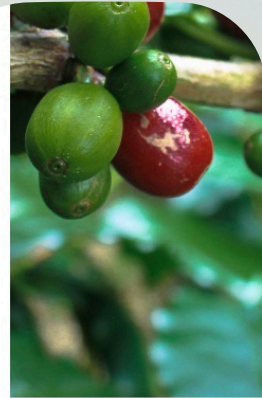
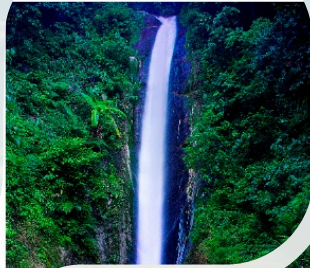




PEMERINTAH KABUPATEN  
MANDAILING NATAL



**RANCANGAN AWAL RPJMD**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**2025-2029**



*Rancangan Awal*  
**RPJMD**

**Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2029**

**BAB 1**  
**Pendahuluan**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai menuju arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan sangat penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah yang bersangkutan. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pentingnya perencanaan dalam pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tanpa perencanaan tujuan pembangunan yang dicita-citakan mustahil dapat tercapai. Perencanaan yang baik dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis di daerah, provinsi, maupun nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Sebagaimana telah diketahui bersama, pada tanggal 21 Maret 2025, Gubernur Sumatera Utara telah melantik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal terpilih atas nama H. Saipullah Nasution, SH, MH dan Atika Azmi Utammi Nasution, B.App.Fin, M.Fin, menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Periode Tahun 2025-2030.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan

berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 1.1.  
Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029



Sumber: Diolah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan RPJMD dimulai dari tahap persiapan dan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Paling lambat 30 hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus melaksanakan konsultasi publik. Selanjutnya dilaksanakan pembahasan Rancangan Awal dengan DPRD hingga tahap penetapan Perda RPJMD.

Dalam proses penyusunan RPJMD juga harus diarahkan pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Dokumen RPJMD diharapkan mampu menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Menindaklanjuti hal tersebut, RPJMD ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya yang dilaksanakan memperhatikan kebutuhan

generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Hal ini mencakup aspek pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup, dan aspek keadilan sosial. Dengan ini diharapkan RPJMD menjadi penentu arah dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat melalui akselerasi pembangunan daerah, untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Dalam proses penyusunannya, RPJMD juga memperhatikan arahan dan sinergi kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan dokumen perencanaan lainnya.

Sejumlah tantangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, teknologi, budaya, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi di daerah juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang tepat dan akurat.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanakerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 8).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045.

### **1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya**

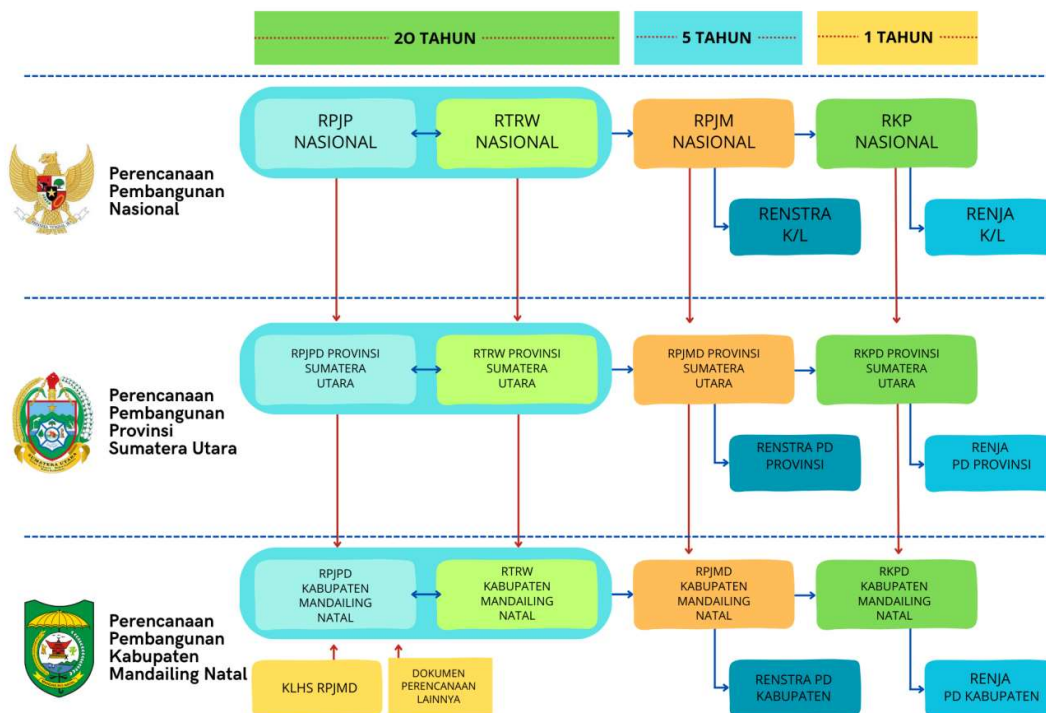
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik pada lingkup Kabupaten Mandailing Natal, provinsi maupun nasional.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama atas penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025-2045. Pada tahap ini, RPJMD tahun 2025-2029 diprioritaskan untuk mewujudkan visi Kabupaten Mandailing Natal melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berkaitan dengan dokumen kewilayahan, penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2036 yang di dalamnya berisi tentang pola pengembangan zonasi kewilayahan. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan potensi wilayahnya serta menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, penyusunan RPJMD juga telah mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi serta kompensasi program dan kegiatan. Sehingga, rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 telah berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 juga memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara. Aspek keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu dengan melakukan penyelarasan terhadap prioritas pembangunan terutama untuk wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, terutama pada Agenda Pembangunan dan Arah Pembangunan Wilayah, sehingga dapat diselaraskan dengan target-target pembangunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, dalam penyusunannya, RPJMD ini juga memperhatikan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan target-target pembangunan daerah. Keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2  
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Data Diolah, 2025

Dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat maka RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu. Dengan terbitnya Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Suatu perencanaan

pembangunan diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

### **1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Mandailing Natal**

RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 adalah implementasi dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045 periode pertama. Dokumen ini merupakan perencanaan awal yang bertujuan untuk memperkuat fondasi Kabupaten Mandailing Natal pada periode 2025-2029. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahap awal ini, berbagai kebijakan yang terdapat dalam dokumen jangka panjang digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029.

### **1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra PD Kabupaten Mandailing Natal**

Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan gradasi dari RPJMD. Sasaran RPJMD, termasuk program prioritas, akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun. Implementasi RPJMD Kabupaten Mandailing Natal diuraikan dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang tentunya harus berjalan secara efektif dan efisien.

Bupati Mandailing Natal terpilih bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD. Secara hierarki, staf/eselon 4 (kepala seksi/kepala subbagian) akan berfokus pada pencapaian *output*, eselon 3 (kepala bidang/kepala bagian) pada *outcome*, eselon 2 (kepala dinas/kepala badan) pada *impact* dan kemudian memberikan benefit pada tingkat kabupaten dalam pencapaian visi dan misi bupati.

### **1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

RPJMD diimplementasikan setiap tahun melalui RKPD. Hal tersebut menjadikan sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dijadikan pedoman dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah, yang merupakan program prioritas Bupati untuk mencapai visi dan misi RPJMD, harus terpetakan dengan baik, menunjukkan kapan setiap program akan dilaksanakan

secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Untuk memastikan sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, setiap tahun diadakan Musrenbang RKPD Kabupaten Mandailing Natal. Musrenbang ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan antara para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah.

#### **1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kabupaten Mandailing Natal**

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Mandailing Natal, mencakup aspek kebijakan dan operasionalisasi serta keselarasan dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelestarian, daya dukung, dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara harmonis dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional.

Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Mandailing Natal dalam RPJMD akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

#### **1.3.5. Hubungan Antara RPJMD dan KLHS RPJMD**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

#### **1.3.6. Hubungan Antara RPJMD dan RPJMN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan,

strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

### 1.3.7. Hubungan Antara RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

RPJMD juga harus memedomani RPJMD Provinsi Sumatera Utara sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Mandailing Natal. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk sinkronisasi kebijakan.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

### 1.4.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal pada periode tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepakatan, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal secara berkesinambungan.

### 1.4.2. Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah, melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

## 1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I            PENDAHULUAN**
- Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mandailing Natal.
- BAB II            GAMBARAN UMUM DAERAH**
- Menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Mandailing Natal sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah.
- BAB III          VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
- Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal kedalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan tentang strategi dan arah kebijakan daerah serta program prioritas daerah.
- BAB IV          PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
- Bab ini menjelaskan program perangkat daerah yang memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dan sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu bab ini juga memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan secara substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.



*Rancangan Awal*  
**RPJMD**

**Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2029**

**BAB 2**

**Gambaran Umum Daerah**



## **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek Geografi membahas mengenai kondisi umum geografi suatu daerah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Sedangkan, Aspek Demografi membahas kependudukan dengan fokus utama jumlah, distribusi, komposisi, komponen utama pertumbuhan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, determinan dan konsekuensi dari perubahan penduduk.

#### **2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah**

##### **A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Mandailing Natal dalam konstelasi regional berada di bagian selatan wilayah Provinsi Sumatera Utara pada lokasi geografis  $0^{\circ}10^{\circ}$ - $1^{\circ}50^{\circ}$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}50^{\circ}$ - $100^{\circ}10^{\circ}$  Bujur Timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Kabupaten ini merupakan bagian paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten dengan ibukota Panyabungan ini memiliki luas wilayah  $\pm 662.069,99$  Ha.

Berdasarkan letak geografis, batas Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat

Batas wilayah administrasi Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2. 1  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mandailing Natal



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Mandailing Natal 2016-2036.

Kabupaten Mandailing Natal memiliki posisi strategis di wilayah pantai barat Sumatera sebagai penghubung antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta pintu gerbang perdagangan regional di pesisir barat. Pantai Barat Sumatera Utara yang menghadap langsung ke Samudera Hindia membuat Kabupaten Mandailing Natal memiliki akses langsung ke Samudera Hindia, hal ini memberi peluang untuk pengembangan pelabuhan dan industri maritim di masa depan.

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 Kecamatan, 377 Desa dan 27 Kelurahan. Secara rinci, luas wilayah dan administrasi Kabupaten Mandailing Natal ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1  
Luas Wilayah dan Administrasi Kabupaten Mandailing Natal

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah Perencanaan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Siabu	Siabu	345,36	26	2
2.	Panyabungan	Panyabungan	259,77	30	9
3.	Kotanopan	Kotanopan	325,15	34	2
4.	Batang Natal	Muarasoma	651,51	30	1

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah Perencanaan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
5.	Muarasipongi	Pasar Muarasipongi	135,70	15	1
6.	Natal	Natal	935,37	28	2
7.	Batahan	Pasar Batahan	497,07	17	1
8.	Muara Batang Gadis	Singkuang	1.435,02	14	-
9.	Bukit Malintang	Malintang Jae	68,74	11	-
10.	Panyabungan Utara	Mompang Jae	63,73	11	1
11.	Panyabungan Timur	Gunung Baringin	397,87	14	1
12.	Panyabungan Selatan	Tano Bato	87,60	10	1
13.	Panyabungan Barat	Longat	87,22	9	1
14.	Lembah Sorik Marapi	Pasar Maga	34,73	8	1
15.	Tambangan	Laru Lombang	158,60	19	1
16.	Ulu Pungkut	Huta Godang	295,19	12	1
17.	Lingga Bayu	Simpang Gambir	192,68	17	2
18.	Ranto Baek	Manisak	152,72	18	-
19.	Sinunukan	Sinunukan III	172,64	14	-
20.	Huta Bargot	Bangun Sejati	116,21	14	-
21.	Pakantan	Pakantan	93,60	8	-
22.	Puncak Sorik Marapi	Sibanggor Tonga	55,54	11	-
23.	Naga Juang	Banua Simanosor	58,69	7	-
	<b>Jumlah</b>		<b>6.620,70</b>	<b>377</b>	<b>27</b>

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setdakab Mandailing Natal

## B. Kondisi Topografi

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan, juga daerah pesisir/daerah pantai di Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis. Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Dataran rendah merupakan daerah pesisir, kemiringan 00-20 seluas 160.500 Ha (24,24%);
2. Daerah/dataran landai, kemiringan 2<sup>0</sup>-15<sup>0</sup> seluas 35.879 Ha (5,49%);
3. Dataran Tinggi, kemiringan 15<sup>0</sup>-40<sup>0</sup>. Dataran tinggi terdiri 2 dari jenis, yaitu:

- a. Daerah perbukitan, kemiringan 15<sup>0</sup>-20<sup>0</sup> seluas 110.513 Ha (16,91%);
- b. Daerah pegunungan, kemiringan 20<sup>0</sup>-40<sup>0</sup> seluas 348.599 Ha (53,34%).

Wilayah dataran rendah berada pada daerah pesisir menyimpan potensi wisata dan sumber daya alam dan berpotensi untuk pengembangan sektor perikanan laut, peternakan dan perkebunan. Pada dataran tinggi sangat baik untuk pengembangan kopi mandailing serta hortikultura. Sedangkan dataran landai secara eksisting lebih banyak digunakan sebagai perkebunan, budidaya perikanan, peternakan, permukiman, dll.

Tabel 2. 2  
Topografi Kabupaten Mandailing Natal

No.	Kecamatan	Topografi
1.	Siabu	Bergelombang s/d Berbukit
2.	Panyabungan	Datar s/d Berbukit
3.	Kotanopan	Berbukit s/d Pegunungan
4.	Batang Natal	Bergelombang s/d Berbukit
5.	Muarasipongi	Berbukit s/d Pegunungan
6.	Natal	Datar s/d Bergelombang
7.	Batahan	Datar s/d Bergelombang
8.	Muara Batang Gadis	Datar s/d Bergelombang
9.	Bukit Malintang	Datar s/d Berbukit
10.	Panyabungan Utara	Datar s/d Berbukit
11.	Panyabungan Timur	Berbukit s/d Pegunungan
12.	Panyabungan Selatan	Berbukit s/d Pegunungan
13.	Panyabungan Barat	Datar s/d Berbukit
14.	Lembah Sorik Marapi	Berbukit s/d Pegunungan
15.	Tambangan	Berbukit s/d Pegunungan
16.	Ulu Pungkut	Berbukit s/d Pegunungan
17.	Lingga Bayu	Bergelombang s/d Berbukit
18.	Ranto Baek	Bergelombang s/d Berbukit
19.	Sinunukan	Datar s/d Bergelombang
20.	Huta Bargot	Datar s/d Berbukit
21.	Pakantan	Berbukit s/d Pegunungan
22.	Puncak Sorik Marapi	Berbukit s/d Pegunungan
23.	Naga Juang	Datar s/d Berbukit

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Kemiringan lebih dari 40% di beberapa kecamatan, seperti Muarasipongi, berpotensi menghambat aksesibilitas dan memerlukan investasi infrastruktur yang signifikan. Solusi mitigasi mencakup pembangunan jalan tahan longsor dan reboisasi pada lahan kritis. Selain itu, posisi Pantai Barat yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia berpotensi terdampak tsunami sehingga dibutuhkan penanganan seperti pemecah ombak, jalur evakuasi, dll.

### **C. Kondisi Klimatologi**

Kabupaten Mandailing Natal yang terletak pada ketinggian antara 0-1.315 meter di atas permukaan laut mengakibatkan suhunya berkisar antara 23°C sampai 32°C dengan kelembapan antara 80-85 %. Rata-rata curah hujan pada tahun 2021 sebanyak 249,15 mm<sup>3</sup>. Curah hujan tertinggi mencapai 722 mm<sup>3</sup> dan yang terendah pada bulan juli yang hanya 35 mm<sup>3</sup>.

Kondisi iklim di atas sangat mendukung Kabupaten Mandailing Natal sebagai wilayah pertanian dan perkebunan. Akan tetapi kenaikan intensitas curah hujan juga menyebabkan peningkatan risiko longsor di daerah perbukitan seperti Kecamatan Muarasipongi, Batang Natal, Panyabungan Selatan dan banjir di sejumlah wilayah hilir sungai seperti Kecamatan Lingga bayu, Natal, Batahan, dan Muara Batang Gadis. Kondisi ini memerlukan sistem pengelolaan DAS yang lebih baik.

### **D. Kondisi Geologi**

Kondisi geologi di Kabupaten Mandailing Natal cukup kompleks, dengan jenis batuan yang berumur mulai dari Permokarbon sampai dengan Resen, terdiri dari berbagai jenis litologi mulai dari batuan beku, batuan metamorf dan batuan sedimen, memungkinkan Kabupaten Mandailing Natal ini memiliki berbagai jenis bahan galian, terutama non-logam, yang beberapa jenis diantaranya cukup prospek untuk dikembangkan, seperti bahan galian granit, lempung, batu gamping, sirtu, tras, batu apung, batu sabak dan kuarsit.

Jenis batuan paling banyak terdapat pada Formasi Paleogen mayoritas terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis. Jenis batuan permokarbon mayoritas terdapat di Kecamatan Natal, Siabu, Panyabungan, sebagian terdapat di Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Muarasipongi. Jenis formasi Andesit Muda mayoritas terdapat di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Kotanopan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis batuan diabas.

Pada daerah jalur patahan aktif, struktur yang dijumpai berupa struktur-struktur patahan aktif yang secara umum berarah sejajar dengan arah memanjangnya Sumatera atau berarah barat laut – tenggara. Lempeng Samudera Hindia yang terus menunjam di bawah Lempeng Benua Asia di barat Sumatera dengan kecepatan rata-rata 6 cm/thn dapat mengakibatkan terjadinya pelepasan energi baik di jalur penunjaman maupun di jalur

patahan aktif dan menimbulkan guncangan atau gempa bumi. Wilayah yang sangat rawan akan melalui Kecamatan Ulu Pungkut, Kotanopan, Panyabungan Barat, Panyabungan Utara dan Bukit Malintang. Jalur tersebut merupakan jalur utama patahan aktif Sumatera. Kecamatan lain yang kena imbas jika terjadi pergeseran pada jalur patahan aktif adalah Kecamatan Muarasipongi, Panyabungan Timur, Panyabungan dan Siabu. Zona patahan Sumatera yang melintasi wilayah kabupaten Mandailing Natal tersebut meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur akibat gempa. Disarankan pembangunan struktur bangunan tahan gempa pada zona rawan.

### **E. Kondisi Hidrologi**

Potensi hidrologi cukup penting untuk menunjang pembangunan, baik untuk kepentingan irigasi, air minum, sanitasi, transportasi, maupun untuk kepentingan lainnya. Sumber air yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal bagi kebutuhan tersebut di atas berasal dari mata air dan sungai.

Di wilayah Mandailing Natal terdapat beberapa DAS yang besar, diantaranya adalah:

- a. DAS Batang Gadis : 313.845,08 Ha (53,32%)
- b. DAS Batang Batahan : 103.540,32 Ha (17,59%)
- c. DAS Batang Natal : 76.091,90 Ha (12,93%)
- d. DAS Batang Tabuyung : 48.152,84 Ha (8,18%)
- e. DAS Batang Bintuas : 32.266,58 Ha (5,48%)
- f. DAS Batang Toru : 14.665,83 Ha (2,49%)

DAS Batang Gadis merupakan DAS terluas yakni 313.845,08 Ha atau sekitar 53,32% dari luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal perlu dioptimalkan untuk irigasi dan pengendalian banjir. Beberapa aktifitas perlu digalakkan seperti rehabilitasi kawasan hulu DAS melalui reboisasi yang juga mendukung keberlanjutan pasokan air. Keenam DAS bermuara ke Pantai Barat (Samudera Hindia). Aliran sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Sungai Batang Gadis mengalir mulai dari Kecamatan Kotanopan melalui Kecamatan Panyabungan hingga ke Kecamatan Siabu dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis;
- b. Sungai Batang Batahan mengalir mulai dari Kecamatan Batang Natal dan bermuara di Kecamatan Batahan;
- c. Sungai Batang Natal mengalir mulai dari Kecamatan Batang Natal dan bermuara di Kecamatan Batahan;
- d. Sungai Batang Tabuyung mengalir dari Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis;

- e. Sungai Batang Bintuas mengalir dan bermuara di Kecamatan Natal;
- f. Sungai Batang Toru mengalir dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis.

Tabel 2. 3  
Kondisi Sungai Utama di Kabupaten Mandailing Natal

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Lebar (m)	Isi Normal (m3)
1.	Batang Gadis	Panyabungan	180	65	25.781,11
2.	Batang Natal	Batang Natal	70,5	42	6.996,00
3.	Batahan	Batahan	102,10	40	13.326,00
4.	Batang Bangko	Batahan	30	90	24.987,00
5.	Batang Sinunukan	Batahan	19,4	40	9.495,00
6.	Kun Kun	Natal	29	29	11.432,00
7.	Bintuas	Muara Batang Gadis	59	60	17.134,00
8.	Batang Tabuyung	Muara Batang Gadis	28,08	70	23.321,00
9.	Parlampungan	Muara Batang Gadis	25	45	5.354,00
10.	Sulang-aling	Muara Batang Gadis	46,80	46,80	7.239,00
11.	Sikapas	Muara Batang Gadis	15	60	15.230,00

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2023

## F. Penggunaan Lahan

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan peta penutupan lahannya terdiri dari belukar rawa 2,74%, hutan lahan kering primer 18,84% hutan lahan kering sekunder 25,93%, hutan *Mangrove* sekunder 0,04%. Luas penutupan lahan di Kabupaten Mandailing Natal diperlihatkan oleh tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4  
Luas Penutupan Lahan di Kabupaten Mandailing Natal

No.	Tipe Lahan	Luas *(Ha)	Persentase (%)
1.	Belukar Rawa	17.880,16	2,74
2.	Hutan Lahan Kering Primer	123.142,89	18,84
3.	Hutan Lahan Kering Sekunder	169.467,34	25,93
4.	Hutan <i>Mangrove</i> Sekunder	289,50	0,04

No.	Tipe Lahan	Luas *(Ha)	Persentase (%)
5.	Hutan Rawa Primer	581,90	0,09
6.	Hutan Rawa Sekunder	11.531,11	1,76
7.	Pemukiman	2.303,84	0,35
8.	Perkebunan	40.490,14	6,20
9.	Pertanian Lahan Kering	75.797,42	11,60
10.	Pertanian Lahan Kering Campur	57.699,95	8,83
11.	Rawa	1.052,11	0,16
12.	Sawah	16.088,20	2,46
13.	Semak/Belukar	103.062,64	15,77
14.	Tanah Terbuka	32.577,80	4,98
15.	Tubuh Air	1.577,45	0,24
	Total	653.542	100

Sumber: RTRW Kabupaten Mandailing Natal 2016-2036

Hutan primer merupakan kawasan yang penting terutama untuk kawasan lindung dan tangkapan air. Hutan primer adalah hutan yang masih alami dan belum pernah ditebang. Hutan primer juga berfungsi sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati flora dan fauna Mandailing Natal, sebagai cadangan karbon, dan juga penyuplai oksigen. Lahan pertanian dan perkebunan juga mendominasi penutupan lahan di Mandailing Natal, hal ini karena kawasan ini merupakan salah satu sentra pertanian dan perkebunan penting di Sumatera.

Alih fungsi lahan yang terjadi beberapa tahun terakhir pada hutan lahan kering sekunder mengurangi daya dukung lingkungan untuk mitigasi banjir. Selain itu, pengalihan fungsian lahan gambut menjadi area perkebunan dan industri masih terus terjadi. Hal ini harus menjadi perhatian dengan melakukan pembatasan alih fungsi lahan dan peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Mandailing Natal.

### 2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Mandailing Natal sangat berlimpah diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain.

#### A. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang menjadi unggulan di Kabupaten Mandailing Natal adalah karet, kelapa sawit, dan kopi. Produksi kelapa sawit cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, produksi kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 298.736 ton dengan luas lahan 18.202 Ha, produksi meningkat pada tahun 2023 menjadi 326.912 ton dengan luas panen 63.842. Produksi dan luas panen komoditi Perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**

**Produksi dan Luas Panen Komoditi Perkebunan Tahun 2020-2023**

Komoditi		2020	2021	2022	2023
Karet	Luas Panen (Ha)	64.463	64.571	64.581	63.842
	Produksi (Ton)	50.848	52.826	52.826	52.826
Kelapa Sawit	Luas Panen (Ha)	18.202	19.086	19.564	19.371
	Produksi (Ton)	298.736	293.603	199.371	326.912
Kopi	Luas Panen (Ha)	3.133	3.572	4.736	3.692
	Produksi (Ton)	2.390	2.565	2963	2.894
Kelapa	Luas Panen (Ha)	2.743	2.950	2.950	3.029
	Produksi (Ton)	1.516	1.549	1.549	1.713
Coklat	Luas Panen (Ha)	3.524	3.887	3.892	3.917
	Produksi (Ton)	2.686	2.825	2.825	3.575

Sumber: Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2024

## **B. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang masih menjadi penopang perekonomian di Mandailing Natal. Hal ini terbukti dengan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih merupakan yang terbesar dibanding sektor lainnya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi sektor ini meningkat dari 46,72 persen pada tahun 2022 menjadi 48,86% pada tahun 2024. Pada subsektor tanaman pangan, padi memiliki peran paling penting sebagai makanan pokok masyarakat Mandailing Natal. Luas panen padi di Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2021. Pada tahun 2020 adalah 18.199 ha, menurun 8,7 persen dibanding tahun 2019. Dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 19.834 ha. Produksi padi yang dihasilkan pada tahun 2023 sebesar 10.258 ton dan produksi beras sebanyak 44.904 ton. Hal ini menunjukkan bahwa 1 ton padi di Kabupaten Mandailing Natal menghasilkan 438 kg beras. Tanaman pangan lainnya yang dihasilkan di Kabupaten Mandailing Natal tidak kalah pentingnya dengan padi. Tanaman pangan dengan luas panen terbanyak pada tahun 2023 adalah luas panen jagung yaitu 2.147 Ha, disusul oleh tanaman kacang kedelai dengan luas panen kacang kedelai sebesar 1.521 Ha. Sementara itu, tanaman pangan dengan luas panen paling sedikit adalah ubi kayu dan ubi jalar yaitu 46 Ha.

## **C. Perikanan**

Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki garis pantai lebih  $\pm$  170 Km memiliki potensi perikanan yang cukup baik namun belum dikelola secara optimal. Selain perikanan yang berasal dari laut, terdapat juga potensi perikanan dengan budidaya air tawar (kolam) dan ikan darat (sungai/rawa) yang tersebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Produksi ikan laut di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 mencapai 22.152,20 ton dan ikan hasil budidaya air tawar sebanyak 2.066,40 ton.

Wilayah pesisir Kabupaten Mandailing Natal yang begitu luas sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan, diantaranya budidaya tambak, usaha sivofishery, budidaya kayu bakau, lokasi galangan kapal, industri perikanan, industri penunjang perikanan, pelabuhan perikanan, dan lokasi tempat pelelangan ikan. Wilayah yang terdapat di bagian barat wilayah Kabupaten Mandailing Natal seluas 158.419 Ha atau 24,24% dari total wilayah Kabupaten Mandailing Natal ini berada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batahan (3 desa pesisir), Natal (11 desa pesisir), dan Muara Batang Gadis (5 desa pantai).

Pulau-pulau kecil sebanyak 15 (lima belas) pulau yang terletak di depan daratan Pulau Sumatera membuat perairan di sekitarnya tenang. Kondisi ini semakin mendukung pemanfaatan potensi laut untuk melakukan kegiatan usaha budidaya laut seperti kerapu, kakap, dan rumput laut.

### C. Pertambangan

Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi pertambangan yang besar yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Salah satu bahan galian yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal adalah marmer. Lokasi tambang tersebut terdapat di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. Berdasarkan perhitungan cadangan yang dilakukan dalam beberapa tahap dan pada setiap tahap dilakukan koreksi reduksi, maka secara kasar di daerah ini terdapat cadangan prospek bahan tambang marmer.

Tabel 2.6  
Ketersediaan Bahan Galian di Kabupaten Mandailing Natal

NO.	BAHAN GALIAN	LOKASI	TAHAP
1	Batubara	Siabu (Desa Lumban Dolok) Lingga Bayu (Desa Simpang Durian) Muara Batang Gadis (Desa Lubuk Kapundung)	Penyelidikan umum Penyelidikan umum Penyelidikan umum
2	Emas	Siabu (Desa Siayo) Kotanopan (Desa Botung) Naga Juang, Huta Bargot, Ulu Pungkut, Pakantan Muarasipongi (Desa Tambang Ubi, Tambang Hitam, Bandar Panjang, Batang Gadis, Simpang Mandepo, Tambang Subun dan Subun-subun) Batang Natal	Eksplorasi detail Diolah masy. tradisional Eksplorasi Eksplorasi Diolah masy. tradisional
		Lingga Bayu (Desa Lobung, Simpang Bajole, Bandar Limabung, Simpang Durian, Simpang Sordang, Kampung Baru) Batang Natal (Desa Rantobi, Parlampungan) Batahan (Desa Sinunukan) Natal (Desa Sikara-kara)	Diolah masy. tradisional Diolah masy. tradisional Diolah masy. tradisional
3	Timah Hitam	Siabu (Desa Lumban Dolok) Muarasipongi (Desa Sibinail) Batahan (Desa Banjar Aur)	Penyelidikan umum Penyelidikan umum

NO.	BAHAN GALIAN	LOKASI	TAHAP
4	Perak	Kotanopan (Desa Pagar Gunung) Batang Natal (sepanjang Sungai Batang Natal) Lingga Bayu (sepanjang Sungai Batang Natal)	Penyelidikan umum
5	Seng	Batang Natal (sepanjang Sungai Batang Natal) Linnga Bayu (sepanjang Sungai Batang Natal)	
6	Mangan	Batang Natal (Desa Sipogu)	
7	Besi	Lingga Bayu (Desa Simpang Gambir, Kampung Baru, Desa Lobung) Muarasipongi (Desa Ranjo Batu)	
8	Belerang	P. Sorik Marapi (Desa Sibanggor Tonga, Sibanggor)	Penyelidikan umum
9	Kaolin	P. Sorik Marapi (Desa Sibanggor)	
10	Tembaga	Kotanopan (Desa Pagar Gunung, Botung)	
11	Serpentin	Batang Natal (Desa Bangkelang, Aek Nangali, Sipogu, Banjar Melayu, Muarasoma)	Eksplorasi
12	Gambut	Batahan dan Sinunukan	Belum menjadi batubara
13	Batu Gamping	Panyabungan (Desa Sipapaga, Aek Banir)	Diolah masy. tradisional

Sumber: RTRW Kabupaten Mandailing Natal, 2016-2036

#### D. Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal adalah berupa wisata alam (ekowisata). Objek wisata di Kabupaten Mandailing Natal memiliki ciri khas, keindahan, dan keunikan yang berbeda dengan objek wisata di daerah lain. Selain mempunyai beberapa daerah aliran sungai untuk objek wisata, daerah Kabupaten Mandailing Natal ini sangat indah dilalui oleh Bukit Barisan serta pantai daerah pesisir. Di samping itu, di Kabupaten Mandailing Natal ditemukan lokasi air panas yang merupakan daerah objek wisata seperti Sabajor/Sampuraga, Sibanggor Julu, dan di beberapa desa di Kecamatan Panyabungan. Daerah ini juga mempunyai beberapa jenis binatang yang harus dilindungi seperti rusa, siamang, beberapa jenis burung, binatang menyusui, binatang reptil, binatang ampibi serta jenis spesies tumbuh-tumbuhan. Prinsip ekowisata juga akan diterapkan untuk mengelola hutan yang mendominasi Mandailing Natal.

Objek wisata lain yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Mandailing Natal, antara lain:

- a. wisata alam Pulau Unggeh, yang terletak di Pantai Barat Mandailing Natal;
- b. wisata alam Pantai Barat mulai dari Natal sampai ke Muara Batang Gadis;
- c. wisata alam panorama Sopotinjak, yang merupakan wisata gunung di Kecamatan Batang Natal;
- d. wisata alam aek batu bontar Kecamatan Panyabungan Timur
- e. wisata alam pagaran gala-gala di Kecamatan Panyabungan Selatan
- f. wisata alam air panas Sibanggor, terletak di Desa Sibanggor Jae, Desa Sibanggor Tonga, Desa Sibanggor Julu, di lereng Gunung Sorik Marapi, dan air panas Siabu;
- g. wisata alam Danau Siombun di Kecamatan Panyabungan, Aek Pohon di Kecamatan Panyabungan Timur dan Danau Marambe di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat;
- h. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi wisata sejarah di Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
- i. Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Batang Natal dan disepanjang aliran-aliran sungai yang potensial pariwisata seperti sungai Batang Gadis, sungai Batang Natal dan Aek Pohon,
- j. Agro wisata di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Siabu dan Kecamatan Panyabungan Timur.

Pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan pariwisata di wilayah pesisir harus mempertimbangkan potensi abrasi yang tinggi di Kecamatan Natal, Batahan dan Muara Batang Gadis. Sebagai upaya mitigasi, penanaman *mangrove* dan pengaturan zona pariwisata mendesak untuk dilakukan.

#### **D. Industri**

Selain potensi pertanian dan perkebunan, Mandailing Natal juga memiliki potensi industri, namun masih didominasi industri kecil (termasuk industri rumah tangga) dan menengah, seperti industri makanan dan kerajinan (anyaman), bengkel, kayu, kerupuk, dan lain-lain. Perkembangan industri tersebut memberi nilai tambah pada komoditas pertanian yang belum mampu berkontribusi pada skala ekonomi yang lebih besar. Prospek investasi industri di Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Pabrik *Crumb Rubber*, karena bahan baku karet cukup tersedia dari produksi kebun karet rakyat mencapai 28.000 ton/tahun.
- b. Pabrik pengolahan kelapa sawit yang tidak hanya menghasilkan CPO namun juga menghasilkan produk turunan lainnya.
- c. Pembangunan pabrik pengolahan rotan, Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang masih memiliki rotan, dimana produksi rotan ini dipasarkan keluar daerah dalam bentuk bahan mentah.
- d. Industri kecil dan menengah lainnya, antara lain:
  1. Kerajinan tikar rotan di Desa Saba Jambu di Panyabungan
  2. Industri kecil dan menengah lainnya, antara lain:
    - a) Industri minuman sirup/*juice* di Natal
    - b) Kerajinan tikar rotan di Desa Saba Jambu di Panyabungan
    - c) Industri makanan kipang di Panyabungan
    - d) Industri pengolahan bubuk kopi mandailing di Muarasipongi dan Ulu Pungkut
    - e) Kerajinan anyam-anyaman pandan di Malintang Kecamatan Siabu
    - f) Industri tenun kain budaya Mandailing Natal
    - g) Industri rumah tangga pembuatan dodol, keripik pisang dan kemplang

### 2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya dukung lingkungan hidup bersifat aktif dimana alam/ ekosistem menyediakan sumber daya dan memberi manfaat positif kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya tampung lingkungan hidup bersifat pasif dimana alam/ ekosistem menerima dan terkena dampak negatif dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan pembangunan.

Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa lingkungan dapat dikelompokkan atas empat jenis yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*).

## A. Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Daya dukung pangan merupakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. Kondisi daya dukung pangan dibedakan menjadi sudah terlampaui dan belum terlampaui, yang ditentukan berdasarkan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan yang dikonversikan kedalam bentuk energi dengan satuan kalori. Ketersediaan pangan di Kabupaten Mandailing Natal dihitung berdasarkan produksi komoditas pangan sebagai berikut:

- Komoditas perkebunan, antara lain: kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao.
- Komoditas peternakan, antara lain: sapi, kerbau, kambing, dan domba.
- Komoditas hortikultura, antara lain: buah-buahan, tanaman biofarmaka, serta tanaman sayuran.

Produksi pangan yang dihasilkan oleh masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal umumnya sedang, dimana terdapat beberapa kecamatan dengan hasil pangan paling tinggi mencapai 13% yaitu Kecamatan Natal dan Batahan. Sedangkan Kecamatan penghasil pangan paling sedikit yaitu Kecamatan Bukit Malintang yaitu 1 % dari hasil pangan se Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil perhitungan ketersediaan pangan digunakan untuk melakukan pemodelan distribusi ketersediaan pangan, sedangkan pemodelan kebutuhan pangan (dalam satuan energi) dilakukan dengan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) per orang (2.100 kkal/hari). Kebutuhan energi bahan pangan dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk, sehingga model kebutuhan energi bahan pangan ini cenderung memiliki pola yang sama dengan pola distribusi populasi. Kebutuhan pangan terbesar terkonsentrasi pada wilayah wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu Kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Siabu. Setelah diketahui ketersediaan dan kebutuhan energi pangan, dihitung selisih keduanya untuk mengindikasikan wilayah yang daya dukung pangannya belum terlampaui atau sudah terlampaui. Peta status daya dukung pangan diperoleh dengan membandingkan distribusi ketersediaan dan kebutuhan pangan. Distribusi ketersediaan pangan (dalam satuan energi) diperoleh dari data produksi pangan per kabupaten yang terdiri dari hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Produksi pangan tersebut kemudian disebarkan secara kuantitatif menggunakan proporsi indeks jasa lingkungan penyedia pangan.

Secara umum, hampir seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki daya dukung yang belum terlampaui dalam hal penyediaan pangan. Kecamatan Natal memiliki persentase luas wilayah dengan daya dukung pangan terlampaui paling tinggi, disusul oleh Kecamatan Muara Batang Gadis.

Tabel 2.7  
Kondisi daya Dukung Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022

No.	Kecamatan	2022		
		Kebutuhan Pangan (Juta Kalori)	Ketersediaan Pangan (Juta Kalori)	Status Daya Dukung Pangan
1	Batahan	17.956.796	111.980.820	Sudah Terlampaui
2	Sinunukan	17.462.403	2.390.603	Belum Terlampaui
3	Batang Natal	19.687.553	16.800.412	Belum Terlampaui
4	Lingga Bayu	21.808.458	37.614.490	Sudah Terlampaui
5	Ranto Baek	11.179.403	6.570.098	Belum Terlampaui
6	Kotanopan	21.480.396	10.343.608	Belum Terlampaui
7	Ulu Pungkut	3.618.647	9.037.760	Sudah Terlampaui
8	Tambangan	8.475.957	4.163.501	Belum Terlampaui
10	Puncak Sorik Marapi	6.982.815	4.634.539	Belum Terlampaui
11	Muara Sipongi	9.867.155	2.720.505	Belum Terlampaui
13	Panyabungan	70.463.579	3.598.183	Belum Terlampaui
14	Panyabungan Selatan	7.987.697	3.878.107	Belum Terlampaui
15	Panyabungan Barat	8.403.906	4.391.535	Belum Terlampaui
16	Panyabungan Utara	17.564.348	12.884.974	Belum Terlampaui
17	Panyabungan Timur	11.108.118	4.625.476	Belum Terlampaui
18	Huta Bargot	6.946.023	1.487.244	Belum Terlampaui
19	Natal	26.865.825	389.223.240	Sudah Terlampaui
20	Muara Batang Gadis	18.225.071	318.459.433	Sudah Terlampaui
21	Siabu	41.432.391	50.913.259	Sudah Terlampaui
22	Bukit Malintang	10.009.724	6.926.739	Belum Terlampaui
23	Naga Juang	3.889.988	1.158.054	Belum Terlampaui
	<b>Mandailing Natal</b>	371.655.921	1.631.788.235	Sudah Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Untuk memperkirakan perubahan produksi bahan pangan di Kabupaten Mandailing Natal hingga akhir tahun perencanaan, dilakukan perhitungan dengan mengasumsikan bahwa perubahan produksi bahan pangan berbanding lurus dengan perubahan penggunaan/peruntukan lahan yang tercermin dari jenis penutupan lahan. Perubahan produksi bahan pangan dari hortikultura, seperti tanaman pangan selain padi, tanaman sayuran, buah-buahan, serta biofarmaka diasumsikan berbanding lurus dengan perubahan luas pertanian lahan kering. Perubahan produksi bahan pangan dari perkebunan diasumsikan berbanding lurus dengan perubahan luas lahan perkebunan, sedangkan perubahan produksi bahan pangan dari peternakan, terutama ternak besar, diasumsikan berbanding lurus dengan perubahan luas lahan perkebunan.

Tabel 2.8  
Proyeksi Ketersediaan Pangan Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Proyeksi Ketersediaan Pangan Tahun 2025-2045 (Juta Kalori)					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	Batahan	113.895.692	117.697.749 1	119.839.023	121.888.271	123.972.560	126.092.491
2	Sinunukan	2.431.483	2.405.370	2.680.017	2.602.111	2.646.607	2.691.864
3	Batang Natal	17.087.699	16.143.994	7.608.018	18.286.820	18.599.525	18.917.577
4	Lingga Bayu	38.257.698	39.303.840	39.170.363	40.942.414	41.642.529	42.354.617
5	Ranto Baik	6.682.447	6.649.021	6.017.771	7.151.385	7.273.673	7.398.053
6	Kotanopan	10.520.483	9.571.730	2.331.067	11.258.754	11.451.278	11.647.095
7	Ulu Pungkut	9.192.306	8.419.224	2.566.635	9.837.372	10.005.591	10.176.686
8	Tambangan	4.234.697	3.862.509	1.567.034	4.531.865	4.609.360	4.688.180
9	Lembah Sorik Marapi	4.030.783	3.647.194	1.320.281	4.313.641	4.387.404	4.462.429
10	Puncak Sorik Marapi	4.713.790	4.330.801	1.869.647	5.044.578	5.130.840	5.218.577
11	Muara Sipongi	2.767.026	2.549.666	1.537.620	2.961.200	3.011.837	3.063.339
12	Pakantan	2.302.350	2.158.432	1.708.376	2.463.917	2.506.050	2.548.903
13	Panyabungan	3.659.712	3.416.796	2.061.428	3.916.531	3.983.504	4.051.622
14	Panyabungan Selatan	3.944.423	3.785.567	2.908.388	4.221.221	4.293.404	4.366.821
15	Panyabungan Barat	4.466.630	4.206.560	2.578.761	4.780.073	4.861.813	4.944.950
16	Panyabungan Utara	13.105.307	13.287.849	12.734.712	14.024.966	14.264.793	14.508.721
17	Panyabungan Timur	4.704.572	4.545.464	3.513.022	5.034.713	5.120.807	5.208.373
18	Huta Bargot	1.512.676	1.378.423	1.149.592	1.618.828	1.646.510	1.674.665
19	Natal	395.878.957	408.890.543	412.726.655	423.659.584	430.904.162	438.272.624

No	Kecamatan	Proyeksi Ketersediaan Pangan Tahun 2025-2045 (Juta Kalori)					
		2023	2025	2026	2027	2028	2029
20	Muara Batang Gadis	323.905.089	334.948.303	340.788.205	346.634.982	352.562.440	358.591.258
21	Siabu	51.783.875	53.019.973	51.362.963	55.417.785	56.365.429	57.329.278
22	Bukit Malintang	7.045.187	7.189.922	7.620.820	7.539.579	7.668.506	7.799.638
23	Naga Juang	1.177.856	1.099.071	1.291.426	1.260.512	1.282.067	1.303.990
	<b>Mandailing Natal</b>	1.659.691.814	1.706.711.773	1.671.826.036	1.776.159.934	1.806.532.269	1.837.423.971

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan di Mandailing Natal juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan angka kecukupan kalori sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, maka kebutuhan energi masyarakat Mandailing Natal pada tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan hingga tahun 2029 ditunjukkan pada Tabel 2.9. sedangkan perkiraan daya dukung pangan Mandailing Natal hingga tahun 2029 ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.9  
Kebutuhan Pangan dan Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2022-2045 (Juta Kalori)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Batahan	17.974.323	17.980.170	17.986.018	17.991.868	17.997.721
2	Sinunukan	17.483.981	17.491.180	17.498.381	17.505.586	17.512.794
3	Batang Natal	19.698.868	19.702.642	19.706.416	19.710.190	19.713.966
4	Lingga Bayu	21.826.836	21.832.966	21.839.097	21.845.230	21.851.364
5	Ranto Baik	11.189.431	11.192.776	11.196.122	11.199.469	11.202.817
6	Kotanopan	21.489.986	21.493.184	21.496.382	21.499.581	21.502.780
7	Ulu Pungkut	3.620.509	3.621.131	3.621.752	3.622.373	3.622.995
8	Tambangan	8.480.741	8.482.336	8.483.932	8.485.527	8.487.124
9	Lembah Sorik Marapi	8.525.244	8.526.854	8.528.465	8.530.076	8.531.688
10	Puncak Sorik Marapi	6.986.932	6.988.305	6.989.678	6.991.051	6.992.425
11	Muara Sipongi	9.874.860	9.877.430	9.880.000	9.882.571	9.885.143
12	Pakantan	1.720.133	1.720.425	1.720.716	1.721.008	1.721.299
13	Panyabungan	70.511.511	70.527.496	70.543.484	70.559.476	70.575.472
14	Panyabungan Selatan	7.991.744	7.993.094	7.994.444	7.995.794	7.997.145
15	Panyabungan Barat	8.410.369	8.412.525	8.414.681	8.416.837	8.418.995
16	Panyabungan Utara	17.574.743	17.578.210	17.581.677	17.585.145	17.588.614
17	Panyabungan Timur	11.115.455	11.117.902	11.120.349	11.122.797	11.125.245
18	Huta Bargout	6.952.303	6.954.397	6.956.492	6.958.588	6.960.684

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2022-2045 (Juta Kalori)				
		2025	2026	2027	2028	2029
19	Natal	26.889.379	26.897.235	26.905.093	26.912.953	26.920.816
20	Muara Batang Gadis	18.249.479	18.257.623	18.265.770	18.273.920	18.282.075
21	Siabu	41.456.494	41.464.532	41.472.571	41.480.612	41.488.654
22	Bukit Malintang	10.016.762	10.019.109	10.021.456	10.023.805	10.026.153
23	Naga Juang	3.894.174	3.895.571	3.896.968	3.898.365	3.899.763
	<b>Mandailing Natal</b>	<b>371.934.259</b>	<b>372.027.089</b>	<b>372.119.944</b>	<b>372.212.825</b>	<b>372.305.731</b>

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Berdasarkan tabel 2.8 dan 2.9 di atas, dapat disimpulkan status daya dukung pangan tahun 2025-2045 per kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Status Daya Dukung Pangan Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan 2025-2045					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Batahan	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui
2	Sinunukan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
3	Batang Natal	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
4	Lingga Bayu	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui
5	Ranto Baek	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
6	Kotanopan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
7	Ulu Pungkut	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui
8	Tambangan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
9	Lembah Sorik Marapi	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
10	Puncak Sorik Marapi	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
11	Muara Sipongi	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
12	Pakantan	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui
13	Panyabungan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
14	Panyabungan Selatan	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
15	Panyabungan Barat	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
16	Panyabungan Utara	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
17	Panyabungan Timur	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
18	Huta Bargot	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
19	Natal	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui
20	Muara Batang Gadis	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan 2025-2045					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
21	Siabu	Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui	Sudah Melampaui
22	Bukit Malintang	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
23	Naga Juang	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui
<b>Mandailing Natal</b>		Sudah Terlampaui	Sudah Terlampaui	Belum Melampaui	Sudah Terlampaui	Belum Melampaui	Belum Melampaui

Sumber: KLHS RPMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Mengingat ketersediaan pangan di Mandailing Natal didukung oleh keanekaragaman hayati yang tinggi, maka kelestarian keanekaragaman hayati ini menjadi sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan kedepan. Selain hal tersebut, dampak perubahan iklim akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan, suhu yang semakin meningkat dan curah hujan yang semakin menurun berpotensi ketersediaan pangan, oleh sebab itu dibutuhkan upaya penguatan ketahanan pangan di Mandailing Natal.

## B. Daya Dukung Air

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, selain pangan. Air dimanfaatkan baik secara langsung untuk konsumsi, kegiatan domestik (mandi, mencuci, dsb), maupun dalam kegiatan penggunaan lahan untuk menghasilkan produk, termasuk pangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.146/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, kondisi daya dukung air dinyatakan dalam surplus dan defisit, yang ditentukan berdasarkan selisih kebutuhan dan ketersediaan dalam bentuk debit air dengan satuan m<sup>3</sup> /tahun.

Ketersediaan air di Kabupaten Mandailing Natal dimodelkan menggunakan peta wilayah aliran sungai. Perhitungan ketersediaan air akan dilakukan metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional, sehingga di dapatkan Total ketersediaan air di Kabupaten Mandailing Natal mencapai **958.017.381,274 m<sup>3</sup>/tahun**, yang terdistribusi pada wilayah Kecamatan. Jumlah kebutuhan air per Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, dimana jumlah kebutuhan air yang paling tinggi berada di Kecamatan Panyabungan 147.086.400 m<sup>3</sup> /tahun.

Tabel 2.11  
Total Kebutuhan Air Kabupaten Mandailing Natal

No.	Nama Kecamatan	Populasi (Jiwa)	Kebutuhan Air Hidup Layak	Total Kebutuhan Air (M3/Tahun)
1	Batahan	23.427	1.600	37.483.200
2	Batang Natal	22.782	1.600	36.451.200
3	Bukit Malintang	25.685	1.600	41.096.000
4	Huta Bargot	28.452	1.600	45.523.200
5	Kotanopan	14.585	1.600	23.336.000
6	Lembah Sorik Marapi	28.024	1.600	44.838.400
7	Lingga Bayu	4.721	1.600	7.553.600
8	Muara Batang Gadis	11.058	1.600	17.692.800
9	Muarasipongi	11.116	1.600	17.785.600
10	Naga Juang	9.110	1.600	14.576.000
11	Natal	12.873	1.600	20.596.800
12	Pakantan	2.243	1.600	3.588.800
13	Panyabungan	91.929	1.600	147.086.400
15	Panyabungan Selatan	10.964	1.600	17.542.400
16	Panyabungan Timur	22.915	1.600	36.664.000
17	Panyabungan Utara	14.492	1.600	23.187.200
18	Puncak Sorik Marapi	9.062	1.600	14.499.200
19	Ranto Baik	35.050	1.600	56.080.000
20	Siabu	23.777	1.600	38.043.200
21	Sinunukan	54.054	1.600	86.486.400
22	Tambangan	13.059	1.600	20.894.400
23	Ulu Pungkut	5.075	1.600	8.120.000
<b>Total</b>		<b>484.874</b>		<b>775.798.400</b>

Sumber : Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2023

Secara keseluruhan ketersediaan air di Kabupaten Mandailing Natal mencapai 958017381,27 m<sup>3</sup>/tahun sedangkan kebutuhan mencapai 775.798.400 m<sup>3</sup> /tahun dengan terdapat selisih surplus sebesar **182.218.981,27** m<sup>3</sup> /tahun. Sehingga diketahui daya dukung air di Kabupaten Mandailing Natal dinyatakan **surplus**.

Tabel 2.12  
Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten/Kota	Total Kebutuhan Air m3/tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Mandailing Natal	776.783.569,1335	778.715.650,8467	780.792.672,9856	783.022.288,3910	785.271.917,8609

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

### C. Kinerja Layanan Atau Jasa Ekosistem

#### 1. Jasa Penyedia Pangan

Berdasarkan hasil identifikasi dan perhitungan, diketahui bahwa distribusi dan luas jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh jasa ekosistem kelas sangat rendah 397.967,05 ha (62%) dan kelas sangat tinggi 32.311,73 Ha (5%). Kelas jasa ekosistem sangat tinggi terluas sebesar 4.558,39 Ha (14%) berada di wilayah Kecamatan Siabu, sedangkan kelas jasa ekosistem sangat rendah terluas berada di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis sebesar 100.946,66Ha (25%).

Adapun distribusi dan luas jasa ekosistem penyedia pangan (P1) di Kabupaten Mandailing Natal disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.13  
Luas Jasa Penyedia Pangan

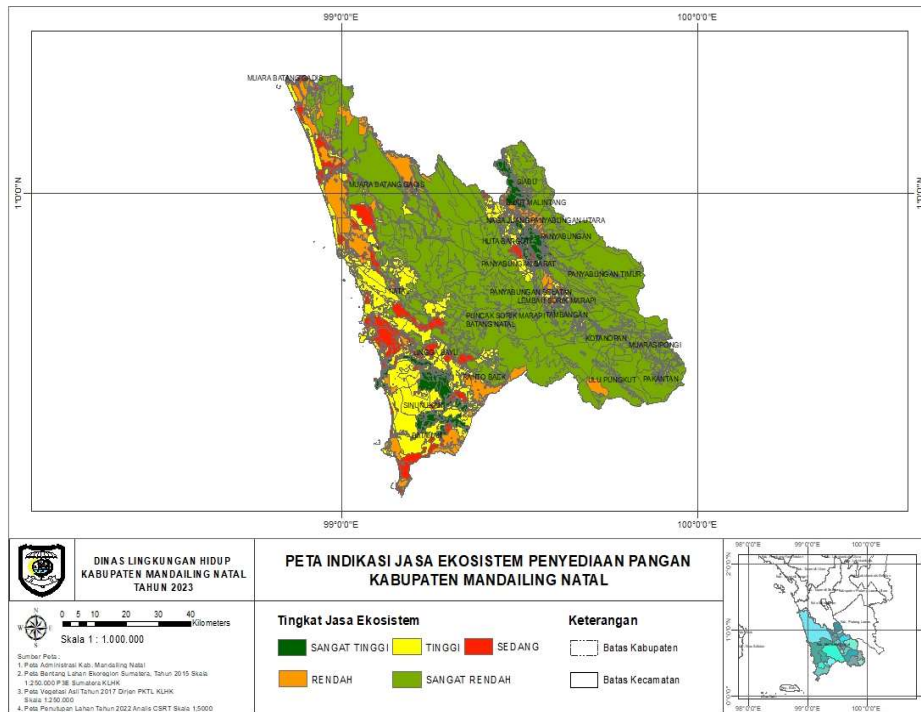
No.	Nama Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Batahan	340,64	6532,77	6152,26	17418,50	3893,13	34337,30
2	Batang Natal	71683,03	1158,14	1244,39	3946,50	367,68	78399,74
3	Bukit Malintang	3635,13	1361,49	150,64	63,29	493,27	5703,82
4	Huta Bargot	7112,32	233,29	547,24	1377,68	795,24	10065,77
5	Kotanopan	27390,33	14,96	76,95	535,18	1118,91	29136,34
6	Lembah Sorik Marapi	53,17	1093,65	135,62	1184,78	644,23	3111,46
7	Lingga Bayu	4776,50	190,95	4967,56	8378,45	3687,60	22001,05
8	Muara Batang Gadis	100946,67	33556,07	15779,11	14249,32	431,55	164962,72
9	Muarasipongi	12536,26	2,78	309,77	222,62	86,07	13157,51
10	Naga Juang	2000,38	82,61	234,97	2033,33	309,93	4661,22
11	Natal	31354,33	3005,47	12891,34	28877,46	2659,93	78788,53
12	Pakantan	10332,73			170,04	269,46	10772,23
13	Panyabungan	17152,30	2791,15	101,20	740,15	3027,06	23811,86
14	Panyabungan Barat	3381,55	285,61	849,44	2028,06	1159,84	7704,49
15	Panyabungan Selatan	5125,06	392,80	18,26	817,11	86,91	6440,15

No.	Nama Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
16	Panyabungan Timur	34695,71	6,54	1,22	40,38	97,45	34841,30
17	Panyabungan Utara	2201,83	1707,60	120,88	793,60	937,82	5761,73
18	Puncak Sorik Marapi	3962,28	217,91	36,34	297,17	403,71	4917,41
19	Ranto Baek	6513,96	5064,99	1692,88	4580,36	1836,08	19688,26
20	Siabu	16063,45	2210,63	882,75	2669,97	4558,40	26385,19
21	Sinunukan		2,87	734,35	8882,67	4491,96	14111,85
22	Tambangan	12603,95	12,97	220,91	742,83	688,64	14269,30
23	Ulu Pungkut	24105,48	1950,97	16,53	5,32	266,85	26345,15
<b>Grand Total</b>		<b>397967,06</b>	<b>61876,22</b>	<b>47164,61</b>	<b>100054,77</b>	<b>32311,74</b>	<b>639374,40</b>

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Ketersediaan jasa ekosistem penyedia pangan yang memiliki distribusi luas dan besar (kelas tinggi dan sangat tinggi) akan memberikan gambaran kemampuan lingkungan mendukung dan memberikan kontribusi dalam ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Luas ketersediaan jasa ekosistem penyedia pangan kelas tinggi dan sangat tinggi di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 13.266,51 Ha (21%) dan luas ketersediaan kelas sedang yang berpotensi dapat dikembangkan pemanfaatannya sebesar 47.164,60 Ha atau 7% dari total luas wilayah kota.

Gambar 2.2  
Peta Indikasi Jasa Penyedia Pangan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

## 2. Jasa Penyedia Air Bersih

Sama halnya dengan jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air bersih dikategorikan ke dalam lima kelas. Distribusi dan luas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh jasa ekosistem kelas sedang 464.220,31 ha (73%) dan kelas tinggi 125.291,89 Ha (20%). Kelas jasa ekosistem sangat tinggi terluas sebesar 2.209,46 Ha (38%) berada di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis.

Adapun distribusi dan luas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Mandailing Natal disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.14  
Luas Jasa Penyedia Air Bersih

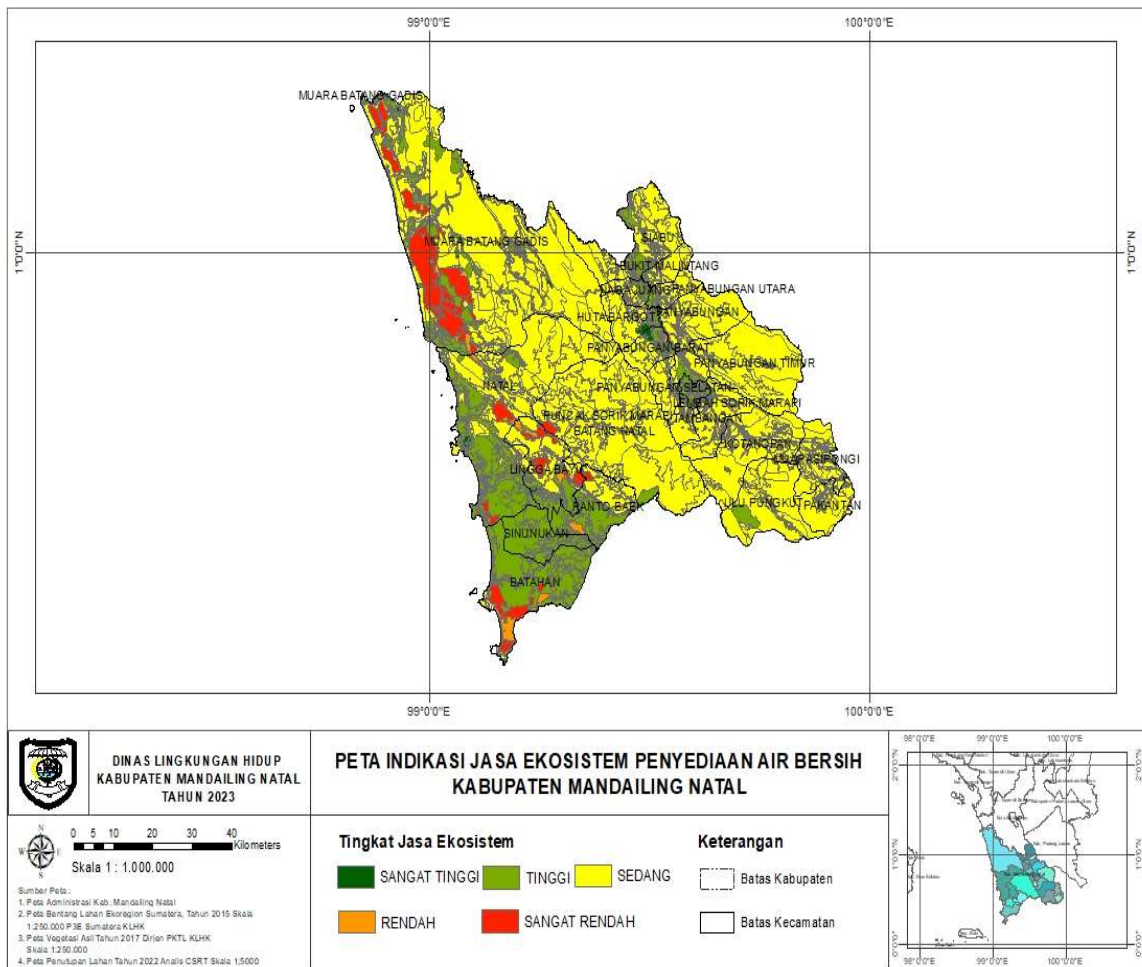
NO	Nama Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Batahan	3959,80	2878,60	883,30	26240,08	375,51	34337,30
2	Batang Natal	819,22		76255,75	1158,14	166,63	78399,74
3	Bukit Malintang	70,03	12,85	5069,51	534,48	16,94	5703,82
4	Huta Bargot	17,12	73,63	8258,85	1194,13	522,04	10065,77
5	Kotanopan	138,49		28920,20	1,24	76,41	29136,34
6	Lembah Sorik Marapi		76,23	166,50	2857,16	11,57	3111,46
7	Lingga Bayu	3334,26	1077,50	10793,67	6332,58	463,05	22001,05
8	Muara Batang Gadis	21776,55	2695,77	119419,55	18861,38	2209,46	164962,72
9	Muarasipongi	102,84		13051,88		2,78	13157,51
10	Naga Juang	0,57	146,71	3474,19	933,97	105,78	4661,22
11	Natal	2386,49	991,75	45419,34	29275,96	714,99	78788,53
12	Pakantan	18,97		10753,26			10772,23
13	Panyabungan	515,99	149,45	20795,66	2252,05	98,71	23811,86
14	Panyabungan Barat		298,26	4795,19	1984,98	626,07	7704,49
15	Panyabungan Selatan	37,17	21,79	5743,72	636,57	0,89	6440,15
16	Panyabungan Timur	41,40	13,11	34786,49	0,01	0,30	34841,30
17	Panyabungan Utara	150,70	64,23	4394,64	1103,95	48,21	5761,73
18	Puncak Sorik Marapi	49,94	7,77	4471,37	357,76	30,57	4917,41
19	Ranto Baek	523,15	750,86	7608,90	10628,53	176,82	19688,26
20	Siabu	274,81	225,09	21454,84	4320,29	110,16	26385,19
21	Sinunukan		79,70	2,25	13969,72	60,18	14111,85
22	Tambangan	174,10	3,93	13348,60	697,95	44,73	14269,30
23	Ulu Pungkut	41,55		24352,63	1950,97		26345,15

NO	Nama Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
	<b>Grand Total</b>	<b>34433,15</b>	<b>9567,23</b>	<b>464220,31</b>	<b>125291,90</b>	<b>5861,81</b>	<b>639374,40</b>

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Kelas dengan jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi menunjukkan kemampuan wilayah tersebut untuk menyediakan air bersih untuk penggunaan oleh mahluk hidup, hal ini juga dapat diartikan bahwa area dengan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih tinggi dan sangat tinggi mempunyai ketersediaan daya dukung tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Gambar 2.3  
Peta Indikasi Jasa Penyedia Air Bersih



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

### 3. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Distribusi dan luas jasa ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh jasa ekosistem kelas sangat tinggi sebesar 344.242,6 Ha (54%) dan kelas tinggi sebesar 226.936,19 Ha (35%). Kelas jasa ekosistem sangat tinggi terluas sebesar 84.285,5 Ha (24%) berada di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis, sedangkan kelas jasa ekosistem tinggi terluas juga berada di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis sebesar 70.606,5 Ha (31%). Adapun distribusi dan luas jasa ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Mandailing Natal disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

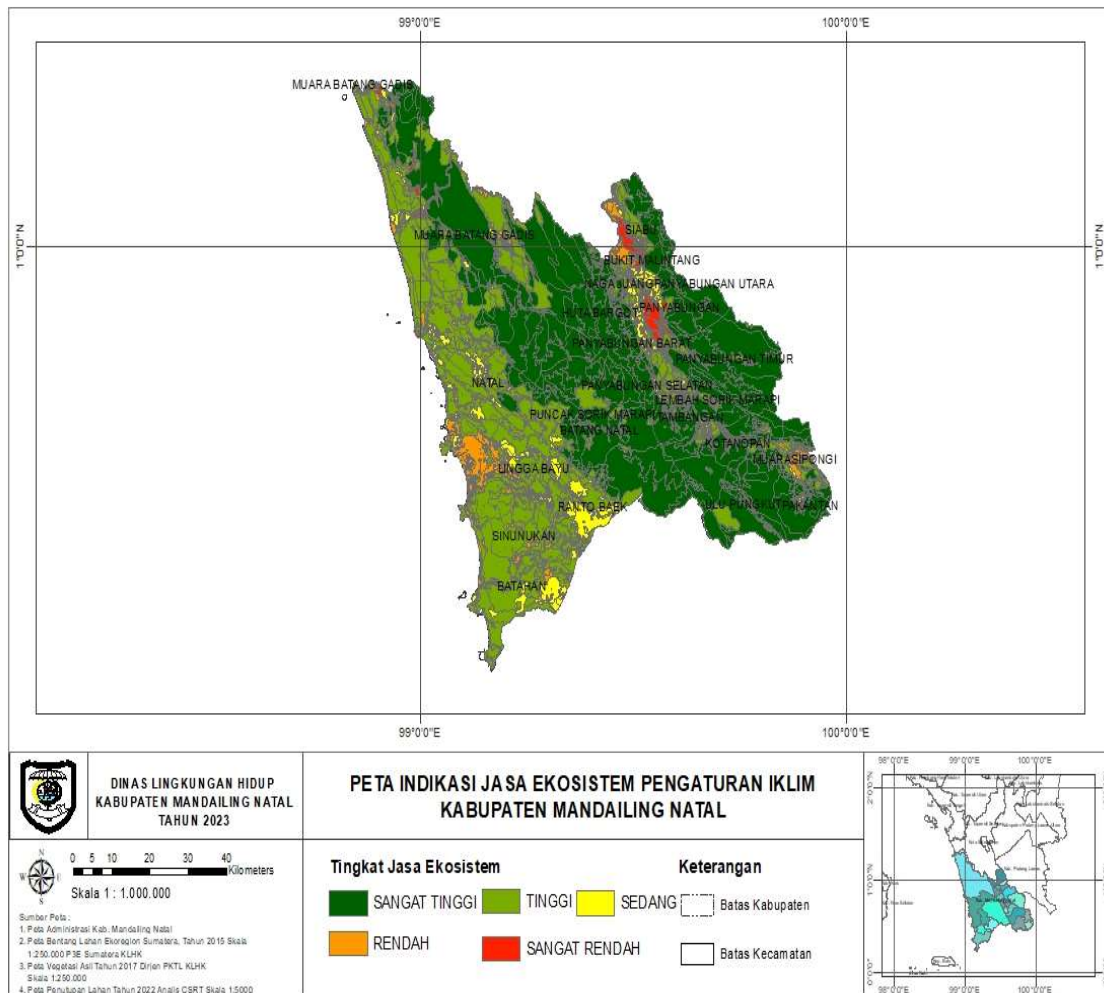
Tabel 2.15  
Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

NO	Nama Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
1	Batahan	4,00	1801,80	4830,36	27686,13	15,02	34337,30
2	Batang Natal			884,59	14218,55	63296,60	78399,74
3	Bukit Malintang	473,07	181,74	992,07	490,08	3566,86	5703,82
4	Huta Bargot			977,04	597,79	8490,93	10065,77
5	Kotanopan	314,03	138,26	224,41	3726,36	24733,29	29136,34
6	Lembah Sorik Marapi			792,23	2247,23	71,99	3111,46
7	Lingga Bayu		537,54	2741,12	18722,40		22001,05
8	Muara Batang Gadis	2090,35	3723,80	4256,52	70606,51	84285,53	164962,72
9	Muarasipongi		1881,73	415,28	3708,80	7151,69	13157,51
10	Naga Juang			420,34	1781,93	2458,95	4661,22
11	Natal	39,40	11555,56	5409,97	36277,20	25506,40	78788,53
12	Pakantan			209,67	816,05	9746,51	10772,23
13	Panyabungan	3363,34	33,84	1062,29	4344,22	15008,18	23811,86
14	Panyabungan Barat			1367,78	1022,13	5314,59	7704,49
15	Panyabungan Selatan			360,96	989,41	5089,77	6440,15
16	Panyabungan Timur	108,82	13,51	2,06	1654,47	33062,43	34841,30
17	Panyabungan Utara	600,49		1600,11	1373,38	2187,76	5761,73
18	Puncak Sorik Marapi			150,51	806,28	3960,62	4917,41
19	Ranto Baek		13,72	6813,59	11664,31	1196,64	19688,26
20	Siabu	1996,53	3082,65	1292,69	5829,41	14183,91	26385,19
21	Sinunukan		901,58	2,87	13207,40		14111,85
22	Tambangan	105,15	11,32	287,81	2593,20	11271,82	14269,30
23	Ulu Pungkut			129,11	2572,95	23643,09	26345,15
	<b>Grand Total</b>	<b>9095,17</b>	<b>23877,06</b>	<b>35223,37</b>	<b>226936,20</b>	<b>344242,60</b>	<b>639374,40</b>

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Jasa ekosistem Pengaturan Iklim kelas tinggi dan sangat tinggi menunjukkan kemampuan wilayah tersebut untuk mengatur kondisi iklim local dan regional. Area dengan jasa ekosistem kelas tinggi dan sangat tinggi diartikan bahwa area tersebut memiliki kemampuan daya tampung lingkungan yang baik untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan dari aktivitas pembangunan dan masyarakat serta mengatur kondisi iklim.

Gambar 2.4  
Peta Indikasi Jasa Pengaturan Iklim



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

#### 4. Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

Distribusi dan luas jasa ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana di Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh jasa ekosistem kelas tinggi sebesar 413.240,54 Ha (65%) dan kelas sedang sebesar 98.384,41 Ha (15%). Kelas jasa ekosistem tinggi terluas sebesar 113.812,27 Ha (28%) beradadi wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis, sedangkan kelas jasa ekosistem sangat rendah terluas berada di wilayah Kecamatan Natal sebesar 25.801,09 Ha (26%). Adapun distribusi dan luas jasa ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana di Kabupaten Mandailing Natal disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

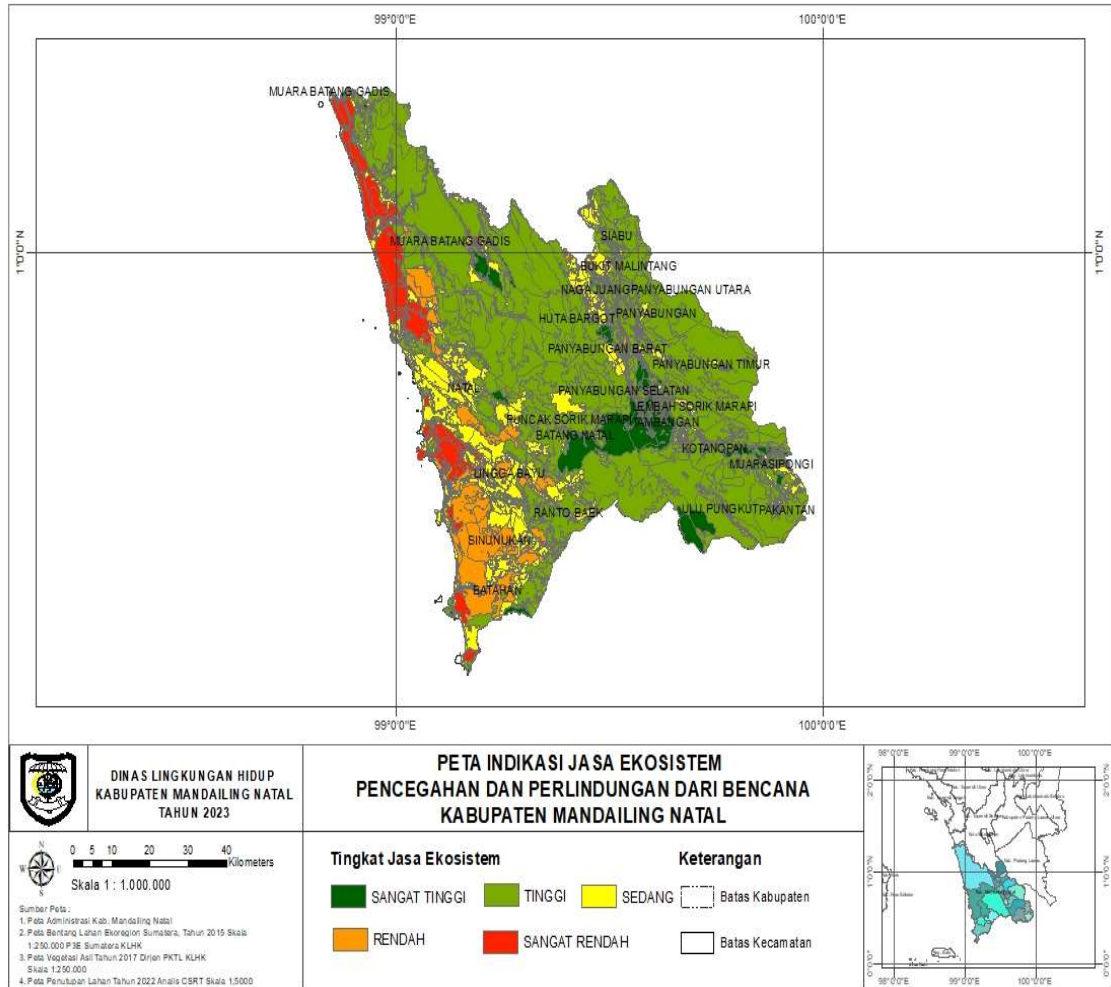
Tabel 2.16  
Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

NO	Nama Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Batahan	2218,76	14757,75	7329,76	9095,33	935,69	34337,30
2	Batang Natal		1039,12	8482,87	57682,21	11195,54	78399,74
3	Bukit Malintang	23,66	96,58	440,67	5142,90		5703,82
4	Huta Bargot		100,54	1425,84	8036,72	502,67	10065,77
5	Kotanopan	56,92	385,26	1787,66	25621,76	1284,74	29136,34
6	Lembah Sorik Marapi			204,35	1881,14	1025,96	3111,46
7	Lingga Bayu	7,95	4536,98	10808,73	6647,40		22001,05
8	Muara Batang Gadis	27274,16	7683,47	12606,78	113812,28	3586,03	164962,72
9	Muarasipongi		57,12	1826,40	9800,69	1473,29	13157,51
10	Naga Juang		179,66	2578,37	1814,45	88,74	4661,22
11	Natal	8921,50	12035,79	25801,10	31503,68	526,46	78788,53
12	Pakantan		18,97	1020,86	9732,40		10772,23
13	Panyabungan	6,81	572,80	1358,97	20485,45	1387,84	23811,86
14	Panyabungan Barat		304,11	1429,18	5358,78	612,43	7704,49
15	Panyabungan Selatan		54,29	740,18	4681,03	964,64	6440,15
16	Panyabungan Timur	12,28	139,17	1344,97	33256,34	88,55	34841,30
17	Panyabungan Utara		63,80	156,28	5541,65		5761,73
18	Puncak Sorik Marapi			94,05	858,11	3965,26	4917,41
19	Ranto Baik	2,00	1460,76	5355,52	12793,08	76,90	19688,26
20	Siabu	271,87	448,84	7146,65	18514,46	3,37	26385,19
21	Sinunukan		9293,08	4597,69	221,08		14111,85
22	Tambangan	13,62	244,47	1244,62	9412,87	3353,73	14269,30
23	Ulu Pungkut		41,55	602,90	21346,75	4353,95	26345,15

NO	Nama Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
	<b>Grand Total</b>	<b>38809,53</b>	<b>53514,11</b>	<b>98384,41</b>	<b>413240,55</b>	<b>35425,79</b>	<b>639374,40</b>

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Gambar 2.5  
Peta Indikasi Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

## D. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

### 1. Potensi Timbunan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Mandailing Natal masih belum berjalan dengan optimal, hal ini disebabkan sarana dan prasarana persampahan masih belum tercukupi dan pelayanan belum seluruh menjangkau wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Upaya pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan dengan baik dari sumber nya maupun di tempat pemrosesan akhir. Belum adanya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah yang layak dan ideal menjadi permasalahan utama pengelolaan sampah. Pengelolaan yang sudah terlaksana hanya kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan. Sarana prasana pengelolaan sampah yang telah dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal, antara lain: truk sampah (dumpruck), truk amroll, truk tinja, *toilet mobile*, alat berat (beco), becak roda 3, container sampah, tong sampah sertapetugas kebersihan yang menyapu jalan-jalan protokol.

Selain pengelolaan sampah yang belum maksimal, ditemukan juga kebiasaan masyarakat yang masih membakar sampah dan membuang sampah di sungai. Jumlah total timbulan sampah Kabupaten Mandailing Natalsebesar **339.412** kg/hari dan timbulan sampah terbesar berada di Kecamatan Panyabungan yaitu sebesar 64.350 kg/hari atau 19 % dari total timbulan sampah. Presentase timbulan sampah yang diangkut dan dibuang ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal sebesar 75%.

Jumlah timbulan sampah perkecamatan dan cara pembuangan sampah masyarakat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.17  
Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Mandailing Natal

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Prediksi Timbulan Sampah (kg/hari)					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Batahan	23.427	17.116	17.474	17.832	18.191	18.549	18.907
2	Sinunukan	22.782	16.917	17.401	17.886	18.371	18.856	19.340
3	Batang Natal	25.685	18.286	18.439	18.592	18.745	18.899	19.052
4	Lingga Bayu	28.452	20.609	20.955	21.301	21.647	21.993	22.339
5	Ranto Baek	14.585	10.602	10.798	10.994	11.190	11.387	11.583
6	Kota Nopan	28.024	19.788	19.874	19.960	20.046	20.131	20.217
7	Ulu Pungkut	4.721	3.348	3.370	3.392	3.414	3.436	3.458
8	Tambangan	11.058	7.868	7.931	7.995	8.058	8.122	8.185
9	Lembah Sorik Marapi	11.116	7.911	7.976	8.041	8.106	8.171	8.236
10	Puncak Sorik Marapi	9.110	6.493	6.551	6.609	6.667	6.725	6.782
11	Muara Sipongi	12.873	9.287	9.425	9.563	9.700	9.838	9.976
12	Pakantan	2.243	1.590	1.600	1.610	1.619	1.629	1.639

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Prediksi Timbulan Sampah (kg/hari)					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	Panyabungan	91.929	65.896	66.669	67.442	68.215	68.988	69.760
14	Panyabungan Selatan	10.421	7.388	7.434	7.481	7.527	7.574	7.620
15	Panyabungan Barat	10.964	7.905	8.020	8.135	8.250	8.365	8.481
16	Panyabungan Utara	22.915	16.334	16.481	16.628	16.775	16.922	17.069
17	Panyabungan Timur	14.492	10.375	10.491	10.606	10.721	10.837	10.952
18	Huta Bargot	9.062	6.590	6.714	6.837	6.961	7.084	7.208
19	Natal	35.050	25.442	25.895	26.349	26.802	27.256	27.709
20	Muara Batang Gadis	23.777	17.767	18.328	18.890	19.452	20.013	20.575
21	Siabu	54.054	38.503	38.836	39.168	39.501	39.833	40.166
22	Bukit Malintang	13.059	9.377	9.494	9.612	9.730	9.847	9.965
23	Naga Juang	5.075	3.730	3.819	3.908	3.997	4.086	4.175
<b>Total</b>		<b>484.874</b>	<b>349.121</b>	<b>353.976</b>	<b>358.831</b>	<b>363.686</b>	<b>368.540</b>	<b>373.395</b>

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standart Minimal Bidang Penatan Ruang Menyatakan Produksi Lumpur Tinja sebesar 40 Liter/org/tahun. Hasil perhitungan timbulan tinja Kabupaten Mandailing Natal terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18  
Proyeksi Timbulan Tinja

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Prediksi Timbulan Tinja (Liter/tahun)					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Batahan	23.427	978.036	998.514	1.018.992	1.039.470	1.059.948	1.080.426
2	Sinunukan	22.782	966.674	994.371	1.022.068	1.049.765	1.077.462	1.105.159
3	Batang Natal	25.685	1.044.908	1.053.662	1.062.416	1.071.170	1.079.924	1.088.678
4	Lingga Bayu	28.452	1.177.636	1.197.413	1.217.191	1.236.969	1.256.747	1.276.525
5	Ranto Baek	14.585	605.823	617.034	628.246	639.457	650.668	661.880
6	Kota Nopan	28.024	1.130.763	1.135.664	1.140.565	1.145.467	1.150.368	1.155.269
7	Ulu Pungkut	4.721	191.336	192.585	193.833	195.081	196.329	197.577
8	Tambangan	11.058	449.579	453.209	456.838	460.468	464.097	467.727
9	Lembah Sorik Marapi	11.116	452.061	455.772	459.483	463.194	466.904	470.615

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Prediksi Timbulan Tinja (Liter/tahun)					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Puncak Sorik Marapi	9.110	371.020	374.329	377.639	380.949	384.259	387.569
11	Muara Sipongi	12.873	530.677	538.556	546.435	554.314	562.192	570.071
12	Pakantan	2.243	90.847	91.411	91.974	92.538	93.101	93.665
13	Panyabungan	91.929	3.765.488	3.809.652	3.853.817	3.897.981	3.942.145	3.986.309
14	Panyabungan Selatan	10.421	422.154	424.810	427.467	430.124	432.781	435.438
15	Panyabungan Barat	10.964	451.714	458.292	464.869	471.446	478.023	484.600
16	Panyabungan Utara	22.915	933.392	941.789	950.185	958.581	966.977	975.373
17	Panyabungan Timur	14.492	592.868	599.463	606.057	612.651	619.245	625.839
18	Huta Bargot	9.062	376.589	383.644	390.699	397.753	404.808	411.863
19	Natal	35.050	1.453.820	1.479.730	1.505.641	1.531.551	1.557.461	1.583.371
20	Muara Batang Gadis	23.777	1.015.254	1.047.342	1.079.429	1.111.516	1.143.603	1.175.691
21	Siabu	54.054	2.200.171	2.219.177	2.238.182	2.257.188	2.276.194	2.295.199
22	Bukit Malintang	13.059	535.811	542.536	549.262	555.987	562.713	569.438
23	Naga Juang	5.075	213.168	218.253	223.337	228.421	233.505	238.590
<b>Total</b>		<b>484.874</b>	<b>19.949.792</b>	<b>20.227.207</b>	<b>20.504.623</b>	<b>20.782.039</b>	<b>21.059.455</b>	<b>21.336.871</b>

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Selain timbulan tinja, produksi air kotor (limbah domestik) merupakan potensi beban pencemar sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Minimal Bidang Penataan Ruang Menyatakan Produksi Air Kotor (Limbah Domestik) Berkisar 70% - 80% dari kebutuhan air.

Tabel 2.19  
Proyeksi Timbulan Air Limbah Domestik

Tahun	Proyeksi Timbulan Limbah Cair Domestik m <sup>3</sup> /tahun
2024	636.702.548,9682
2025	638.286.209,3345
2026	639.988.672,3405
2027	641.816.210,7544
2028	643.660.154,0027
2029	6.438.767.646,0000

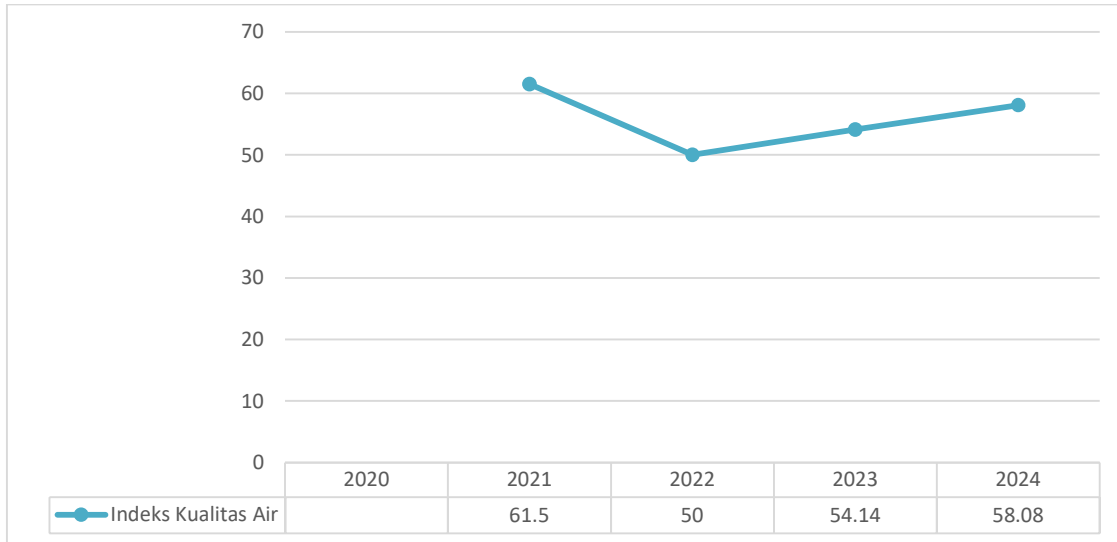
## 2. Potensi Beban Pencemar Air Sungai

Potensi beban pencemar pada air sungai dapat dilihat dari kadar BOD (*Biological Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*), dan TSS (*Total Suspended Solid*). Potensi beban pencemar untuk masing-masing parameter tersebut merupakan akumulasi dari pencemaran yang berasal dari kegiatan domestik, pertanian, maupun penggunaan lahan. Potensi beban pencemar yang berasal dari domestik akan dipengaruhi oleh pola distribusi penduduk dan jaraknya terhadap sungai, beserta beberapa faktor lain seperti rasio ekuivalen kota dan faktor emisi masing-masing zat pencemar. Sedangkan potensi beban pencemar yang berasal dari kegiatan pertanian dan penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan dan faktor emisi masing-masing zat pencemar. Tutupan lahan yang dikategorikan sebagai pertanian yaitu sawah, tegalan, ladang, dan kebun atau perkebunan. Sedangkan tutupan lahan yang menjadi sumber potensi beban pencemar penggunaan lahan mencakup lahan terbangun dan hutan.

Indeks Kualitas Air digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dan digunakan untuk memberikan indikasi awal secara cepat tentang kondisi kualitas air sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur pengurangan laju pencemaran air. Hasil indeks kualitas air Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 adalah 50,00 (Cukup) artinya sungai di Kabupaten Mandailing Natal tercemar sedang, dimana dari 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal menduduki peringkat nomor 6 dengan Indeks Kualitas Air sedang. Penurunan indeks kualitas air pada

tahun 2021-2022 terutama karena meningkatnya aktivitas ekonomi pada daerah aliran Sungai. Angka IKA Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 yaitu sebesar 58,08. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian IKA tahun 2023 yaitu 54,14.

Diagram 2.1  
Tren Indeks Kualitas Air Kabupaten Mandailing Natal



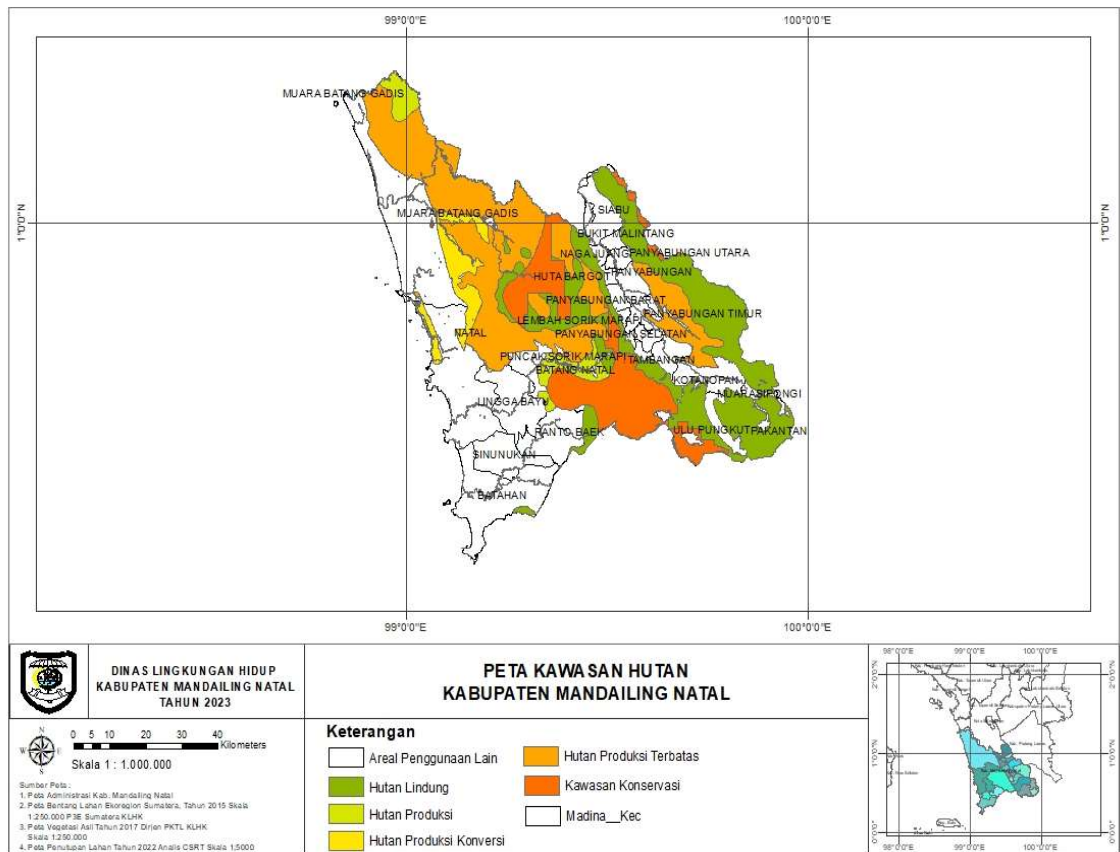
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

### E. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Hutan dengan berbagai ekosistem yang terdapat didalamnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik biotik maupun abiotik. Selain menjadi sumber berbagai jenis sumber daya alam, hutan juga menjadi penopang tersedianya sumber daya alam lainnya, seperti sumber daya air. Oleh sebab itu keberadaan hutan sangat penting dijaga agar keberlanjutan proses, fungsi dan produktifitasnya dapat dipertahankan yang menjadi salah satu modal untuk mencapai mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan kawasan hutan di Mandailing Natal mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sesuai dengan penetapan Pemerintah. Penetapan kawasan hutan terbaru adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Hutan Lindung: **179.658 Ha**, Hutan Produksi Terbatas: **189.781 Ha**, Hutan Produksi: **49.065 Ha**, dan Hutan Konversi: **3.164 Ha**.

Gambar 2.5  
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Mandailing Natal

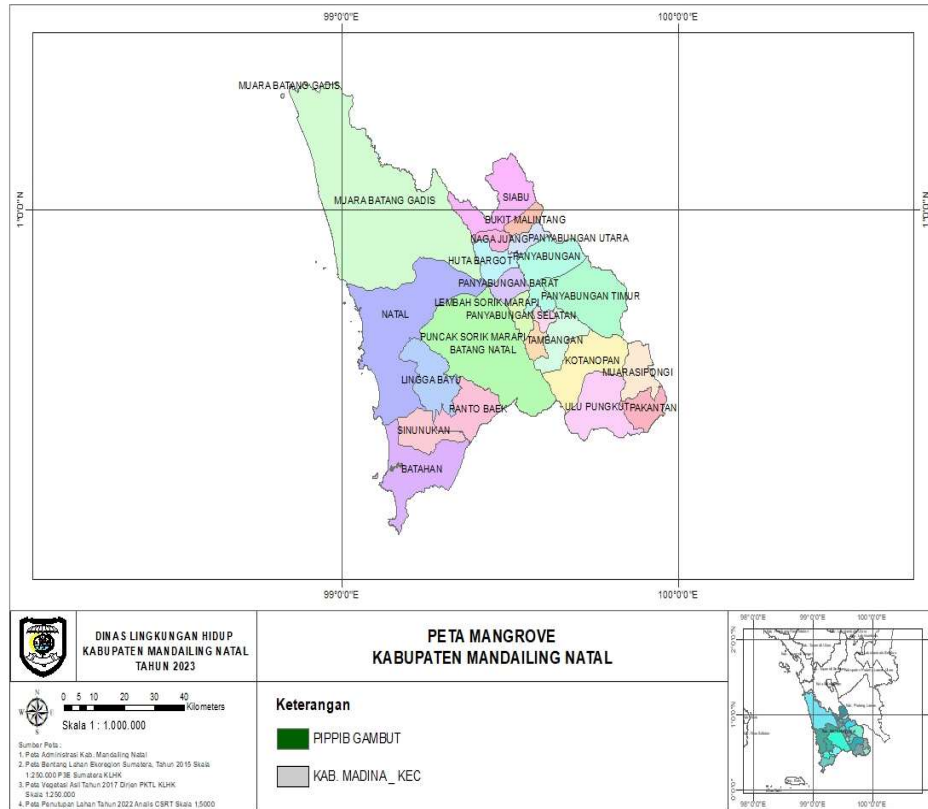


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045

Hutan *Mangrove* memiliki peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam luasan yang setara dengan hutan tropis, hutan *mangrove* mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih banyak. Hutan *mangrove* seluas 1 hektare mampu menyerap 1.000 ton karbon. Keberadaan *mangrove* yang sehat di kawasan pesisir dapat meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan meminimalisir dampak bencana alam, seperti tsunami, badai dan gelombang. *mangrove* turut serta dalam mengendalikan perubahan iklim dengan berperan sebagai paru-paru dunia melalui penyerapan dan penyimpanan karbon biru. Selain berfungsi sebagai pelindung pantai dan 'karbon biru' (*blue carbon*), *mangrove* merupakan *nursery ground* dan habitat biota yang bernilai ekonomis seperti ikan, kepiting, dan udang (manfaat untuk *livelihood*). Namun perubahan iklim dan perkembangan global telah memberikan dampak terhadap kelestarian *mangrove*. Sebagai negara dengan hutan *mangrove* terluas di dunia, upaya pelestarian *mangrove* di Indonesia menjadi fokus utama program perubahan iklim dunia.

*Mangrove* di Kabupaten Mandailing Natal didominasi *mangrove* sedang, hanya 5% yang merupakan *mangrove* jarang. Guna peningkatan penanggulangan perubahan iklim, baik *mangrove* jarang maupun *mangrove* sedang perlu direhabilitasi agar kondisinya berubah menjadi *Mangrove* lebat.

Gambar 2.6  
Peta *Mangrove* Kabupaten Mandailing Natal

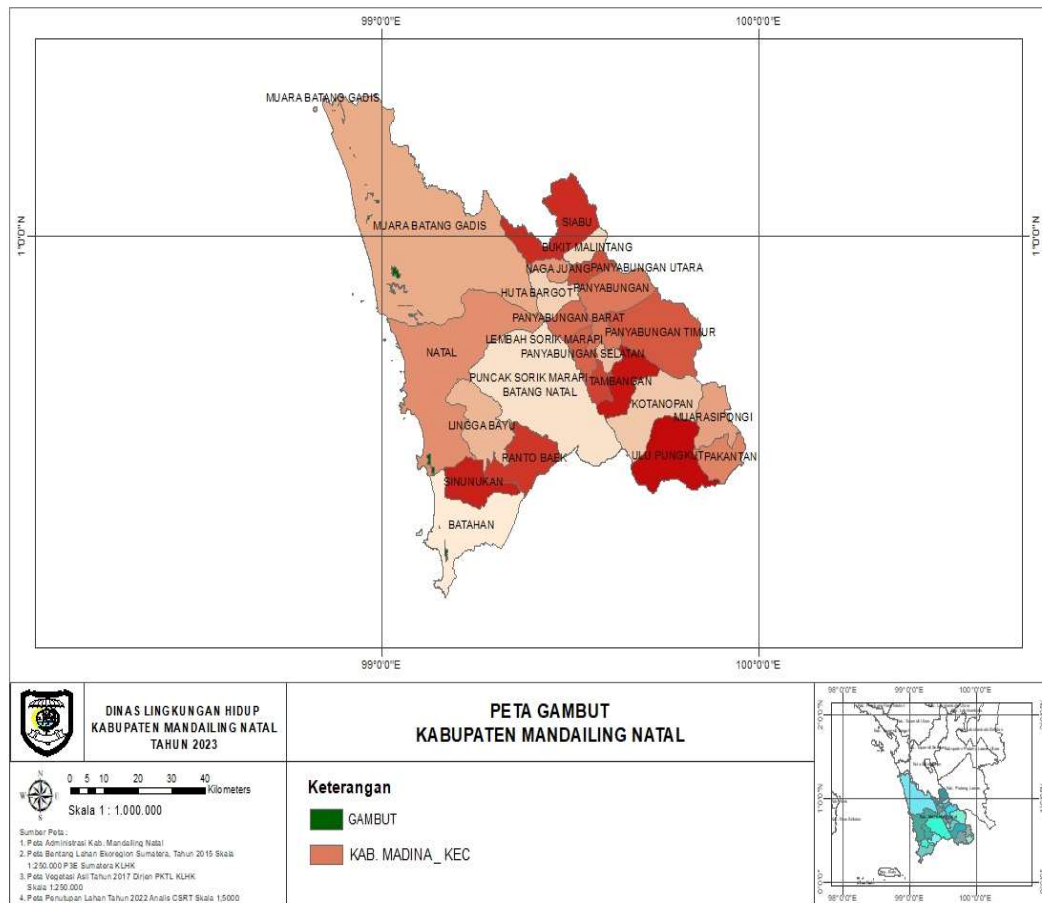


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045

Luas gambut di dunia hanya sekitar 3% dari luas seluruh lahan, namun kemampuannya menyimpan karbon jauh lebih tinggi dari jenis lahan dan vegetasi apapun. Lahan gambut yang masih dalam kondisi mendekati alami dapat menyimpan hingga lebih dari 550 gigaton karbon atau 42% dari semua karbon yang tersimpan di tanah. Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan gambut dikeringkan atau dialihfungsikan.

Meski demikian, pengalihanfungsian lahan gambut menjadi area perkebunan dan industri masih terus terjadi. Kebanyakan alih fungsi ini menggunakan metode pengeringan, pembakaran, dan deforestasi sehingga melepaskan cadangan karbon di gambut ke atmosfer. Selain itu, gambut yang terdegradasi akan menjadi kering dan mudah terbakar sehingga memperparah intensitas cadangan karbon yang lepas ke atmosfer.

Gambar 2.7  
Peta Gambut Kabupaten Mandailing Natal



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045

Pemanfaatan sumber daya alam di kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa kegiatan yang bersumber dari data KPH Kabupaten Mandailing Natal seperti terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 2.20  
Daftar Pemanfaatan Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Sumber Daya Alam
1.	Potensi Kayu (m3)	11.970.542,00
2.	Potensi Non-Kayu	Sarang Walet, Rotan, Lebah Madu, Gaharu, Getah, Palembang, Bambu, Anggrek, Damar, Kayu Manis, Durian, Aren Guagua Batu Di Desa Bandar Melayu, Air Terjun Di Desa Aek Holbung, Kandungan Emas Di Sepanjang Sungai Batang Natal,

No.	Uraian	Sumber Daya Alam
3.	Potensi Jasa Lingkungan	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Arung Jeram, <i>Camping Ground</i> , Track Lintas Alam, Pemandangan Alam Dan Hawa Sejuk Dari Penatapan Dolok Martimbus, Budaya Yang Cukup Khas Di Desa Sopotinjak
4.	Rencana Bisnis	Pembangunan Hutan Karet; Pemanfaatan HHK dan HHBK

Sumber : Dokumen RPHJP KPH

Di Kabupaten Mandailing Natal lokasi target pelaksanaan rencana operasi *FOLU Net Sink* mencakup:

1. Pencegahan/penurunan laju deforestasi hutan, meliputi 1) kawasan hutan produksi yang masih berhutan alam seluas 495.057 ha, 2) kawasan hutan lindung yang masih berhutan alam seluas 524.832 ha, 3) kawasan hutan konservasi yang berhutan alam seluas 371.553 ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang masih berhutan alam seluas 130.182 ha.
2. Degradasi hutan konsesi Potensi luasan area perlindungan hutan alam primer di Perizinan Berusaha Pemanfaatan- Hutan Alam (PBPH-HA) adalah seluas 304.726 ha dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan- Hutan Tanaman (PBPH-HT) seluas 16.516 ha.
3. Pembangunan hutan tanaman Potensi perluasan hutan tanaman dalam kawasan PBPH-HT di Sumatera Utara adalah 18.801 ha.
4. Pengelolaan hutan lestari Areal dalam konsesi hutan yang potensial untuk pelaksanaan RIL adalah seluas 113.669 ha, Silvikultur Intensif (SILIN) seluas 20.110 ha sedangkan *Enhanced Natural Regeneration (ENR)* adalah seluas 15.286 ha.
5. Rehabilitasi dengan rotasi dan non rotasi Potensi lahan untuk rehabilitasi non rotasi pada IPL tinggi di Sumatera Utara adalah 31.212 ha sedangkan luasan rehabilitasi dengan rotasi dengan IPL tinggi adalah 16.248 ha.
6. Pengelolaan lahan gambut Luas potensi aksi mitigasi perbaikan tata air di PBPH adalah 42.417 ha dan Hak Guna Usaha (HGU) adalah 42.540 ha.
7. Konservasi keanekaragaman hayati Area hutan alam di kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin (HP-Non Konsesi) di Sumatera Utara yang memiliki nilai konservasi tinggi (arah lindung) dan berada di wilayah IPL 5-9 terdapat seluas 150.970 dengan rincian pada Indeks Prioritas Lokasi (IPL) 5-6, seluas 43.972 ha dan IPL 7-9, seluas 87 ha.

## F. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Terkait dengan kondisi iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Berdasarkan data SIDIK KLHK 87% wilayah Kabupaten Mandailing Natal cukup rentan terhadap perubahan iklim, agak rentan 4%, sangat rentan 9%. Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki luasan paling besar untuk daerah yang agak rentan, sedangkan Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan merupakan kabupaten dengan luas kerentanan perubahan iklim sangat rentan.

Adaptasi merupakan proses, aksi, atau luaran dalam suatu sistem untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menghadapi, mengelola, atau menyesuaikan terhadap perubahan kondisi, tekanan, bahaya, risiko atau kesempatan (Smit & Wandel, 2006). Oleh sebab itu, untuk mengurangi tingkat risiko, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptasi sehingga tingkat kerentanan suatu wilayah dapat menurun. Kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Semakin tinggi nilai kapasitas adaptasi suatu wilayah mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan wilayah tersebut dalam menghadapi kejadian bencana. Indeks Keterpaparan dan Sensitifitas (IKS) dan Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

Tabel 2.21  
Tingkat Kerentanan Kabupaten Mandailing Natal

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Batahan	0,47035	0,5197	3	3	3
Sinunukan	0,474	0,539	3	3	3
Batang Natal	0,42043	0,5777	3	3	3
Lingga Bayu	0,44286	0,6291	3	3	3
Ranto Baik	0,4708	0,6397	3	3	3
Kotanopan	0,56199	0,6277	3	3	3
Ulu Pungkut	0,53276	0,6498	3	3	3
Tambangan	0,49678	0,5695	3	3	3

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Lembah Sorik Marapi	0,547045	0,7491	2	2	2
Puncak Sorik Marapi	0,486615	0,6976	3	3	3
Muara Sipongi	0,427795	0,6892	5	5	5
Pakantan	0,354275	0,5725	3	3	3
Panyabungan	0,572805	0,6471	3	3	3
Panyabungan Selatan	0,44204	0,7161	5	5	5
Panyabungan Barat	0,45946	0,5926	3	3	3
Panyabungan Utara	0,50153	0,6726	3	3	3
Panyabungan Timur	0,47938	0,6503	3	3	3
Huta Bargot	0,546275	0,5966	3	3	3
Natal	0,501855	0,5115	3	3	3
Muara Batang Gadis	0,48619	0,5041	3	3	3
Siabu	0,535035	0,6721	3	3	3
Bukit Malintang	0,503385	0,6001	3	3	3
Naga Juang	0,354955	0,5168	3	3	3

Sumber : Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan (SIDDIK)

### G. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

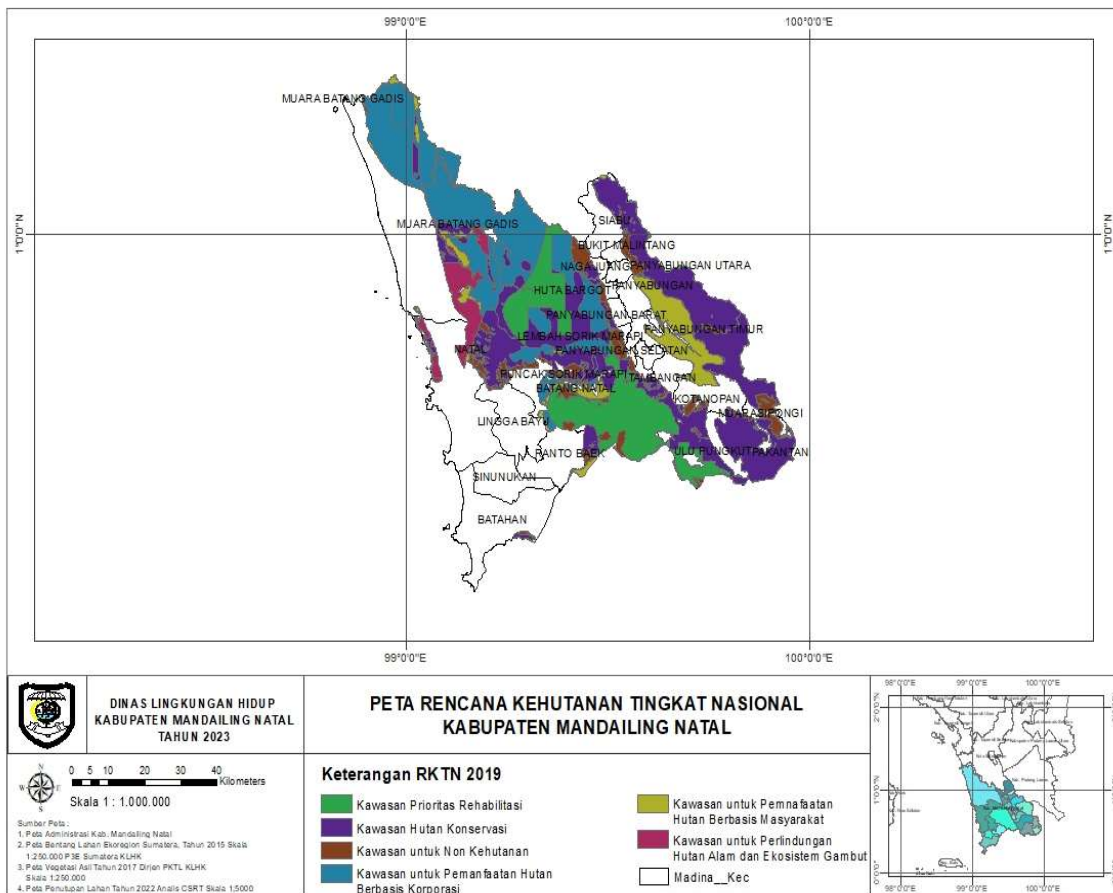
Kawasan merupakan salah satu lokus perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Ekosistem hutan yang sangat beragam, mejadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan beserta fungsinya yang berada di Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26:

Tabel 2.22  
Jenis dan Luas Hutan di Kabupaten Mandailing Natal

No.	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	179.658
2	Hutan Produksi Terbatas	189.781
3	Hutan Produksi	49.065
4	Hutan Konversi	3.164

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) merupakan arahan makro indikatif sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan, rencana investasi dan rencana kerja usaha berbagai skala geografis, jangka waktu dan fungsi-fungsi pokok kawasan hutan. Tekanan terhadap sumber daya hutan telah menyebabkan semakin terdegradasinya sumber daya hutan. RKTN memberikan arah pengurusan hutan ke depan melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara adil dan berkelanjutan, potensi multi fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai posisi penting Kehutanan Indonesia di tingkat nasional, regional dan global di tahun 2030 melalui optimalisasi dan pemantapan kawasan hutan, peningkatan produktifitas dan nilai sumber daya hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, peningkatan riset dan teknologi kehutanan, mewujudkan kelembagaan bagi tata kelola kehutanan secara efisien dan efektif serta mengoptimalkan komparatif kehutanan Indonesia.

Gambar 2.8  
Peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Kabupaten Mandailing Natal



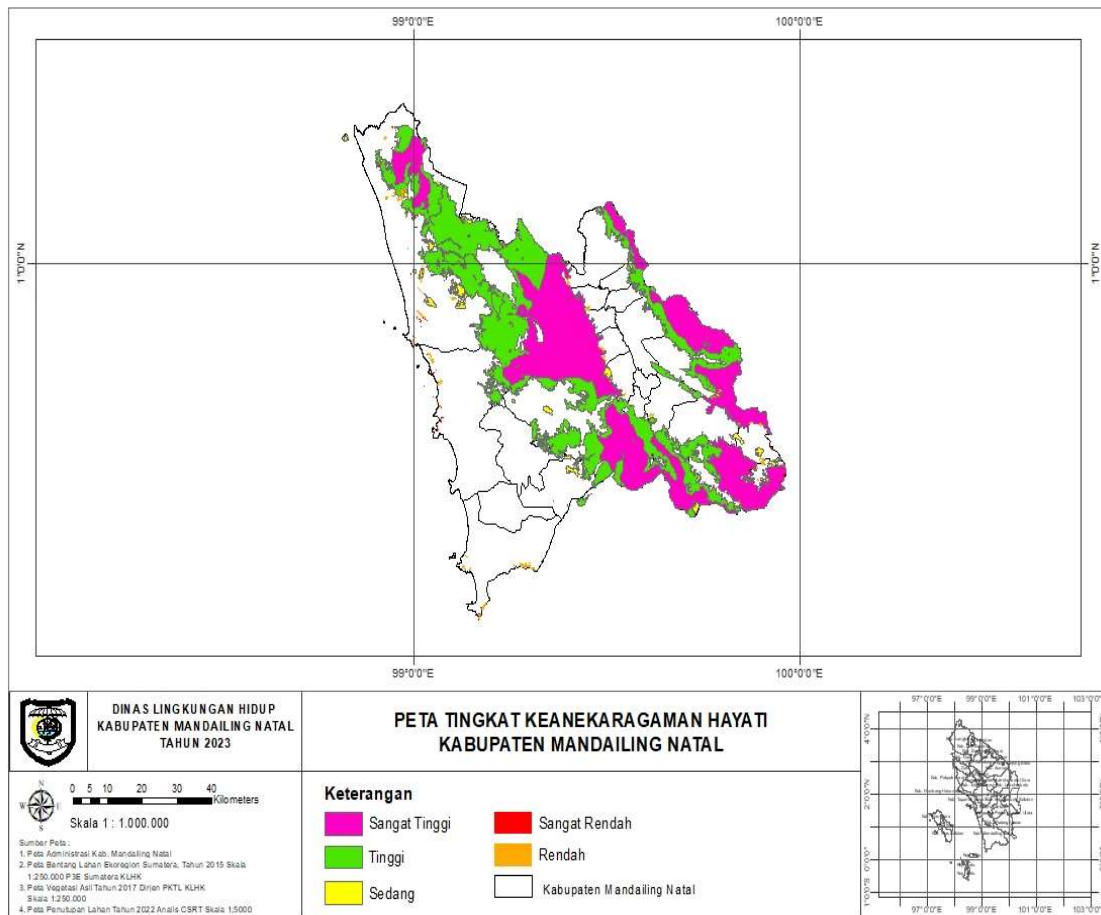
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Nilai *shape index* dapat menggambarkan tingkat ketahanan potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Mandailing Natal. *Shape index* menunjukkan ukuran bentuk dari suatu petak (*patch*) ekosistem, yang menunjukkan seberapa efektif petak tersebut dalam mendukung keanekaragaman hayati di dalamnya. Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh *shape index* sangat tinggi dan tinggi dengan luasan sebesar 281.572,61 Ha (99,19%) dari luas wilayah bertutupan hutan. Sedangkan wilayah dengan ketahanan sangat rendah hingga rendah seluas 614,37 Ha (0,2%), sebagaimana ditunjukkan pada table dan gambar dibawah ini:

Tabel 2.23  
Tingkat Ketahanan Keanekaragaman Hayati pada Wilayah Bertutupan Hutan di Kabupaten Mandailing Natal

No.	Ketahanan Kehati	Luas (Ha)
1	RENDAH	294,35
2	SANGAT RENDAH	320,02
3	SANGAT TINGGI	260.867,65
4	SEDANG	1.668,91
5	TINGGI	20.704,96
<b>Grand Total</b>		<b>283.855,89</b>

Gambar 2.9  
Peta *Shape Index* Kabupaten Mandailing Natal



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Salah satu upaya melestarikan keanekaragaman hayati adalah dengan melindungi wilayah jelajah hewan-hewan yang dilindungi, seperti gajah dan harimau serta orang utan. Dengan melindungi wilayah jelajah hewan-hewan ini, juga akan menghindarkan terjadinya konflik satwa dan manusia

#### 2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan adalah tiga pilar utama yang saling berkaitan dan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor.

## A. Indeks Ketahanan Pangan

Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Mandailing Natal ditunjukkan melalui Indeks Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

Tabel 2.24  
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2023

Tahun	Indeks Ketahanan Pangan	Peringkat	Kelompok	Keterangan
2020	68,37	301	5	Tahan
2021	67,31	313	4	Agak Tahan
2022	66,36	317	4	Agak Tahan
2023	69,54	301	5	Tahan
2024	n.a	n.a	n.a	n.a

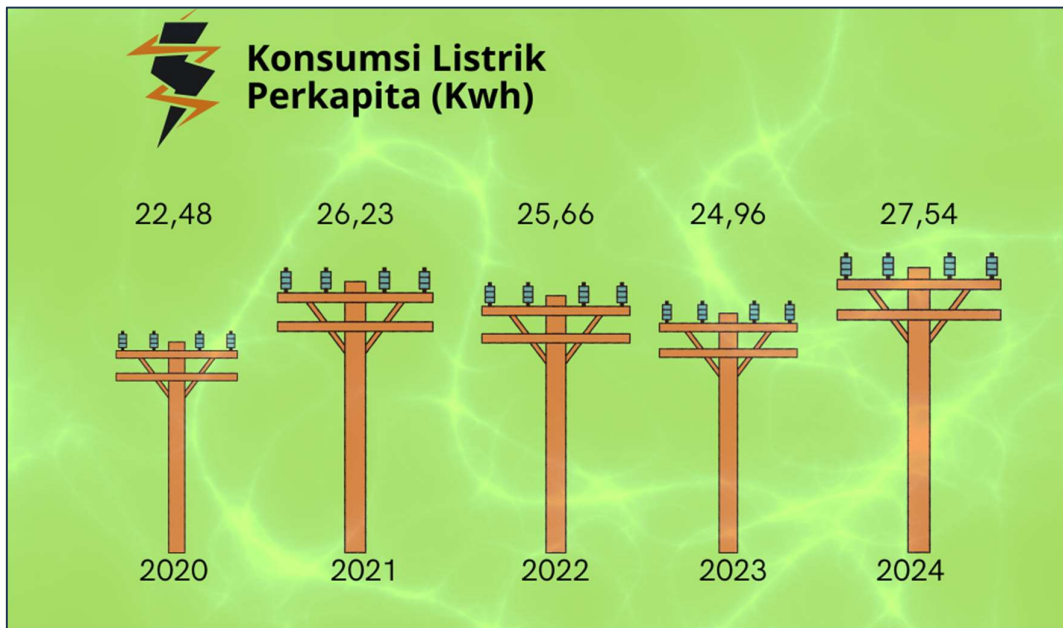
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Indeks Ketahanan Pangan diukur dengan menilai aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 masuk dalam kelompok 5 (Tahan), namun mengalami penurunan indeks hingga tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 menjadi kelompok 5 (Tahan). Hal ini menunjukkan adanya penurunan terkait dengan pemenuhan/distribusi bahan pangan di Kabupaten Mandailing Natal diantaranya akibat penurunan luas lahan baku. Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Mandailing Natal perlu diperhatikan dengan mewujudkan kerjasama pertanian, intensifikasi, penerapan teknologi pertanian dan meningkatkan keanekaragaman komoditas yang diserap oleh masyarakat Mandailing Natal, serta penegasan atas luas lahan sawah berkelanjutan.

## B. Konsumsi Listrik Per Kapita

Kondisi konsumsi listrik masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal merupakan perbandingan antara pemakaian tenaga listrik dibagi dengan jumlah penduduk Mandailing Natal. Data rata-rata konsumsi listrik diuraikan sebagai berikut:

Diagram 2.2  
Rata-Rata Konsumsi Per Kapita Listrik Per Bulan di Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2019-2023



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi listrik per kapita pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, tertinggi pada tahun 2023 sebesar 26,23 (KWh). Ke depan, perlu adanya diversifikasi sumber energi, termasuk upaya pengembangan energi terbarukan di Kabupaten Mandailing Natal. Potensi panas bumi sebagai energi alternatif juga dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal yang tersebar pada beberapa tempat antara lain di daerah-daerah sebagai berikut:

Tabel 2.25  
Sebaran Potensi Panas Bumi

No	Lapangan	RES (Mwe)		RE (Mwe)			Ins (MW)
		Sp	Hp	Ps	Pb	Pv	
1.	S. Merapi-Sampuraga	-	-	420	-	-	-
2.	Sampuraga	225	-	-	-	-	-
-3.	Roburan	-	-	320	-	-	-

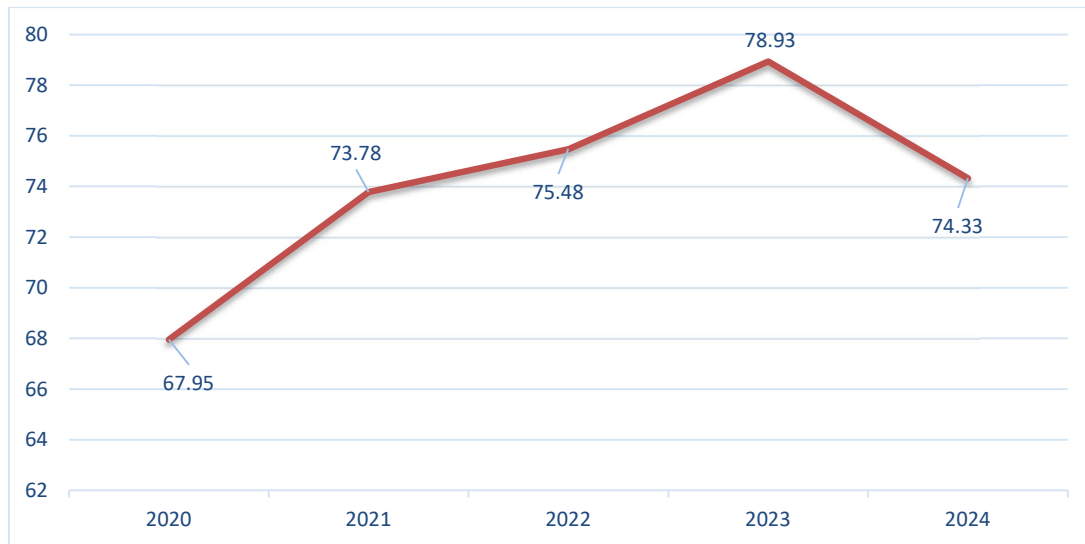
Keterangan: Sp: Speculative, Hp: Hypothetical, Ps: Possible/terduga, Pb: Probable/mungkin, Pv: Proven/terbukti, Re: Reserve/cadangan, Res: Resources/sumberdaya, Ins: Installed/terinstal

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara

### C. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Layak

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Mandailing Natal ditampilkan pada Diagram berikut:

Diagram 2.3  
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Pada Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Pada tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak sebesar 67,95% meningkat menjadi 75,48% pada tahun 2022, serta 78,93% pada tahun 2023. Angka tersebut menurun menjadi 74,33 % pada tahun 2024 disebabkan banyaknya infrastruktur SPAM yang rusak dan membutuhkan rehabilitasi dan pemungisian kembali.

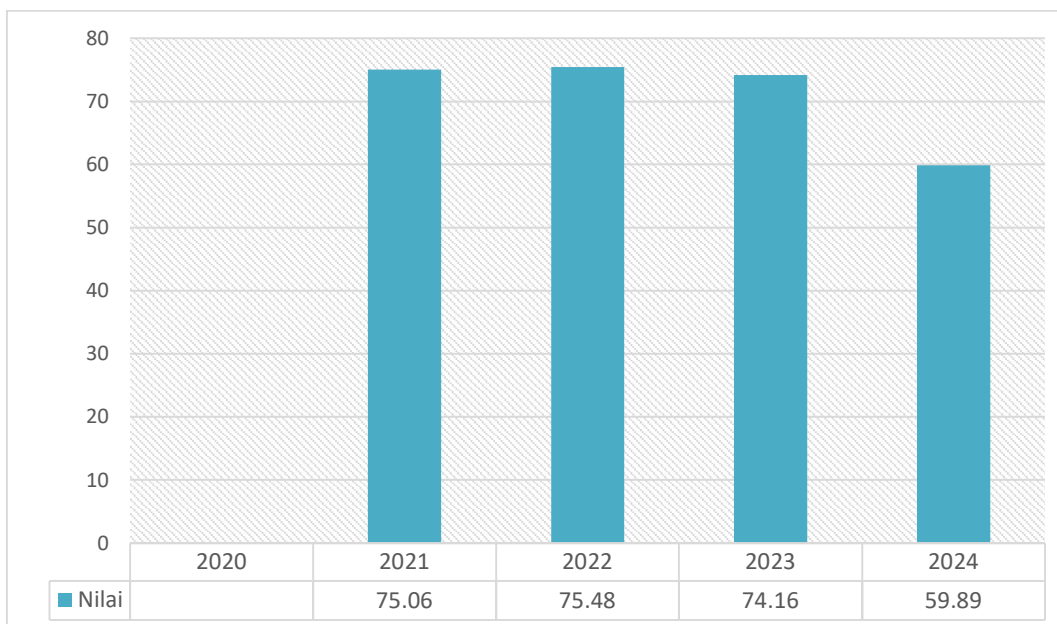
#### 2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan Hidup Berkualitas mengacu pada kondisi lingkungan yang mampu mendukung kehidupan secara berkelanjutan melalui keseimbangan 42 ekosistem, kualitas udara dan air yang baik, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

### A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah berdasarkan berbagai parameter lingkungan, seperti kualitas udara, air, dan tutupan lahan. IKLH menggabungkan data dari berbagai aspek lingkungan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang seberapa baik atau buruk kondisi lingkungan suatu daerah. Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada diagram berikut berikut:

Diagram 2.4  
 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal  
 Tahun 2020-2024



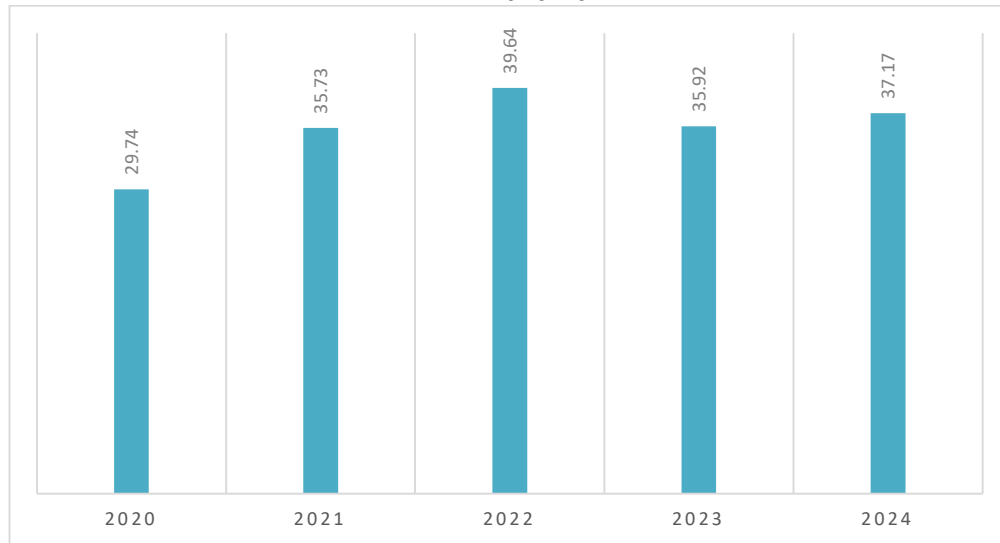
Sumber: Sistem Informasi Statistik KLHK, 2025

Indeks Kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 sampai 2024 cenderung mengalami penurunan dari 75,06 pada tahun 2021 menjadi 59,89 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Mandailing Natal semakin menurun secara keseluruhan. Implementasi kebijakan dan regulasi lingkungan yang ketat, seperti pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan perlindungan kawasan hijau perlu ditingkatkan.

#### **B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak**

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengacu pada persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dasar yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan lingkungan. Akses sanitasi aman merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

Diagram 2.5  
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, SSK, & Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal

Sehubungan faktor ketersediaan data, data tahun 2020-2022 bersumber dari BPS Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2023 merupakan data SSK, serta tahun 2024 bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan data di atas, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020-2022 terus meningkat dan terjadi penurunan pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berupaya meningkatkan kualitas sanitasi melalui pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi aman, serta melakukan kolaborasi dengan pihak lain.

### C. Pengelolaan Sampah

Sistem Pengelolaan Sampah merupakan suatu rangkaian terintegrasi yang mencakup seluruh tahap pengelolaan sampah dari sumber hingga pemrosesan akhir, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.26  
Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0	0	0	0	0
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	18	18.4	18.8	19	19.6
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Layak Pengumpulan Sampah (%)	60	62	67	70	71
Jumlah Timbunan Sampah (Ton)	39.745	40.540	41.350	42.178	43.021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Timbulan Sampah Terolah mengacu pada persentase total sampah yang dihasilkan masyarakat yang berhasil diolah secara benar di fasilitas pengolahan sampah seperti TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), atau fasilitas daur ulang. TPA Kabupaten Mandailing Natal belum melakukan pengolahan terhadap timbunan sampah. Kedepan, hal ini perlu menjadi prioritas agar sampah yang ada dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna seperti kompos, listrik, dan lain-lain.

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah mengukur persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara teratur dan menyeluruh dari dinas terkait. Data di atas menunjukkan bahwa 19.6% rumah tangga pada tahun 2024 mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah, meningkat 1,6% dari tahun 2020. Beberapa tantangan untuk meningkatkan angka tersebut diantaranya jarak tempuh yang jauh antara TPA dengan TPS, keterbatasan armada, dan lainnya.

### 2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah rawan bencana adalah daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap kejadian bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan badai. Kondisi geografis, iklim, serta aktivitas manusia yang tidak terkontrol seringkali menjadi faktor penyebab kerawanan tersebut. Daerah-daerah ini sering mengalami kerugian material dan korban jiwa yang signifikan akibat bencana yang terjadi. Untuk memahami dan mengelola risiko di wilayah-wilayah ini, digunakanlah Indeks Risiko Bencana (IRD).

#### A. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko setiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor *hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2020-2024 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada wilayah Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal menempati urutan pertama Kelas Risiko dengan kategori Tinggi dengan skor 214,80 (dua ratus empat belas koma delapan). Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mandailing Natal ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.27  
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Mandailing Natal	164.49	214.80	214.80	214.80	214.80

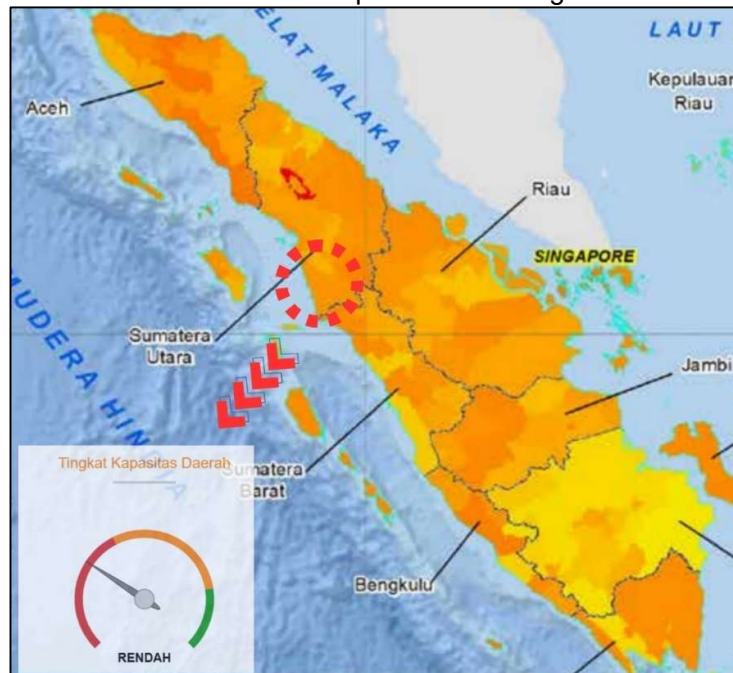
Sumber: BNPB, 2025

Pada tahun 2020 indeks risiko bencana Kabupaten Mandailing Natal berada pada angka 164.49 namun terus meningkat pada tahun 2021 sampai 2024 dengan angka konstan sebesar 214,80. Peningkatan angka tersebut terutama terjadi karena meningkatnya angka kejadian bencana di Kabupaten Mandailing Natal.

## B. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Gambar 2.10  
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024



Sumber: BNPB, 2025

Berdasarkan data dari BNPB, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2020-2024 masuk pada kategori rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah terutama dengan melakukan penerapan peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah, peningkatan fungsi informasi penataan ruang daerah, peningkatan kapasitas dasar sekolah dan madrasah, penguatan keselamatan rumah sakit dan puskesmas, perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

## **C. Kawasan Rawan Bencana**

### **1. Kawasan Rawan Tanah Longsor**

Gerakan tanah/longsor yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal umumnya disebabkan karena proses pelapukan pada lereng terjal serta daerah lemah akibat pergeseran patahan/sesar. Dari observasi lapangan terlihat bahwa daerah yang banyak mengalami gerakan tanah/longsor dijumpai di beberapa kecamatan. Gerakan tersebut umumnya terjadi di daerah lereng, punggung bukit terjal dimana terdapat endapan hasil lapukan yang gembur. Curah hujan yang tinggi akan memacu lebih cepat terjadinya gerakan tanah. Kondisi tersebut diperparah dengan kedudukan beberapa kecamatan tersebut yang sangat rentan/lemah karena berada pada Zona Patahan. Beberapa daerah yang berpotensi mengalami bencana gerakan tanah adalah:

- a. Wilayah berelevasi lebih dari 1000 m pada wilayah Muarasipongi, Pagargunung, Tanobato, Banjarsipan memiliki potensi bencana gerakan tanah tinggi.
- b. Wilayah berelevasi antara 500 – 1000 m yang tersebar mulai dari bagian barat – barat daya dengan sebaran memanjang berarah barat laut – tenggara. Sebaran yang lain terdapat di bagian tengah-utara sebelah selatan Panyabungan. Wilayah ini memiliki potensi bencana gerakan tanah sedang - tinggi.
- c. Wilayah berelevasi lebih dari 500 m dengan penyebaran setempat pada bagian barat Mandailing Natal serta pada perbukitan bagian timur Panyabungan. Wilayah ini memiliki potensi bencana gerakan tanah sedang - kecil.
- d. Wilayah berelevasi 100 – 500 m dengan penyebaran di sekitar Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Wilayah ini memiliki potensi bencana gerakan tanah kecil.
- e. Wilayah berelevasi kurang dari 100 m dengan penyebaran terdapat pada muara sungai hingga tepi pantai. Lokasi lain terdapat pula dataran antar perbukitan sampai dengan elevasi 100 m. Wilayah ini memiliki potensi bencana gerakan tanah sangat kecil.

Selain terjadi gempa maka di daerah - daerah dengan kondisi batuan yang kurang kompak, labil dan mempunyai tingkat kelerengan besar akan sangat berpotensi terjadinya longsor. Dari pengamatan lapangan daerah yang banyak terjadi longsor berada di sekitar jalan utama Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Natal.

### **2. Kawasan Rawan Banjir**

Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai- sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu juga daerah cekungan-cekungan dapat juga terjadi genangan yang menyebabkan banjir.

Kawasan yang berpotensi terkena banjir berada di beberapa kecamatan termasuk kawasan pertemuan antara sungai Batang Angkola dengan Sungai Batang Gadis. Kemudian di sekitar muara Sungai Batahan Kecamatan Batahan serta di batas Kecamatan Batang Natal di sekitar sungai Batang Natal. Banjir bandang akan terjadi dan bertambah parah jika di daerah hulu (Kawasan Resapan Air Tanah) terjadi perubahan tataguna lahan ataupun penggundulan hutan.

Pada kawasan yang biasa terkena banjir, diperlukan usaha pengembalian ekosistem lingkungan dengan melakukan reboisasi terhadap kawasan-kawasan hutan yang telah rusak. Selain itu, pada daerah perkotaan seperti Panyabungan diperlukan perbaikan sistem drainase. Sistem drainase berfungsi untuk menanggulangi banjir yang mungkin terjadi di daerah pemukiman, diperlukan juga suatu perencanaan sumur resapan dan kolam retensi yang juga didasarkan atas tata guna lahan lokasi perencanaan yang nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya koefisien limpahan yang terjadi.

### **3. Kawasan Rawan Gempa dan Bahaya Letusan Gunung Berapi**

Kabupaten Mandailing Natal dijumpai gunung berapi Sorik Marapi yang masih cukup aktif. Hal ini terlihat dari keberadaan beberapa sumber fumarol di sekitar lereng gunung tersebut. Jika terjadi peningkatan tektonik akibat penunjaman lempeng Samudera Hindia di bawah lempeng Asia di bagian tepian barat/daratan Kabupaten Mandailing Natal dikhawatirkan akan memicu terjadinya gempa dan peningkatan aktifitas gunung api Sorik Marapi. Gempa akan terjadi sepanjang patahan aktif dengan jalur melalui gunung api tersebut, yang akan memicu terjadinya peningkatan aktifitas gunung api.

Wilayah bahaya gempa yang akan terkena dampak langsung akibat pergeseran Patahan Sumatera dan gempa vulkanik meliputi:

- a. Kecamatan Lembah Sorik Marapi: Desa Aek Marian MG, Maga Lombang, Pasar Maga dan Desa Maga Dolok. Mengingat jalur gempa yang melintas di Lembah Sorik Marapi melintasi permukiman yang cukup padat yang mestinya sangat rentan bencana bila terjadi gempa di jalur tersebut.
- b. Kecamatan Panyabungan Selatan: secara geologis kecamatan ini berada di sebelah barat dari jalur struktur atau patahan aktif Sumatera, termasuk dalam segmen patahan Gadis yang menerus ke Pasaman. Permukiman yang akan terkena dampak langsung jika terjadi gempa bumi pada jalur tersebut seperti permukiman di Desa Kayu Laut, Roburan Lombang, Lumban Dolok dan Desa Aek Ngali.
- c. Kecamatan Tambangan: potensi gempa terutama di jalur patahan aktif terutama yang melintasi atau berada di Desa Huta Tinggi, Huta Tonga AB, Angin Barat, Padang Sanggar, Pastap maupun Pastap Hulu.

Untuk bahaya gunung api, jika terjadi letusan di gunung api Sorik Marapi, maka zonasi bahaya meliputi:

1. Daerah Bahaya (Radius 5 Km): Terletak pada gunung Sorik Marapi (barat laut) dengan radius 5 Km, daerah yang termasuk pada daerah bahaya adalah Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
2. Daerah Waspada (Radius 10 Km): Terletak melingkar dari Gunung Sorik Marapi dengan radius 10 km, daerah yang termasuk adalah Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Selatan dan kecamatan Tambangan.

Sebagai upaya mitigasi perlu dilakukan hal-hal seperti pemantauan dan pengamatan aktivitas gunung berapi secara rutin, membuat peta kawasan rawan bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, menyiapkan jalur evakuasi, melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat, membangun infrastruktur pengamanan, serta melakukan penelitian dan pengembangan.

#### **4. Kawasan Rawan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah**

Wilayah Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di Pulau Sumatera yang dilewati patahan besar sumatera atau patahan semangko. Struktur geologi yang terbentuk di Kabupaten Mandailing Natal merupakan patahan aktif yang mempunyai jalur barat laut – tenggara, merupakan bagian dari patahan aktif Renun – Toru. Akibat pergerakan patahan tersebut di beberapa daerah di Kabupaten Mandailing Natal membentuk daerah dataran yang menyerupai cekungan atau dikenal dengan nama Graben, yaitu graben Panyabungan dan graben di sekitar Kotanopan.

Di sebelah barat Sumatera lempeng Samudera Hindia yang terus menunjam di bawah lempeng Asia dengan kecepatan rata-rata 6 – 7 cm/th dapat mengakibatkan terjadinya pelepasan energi baik di zona penunjaman maupun di jalur patahan aktif dan selanjutnya akan menimbulkan guncangan atau gempa bumi. Oleh karena itu daerah – daerah yang dilalui oleh jalur patahan aktif akan sangat rentan sekali terhadap bahaya gempa.

Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Mandailing Natal meliputi seluruh kecamatan dan termasuk dalam zona kerawanan tingkat menengah. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif meliputi sebagian:

1. Kecamatan Siabu;
2. Kecamatan Naga Juang;
3. Kecamatan Huta Bargot;
4. Kecamatan Panyabungan;
5. Kecamatan Panyabungan Barat;
6. Kecamatan Panyabungan Selatan;
7. Kecamatan Puncak Sorik Marapi;

8. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
9. Kecamatan Tambangan;
10. Kecamatan Kotanopan;
11. Kecamatan Muarasipongi;
12. Kecamatan Ulu Pungut.

Mitigasi pada daerah-daerah rawan gempa bumi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: pemetaan daerah patahan aktif, membangun infrastruktur yang tahan bencana, menyiapkan rencana penyelamatan diri, melakukan latihan menghadapi bencana, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

## 5. Kawasan *Buffer* Gelombang Tsunami

Kawasan pantai barat Sumatera secara umum berpotensi terkena bencana tsunami tak terkecuali pantai barat Kabupaten Mandailing Natal yang meliputi Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan dan Kecamatan Sinunukan. Dalam pembagian zona kerentanan tsunami, maka kecamatan- kecamatan tersebut di atas termasuk dalam kawasan pantai barat Sumatera, maka kecamatan tersebut termasuk dalam zona 1, yaitu zona dengan gelombang atau *run up* 6 – 10 m. Gelombang pasang tersebut sangat berpotensi terjadi bila terjadi gempa di laut pantai barat dengan kekuatan > 7 SR dan pada kedalaman dangkal.

Secara umum relief di dataran pantai Kecamatan Muara Batang Gadis cukup landai dengan permukiman penduduk dekat dengan laut, hal ini memungkinkan terkena bahaya tsunami, terutama di sekitar Desa Tabuyung. Di Kecamatan Natal secara umum permukiman penduduk sudah memperhatikan garis sempadan pantai (> 200 m) dari garis pantai, kecuali permukiman di sekitar Desa Bintuas dimana letak permukiman penduduk berada di tepi muara sungai dan sangat dekat dengan garis pantai (< 3 m) dan morfologi dengan relief datar atau relatif sama tinggi antara permukiman dengan garis pantai. Kecamatan Batahan sudah memperlihatkan kawasan sempadan pantai (> 200 m), kecuali permukiman di sekitar muara sungai Batahan yang letaknya sangat dekat dengan pantai dan merupakan permukiman yang padat.

Wilayah yang berpotensi terkena gempa bumi dan tsunami meliputi:

- A. Tinggi: Pada kawasan ini diperkirakan dapat terjadi sepanjang pantai barat Kabupaten Mandailing Natal karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Beberapa wilayah yang beresiko terkena gempa bumi dan gelombang tsunami adalah:
  - a. Kecamatan Muara Batang Gadis, meliputi Desa Tabuyung dan Singkuang;
  - b. Kecamatan Natal meliputi Desa Bintuas dan Kunkun;
  - c. Kecamatan Batahan: air laut naik di muara Sungai Batahan.

B. Sedang: Bencana tsunami dapat pula terjadi di bagian muara sungai menerus ke hulu sampai energi gelombang berhenti. Oleh karena itu daerah yang berpotensi sedang berada pada muara dan sepanjang sempadan sungai.

Sebagai upaya mitigasi pada daerah rawan bencana tsunami perlu dilakukan beberapa hal seperti: (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat: Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda tsunami dan cara evakuasi (2) Pemasangan sistem peringatan dini: membangun sistem peringatan dini tsunami (TEWS) yang memanfaatkan teknologi maju (3) Pembuatan jalur evakuasi: membuat jalur evakuasi yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan papan informasi (4) Pembangunan struktur pelindung: membangun struktur pelindung di sekitar pantai untuk mengurangi dampak tsunami (5) Perencanaan penggunaan lahan: Membatasi pembangunan baru di zona bahaya tsunami (6) Perencanaan pemulihan pasca tsunami: Menyiapkan rencana pemulihan pasca tsunami (7) Pemetaan kawasan rawan tsunami: Membuat pemetaan kawasan rawan tsunami dengan skala yang memadai (8) Pembuatan *green belt* di kawasan pantai.

## **6. Kawasan Erosi Pantai/Abrasi**

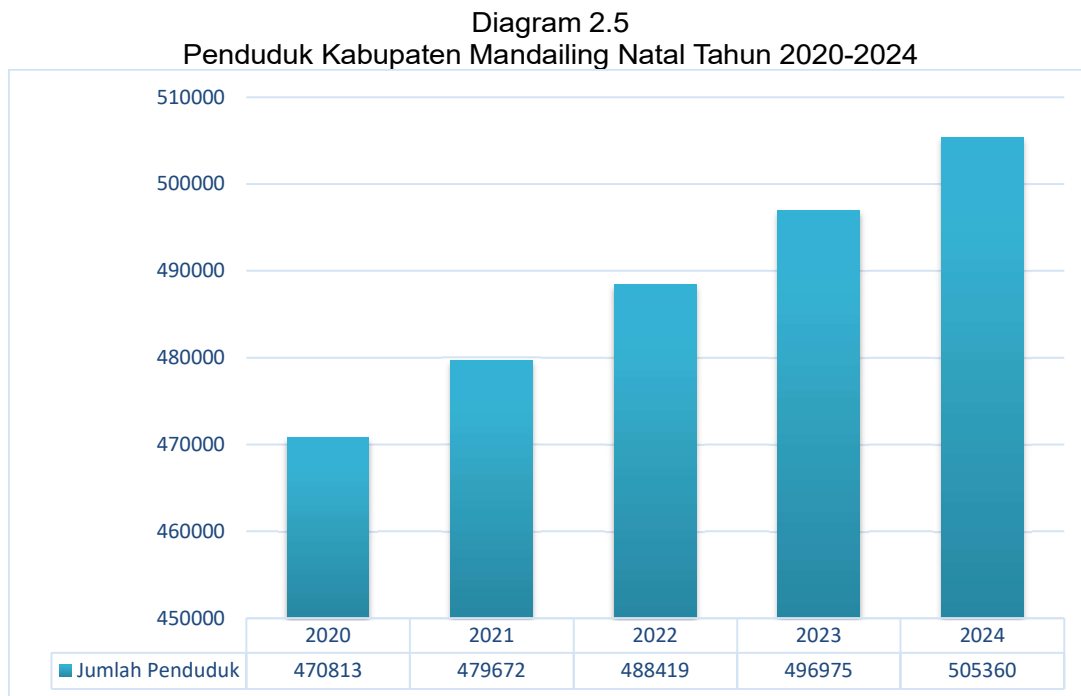
Bencana alam berupa erosi pantai terjadi pada dua (2) musim, yaitu musim barat dan timur dan dapat digolongkan:

- a. Tinggi: Erosi pantai tertinggi terjadi disepanjang pantai bagian utara dan tengah yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.
- b. Sedang: Erosi pantainya terletak pada sepanjang pantai bagian selatan dari mulai Tabuyung ke Selatan. Hal ini terjadi karena secara natural terdapat beberapa daratan yang menjorok membentuk teluk-teluk, yang secara alami merupakan batas sirkulasi sedimen di pantai. Untuk menanggulangi abrasi dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul ataupun penanaman *mangrove*.

### 2.1.7. Demografi

#### A. Jumlah Penduduk

Kondisi kependudukan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dari jumlah penduduk, persentase penduduk menurut tingkat pendidikan, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, distribusi penduduk, serta piramida penduduk. Gambaran ini dapat memberikan pemahaman tentang kelompok sasaran pembangunan yang akan dituju sehingga mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi kependudukan Kabupaten Mandailing Natal dapat dianalisis dengan melihat pada diagram di bawah ini.



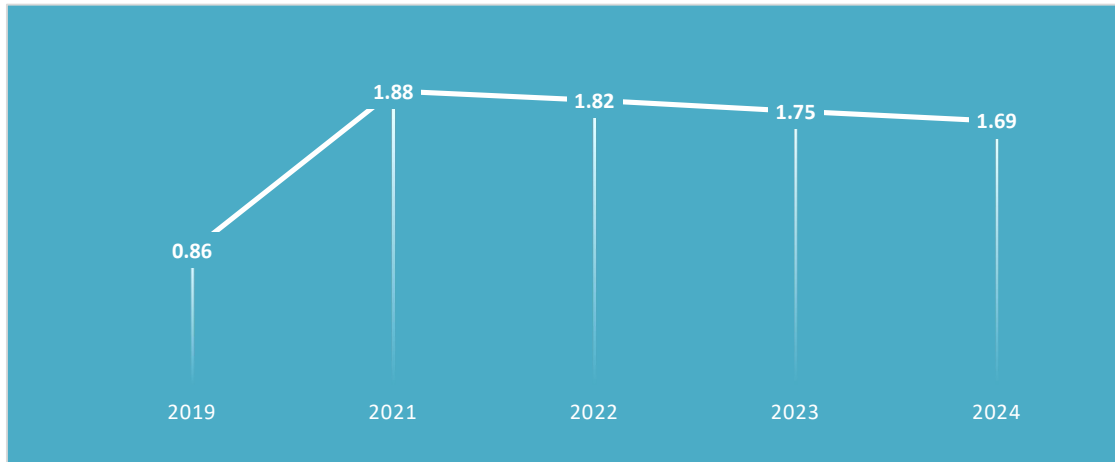
Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 470.813 Jiwa dan mengalami tren meningkat hingga tahun 2024 menjadi 505.360 Jiwa. Pada kurun waktu tersebut, penduduk Kabupaten Mandailing Natal bertambah 34.547 Jiwa. Dengan peningkatan ini, jumlah kebutuhan fasilitas dasar seperti air bersih, kebutuhan hunian, dan lain-lain juga akan meningkat pada tahun 2030.

## B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama tahun 2019-2024 angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) cenderung menurun mulai tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada diagram di bawah ini.

Diagram 2.6  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Penurunan laju pertumbuhan penduduk di atas menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait penurunan jumlah penduduk seperti program keluarga berencana dan upaya pencegahan pernikahan di usia dini.

## C. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Pengelompokan data disesuaikan dengan tujuan tertentu. Misalnya, secara geografis, jenis kelamin, atau umur. Bila dikelompokkan berdasarkan umur, penduduk Mandailing Natal dikelompokkan menjadi kelompok umur belum produktif (0-14 tahun), umur produktif (15-64 tahun), dan umur tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur, ternyata Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 masih didominasi oleh penduduk umur produktif.

Tabel 2.28  
Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2024 (dalam ribu jiwa)

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Total (Jiwa)
0-4	27.25	26.36	53.61
5-9	25.67	24.49	50.16
10-14	24.73	23.7	48.43
15-19	23.75	22.96	46.71

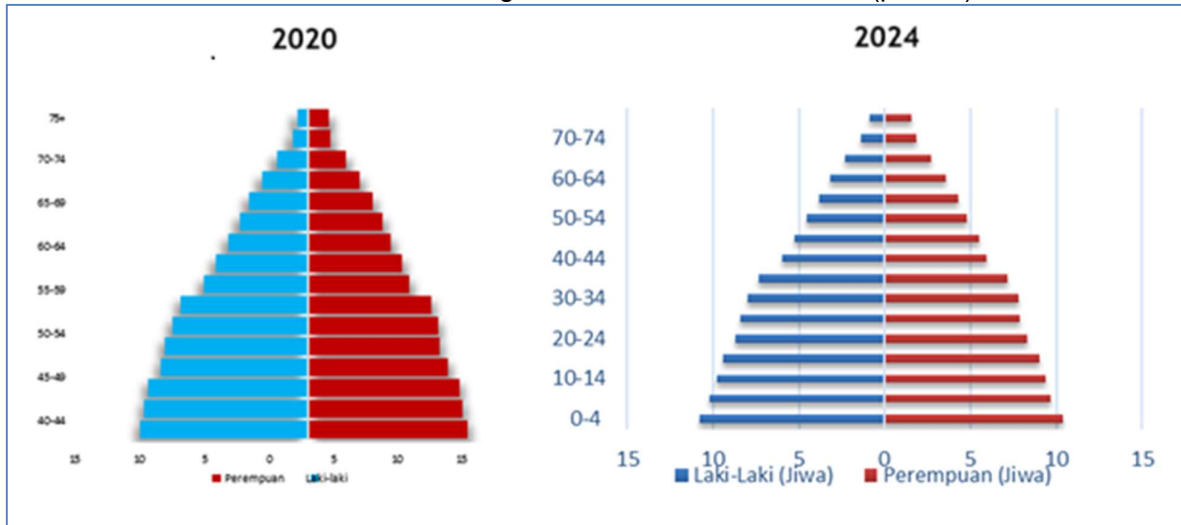
20-24	21.93	21.12	43.04
25-29	21.28	20.01	41.28
30-34	20.12	19.75	39.87
35-39	18.54	18.18	36.71
40-44	15.08	15	30.07
45-49	13.31	13.93	27.24
50-54	11.36	12.17	23.53
55-59	9.58	10.82	20.4
60-64	7.98	9.14	17.11
65-69	5.8	6.95	12.75
70-74	3.52	4.68	8.2
75+	2.2	4.04	6.24
Mandailing Natal	252.07	253.29	505.36

Sumber: Mandailing Natal dalam Angka, 2025

Dari di atas dapat terlihat bahwa Kabupaten Mandailing Natal memiliki kelompok umur belum produktif sebanyak 30,12%, umur produktif sebanyak 64,50% dan 5,38% lainnya tidak produktif. Hal ini mengindikasikan penduduk Kabupaten Mandailing Natal termasuk kelompok penduduk umur muda. Hal ini juga termasuk modal menuju bonus demografi. Persentase penduduk umur produktif yang semakin meningkat memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur produktif perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil dan mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada.

Komposisi penduduk suatu wilayah dapat disajikan dalam bentuk diagram yang berbentuk piramida atau yang kemudian disebut dengan piramida penduduk. Kabupaten Mandailing Natal termasuk daerah yang memiliki struktur penduduk dalam bentuk Piramida *ekspansive* atau piramida penduduk muda yaitu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat.

Diagram 2.7  
Piramida Penduduk Mandailing Natal Tahun 2020 dan 2024 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Bila dilihat pada gambar di atas, pada periode 2020-2024 terjadi fenomena penurunan persentase jumlah penduduk pada kelompok umur 30-34 tahun ke bawah. Menurunnya persentase penduduk umur muda kemungkinan merupakan dampak dari menurunnya tingkat fertilitas. Berdasarkan data sensus penduduk hasil LF SP2020, terdapat penurunan angka kelahiran total (TFR) dari 3,8 pada tahun 2010 menjadi 3,04 pada tahun 2020. Selain itu, angka kematian bayi di Kabupaten Mandailing Natal juga mengalami penurunan yakni sebesar 46 pada tahun 2010 menjadi 25,4 tahun 2020 hasil LF SP2020.

#### D. Kepadatan Penduduk

Dengan luas wilayah sebesar 662.070 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk Mandailing Natal 2024, adalah pada tahun sebanyak 505.360 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 76 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Panyabungan yaitu 95.373 jiwa sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pakantan yaitu 2.250 jiwa. Kecamatan Panyabungan Utara adalah kecamatan dengan penduduk terpadat, yaitu sebesar 371 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Ulu Pungkut adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 16 jiwa per km<sup>2</sup>.

Tabel 2.29  
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan  
Tahun 2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
Batahan	50
Sinunukan	142
Batang Natal	41
Lingga Bayu	155
Ranto Baik	100
Kotanopan	88
Ulu Pungkut	16
Tambangan	69
Lembah Sorik Marapi	316
Puncak Sorik Marapi	169
Muara Sipongi	102
Pakantan	24
Panyabungan	367
Panyabungan Selatan	122
Panyabungan Barat	131
Panyabungan Utara	371
Panyabungan Timur	38
Huta Bargot	89
Natal	39
Muara Batang Gadis	18
Siabu	161
Bukit Malintang	197
Naga Juang	92

Sumber: Mandailing Natal dalam Angka, 2025

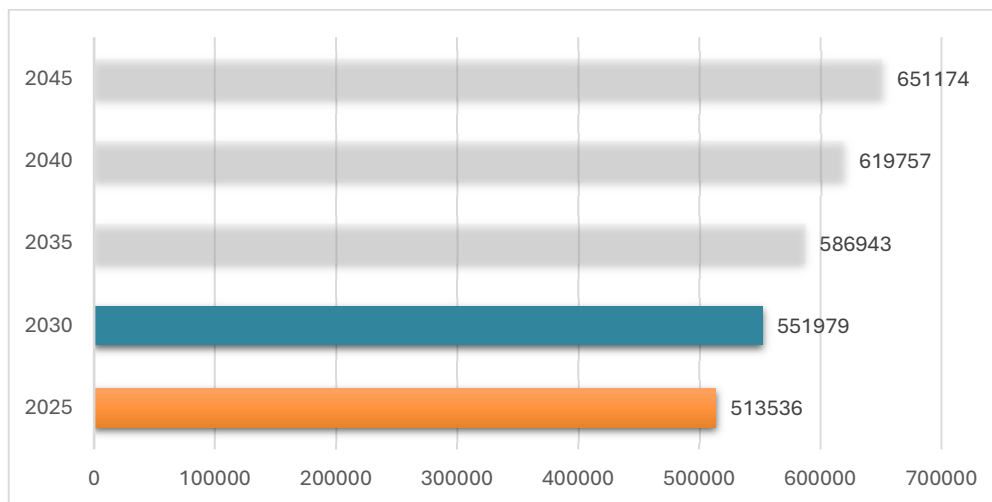
### E. Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang.

Proyeksi penduduk perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi penduduk di perkotaan dan perdesaan. Pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana suatu wilayah. Dari data proyeksi struktur penduduk dan proyeksi kebutuhan tersebut kemudian diharapkan dapat disusun suatu rencana yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dinamika kependudukan. Salah satu target dari perencanaan kebutuhan ini adalah terjadinya pemerataan pembangunan yang dapat menekan ketimpangan dalam mengakses layanan maupun infrastruktur dasar.

Pengkajian terhadap tingkat pertumbuhan penduduk dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan jumlah penduduk per lima tahun sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menentukan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2045. Dengan mengamati karakteristik perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mandailing Natal maka dapat diperkirakan kecenderungan pola perkembangan penduduk secara umum sampai dengan tahun 2045 sebagaimana dapat dilihat pada Diagram berikut:

Diagram 2.8  
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Proyeksi BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2023

Dari diagram di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal diproyeksikan akan mencapai 551.979 Jiwa pada tahun 2030 atau tumbuh 7,5% dari tahun 2025.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dimana rasio jenis kelaminnya pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 100,50. Angka ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2030 nanti, diantara 100 perempuan, terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel 2.30  
 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Menurut Jenis Kelamin  
 Tahun 2030

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk	
		2025	2030
Laki-Laki	247.811	256.215	276.677
Perempuan	249.164	257.321	275.302
Rasio	99,46	99,57	100,50

Sumber: Data Proyeksi BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Kondisi ketidakseimbangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan dampak dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi serta kebutuhan pelayanan publik. Ketika kondisi penduduk laki-laki lebih dominan maka dapat memunculkan kondisi seperti ketidakseimbangan struktur keluarga atau perkawinan, seperti kesulitan menikah karena jumlah perempuan yang lebih sedikit; ketimpangan gender yang semakin besar; keterbatasan partisipasi perempuan dan kurangnya tenaga kerja terampil perempuan.

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat dominasi penduduk laki-laki di masa yang akan datang, pemerintah perlu merancang infrastruktur sosial yang mendukung kebutuhan kelompok laki-laki, seperti pusat pelatihan keterampilan atau fasilitas lainnya. Namun, tetap penting untuk menjaga keseimbangan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dalam perencanaan layanan publik. Pemerintah juga harus memperhatikan hak perempuan dengan melibatkan perempuan dalam sektor pendidikan, bisnis dan politik akan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Selanjutnya perlu diteliti perkembangan penduduk usia produktif pada tahun 2025-2030, sebagai berikut:

Tabel 2.31  
 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2030

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Tahun Proyeksi	
			2025	2030
1	0-4	52.575	55.196	54.360
2	5-9	49.940	49.680	54.909
3	10-14	48.350	48.500	49.570
4	15-19	45.960	47.340	48.400
5	20-24	42.660	43.550	47.080
6	25-29	41.070	41.500	43.030

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Tahun Proyeksi	
			2025	2030
7	30-34	39.710	40.020	40.910
8	35-39	35.350	37.800	39.500
9	40-44	29.520	30.890	37.200
10	45-49	26.630	27.780	30.260
11	50-54	23.030	24.070	27.000
12	55-59	20.030	20.790	23.070
13	60-64	16.580	17.590	19.440
14	65-69	12.220	13.280	15.820
15	70-74	7.580	8.770	11.160
16	>75	5.770	6.780	10.270

Sumber: Data Proyeksi BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa proporsi penduduk usia produktif sedikit menurun dari 64,52% pada 2025 menjadi 64,48% pada 2030. Hal ini perlu disikapi dengan mempersiapkan tenaga kerja melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja serta menciptakan iklim ekonomi yang baik sehingga menciptakan lapangan pekerjaan.

#### F. Proyeksi Distribusi Penduduk

Proyeksi distribusi penduduk dalam kurun waktu 2025-2030 di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dari persentase kepadatan penduduk yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32  
Kepadatan Penduduk Wilayah Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2025-2030

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )			
	2020	2025	2030	
Wilayah Pantai Barat				
1	Tapanuli Tengah	166	184	202
2	Padang Lawas Utara	66	73	79
3	Padang Lawas	67	73	79

4	Tapanuli Selatan	50	53	56
5	Mandailing Natal	77	84	90

Sumber: Hasil Proyeksi BPS Sumatera Utara, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 84 Jiwa/Km<sup>2</sup> dan akan terus meningkat sehingga menjadi 90 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2030. Wilayah seperti Panyabungan akan menghadapi peningkatan kebutuhan pada infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air bersih, yang memerlukan perencanaan kapasitas tambahan.

### G. Proyeksi Angka Ketergantungan Penduduk

Proyeksi angka ketergantungan penduduk dalam kurun waktu 2025-2030 dapat dianalisa dari perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Dari tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2030 angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 55,1 %, artinya bahwa di dalam 100 orang penduduk usia produktif terdapat sekitar 55 orang yang tidak produktif.

Tabel 2.33  
Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2030

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Tahun Proyeksi		ANGKA KETERGANTUNGAN	
			2025	2030	2025	2030
1	0-4	52.575	55.196	54.360	55,0	55,1
2	5-9	49.940	49.680	54.909		
3	10-14	48.350	48.500	49.570		
4	15-19	45.960	47.340	48.400		
5	20-24	42.660	43.550	47.080		
6	25-29	41.070	41.500	43.030		
7	30-34	39.710	40.020	40.910		
8	35-39	35.350	37.800	39.500		
9	40-44	29.520	30.890	37.200		
10	45-49	26.630	27.780	30.260		
11	50-54	23.030	24.070	27.000		
12	55-59	20.030	20.790	23.070		
13	60-64	16.580	17.590	19.440		
14	65-69	12.220	13.280	15.820		
15	70-74	7.580	8.770	11.160		
16	>75	5.770	6.780	10.270		

Sumber: Hasil Proyeksi BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan usia produktif yaitu investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Dari sisi layanan dasar, maka pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung program kesejahteraan yang mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat pertambahan usia harapan hidup penduduk. Terkait kemiskinan yang timbul maka perlu adanya pengentasan program kemiskinan dan ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal pengendalian penduduk, perlu menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan memastikan bahwa jumlah kelahiran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Fokus utama rencana aksi dalam memanfaatkan kondisi ini adalah investasi pada sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan dan akses teknologi agar tenaga kerja mampu bersaing di pasar global. Pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja dengan mengembangkan sektor industri, teknologi dan ekonomi kreatif serta memperkuat dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, reformasi kebijakan ekonomi diperlukan untuk memperkuat inklusi keuangan, mendukung wirausaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Di sisi kesehatan, penguatan layanan kesehatan dasar penting untuk menjaga produktivitas tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga harus diprioritaskan untuk mendukung mobilitas dan urbanisasi yang seimbang. Semua langkah ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat guna memastikan bonus demografi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **H. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana**

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana dalam perencanaan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik tentunya melalui proses yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar berbagai pemangku kepentingan. Sarana dan prasarana yang baik dapat berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

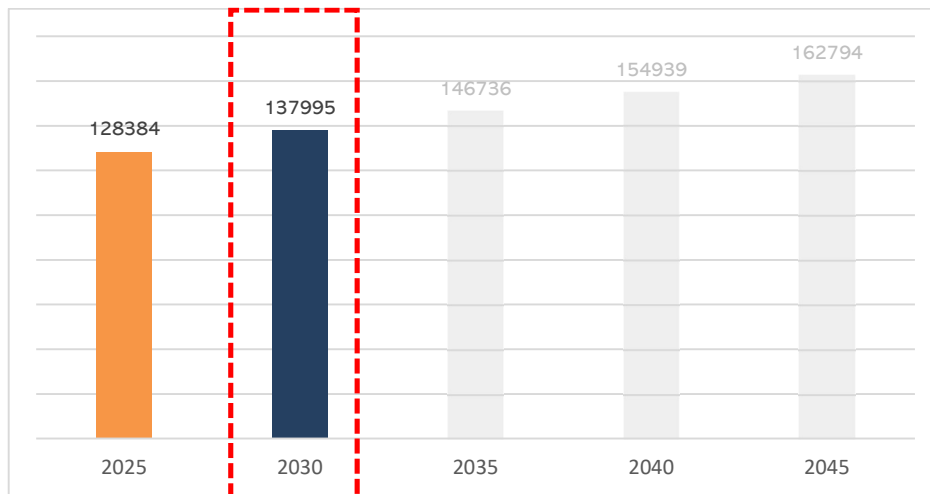
Kebutuhan sarana dalam pembangunan dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis proyek pembangunan, tujuan, dan konteks geografis. Disajikannya identifikasi kebutuhan Sarana dan Prasarana tentunya juga mempertimbangkan kondisi di Kabupaten Mandailing Natal dan isu global serta nasional yang memiliki pengaruh pada proyeksi

kedepannya sehingga disampaikan bahwa proyeksi kebutuhan sarana prasarana memuat antara lain Kebutuhan Hunian, Air Baku dan Air Minum, Energi/Kelistrikan, Pengelolaan Persampahan, Infrastruktur Pendidikan, dan Infrastruktur Kesehatan. Hal ini juga memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan seiring berjalannya waktu untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

### 1. Proyeksi Kebutuhan Hunian

Dalam menghitung kebutuhan rumah, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu data demografi dan data *backlog*. Data demografi berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk dan asumsi jumlah kepala keluarga yang menghuni tiap-tiap rumah. Sementara itu, data *backlog* dihitung dengan mengurangi jumlah rumah yang sudah ada dari jumlah kebutuhan rumah. Dalam menghitung kebutuhan rumah penting untuk mempertimbangkan asumsi yang digunakan dan data yang akurat agar hasil perhitungan dapat menjadi dasar yang baik dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dengan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 4 (empat) jiwa maka proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025 adalah 128.384 dengan jumlah penduduk 513.536 sedangkan pada tahun 2030 kebutuhan rumah diperkirakan sebanyak 137.995 unit.

Diagram 2.9  
Proyeksi Kebutuhan Hunian Tahun 2025-2030



Sumber: Hasil Analisa, 2025

Lebih lanjut, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk per Kecamatan, wilayah perkotaan menunjukkan kebutuhan hunian lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan, sehingga pembangunan hunian baru perlu difokuskan pada area dengan pertumbuhan penduduk terbesar, seperti Kecamatan Panyabungan, Siabu dan Natal.

## 2. Proyeksi Kebutuhan Air Baku dan Air Minum

Proyeksi kebutuhan Air Baku/Air minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk, dan pengklasifikasian jenis kebutuhan. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Kebutuhan non-domestik diasumsikan 20 persen dari kebutuhan domestik. Proyeksi kebutuhan air total merupakan penjumlahan kebutuhan air domestik dan non domestik ditambah sejumlah air untuk kehilangan yang tidak dapat ditanggulangi baik secara teknis maupun ekonomis.

Dengan asumsi kebutuhan domestik adalah 20L/orang/hari, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan Air Baku dan Air Minum di Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan Air Baku dan Air Minum di Mandailing Natal adalah 143 liter/detik atau 12.324.864 liter/hari. Sedangkan pada tahun 2030, proyeksi kebutuhan Air Baku dan Air Minum 153 Liter/detik atau 13.247.496 Liter/Hari.

Tabel 2.34  
Proyeksi Kebutuhan Air Baku dan Air Minum Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air Baku dan Air Minum Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Air Baku dan Air Minum Non Domestik (Liter/Hari)	Total (Liter/Hari)	Proyeksi Kebutuhan Air Baku dan Air Minum (liter/detik)
2025	513.536	10.270.720	2.054.144	12.324.864	143
2030	551.979	11.039.580	2.207.916	13.247.496	153

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kapasitas distribusi air bersih pada tahun 2023 hanya memenuhi 78,93% kebutuhan domestik di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga diperlukan peningkatan jaringan distribusi sebesar 21,07% hingga 2030 untuk mencapai pemenuhan kebutuhan penuh.

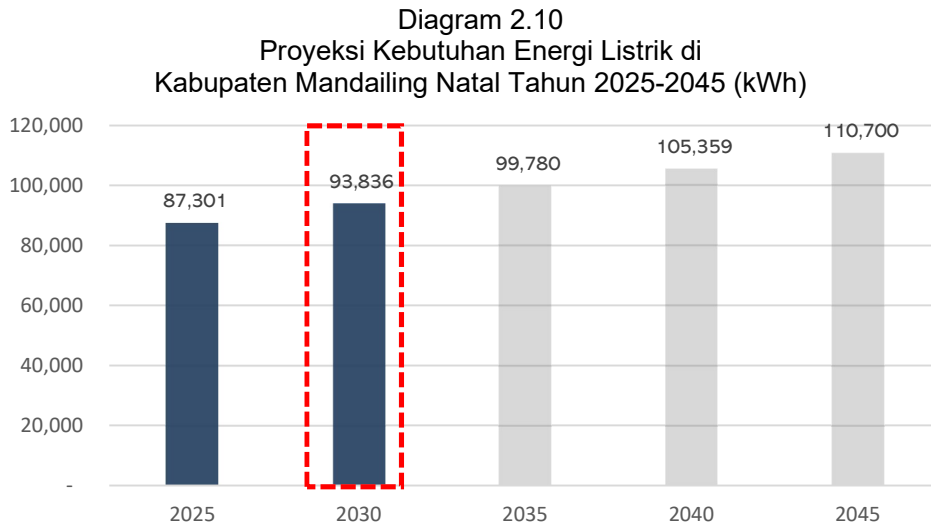
Untuk memastikan ketersediaan suplai air minum dibutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat meminimalisir terjadinya krisis air di masa mendatang seperti pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan dan terintegrasi, konservasi lahan resapan air hujan, peningkatan pembangunan infrastruktur pengolahan air, penyediaan infrastruktur penampung air hujan serta pengelolaan drainase yang efisien. Disamping itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan air secara bijak juga harus ditingkatkan untuk menjaga cukupnya ketersediaan air di masa yang akan datang.

Tuntutan penyelenggaraan SPAM dimasa depan sebagaimana dimatkan dalam SDGs yang telah diinternalisasi kedalam dokumen RPJPN dan RPJMN yakni air yang dikonsumsi masyarakat adalah air minum aman yang memiliki prinsip pemenuhan kebutuhan air minum 4K yakni: Kuantitas (sesuai dengan standar kebutuhan air minum); Kualitas (sesuai dengan standar kesehatan), Kontinuitas (mencukupi kebutuhan air selama 24 jam) dan Keterjangkauan (mudah diakses dengan biaya yang terjangkau).

### 3. Proyeksi Kebutuhan Energi / Kelistrikan

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat. Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita.

Kebutuhan konsumsi listrik per 5 tahun sampai dengan tahun 2030 dapat dihitung menggunakan proyeksi kebutuhan energi listrik dengan menggunakan asumsi standar kebijakan penyediaan listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2013-2022. Dengan asumsi kebutuhan domestik adalah 170 watt/jiwa,



Sumber: Hasil Analisis, 2025

berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan energi listrik adalah 87.301 kWh sedangkan pada tahun 2030, proyeksi kebutuhan energi listrik diperkirakan sebesar 93.836 kWh. Pada tahun 2023 sebanyak 97,76% rumah tangga sudah menggunakan sumber penerangan listrik PLN. Beberapa wilayah pedesaan menunjukkan gap belum memperoleh akses listrik. Perluasan jaringan listrik, instalasi panel surya, dan PLTMH di daerah terpencil diusulkan untuk mengatasi gap ini.

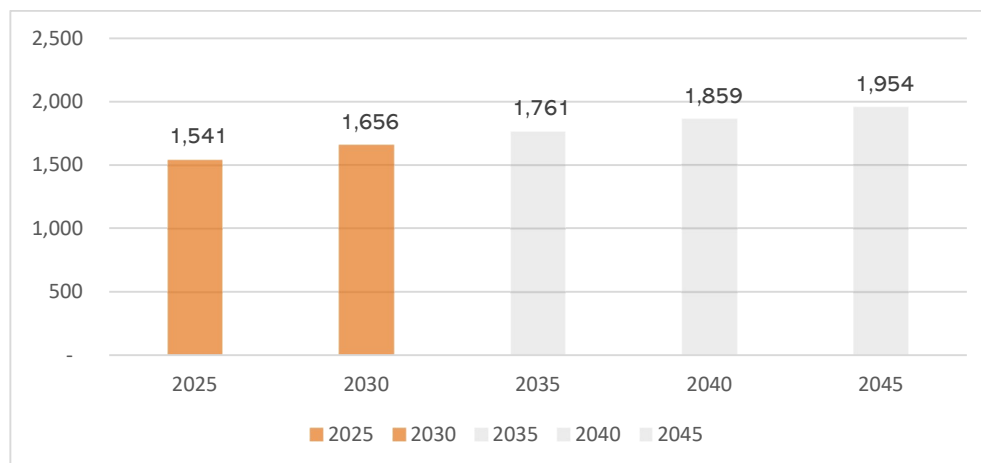
#### 4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Paradigma pengelolaan sampah sebelumnya banyak bertumpu pada konsep lama/konvensional yang bersifat “kumpul–angkut–buang” yang bertumpu pada pendekatan penanganan akhir. Paradigma baru berkembang menjadi “kumpul – pilah – olah – angkut – buang” yang memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah sangat minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan/Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS). Dalam paradigma ini, sampah yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Standar kebutuhan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) per-jumlah penduduk sesuai dengan SNI 03-1733-2004 adalah 1 (satu) unit TPA untuk lebih dari 480.000 penduduk. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2025-2030 dibutuhkan setidaknya 2 lokasi tempat pembuangan akhir sampah.

Dengan asumsi timbulan sampah domestik sebesar 3 Liter/orang/hari, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk maka dilakukan perhitungan proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

Diagram 2.11  
Proyeksi Timbulan Sampah per Hari di Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2030



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pada tahun 2025 proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Mandailing Natal diproyeksi sebanyak 1.541 m<sup>3</sup>/hari dengan jumlah penduduk sebesar 513.536 jiwa. Sedangkan pada tahun 2030, proyeksi timbulan sampah meningkat menjadi 1.656 m<sup>3</sup>/hari seiring peningkatan jumlah penduduk.

Penentuan banyaknya prasarana persampahan berupa TPS/TPA berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang tata cara Teknik operasional pengolahan sampah perkotaan yaitu 2.500 jiwa membutuhkan 1 armada berupa gerobak sampah/bak sampah kecil, 30.000 jiwa membutuhkan 1 armada berupa gerobak sampah/bak sampah besar, 120.000 jiwa membutuhkan 1 armada berupa mobil sampah/bak sampah besar, dan 480.000 jiwa membutuhkan 1 armada berupa bak sampah akhir/ tempat daur ulang sampah, sehingga kebutuhan armada per Wilayah Pengembangan di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35  
Proyeksi Kebutuhan Armada Persampahan  
di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2030

Tahun	Gerobak Sampah/Bak Sampah Kecil	Gerobak Sampah/Bak Sampah Besar	Mobil Sampah/Bak Sampah Besar	Bak Sampah Akhir/Tempat Daur Ulang Sampah
2025	205	17	4	2
2030	221	18	5	2

Sumber: Hasil Analisis, 2025

## 5. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Proyeksi kebutuhan pendidikan dilakukan dengan berpedoman Permendikburistek No. 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Perhitungan dilakukan dengan membagi prediksi jumlah penduduk usia sekolah di masing-masing satuan pendidikan yang dibagi dengan standar jumlah siswa per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan.

Untuk menganalisa proyeksi kebutuhan sarana prasarana di Kabupaten Mandailing Natal maka dibutuhkan proyeksi jumlah penduduk usia sekolah, sebagai berikut:

Tabel 2.36  
 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah  
 Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Jumlah penduduk (jiwa)		
	2023	2025	2030
7-12 tahun	58.986	58.653	62.601
13-15 tahun	28.531	28.949	29.151
16-18 tahun	27.619	28.524	29.059

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Kelompok Umur 7-12 digunakan untuk menghitung proyeksi jumlah sarana pendidikan dasar sedangkan usia 13-15 digunakan untuk proyeksi sarana Pendidikan menengah.

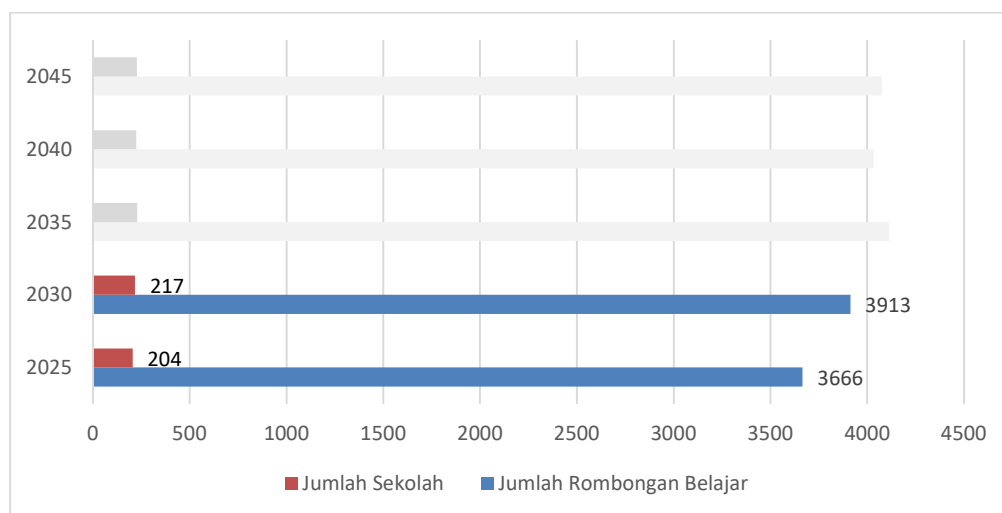
### Sekolah Dasar/MI

Perhitungan jumlah fasilitas SD/MI di Kabupaten Mandailing Natal hingga tahun 2030 didasarkan pada, asumsi:

- Proyeksi penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Mandailing Natal yaitu 58.653 orang di tahun 2025 hingga 62.601 orang di tahun 2030
- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SD/MI ialah sebanyak 16 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan Pendidikan ialah sebanyak 18 rombongan belajar.

Perhitungan kebutuhan SD/MI di Kabupaten Mandailing Natal ditampilkan pada diagram berikut:

Diagram 2.12  
 Proyeksi Kebutuhan SD/MI di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2030



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan diagram tersebut, kebutuhan SD/MI di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025 sebanyak 204 unit dan meningkat menjadi 217 unit pada tahun 2030.

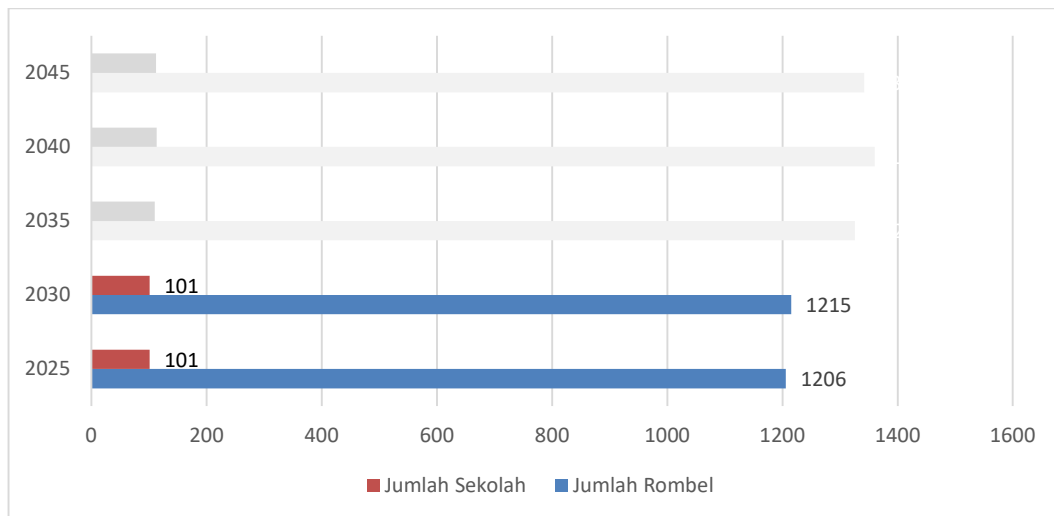
### **Sekolah Menengah Pertama/Mts**

Perhitungan jumlah fasilitas SMP/MTs di Kabupaten Mandailing Natal hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi:

- Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SMP/MTs (13-15 tahun)
- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SMP/MTs ialah sebanyak 24 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan Pendidikan ialah sebanyak 12 rombongan belajar.

Perhitungan kebutuhan SMP/MTs di Kabupaten Mandailing Natal ditampilkan pada diagram berikut:

Diagram 2.13  
Proyeksi Kebutuhan SMP/Mts di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2030



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan diagram tersebut, kebutuhan SMP/MTs di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025 dan 2030 sebanyak 101 unit.

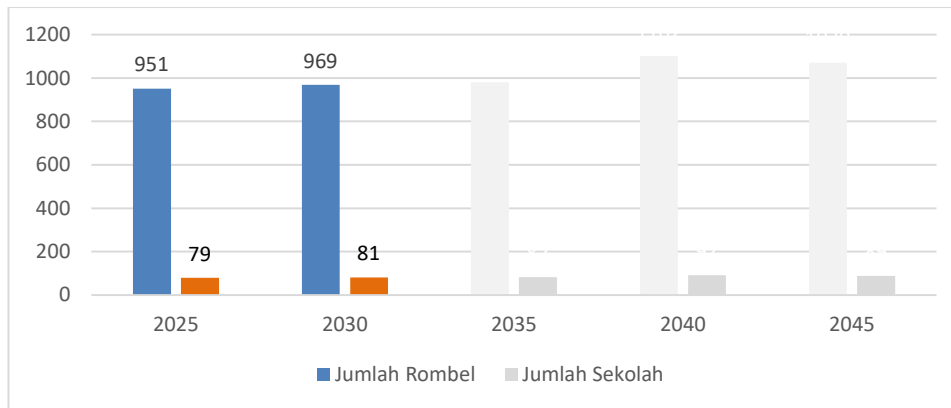
### **Sekolah Menengah Atas/MA**

Perhitungan jumlah fasilitas SMA/MA di Kabupaten Mandailing Natal hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi:

- Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SMA/MA (13-15 tahun)
- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SMA/MA ialah sebanyak 30 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan Pendidikan ialah sebanyak 12 rombongan belajar.

Perhitungan kebutuhan SMA/SMK/MA di Kabupaten Mandailing Natal ditampilkan pada diagram berikut:

Diagram 2.14  
Proyeksi Kebutuhan SMA/SMK/MA di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2030



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan diagram tersebut, kebutuhan SMA/SMK/MA di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025 sebanyak 79 unit dan meningkat menjadi 81 unit pada tahun 2045.

## 6. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Perhitungan dilakukan dengan membagi proyeksi jumlah penduduk secara dengan standar jumlah penduduk pendukung di setiap jenis sarana. Perhitungan kebutuhan dilakukan hanya untuk sarana puskesmas dan puskesmas pembantu Puskesmas/Balai Pengobatan Perhitungan jumlah puskesmas/balai pengobatan di Kabupaten Mandailing Natal hingga tahun 2030 didasarkan pada, asumsi bahwa setiap 1 unit Rumah Sakit melayani 100.000 jiwa penduduk dan puskesmas melayani sejumlah 30.000 jiwa penduduk dan 1 unit Apotek melayani sejumlah 8.333 jiwa. Perhitungan fasilitas kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal hingga tahun 2045 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.37  
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk	Proyeksi Kebutuhan RS	Proyeksi Kebutuhan Puskesmas	Proyeksi Kebutuhan Apotek	Proyeksi Kebutuhan Klinik
2025	513.536	5	17	62	32
2030	551.979	6	18	66	34

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, setidaknya dibutuhkan 1 unit Rumah Sakit Baru pada tahun 2025 dan 2 unit Rumah Sakit Baru pada tahun 2030. Selain itu jumlah puskesmas di Kabupaten Mandailing Natal telah melampaui jumlah minimal. Pemerintah Kabupaten

Mandailing Natal diharapkan fokus dalam pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan peningkatan kualitas layanan di Rumah Sakit dan Puskesmas.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

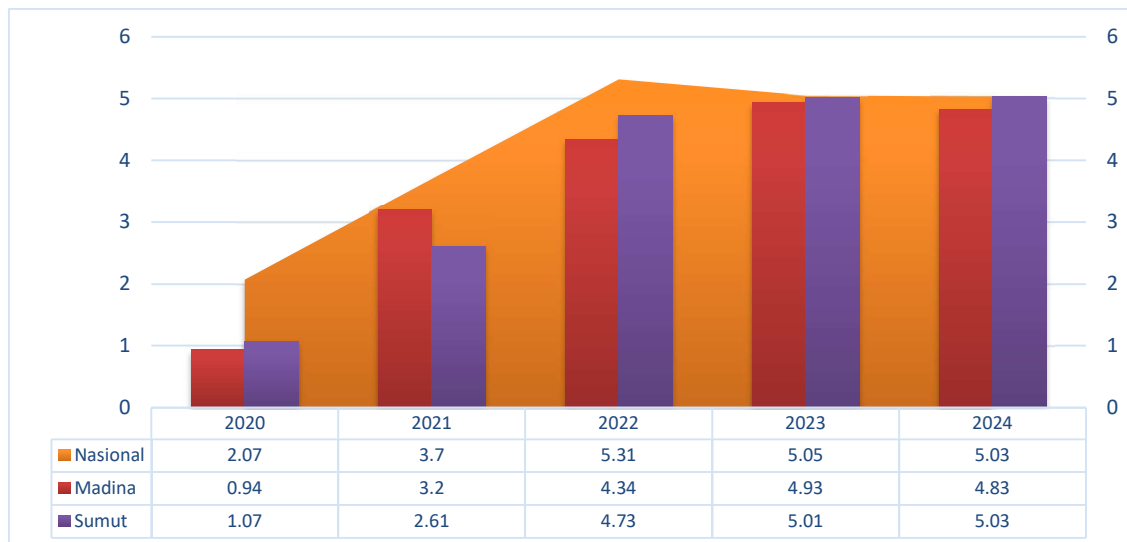
Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan kondisi pencapaian pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Pada bagian ini terdapat dua aspek, yaitu 1) aspek kesejahteraan ekonomi; dan 2) aspek kesejahteraan sosial budaya.

### 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

#### A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya, guna mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi/ PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dalam Diagram berikut:

Diagram 2.15  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025.

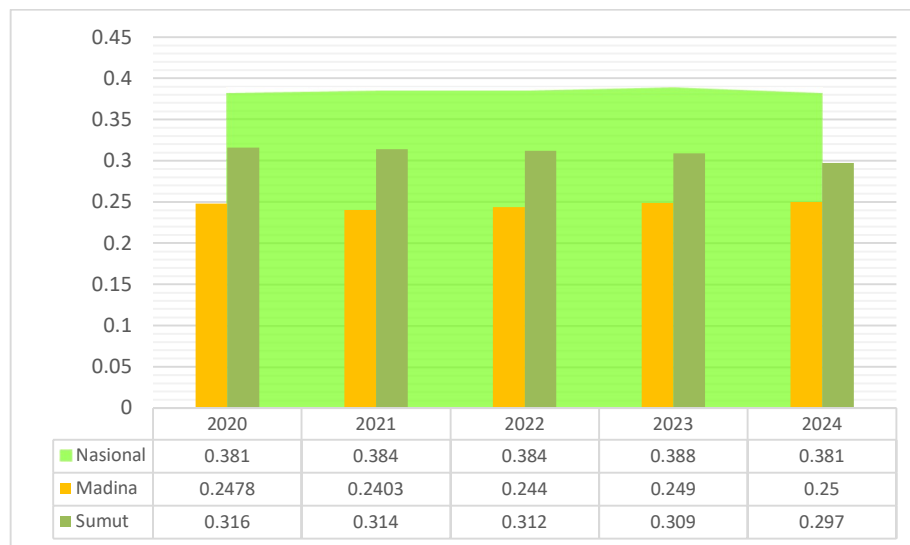
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal mulai tahun 2020-2023 mengalami peningkatan dari 0,94% pada tahun 2020 menjadi 4,93% pada tahun 2023, namun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 4,83%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal menurun tajam di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal pada 2022 sebesar 4,34%, dan 4,93 pada tahun 2023 menunjukkan pemulihan pasca-pandemi. Namun, sektor

pertanian mengalami pertumbuhan lambat, memerlukan kebijakan diversifikasi komoditas untuk meningkatkan kontribusi ekonomi.

## B. Indeks Gini

*Gini ratio* merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0-1 poin. Semakin tinggi nilai *gini ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Tahun 2020 sampai 2024, *gini ratio* Kabupaten Mandailing Natal selalu lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara dan Nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Kondisi *gini ratio* yang relatif terjaga ini juga dipengaruhi oleh program pengentasan kemiskinan. Untuk menjaga tren positif, diperlukan peningkatan akses keuangan untuk usaha kecil dan mikro.

Diagram 2.16  
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2005-2023



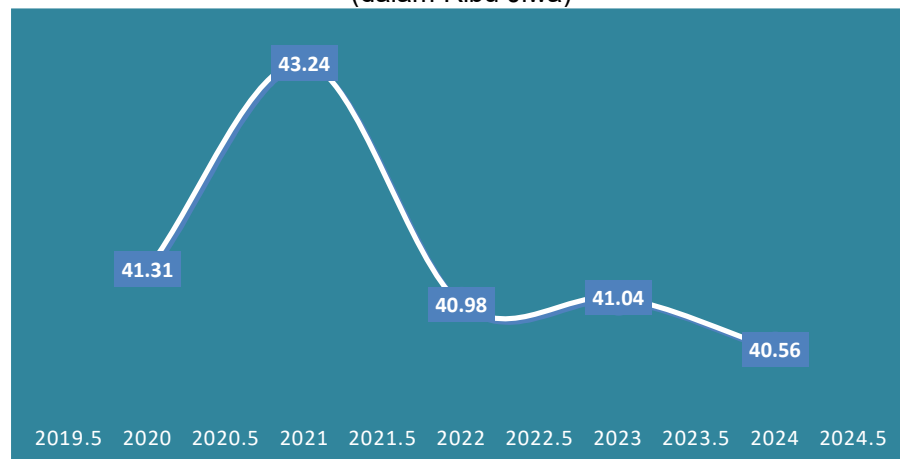
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

## C. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank* tahun 2009. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin berjumlah 41.31 ribu jiwa turun menjadi 40.56 ribu jiwa pada tahun 2024. Selama periode tersebut, jumlah penduduk miskin berkurang 750 jiwa. Pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan tahun 2019 karena adanya pandemi covid-19.

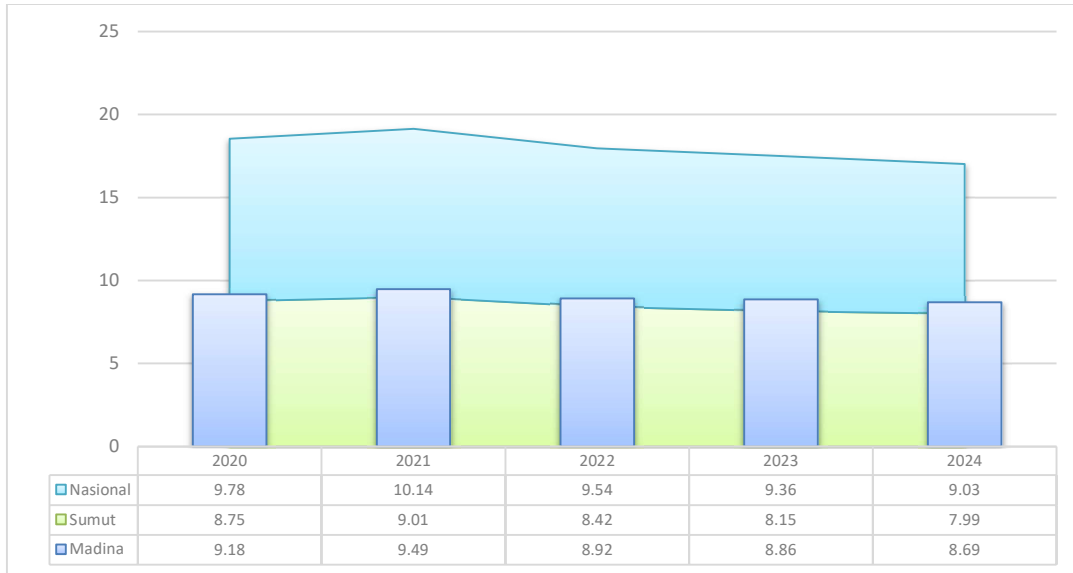
Diagram 2.17  
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024  
(dalam Ribu Jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Selain jumlah penduduk miskin, perlu diuraikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal yang dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Sumatera Utara. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebanyak 9,18%, di atas Provinsi Sumatera Utara yang berada pada angka 8,75%. Pada Tahun 2024, persentase kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal semakin berkurang menjadi 8,69% namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu 7,99%. Persentase kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional.

**Diagram 2.18**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024**

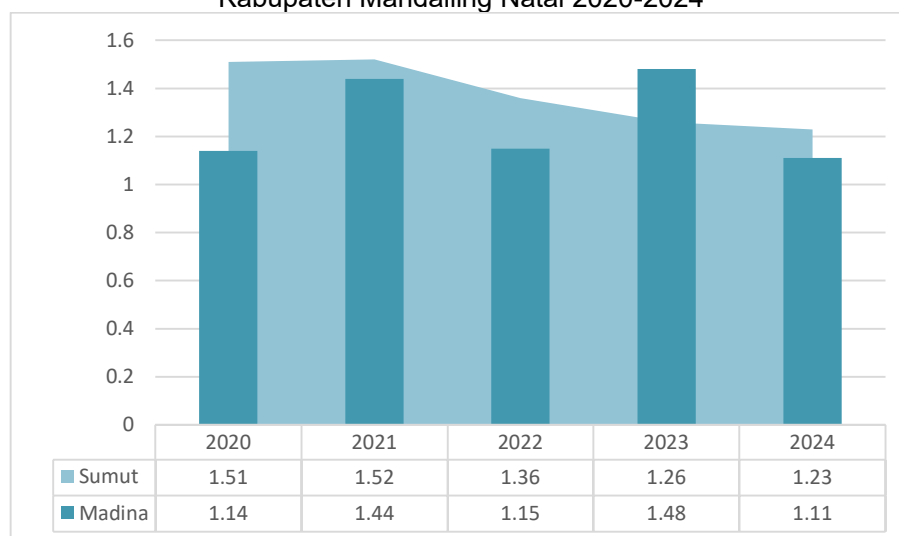


Sumber: BPS Mandailing Natal, 2025

Kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2021 disebabkan melemahnya perekonomian akibat pandemi covid 19. Setelahnya, angka kemiskinan terus menurun terutama karena membaiknya perekonomian, meningkatnya harga komoditas utama, program penanganan kemiskinan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah yang dilakukan secara terkoordinasi, dan lain-lain.

Untuk menggambarkan kondisi Kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal diuraikan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dilihat pada Diagram berikut.

Diagram 2.19  
 Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index - P1*)  
 Kabupaten Mandailing Natal 2020-2024

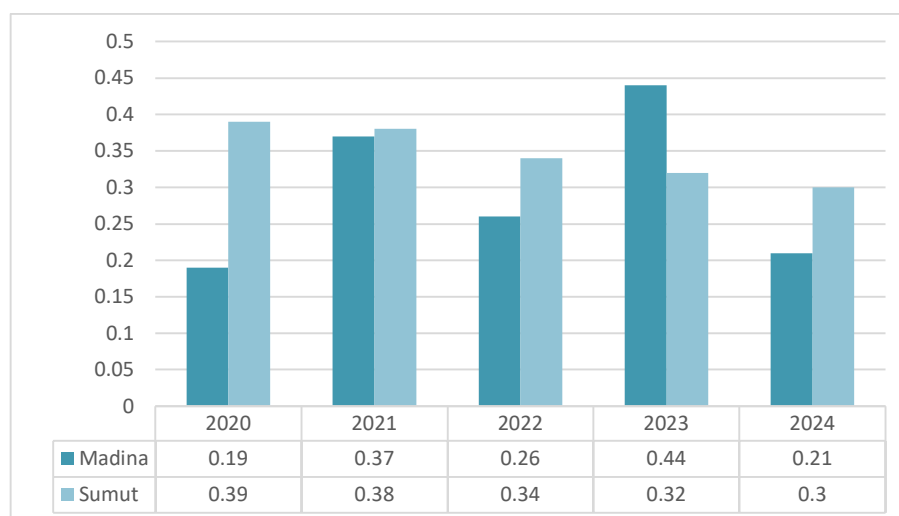


Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Berdasarkan diagram di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal berfluktuasi. Pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal senilai 1,14 poin dan berada di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2023, nilai tersebut menjadi 1,48 poin dan berada di atas Provinsi Sumatera Utara yang memiliki nilai 1,26 poin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah rata-rata penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 2.20  
 Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*)  
 Kabupaten Mandailing Natal 2010-2023



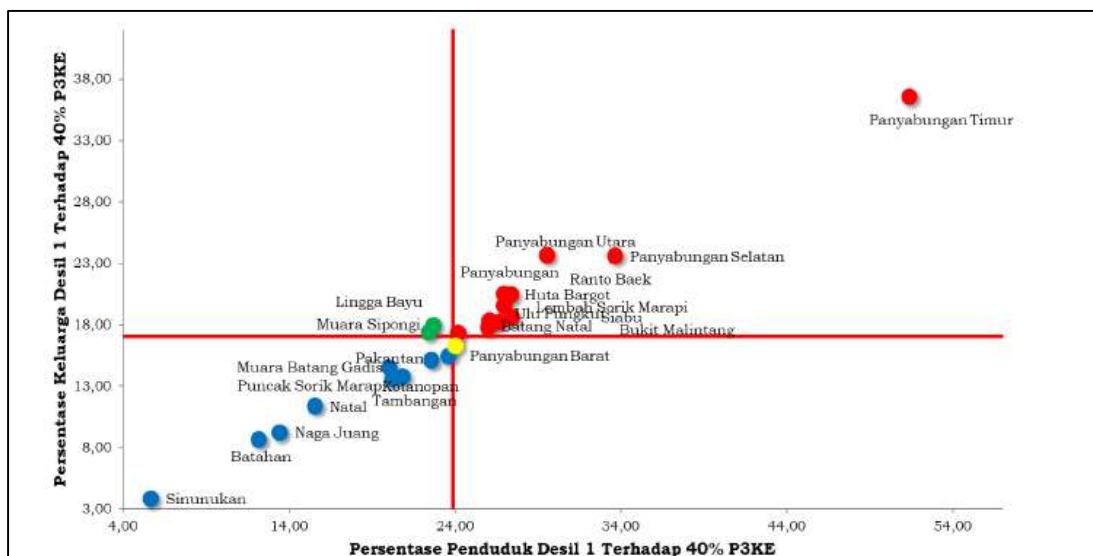
Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Dari data di atas terlihat bahwa, indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 sebesar 0,19 poin dan berada di bawah angka Provinsi Sumatera Utara yaitu 0,39 Poin. Namun, pada tahun 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal meningkat menjadi 0,44 poin dan berada di atas indeks yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara yaitu 0,32 poin. Secara keseluruhan, dalam 5 tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal umumnya berada di bawah indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. Dari data indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal semakin baik dalam mengatasi permasalahan, namun pemerintah tetap harus terus mengurangi penduduk miskin melalui identifikasi permasalahan kemiskinan dan bantuan yang tepat.

Penanganan kemiskinan memerlukan analisis wilayah prioritas untuk menentukan wilayah kecamatan secara tepat sebagai lokus intervensi program dan kegiatan. Hal ini disebabkan oleh beda karakteristik daerah, beda akar masalah, akan berbeda wilayah prioritas dan harus berbeda intervensi yang disiapkan. Analisis wilayah prioritas ini menggunakan pendekatan analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan melalui analisis kuadran ini dapat ditentukan 4 kategori prioritas wilayah sebagai berikut :

- Prioritas 1 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya negatif (warna merah)
- Prioritas 2 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x negatif, namun indikator y positif (warna kuning)
- Prioritas 3 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x positif, namun indikator y negatif (warna hijau)
- Prioritas 4 adalah Kecamatan yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya positif (warna biru). Prioritas ke 4 ini memiliki derajat prioritas yang paling rendah atau disebut dengan wilayah non prioritas atau prioritas keempat dari 1 2 3 dan 4.

Gambar 2.11  
Wilayah Prioritas Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: Rencana Penganggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mandailing Nata 2024-2026  
Dari analisis kuadran wilayah dengan membandingkan antara jumlah persentase penduduk desil 1 terhadap 40% P3KE dengan persentase keluarga desil 1 terhadap 40% P3KE didapatkan prioritas wilayah yang harus ditangani yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas 1	Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Siabu, Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Bukit Malintang
Prioritas 2	Kecamatan Panyabungan Barat
Prioritas 3	Kecamatan Lingga bayu dan Kecamatan Muarasipongi
Prioritas 4	Kecamatan Pakantan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Natal, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Batahan dan Kecamatan Sinunukan

Untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan lapangan kerja yang berkualitas termasuk tenaga kerja yang masih kurang kompeten/produktif, kesenjangan ekonomi, ketidakmerataan akses pendidikan, serta perubahan iklim dan cuaca yang rentan bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat mengambil langkah kebijakan seperti peningkatan program pendidikan dan pelatihan keterampilan, peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan atau dukungan bagi usaha kecil dan

mikro serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal melalui pemanfaatan basis data terpadu yang valid dan *up to date*.

#### D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mandailing Natal memberikan konsekuensi terhadap jumlah penduduk usia kerja. Kondisi penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Mandailing Natal. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 2.21  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mandailing Natal 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2024

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 sampai 2021, TPT Kabupaten Mandailing cenderung menurun dari angka 6,5 menjadi 6,12. Angka tersebut berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Nilai TPT Kabupaten Mandailing Natal terkoreksi pada tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 1,52% dan kembali dapat diturunkan setelah periode tersebut. Peningkatan dan penurunan TPT di Kabupaten Mandailing Natal sangat dipengaruhi beberapa hal seperti harga komoditi perkebunan dan pertanian yang cenderung berfluktuasi. Harga komoditas yang menurun menyebabkan petani tidak lagi mengelola lahan perkebunannya dan mencoba mencari alternatif pekerjaan lain.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka dapat menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial-ekonomi masyarakat. Ketika angkatan kerja berada pada status "menganggur" maka perekonomian menjadi lesu dan daya beli masyarakat akan menurun. Selain itu, angka kriminalitas dapat meningkat seperti pencurian, perampokan dan lain-lain sebagai dampak terdesaknya masyarakat akan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu,

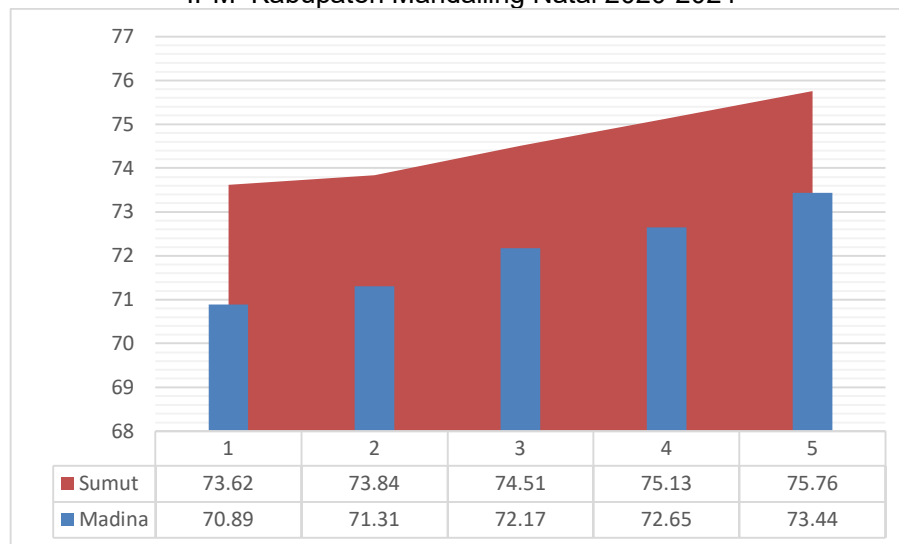
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dituntut untuk memberikan stimulasi pada sektor-sektor usaha yang dapat menyerap angkatan kerja. Pemerintah dapat mengedukasi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Melalui pendidikan keterampilan ini akan menambah keahlian dan kreativitas masyarakat untuk membuka lapangan usaha. Selain itu, sektor industri, pariwisata dan pertanian juga dapat dikuatkan untuk menyerap tenaga kerja secara masif.

### E. Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran IPM dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap perkembangan kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Mandailing Natal. Pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, indikator IPM juga menentukan peringkat atau level Pembangunan suatu wilayah/negara, sehingga menjadikan data strategis sebagai ukuran kinerja Pemerintah.

Pada kurun waktu 2005-2013 perhitungan rata-rata IPM menggunakan metode lama, sedangkan pada periode 2014 sampai saat ini menggunakan metode baru dikarenakan terjadi perubahan pada indikator perhitungan. Berdasarkan Diagram dibawah terlihat peningkatan nilai IPM Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 sampai 2024 yang sudah berada diatas nilai 70 dan masuk pada kategori tinggi.

Diagram 2.22  
IPM Kabupaten Mandailing Natal 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024

Peningkatan IPM di Kabupaten Mandailing Natal didukung oleh peningkatan setiap komponen penyusunnya (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita). Peningkatan IPM merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah karena mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia harus terus ditingkatkan dan dilakukan secara berkelanjutan dengan mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas serta tanpa kemiskinan.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa tantangan dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas seperti belum optimalnya kapasitas pendidikan yang kompeten dan kompetitif. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat menuntut adaptasi yang cepat terhadap keterampilan baru, sementara sebagian besar tenaga kerja belum sepenuhnya siap untuk bertransformasi menuju era digital. Tantangan lainnya adalah kurangnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, sehingga lulusan sering kali tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Masalah seperti kemiskinan, kurangnya fasilitas pendidikan dan minimnya investasi dalam pengembangan SDM juga memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik, termasuk peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan berbasis teknologi dan kebijakan yang mendorong sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

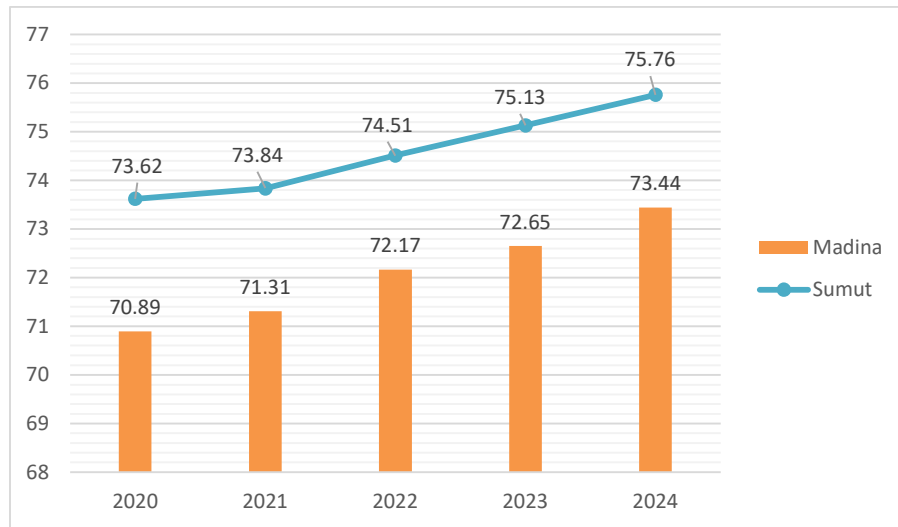
### **2.2.2. Kesehatan untuk Semua**

Kesehatan untuk Semua merupakan komitmen pembangunan yang menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, melalui penguatan sistem kesehatan primer berbasis Puskesmas dan Posyandu, perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan kualitas tenaga medis dan ketersediaan obat esensial di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan dengan fokus pada upaya promotif-preventif untuk menciptakan masyarakat sehat yang produktif dan berdaya saing.

## 1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan indikator pada dimensi kesehatan. Usia Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup menjadi indikator yang menggambarkan capaian dari pembangunan kesehatan. Semakin baik akses masyarakat terhadap pembangunan kesehatan, maka semakin meningkat usia harapan hidup masyarakat. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

Diagram 2.23  
Umur Harapan Hidup Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



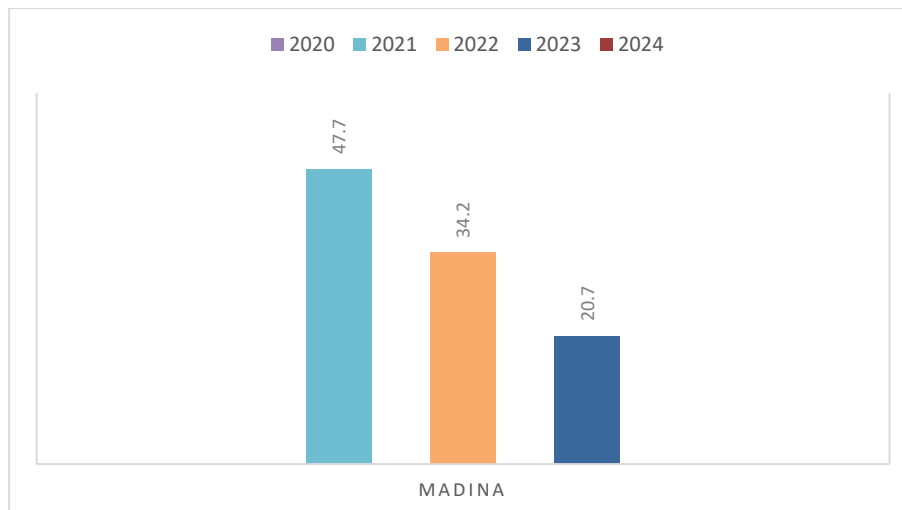
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Usia Harapan Hidup Kabupaten Mandailing Natal meningkat dari 70.89 tahun pada tahun 2020 menjadi 73.44 tahun pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin merasakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal melalui program peningkatan akses dan kualitas Kesehatan, penerapan *Universal Health Coverage (UHC)* yang memastikan seluruh warga memiliki akses pelayanan Kesehatan yang adil dan terjangkau, serta kegiatan lain yang mendukung kesehatan masyarakat. Pemerintah harus menjaga dan berupaya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan agar umur harapan hidup masyarakat semakin meningkat.

## 2. Prevalensi Stunting

Stunting adalah permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu. Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

Diagram2.24  
Prevalensi Stunting Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: SSGI

Prevalensi stunting di Mandailing Natal menurun dari 47.7 persen pada tahun 2021 menjadi 34.3 persen pada tahun 2022, terus menurun pada tahun 2023 menjadi 20.7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Balita yang mengalami stunting di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak meskipun prevalensi stunting terus menurun. sehingga pemerintah perlu memperhatikan akses dan layanan kesehatan kepada masyarakat serta distribusi pangan yang merata agar seluruh masyarakat dapat mengonsumsi gizi yang seimbang. Program pemberian makanan tambahan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan status gizi balita serta kegiatan lain yang mendukung penurunan angka stunting di Kabupaten Mandailing Natal.

### 2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata merupakan upaya sistematis untuk menjamin akses pendidikan inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, melalui pemerataan infrastruktur pendidikan yang memadai, peningkatan kompetensi guru berbasis kurikulum modern, serta penerapan teknologi digital untuk menjangkau daerah terpencil dengan fokus pada pengembangan keterampilan untuk menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

#### A. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Dimensi pendidikan diukur dari 2 indikator, yaitu: 1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh penduduk secara rata-rata; dan 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan kesempatan penduduk secara rata-rata dalam mencapai suatu tingkat pendidikan di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam

menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

**Tabel 2.38**  
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah	8,62	8,63	8,76	8,84	9,11
Harapan Lama Sekolah	13,32	13,61	13,85	13,86	13,87

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Data diatas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan setiap tahun. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 yaitu 8,62 mengalami peningkatan 0,43 tahun pada tahun 2024 sehingga menjadi 9,11. Selain itu, harapan lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 13,32 meningkat menjadi 13,87 pada tahun 2024. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di atas antara lain aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan yang lebih baik dan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Melalui pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi pondasi utama bagi pengembangan Sumber Daya Manusia Mandailing Natal secara menyeluruh.

## **B. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indeks yang mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut:

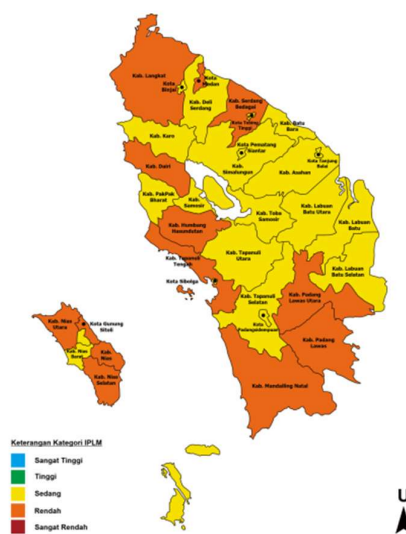
Tabel 2.39  
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024

UPLM	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
UPLM 1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	n.a.	n.a.	0,0014	0,2124	n.a.
UPLM 2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	n.a.	n.a.	0,5048	0,0224	n.a.
UPLM 3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	n.a.	n.a.	0,0000	0,0464	n.a.
UPLM 4	Tingkat Kunjungan Pustaka	n.a.	n.a.	0,3810	0,0673	n.a.
UPLM 5	Perpustakaan Ber-SNP	n.a.	n.a.	1,2494	0,5826	n.a.
UPLM 6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	n.a.	n.a.	0,3471	1,0000	n.a.
UPLM 7	Jumlah Pemustaka	n.a.	n.a.	0,5192 4	1,0000	n.a.
IPLM		n.a.	n.a.	42,90	41,87	n.a.

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi, IPLM Kabupaten Mandailing Natal turun dari 42,90 poin pada tahun 2022 menjadi 41,87 poin pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh penurunan 2 aspek penyusunnya, yaitu UPLM 2 dan UPLM 4, di mana UPLM 2 merupakan pemerataan koleksi perpustakaan yang menurun dari 0,5048 poin pada tahun 2022 menjadi 0,0224 poin pada tahun 2023 dan tingkat kunjungan Pustaka yang turun dari 0,3810 menjadi 0,0673. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan literasi Masyarakat terutama jika ingin bersaing di tingkat provinsi. Perbandingan indeks pembangunan literasi masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

Gambar 2.11  
Peta Capaian IPLM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023



Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

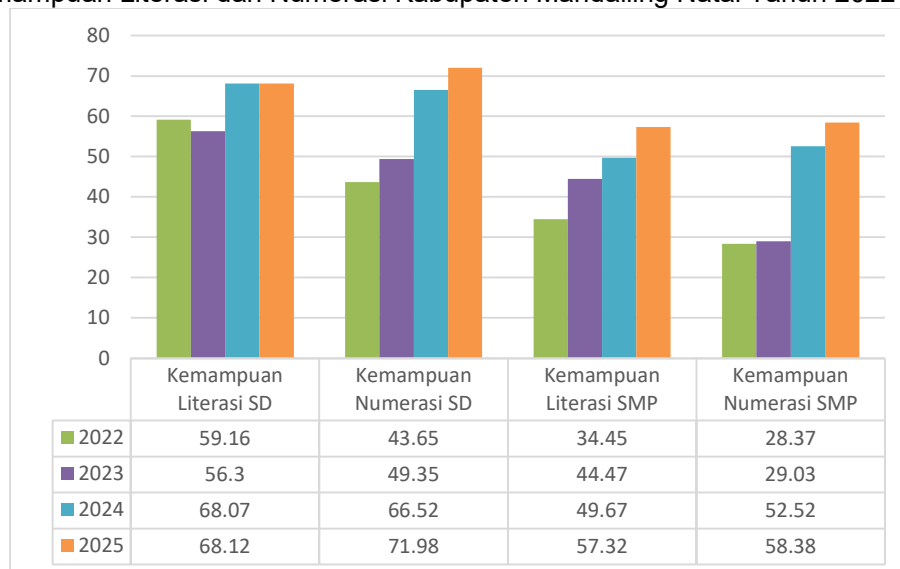
Berdasarkan peta di atas, IPLM Kabupaten Mandailing Natal masih berada pada kriteria rendah sedangkan mayoritas kabupaten/kota lain sudah pada kriteria sedang.

### **C. Angka Literasi dan Numerasi**

Kemampuan literasi mencakup kemampuan untuk membaca, memahami, menganalisis dan menggunakan informasi tertulis dalam berbagai bentuk. Literasi tidak hanya terbatas pada membaca teks, tetapi juga mencakup kemampuan memahami konteks, mengkritisi isi dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah. Sedangkan Kemampuan numerasi adalah keterampilan dalam memahami dan menggunakan angka serta konsep matematika dasar, seperti menghitung, mengukur, memahami data dan memecahkan masalah kuantitatif dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi juga mencakup kemampuan berpikir logis dan analitis yang terkait dengan angka.

Kedua kemampuan ini saling melengkapi dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan keterampilan lainnya, seperti berpikir kritis, berinovasi dan berkomunikasi. Literasi dan numerasi yang baik membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan dunia kerja, serta berkontribusi aktif dalam masyarakat. Adapun pencapaian kemampuan literasi maupun numerasi Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan pada tahun 2023 baik pada jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama kecuali kemampuan literasi SD yang mengalami penurunan 2,86 poin. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dengan upaya konkrit seperti membiasakan membaca sejak dini, menciptakan lingkungan yang mendukung, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas guru dan mengembangkan keterampilan membaca kritis. Kenaikan pada indikator lainnya mengindikasikan semakin baiknya pendidikan masyarakat sehingga kualitas SDM menuju masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang maju dapat tercapai. Secara umum, kemampuan literasi dan numerasi di Kabupaten Mandailing Natal cenderung meningkat.

Diagram 2.22  
Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, 2025

#### 2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif memastikan jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat mencakup berbagai tantangan dan perubahan, termasuk guncangan ekonomi, bencana alam, atau krisis kesehatan seperti pandemi. Sistem ini dirancang untuk memberikan respon cepat dan tepat sasaran kepada kelompok rentan dengan mekanisme yang fleksibel dan berbasis kebutuhan.

##### A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Kondisi tersebut digambarkan melalui cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

Tabel 2.40  
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja	192,603	207,591	211,024	202,696	211,768
Cakupan Kepesertaan:					
Tenaga Kerja Penerima Upah	7,307	12,090	19,392	19,442	21,208
Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah	761	1,324	1,257	7,219	4,986
Tenaga Kerja Jasa Konstruksi	8,242	14,603	9,318	11,611	3,466
Total	16,310	28,017	29,967	38,272	29,660
	<b>8.47</b>	<b>13.50</b>	<b>14.20</b>	<b>18.88</b>	<b>14.01</b>

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dari tahun 2020 sampai 2023 terus mengalami peningkatan dari 8.47% menjadi 18.88%. Pada tahun 2024 turun menjadi 14.01% terutama karena berkurangnya kepesertaan pada tenaga kerja sektor konstruksi seiring berkurangnya kegiatan jasa konstruksi yang bersumber dari anggaran APBN.

## **2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

### **A. Kebudayaan**

Pembangunan kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena kebudayaan mencerminkan identitas dan karakter masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan daerah, kebudayaan menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya saing, kreatif dan memiliki jati diri yang kuat. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal dapat menjadi sumber inspirasi dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi kreatif dan pariwisata, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pembangunan budaya adalah dengan menjaga dan melestarikan benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya di Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2023, cagar budaya yang dilestarikan yaitu Bagas Godang, Patung Sangkolan, dan Batu Tagor. Program pelestarian ini tentu saja memperkuat pembangunan budaya di Kabupaten Mandailing Natal.

Pembangunan budaya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di era modern. Salah satu tantangan utamanya adalah arus globalisasi dan digitalisasi yang sering kali menyebabkan budaya lokal terpinggirkan atau kehilangan relevansinya di tengah maraknya budaya asing. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal sering kali mengakibatkan tradisi, bahasa dan seni budaya mulai terlupakan, terutama di kalangan generasi muda. Di wilayah perkotaan, perubahan sosial dan urbanisasi juga berkontribusi pada hilangnya ruang-ruang budaya tradisional, sementara konflik antar kelompok masyarakat dapat mengancam harmoni budaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu, seperti penguatan pendidikan budaya, digitalisasi warisan budaya dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mewujudkan pembangunan budaya di Kabupaten Mandailing Natal.

## 2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

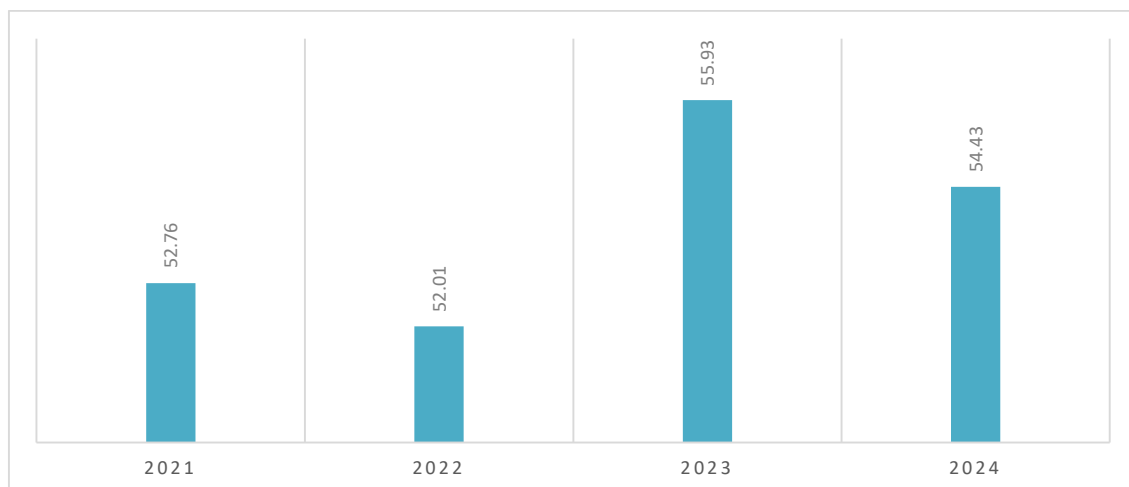
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif merupakan tiga pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Keluarga berkualitas dicirikan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan seluruh anggotanya, serta menjadi fondasi pembentukan generasi unggul. Kesetaraan gender diwujudkan melalui penghapusan diskriminasi, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan pembagian peran yang adil dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan masyarakat inklusif dibangun dengan menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal lainnya, dalam menikmati hasil pembangunan.

### A. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, sehat, harmonis dan berdaya guna, sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan negara. Tujuan utamanya meliputi peningkatan kualitas hidup keluarga melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai moral, budaya dan agama. Selain itu, pembangunan keluarga juga bertujuan untuk mendorong kemandirian keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan, memperkuat ketahanan keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, pembangunan keluarga berfokus pada upaya menciptakan generasi yang berkualitas, produktif dan memiliki kontribusi positif terhadap masyarakat.

Adapun kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Mandailing Natal mengalami fluktuasi di setiap tahunnya sebagaimana ditampilkan pada data berikut:

Diagram 2.25  
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2024



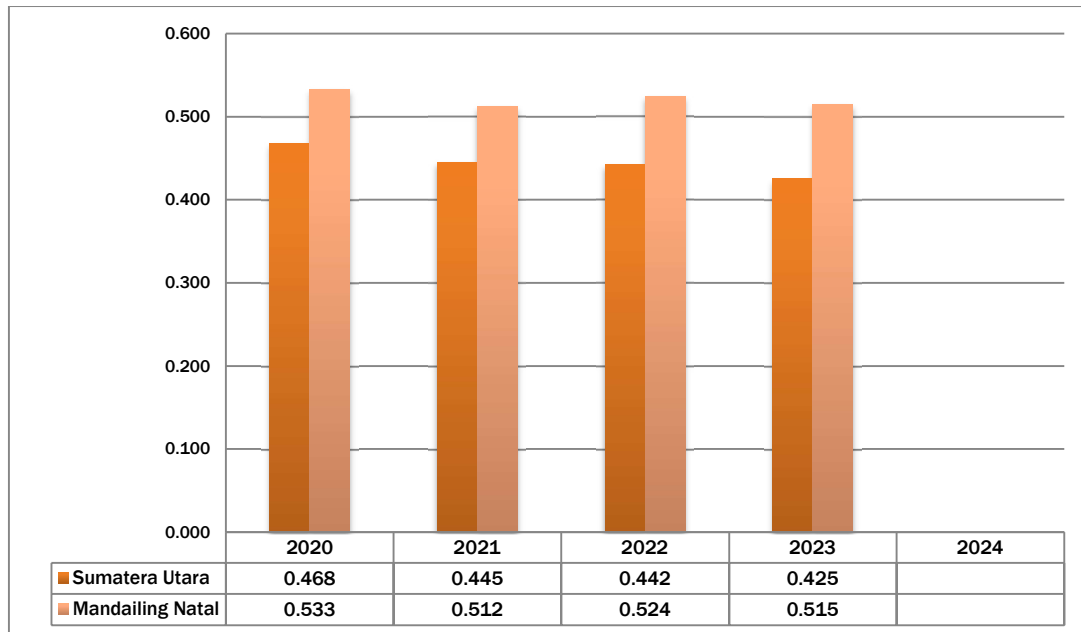
Sumber: BKKBN, 2024

Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Mandailing Natal sebesar 52,76 meningkat menjadi sebesar 55,93 pada tahun 2023, kemudian turun pada angka 54,43 pada tahun 2024. Beberapa tantangan sosial ekonomi dalam mewujudkan keluarga berkualitas seperti ketidakstabilan ekonomi baik gejala nasional maupun daerah, kondisi budaya dan pemahaman keluarga, belum optimalnya akses pendidikan yang berkualitas, hingga akses terhadap kehidupan layak yang menyejahterakan masyarakat.

## B. Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Indeks Ketimpangan Gender menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan serta akses dalam pasar tenaga kerja.

Diagram 2.26  
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Ketimpangan gender di Kabupaten Mandailing Natal selama lima tahun terakhir cukup berfluktuatif. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021, IKG Mandailing Natal berkurang sebesar 0,021 poin, kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,012 poin (0,524) dan pada tahun 2023 turun kembali sebesar 0,009 poin (0,515). Namun secara trenline IKG Mandailing Natal cenderung mengalami penurunan. Menurunnya Indeks

Ketimpangan Gender (IKG) di Mandailing Natal terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Sementara dimensi tenaga kerja terjadi penurunan TPAK laki-laki sebesar 82,36 persen di tahun 2022 menjadi 78,6 persen di tahun 2023 (turun 3,76 persen) dan TPAK perempuan di tahun 2022 sebesar 60,63 persen menjadi 47,93.

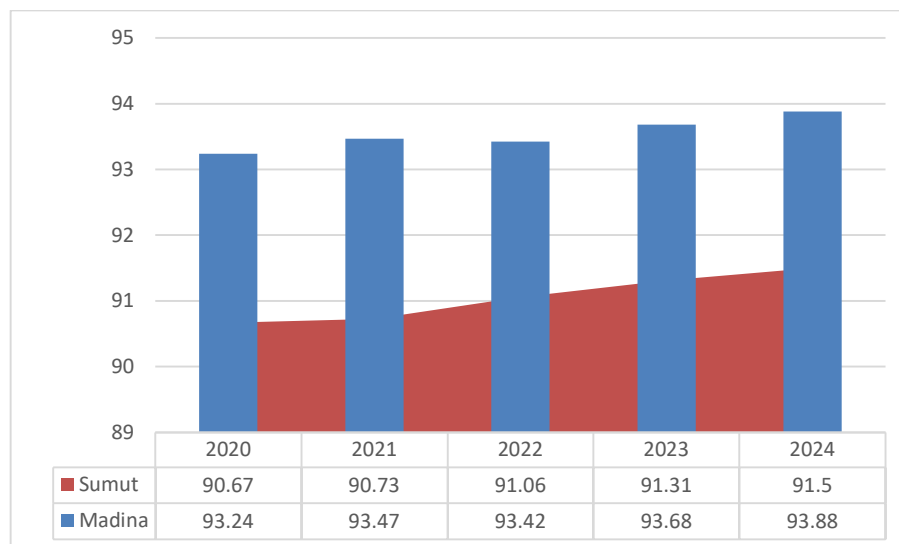
Ketimpangan gender di era modern merupakan isu yang harus mendapat perhatian menuju pembangunan inklusif. Semakin meningkatnya kaum perempuan dalam mengenyam pendidikan tinggi membuka peluang bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong pembangunan sehingga ketimpangan gender semakin minim. Peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Selain itu, perlu upaya sosialisasi dan kampanye untuk menyuarakan pentingnya kesetaraan gender, termasuk dalam penyiapan regulasi pembangunan berbasis gender.

### **C. Indeks Pembangunan Gender**

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan dan partisipasi ekonomi. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Diagram 2.27  
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024



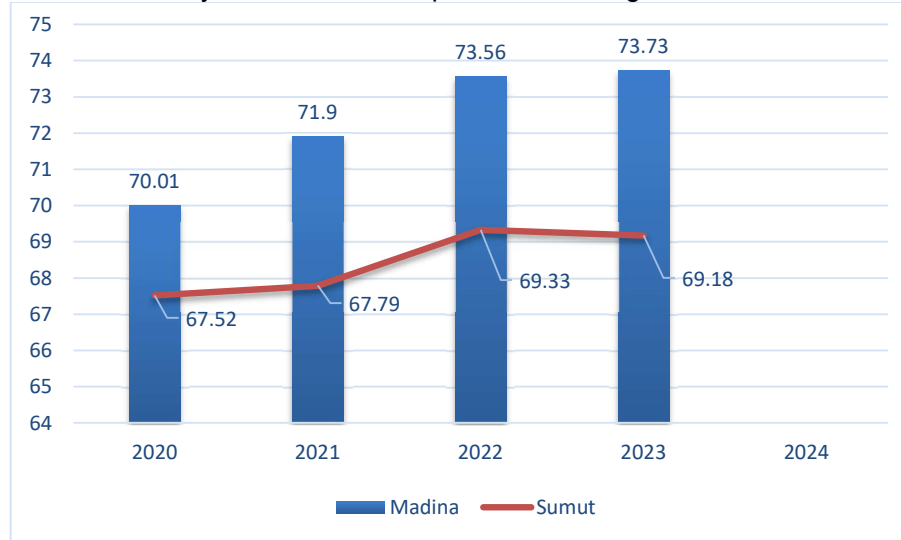
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Diagram di atas menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2010, nilai IPG Kabupaten Mandailing Natal sebesar 91,53 dan terus meningkat menjadi 93,88 pada tahun 2024. Nilai IPG Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020-2024 selalu berada di atas nilai IPG Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan IPG pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan perempuan. Untuk mempertahankan tren positif, perlu peningkatan akses perempuan ke pendidikan tinggi dan sektor formal.

#### D. Indeks Pemberdayaan Gender

Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 2.28  
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 sebesar 70,01 dan terus meningkat pada tahun berikutnya menjadi 73,73 pada tahun 2023. Capaian Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara. Hal ini merupakan capaian positif pemerintah dalam memberdayakan perempuan di Kabupaten Mandailing Natal. Untuk terus mengoptimalkan pembangunan gender, pemerintah perlu mengantisipasi tantangan-tantangan dalam melakukan pembangunan gender, khususnya perempuan yang masih tertinggal dari keberdayaan laki-laki seperti keterbatasan regulasi dan kebijakan mengenai kesetaraan gender, stereotip sosial yang membatasi peran dan peluang bagi kaum perempuan serta akses pendidikan yang tidak merata.

Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dan upaya yang serius dalam rangka penyetaraan gender sehingga pembangunan dan pemberdayaan gender mampu memberikan pembangunan yang inklusif. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

### 2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah menggambarkan tingkat daya saing Kabupaten Mandailing Natal yang diukur dari 7 fokus, yaitu: 1) Daya Saing Sumber Daya Manusia; 2) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi; 3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru; dan 4) Transformasi Digital; 5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 6) Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; dan 7) Stabilitas Ekonomi Makro.

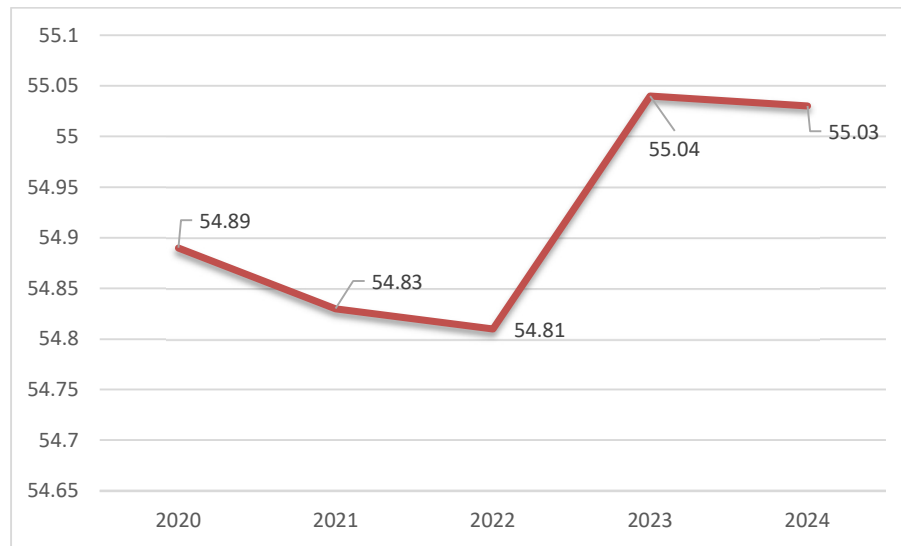
#### 2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing SDM ini akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dimana berfokus pada analisis terkait kompetensi masyarakat Mandailing Natal. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah angka ketergantungan. Angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tergolong non-produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka ketergantungan digunakan untuk mengukur beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung kebutuhan kelompok non-produktif. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin kecil beban ekonomi bagi penduduk usia produktif, yang biasanya mengindikasikan potensi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi tantangan karena penduduk usia produktif harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan populasi non-produktif.

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) dari tahun 2020-2022 semakin menurun walaupun tidak terlalu jauh. Pada tahun 2024 angka beban ketergantungan sebesar 55,03 persen, yang berarti setiap seratus orang umur produktif di Kabupaten Mandailing Natal menanggung 55 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan angka beban ketergantungan sebesar 55,03 persen, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan di Mandailing Natal tergolong dalam ketergantungan sedang, jika dilihat dari kategori angka ketergantungan, yaitu :

- Angka beban tanggungan TINGGI :  $\geq 70$
- Angka beban tanggungan SEDANG : 51 – 69
- Angka beban tanggungan RENDAH :  $\leq 50$

Diagram 2.29  
Rasio Ketergantungan Penduduk Mandailing Natal, 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

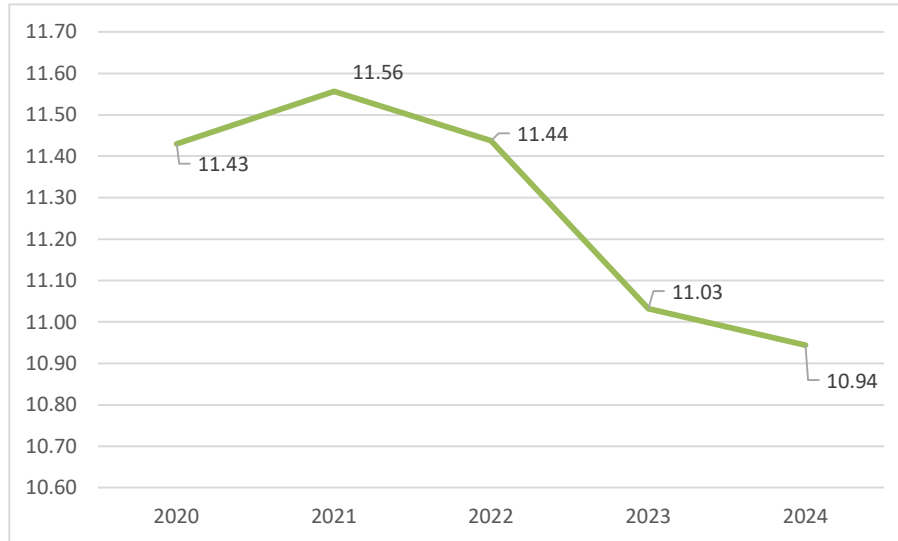
### 2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi;

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi merupakan tiga pilar yang saling terkait dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di mana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi landasan untuk menciptakan inovasi produk, proses, maupun model bisnis yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas ekonomi melalui optimalisasi sumber daya. Implementasinya memerlukan sinergi antara lembaga riset, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem inovasi yang didukung oleh adopsi teknologi terkini, peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi digital, serta kebijakan yang mendukung komersialisasi hasil penelitian, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, memperkuat daya saing, dan menciptakan lapangan kerja.

#### A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan seberapa besar peran industri pengolahan dalam perekonomian daerah. Industri pengolahan diharapkan bertumbuh karena berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan rasio PDRB Industri Pengolahan sebagai berikut:

Diagram 2.30  
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mandailing Natal cenderung menurun pada angka 11,43 persen Tahun 2020, di mana sektor ini mengalami penurunan 0,49 pada tahun 2024 menjadi 10.94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran Industri Pengolahan bagi perekonomian Kabupaten Mandailing Natal masih relatif sedikit. Maka dari itu, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri daerah melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong hilirisasi produk-produk berbasis keunggulan daerah.

## B. Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum menggambarkan kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan minum terhadap perekonomian daerah. Sektor ini dijadikan indikator untuk Sektor Pariwisata karena berkaitan dengan rumah makan, restoran, perhotelan atau penginapan. Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.41  
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Madina (%)	0.68	0.64	0.63	0.64	0.64

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

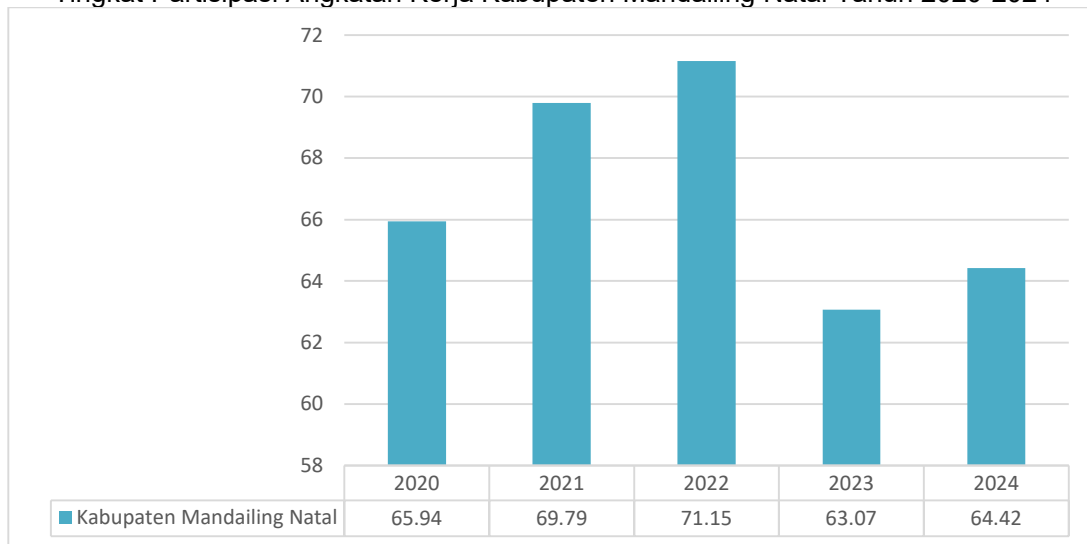
Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan dari 0.68 persen pada tahun 2020 menjadi 0.64 persen pada tahun 2021. Angka tersebut cenderung stagnan pada posisi 0.6%. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik pariwisata daerah yang ditunjukkan dari menurunnya kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap perekonomian perlu ditingkatkan mengingat sektor ini merupakan sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

### C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Mandailing Natal memiliki tren fluktuatif mulai tahun 2020 hingga 2024. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang fluktuatif menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi tidak stabil dan mengindikasikan tingginya kegiatan usaha informal yang memiliki kerentanan terhadap keberlangsungan usaha. Kondisi ini perlu adanya kebijakan stimulus dalam meningkatkan geliat ekonomi masyarakat ke depannya secara stabil dan konsisten.

Diagram 2.31  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Pada tahun 2024 terdapat 44,40% penduduk usia 15 tahun dan lebih yang bekerja di Kabupaten Mandailing Natal bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Lapangan pekerjaan utama terbesar kedua setelah sektor pertanian adalah jasa yakni sebesar 36,94%. Lapangan pekerjaan utama terkecil yakni di sektor manufaktur sebesar 18,67%.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Mandailing Natal bekerja di sektor informal. Untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja di sektor formal, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada. Disamping

itu, pemerintah juga dapat memberikan stimulus ekonomi bagi para investor atau pengusaha agar dapat menyerap tenaga kerja secara lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan keringanan pajak, kemudahan dalam mengurus legalitas usaha, pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta pemberian jaminan perlindungan sosial.

#### D. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan alat ukur yang menilai kapasitas dan kinerja inovasi di tingkat regional dengan mempertimbangkan faktor input (sumber daya inovasi) dan output (hasil inovasi). IID mengintegrasikan tujuh dimensi kunci: (1) kapasitas SDM penelitian, (2) anggaran riset, (3) infrastruktur teknologi, (4) kolaborasi triple helix, (5) output paten/hak kekayaan intelektual, (6) adopsi teknologi industri, dan (7) dampak ekonomi inovasi. Perkembangan IID Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

Tabel 2.42  
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Skor	<b>346</b>	<b>44,76</b>	<b>64,61</b>	<b>45,80</b>	<b>52,65</b>
Kriteria	Kurang Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berupaya melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan daerah. Dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, pencapaian Indeks Inovasi Daerah yang merupakan indikator untuk melihat inovasi daerah dalam pembangunan, Kabupaten Mandailing Natal termasuk pada kategori inovatif. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini cukup memberikan nilai lebih dalam pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat. Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan seperti Inovasi dengan penerapan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kesehatan, inovasi pada tata kelola pemerintahan hingga inovasi pada pelayanan publik. Harapannya, kedepan Kabupaten Mandailing Natal lebih mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang mudah, murah dan ramah.

#### 2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dalam aktivitas ekonomi

melalui dua pendekatan komplementer. Ekonomi Hijau berfokus pada pengurangan jejak ekologis sektor daratan melalui efisiensi energi, energi terbarukan dan praktik industri rendah karbon, sementara Ekonomi Biru mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan melalui pengelolaan perikanan berbasis kuota, ekowisata bahari, dan pengembangan bioteknologi kelautan.

#### 2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi Digital merupakan proses strategis yang mengintegrasikan teknologi digital secara menyeluruh dalam pemerintahan, bisnis, dan masyarakat untuk menciptakan efisiensi dan inovasi, yang diwujudkan melalui penguatan infrastruktur digital. Transformasi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Sebagai salah satu upaya strategis, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkenalkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada tahun 2022. IMDI dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan masyarakat digital.

Tabel 2.43  
Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2022-2024

Pilar	2022	2023	2024	Sub Pilar	2022	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	38.36	55,26	49.56	Akses dan Adopsi Teknologi	36.14	51.5	61.84
				Ekosistem Pembelajaran	40.58	50.43	32.97
				Digitalisasi Pemerintah	-	70.3	62.89
Keterampilan Digital	49.26	45.49	50.2	Komplementaritas	48.87	43.02	51.25
				Pengenalan	55.07	53.36	48.24
				Keamanan TIK	43.85	40.19	51.09
Pemberdayaan	23.97	21.75	21.4	Konsumen/ Pengguna	24.22	23.66	25.19
				Penjual/Penyedia	23.71	19.84	17.61
Pekerjaan	35.71	32.5	33.77	Permintaan	47.31	53.65	56.66
				Penawaran	24.11	11.36	10.88
Indeks Masyarakat Digital					36.69	38.31	38.3

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Mandailing Natal cenderung meningkat dari 36.69 pada tahun 2022 menjadi 38.30 pada tahun 2024. Pilar Keterampilan Digital dan Pekerjaan pada tahun 2023-2024 mengalami peningkatan. Namun pilar infrastruktur dan ekosistem serta pemberdayaan mengalami penurunan pada tahun tersebut.



Salah satu manfaat memiliki perkembangan teknologi yang lebih cepat adalah produktivitas yang lebih tinggi. Manfaat produktivitas dari adopsi teknologi digital menjadi lebih besar saat pembagian tugas yang dapat diotomatisasi lebih signifikan. Dalam hal ini, terdapat korelasi kuat antara adopsi teknologi, pekerjaan yang dapat diotomatisasi, dan produktivitas.

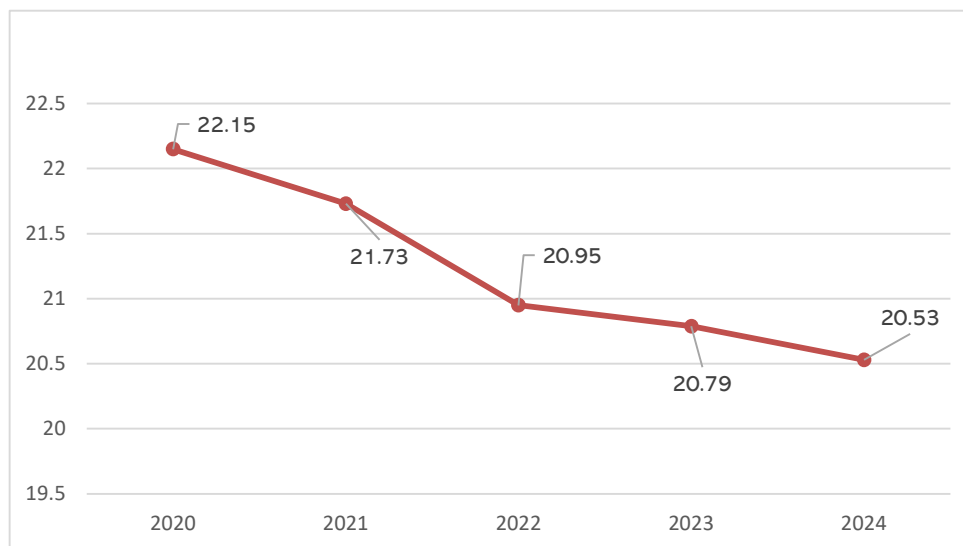
### 2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global merupakan proses strategis untuk memperkuat konektivitas dan daya saing ekonomi nasional dalam sistem perdagangan internasional melalui sinergi antara kekuatan ekonomi dalam negeri dan peluang pasar global.

#### A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merujuk pada total nilai investasi dalam aset fisik baru yang digunakan untuk proses produksi selama periode tertentu, meliputi pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, waduk), pembelian mesin dan peralatan, serta pengembangan teknologi produktif. PMTB mencerminkan upaya suatu negara atau daerah dalam memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas ekonomi jangka Panjang.

Diagram 2.32  
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024



Rasio PMTB terhadap PDRB cenderung menurun dari 22,15 persen pada tahun 2020 menjadi 20,53 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa investasi kurang berperan dalam peningkatan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu menggali potensi daerah dan mempromosikannya kepada investor sehingga investor menjadi tertarik untuk menanamkan modal di daerah.

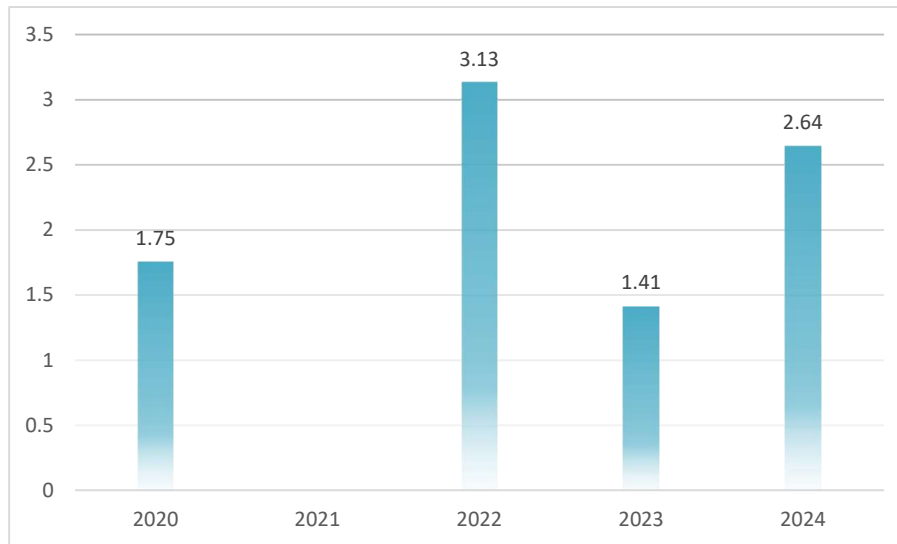
### 2.3.6. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi merupakan konsep pembangunan yang mengoptimalkan potensi khas masing-masing wilayah melalui sinergi yang saling memperkuat. Perkotaan berperan sebagai penggerak utama dengan konsentrasi industri, jasa keuangan, dan inovasi teknologi, sementara perdesaan menjadi basis ketahanan pangan dan energi terbarukan.

#### A. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas dan ketersediaan jaringan infrastruktur fisik suatu wilayah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Infrastruktur Kabupaten Mandailing Natal ditampilkan pada Diagram berikut:

Diagram 2.33  
Indeks Infrastruktur Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024



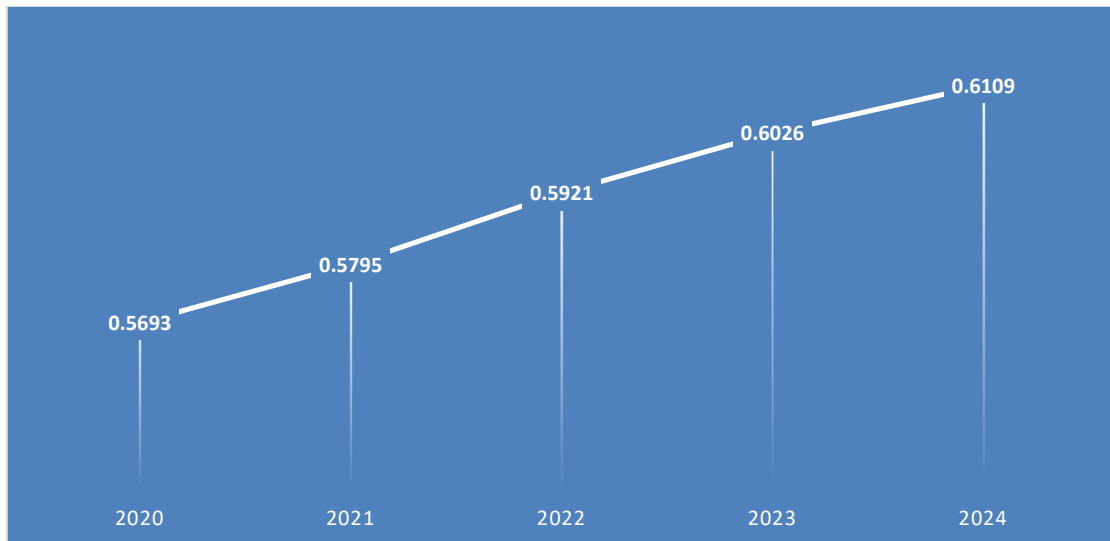
Sumber:BRIN, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa indeks infrastruktur Kabupaten Mandailing Natal mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2024. Pergerakan nilai tersebut disebabkan keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing.

#### **B. Indeks Desa Membangun & Persentase Desa Mandiri**

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur komprehensif yang menilai tingkat kemandirian dan kemajuan pembangunan desa berdasarkan tiga dimensi utama: (1) Dimensi Sosial (meliputi kualitas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat), (2) Dimensi Ekonomi (mencakup produktivitas, akses pasar, dan ketahanan pangan), serta (3) Dimensi Lingkungan (termasuk pengelolaan sumber daya alam dan adaptasi perubahan iklim).

Diagram 2.34  
Indeks Desa Membangun Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa Indeks Desa Membangun Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan seiring dengan pergeseran dari setiap jenjang status desa seperti desa berkembang ke desa maju, desa maju ke desa mandiri. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan bahwa secara umum desa di Kabupaten Mandailing Natal berada pada klasifikasi “Berkembang”. Maka dari itu perlu bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam membangun desa sehingga mampu mencapai status Mandiri. Persentase desa mandiri ditampilkan pada table berikut:

Tabel 2.44  
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa	377	377	377	377	377
Jumlah Desa Mandiri	n.a	3	3	6	6
Persentase Desa Mandiri		0.01	0.01	0.02	0.02

Sumber: Ompan, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase Desa Mandiri masih sangat sedikit. Hal ini terjadi karena mayoritas desa belum mampu mengembangkan potensi dan sumber daya desa serta bergantung pada Dana Desa dalam pembangunan desanya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengingat terdapat 52 Desa yang sudah berstatus Maju dan berpotensi untuk ditingkatkan statusnya.

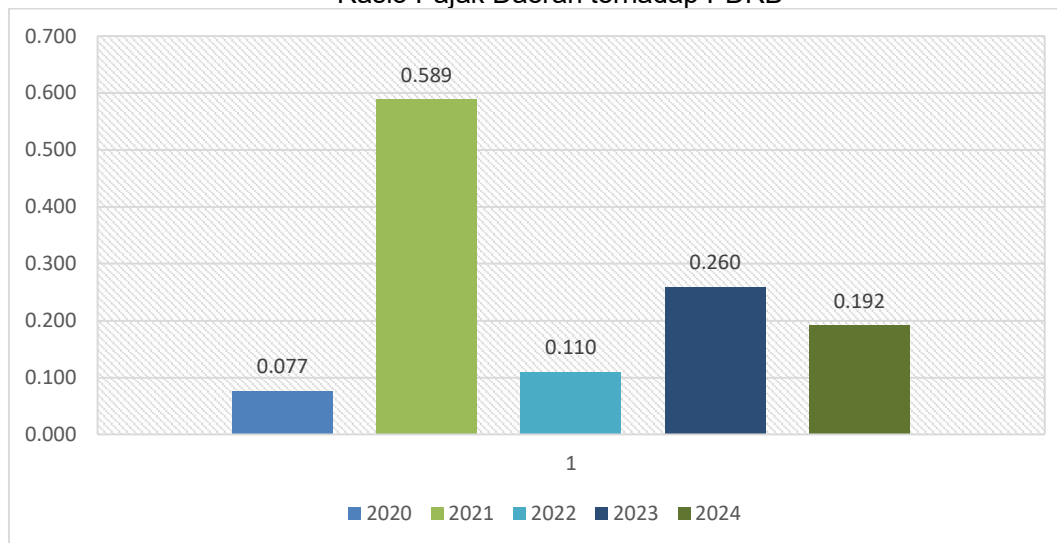
### 2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi ketika berbagai indikator ekonomi tetap stabil dan terkendali dalam jangka waktu yang panjang. Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### 2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menggambarkan berapa besar kontribusi dari pajak yang diterima oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada gambar berikut:

Diagram 2.35  
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB



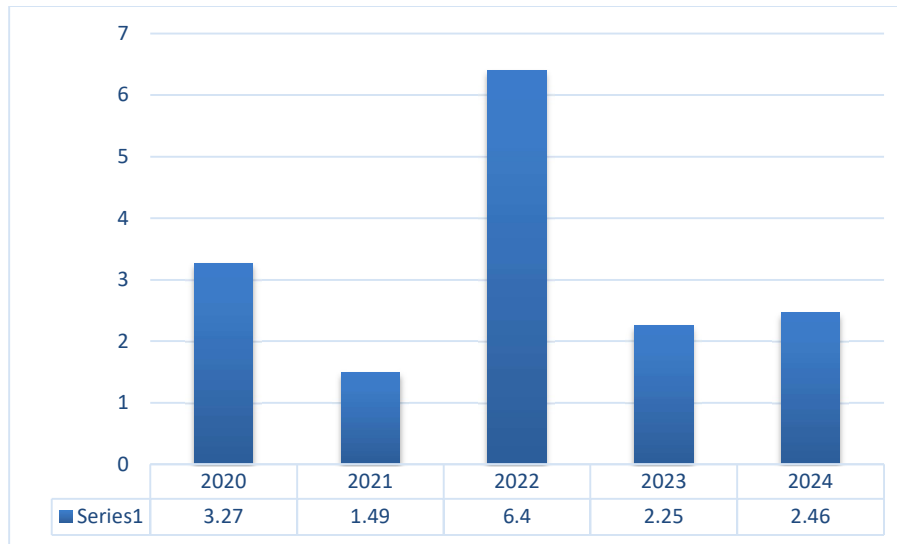
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, 2021-2025

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB masih sangat rendah di mana pada tahun 2024 menurun menjadi 0,192 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah masih belum mampu mendorong perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 2.3.7.2. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kondisi inflasi Mandailing Natal digambarkan dari kondisi Inflasi di Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

Diagram 2.36  
Tingkat Inflasi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Padang Sidempuan, 2025

Kelompok pengeluaran yang menyumbang besar terhadap inflasi termasuk (1) kelompok makanan, minuman, dan tembakau (2) perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (3) Pakaian dan Alas Kaki (4) Kesehatan serta (5) transportasi. Kenaikan harga cabai merah, angkutan udara, dan minyak goreng menjadi beberapa kontributor utama inflasi di Mandailing Natal. Tingkat inflasi di Kabupaten Mandailing Natal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok rumah tangga yang dominan disediakan dari daerah lain seperti cabe merah, bawang merah, jeruk, dan lain-lain.

#### 2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum Kabupaten Mandailing Natal merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aspek Pelayanan Umum berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 4 urusan, yaitu: 1) Layanan Urusan Wajib Dasar; 2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar; 3) Layanan Urusan Pilihan; dan 4) Penunjang Urusan.

### 2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas dalam merespons perubahan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan pengawasan, serta penerapan teknologi untuk menciptakan tata kelola yang efektif, bersih, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan.

Tabel 2.45  
Capaian Kinerja Aspek Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Mandailing  
Natal Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	Poin	n.a	n.a	n.a	n.a	C
Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	40.22 (C)	44.23 (C)	48.45 (C)	50.78 (CC)	55.97 (CC)
Indeks SPBE	Poin	n.a	2.73	2.58	2.58	2.89
Indeks Pelayanan Publik	Poin	n.a	2.54	2.69	2.49	2.8
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Poin	n.a	59.52 (C)	61.25 (C)	88.03 (A)	78.07 (B)
Indeks Integritas Nasional (SPI)	Poin	n.a	66.42	60.18	66.42	57.15

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, KemenpanRB, KPK

Berdasarkan data tersebut di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020-2022 termasuk pada kriteria “Kurang”, dan pada tahun berikutnya meningkat pada kriteria cukup. Peningkatan capaian tersebut merupakan dampak positif pada perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*. Namun demikian, untuk meningkatkan kinerja birokrasi masih dibutuhkan upaya-upaya nyata untuk menyederhanakan regulasi, tata kelola dan meningkatkan kapasitas ASN yang profesional melalui pembekalan dan pelatihan serta pengawasan, *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk mencegah praktik-praktik buruk dalam tata kelola pemerintah serta mempercepat digitalisasi pelayanan publik sehingga Kabupaten Mandailing Natal dapat bersaing dengan Kabupaten lain dan perwujudan Madina Maju dapat dicapai.

Permasalahan pelayanan birokrasi memang seringkali menuai kritik dari masyarakat. Untuk itu, reformasi birokrasi harus terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi diharapkan mampu meningkatkan kepuasan publik.

Indeks SPBE Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami peningkatan dari 2.73 pada tahun 2021 menjadi 2.89 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menerapkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Penguatan dan implementasi SPBE merupakan langkah yang sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat, yaitu penguatan sains dan teknologi serta digitalisasi. Dengan penguatan sains dan teknologi serta digitalisasi diharapkan mampu menghantarkan generasi Indonesia Emas di tahun 2045. Percepatan serta penguatan digitalisasi pelayanan publik dapat dimulai dengan penguatan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan SPBE. Kemudian diimbangi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dalam melaksanakan digitalisasi pelayanan publik.

Indeks Pelayanan Publik menunjukkan kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai melalui 6 aspek, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Indeks Pelayanan Publik cenderung meningkat dari 2.54 pada tahun 2021, naik 0,26 poin pada tahun 2024. Pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini juga tergambar dari tingkat kepatuhan dalam penyelenggaraan publik yang pada tahun 2023, kabupaten ini memperoleh predikat kriteria tertinggi dari Ombudsman dengan nilai 88.03. Capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Mandailing Natal masih dapat dimaksimalkan, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. **Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai melalui pelatihan rutin. Ini membantu staf memahami standar pelayanan yang diharapkan dan memberikan layanan yang lebih baik;
- b. **Penerapan Teknologi:** Menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Misalnya, mengembangkan aplikasi *online* untuk pengaduan atau permohonan layanan;
- c. **Umpan Balik dari Masyarakat:** Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari masyarakat secara berkala. Ini dapat dilakukan melalui survei, kotak saran atau forum diskusi untuk mengetahui kepuasan dan harapan masyarakat;
- d. **Standar Pelayanan:** Menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur. Menggunakan indikator kinerja untuk menilai sejauh mana standar tersebut tercapai;

- e. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam proses dan keputusan pelayanan publik. Memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi tentang layanan yang diberikan dan prosedur yang ada;
- f. **Peningkatan Aksesibilitas:** Memastikan bahwa layanan publik mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Ini bisa mencakup lokasi fisik yang strategis dan penyediaan layanan dalam berbagai format;
- g. **Kolaborasi dengan Stakeholder:** Bekerja sama dengan organisasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas layanan. Kolaborasi dapat membantu memanfaatkan sumber daya dan pengalaman yang ada.
- h. **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Melakukan evaluasi rutin terhadap layanan yang diberikan dan mencari area untuk perbaikan. Proses ini harus menjadi siklus yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas;
- i. **Kepemimpinan yang Baik:** Memastikan bahwa pemimpin di lembaga publik memiliki visi yang jelas dan mendukung budaya pelayanan yang berkualitas di seluruh organisasi;
- j. **Pemberian Penghargaan dan Insentif:** Memberikan penghargaan kepada pegawai yang memberikan pelayanan yang luar biasa untuk memotivasi pegawai lain dan menciptakan kompetisi positif.

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama. Nilai SPI Kabupaten Mandailing Natal mulai dari tahun 2021 sampai 2024 berada pada kriteria rentan. Hal ini harus menjadi perhatian dengan mewujudkan budaya anti korupsi dan tata Kelola pemerintahan serta pelayanan yang transparan. Capaian Indeks Reformasi Hukum juga harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang pada tahun 2024 hanya memperoleh nilai C (Kurang)

#### 2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum Berkeadilan diwujudkan melalui penegakan hukum yang imparial dan konsisten dengan prinsip keadilan sosial, menjamin perlindungan hak dasar warga negara serta kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat. Keamanan Nasional yang Tangguh dibangun melalui sistem pertahanan komprehensif yang mengintegrasikan aspek militer, siber, dan ketahanan masyarakat, mampu mengantisipasi ancaman multidimensi baik konvensional maupun non-tradisional. Demokrasi Substansial tidak hanya terbatas pada

prosedur elektoral, tetapi termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta mekanisme *check and balance* antar lembaga negara. Ketiganya bersinergi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, di mana hukum yang adil menjadi fondasi, keamanan nasional menyediakan ruang stabil, dan demokrasi substansial menjamin inklusivitas proses pembangunan. Tantangan implementasi mencakup konsistensi penegakan hukum di daerah, evolusi ancaman keamanan *hybrid*, dan kualitas partisipasi demokratis yang diatasi melalui penguatan kapasitas institusi, edukasi kewarganegaraan, dan inovasi tata kelola berbasis teknologi.

#### A. Persentase Penegakan Perda

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal, persentase penegakan perda sebagai berikut:

Tabel 2.46  
Persentase Penegakan Perda

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	60	60	60	60	60

Sumber: Satpol PP dan Damkar, 2025

#### B. Persentase Capaian Aksi HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM).

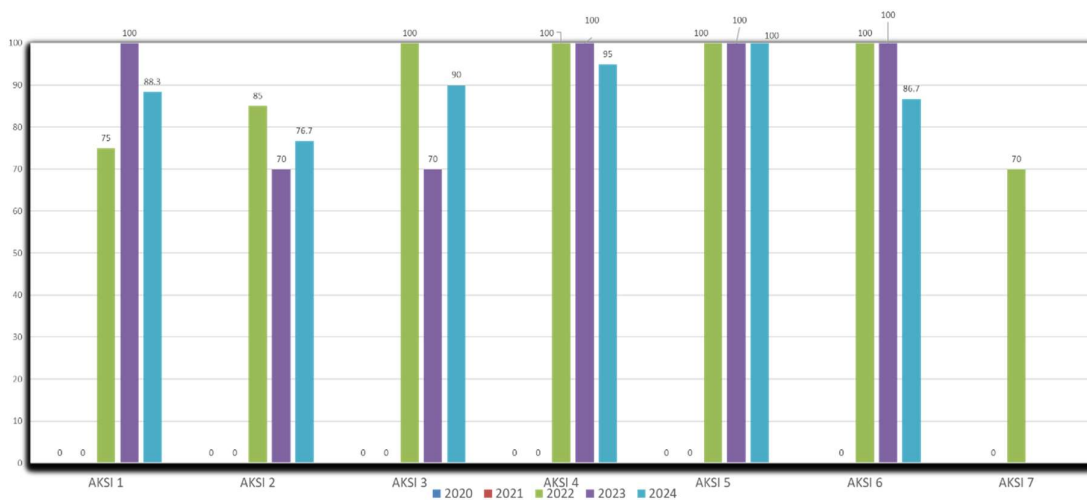
Pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mengeluarkan produk hukum terus berupaya untuk melaksanakan P5 HAM. Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah adalah dengan melanjutkan peraturan terkait Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 telah diperbaharui dengan menerbitkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021 – 2025 sebagai lanjutan dari RANHAM sebelumnya (pemerintah telah menerbitkan 4 (empat) RANHAM, yaitu generasi ke-1 diluncurkan tahun 1998, generasi ke-2 tahun 2005, generasi ke-3 tahun 2011, dan generasi ke-4 pada tahun 2015).

RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan P5 HAM di Indonesia. RANHAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana pemerintahan dalam menyusun, melaksanakan, dan

mengevaluasi Aksi HAM. RANHAM juga merupakan simbol komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia ke dalam agenda pembangunan nasional, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM menjadi program yang sangat strategis untuk menjadi acuan semua pihak untuk pengejawantahan nilai HAM pada level yang paling praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan. Capaian Aksi HAM Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

Diagram 2.37  
Capaian Aksi HAM Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber : Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025

Pada Tahun 2020 tidak dilakukan pelaporan Aksi HAM sehubungan terjadinya Pandemi Covid 19. Pada tahun 2022-2023, AKSI 4, 5 dan 6 dapat dicapai 100%. Seluruh Aksi dalam RANHAM mulai tahun 2022-2024 telah dilaksanakan oleh Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan kewenangan daerah, namun beberapa aksi tidak tercapai sepenuhnya disebabkan terbatasnya pemahaman perangkat daerah untuk menyajikan laporan dikarenakan keterbatasan data dan anggaran serta adanya format laporan dan data dukung yang tidak dapat dipenuhi oleh perangkat daerah.

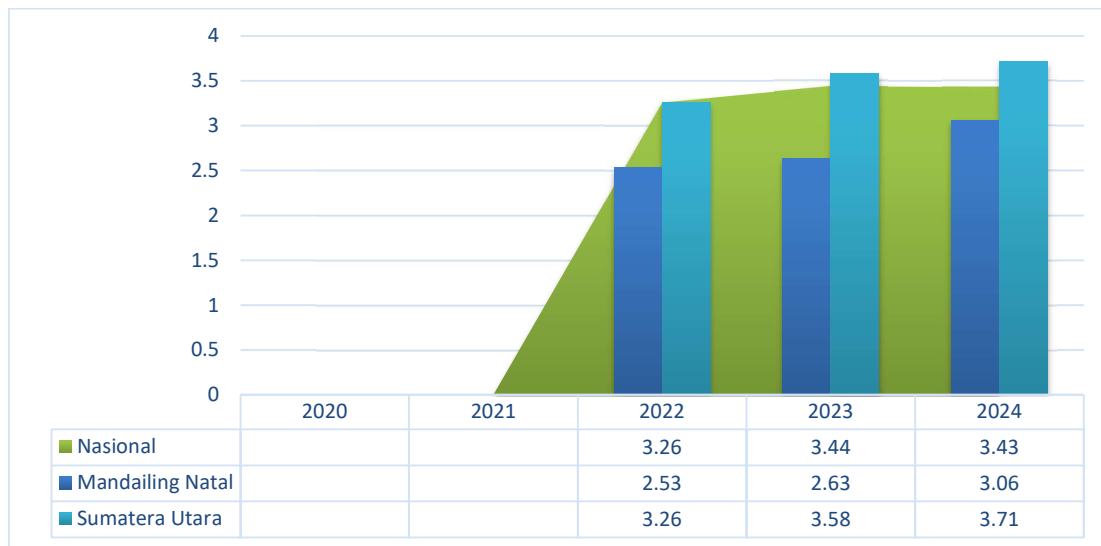
### 2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan kekuatan diplomasi dan pertahanan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional. Pendekatan ini memadukan *soft power diplomacy* melalui jalur multilateral dan kerja sama ekonomi, dengan *hard power deterrence* berupa penguatan kapasitas pertahanan yang kredibel, guna mencegah konflik dan mempertahankan kedaulatan.

## A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang mengukur daya saing daerah yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu 1) Lingkungan Pendukung; 2) Sumber Daya Manusia; 3) Pasar; dan 4) Ekosistem Inovasi. Pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebesar 2,77 poin hal ini menunjukkan bahwa daya saing daerah masih dinilai rendah secara keseluruhan. Secara detail hasil evaluasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada Diagramr berikut:

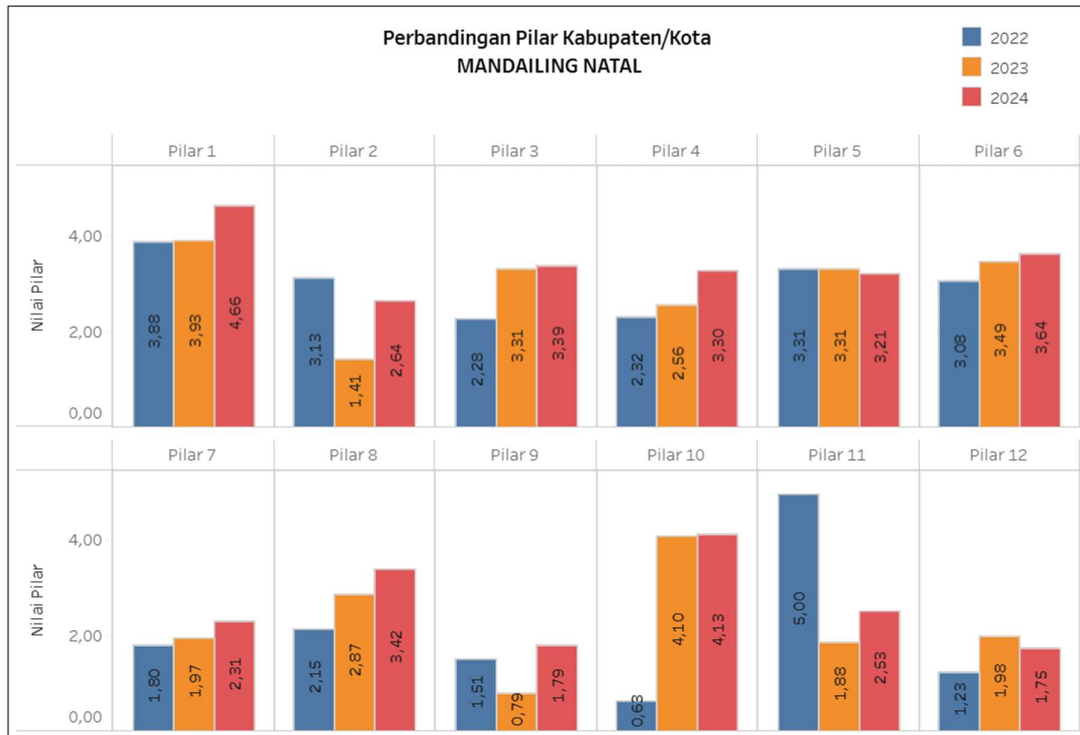
Diagram 2.38  
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2024



Sumber: BRIN, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2024 terus meningkat namun masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Peningkatan indeks tersebut didorong oleh kenaikan beberapa pilar yaitu Institusi, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, dan Ukuran Pasar. Secara detail, perbandingan pilar penyusun IDSD kabupaten Mandailing Natal ditampilkan pada Diagram berikut:

Diagram 2.39  
Perbandingan Pilar Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022-2024



Sumber: BRIN,2025

#### 2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap perangkat daerah sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.47  
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>													
<b>A.1</b>	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN DANPEMERATAAN EKONOMI</b>													
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen		-0,94	5,45	3,2	5,51	4,34	5,71	4,93	5,81	4,83	Seluruh Perangkat Daerah	
2	Inflasi	Persen		3,27	3,10	2,15	2,94- 3,02	6,40	3,02-3,10	2,95	3,10- 3,15	2,46	Seluruh Perangkat Daerah	
3	Gini ratio	Persen		0,248	0,242	0,240	0,237	0,244	0,232	0,249	0,227	0,2500	Seluruh Perangkat Daerah	
4	Persentase penduduk miskin	Persen		9,18	8,86	9,49	8,55	8,92	8,0	8,86	7,75	8,69	Seluruh Perangkat Daerah	
<b>A.2</b>	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>													
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks		70,89	67,19	71,00	68,06	71,35	68,94	71,72	69,83	71,88	Seluruh Perangkat Daerah	
2	Tingkat pengangguran terbuka	Persen		6,50	6,25	6,12	5,70	7,64	5,20	7,45	4,70	7,22	Seluruh Perangkat Daerah	
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	Persen		35	70	40	100	62	100		100		Dinas Sosial	
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>													
<b>B.1</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSANPEMERINTAHAN WAJIB</b>													
<b>B.1. 1</b>	<b>PELAYANAN DASAR</b>													
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>													
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun		-	13,32	-	13,61	13,63	13,85	14,13	13,86	14,63	13,87	Dinas Pendidikan
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun		7,94	8,62	8,01	8,63	8,71	8,76	8,79	8,84	8,87	9,11	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1.3	Persentase Pemajuan Budaya	Persen							12	-	35,19	33,9	Dinas Pendidikan
1.4	Jumlah Desa Budaya	Jumlah							4	4	14	0	Dinas Pendidikan
1.5	Jumlah Cagar Budaya	Jumlah							2	-	6	1	Dinas Pendidikan
1.6	Jumlah gedung kebudayaan	Jumlah									2	0	Dinas Pendidikan
1.7	APK (PAUD)	Persen	20,69	n.a	20,90	76,75	77,52	-	78,29	106,67	79,08	76,81	Dinas Pendidikan
	APM (PAUD)	Persen	-	n.a	-	76,7	77,47	-	78,24		79,02	76,81	Dinas Pendidikan
1.8	APK (SD/MI)	Persen	118,96	108,54	119,89	103	104,03	110,85	105,07	106,67	106,12	105,98	Dinas Pendidikan
	APM (SD/MI)	Indeks	103,23	99,46	104,04	93,89	94,83	98,59	95,78	98,72	96,73	98,80	Dinas Pendidikan
1.9	APK (SMP/MTs)	Persen	97,11	93,57	97,87	99	99,99	87,32	100,99	97,35	102,00	91,55	Dinas Pendidikan
	APM (SMP/MTs)	Persen	83,70	83,99	84,35	90	90,90	82,80	91,81	85,00	92,73	85,44	Dinas Pendidikan
10	Jumlah group kesenian	Jumlah									28	11	Dinas Pendidikan
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>												
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	80	68,78/100.000 KLH	72	61,03	55,37	74,47	50,81	148,92	46,25	78,98	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 kelahiran hidup	9	1,9	8	4,4	4	3	3,9	9,2	3,8	3,7	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi stunting	Persen	-	48	-	47,7	40,00	34,2	30,00	20,7	20,00	n.a	Dinas Kesehatan
4	Cakupan penduduk miskin penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	100	48,1	100	43,5	46,7	68,37	46,8	51,52	47	69,9	Dinas Kesehatan
5	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	-	-	-	-	10,95	4,73	10,93	55,83	10,91	68,96	Dinas Kesehatan
6	Angka Kesakitan malaria (Annual Paracite Incidence) per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	2	0,04	1	0,02	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	Dinas Kesehatan
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	94	70,3	95	73,0	80	77	85	80,1	90	60,2	Dinas Kesehatan
8	Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	Persen	72	42,5	74	68,9	45	58,26	50	51,09	55	52,7	Dinas Kesehatan
10	Cakupan PIRT yang mendapatkan SPP IRT	Persen	-	-	-	-	65	20	70	60	75	45,78	Dinas Kesehatan
11	Persentase ketersediaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	95	100	100	100	95	97,50	100	97,50	100	97,50	Dinas Kesehatan
12	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	-	-	85	23,08	90	26,92	95	61,54	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
13	Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Sesuai standar	Persen	-	-	-	-	70	45,54	75	46,35	80	53,16	Dinas Kesehatan
14	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	-	31,9	-	36,4	65	49,6	70	59,6	75	93,59	RSUD
15	Bed Turn Over (BTO)	Kali	-	31,3	-	36,0	40	51	45	67	45	103,59	RSUD
16	Length Of Stay (LOS)	Hari	-	2,5	-	2,9	6	3	6	2	6	3,29	RSUD
17	Turn Over Internal (TOI)	Hari	-	7,9	-	6,4	3	4	3	2	3	0,23	RSUD
18	Capaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	-	-	-	-	B	C	B	BB	B	N/A	Dinas Kesehatan
19	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	-	-	-	-	0,27	0,98	0,29	0,11	0,31	0,11	Dinas Kesehatan
20	Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	65	67,7	79	68,34	70	68,37	72	69,01	75	60	Dinas Kesehatan
21	UHC (Universal Health Coverage)	Persen	-	-	-	-	70	75,64	73,00	96,39	76,00	97,81	Dinas Kesehatan
22	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	-	-	-	-	3,2	79,01	3,3	79,35	3,4	80,27	Dinas Kesehatan
23	Indeks kesehatan	Indeks	-	-	-	-	0,686	0,77	0,690	0,77	0,694	0,78	Dinas Kesehatan
24	Usia harapan hidup	Tahun	62,61	62,60	71	62,55	63,77	71,35	64,91	71,72	66,07	71,88	Dinas Kesehatan
25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Pukesmas	Persen	80%	100%	90	100	58	50	77	85	85	85	Dinas Kesehatan
26	Persentase Puskesmas yang memiliki tanaman toga di puskesmas	persen	-	-	-	-	55	60	60	95	65	65	Dinas Kesehatan
27	Persentase kasus gawat darurat dengan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPDGT)	Persen	-	-	-	-	70	68	70	78	70	70	Dinas Kesehatan
28	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	25%	100%	30	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
29	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Orang	9,71	6,8	10,68	5,0	10,5	4,5	14,5	3,6	18,5	6,3	Dinas Kesehatan
30	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	Orang	24,74	18,0	28,45	23,6	36	24,5	55	23,5	74	24,5	Dinas Kesehatan
31	Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk	Orang	4,74	5,3	4,97	5,9	6	5,8	7	6,4	8	6,5	Dinas Kesehatan
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG</b>												
<b>3.1</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>												
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	persen	52	52	55,49	55,49	54	46,19	61	29,84	64	61,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	km	3,55	3,6	3,78	3,81	3,73	3,81	3,68	0,003	3,64	3,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase Kelurahan/Desa Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	persen	6,64	6,7	8,66	5,9	8,17	5,9	7,67	3,19	7,18	2,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	57	41,92	60	45,87	63	55,18	66	55,41	69	53,40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Rasio Jaringan Irigasi	persen	38	31,52	41,74	32,83	45,5	33,95	49,5	34,32	54,5	56,5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Rasio Jaringan irigasi kondisi baik	Persen	38	31,52	41,74	32,83	45,5	33,95	49,5	34,32	54,5	53,40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Persentase balai kecamatan, kelurahan dan desa dalam kondisi Baik	persen	73	73	47,83	47,83	50,22	49,8	52,73		55,37		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	67,82	71,8	75,04	72	76,8	74	91,68	n.a	100	93,74	
10	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	persen	32,73	35	39,44	35,5	48,99	36,74	29	n.a	34,18	1,22	
<b>3.2</b>	<b>PENATAAN RUANG</b>												
1	Rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	Dokumen	15	15	15	15	20	50	20	28	25	26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Tersedianya dokumen tata ruang yang telah ditetapkan	Dokumen	2	2	1	1	1	1	1	n.a	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Tersedianya SHPK dan Dokumen Terkait IMB	Dokumen	5	5	-	-	10	150	15	19	20	66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang	Dokumen	-	-	-	-	0	0	-	-	1	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN</b>												
1	Persentase Akses Rumah Layak Huni	Persen	18,62	31,68	49,11	49,11	50,34	49,45	51,6	51,6	52,89	52,89	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase Permukiman Kumuh	Persen	0,065	0,000073 65	0,065	0,000076	0,1	0,000078 14	0,200	0,200	0,199	0,199	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Jumlah PSU Terbangun	Unit	63	39	160	114	54	55	59	59	64	18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBANUMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>												
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	Satpol PP
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Jumlah	328	221	330	230	335	236	340	335	345	320	Satpol PP
4	Persentase penegakan PERDA	%	75,53	60	76,60	60	76,60	76,90	77,50	77,50	78,00	60	Satpol PP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
3	Persentase Kejadian Kebakaran yang Tertangani	%	88,37	55	85,71	58	89,00	58	89,00	96.15	90,00	85	Satpol PP
5	Rata Rata Response Time Penanganan Kebakaran	Rata Rata Menit/ Kejadian	60 Menit	45 Menit	58 Menit	40 Menit	45 Menit	30 Menit	45 Menit	17.,3	43 Menit	30	Satpol PP
													Satpol PP
5.7	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan Akuntabel	Persentase	95	95	95	95	95	95	80	95	83	94	Kesbangpol
5.8	Jumlah Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan pembinaan, pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kegiatan	4	4	10	10	4	4	4	4	4	4	Kesbangpol
5.9	Persentase Pembinaan Politik Daerah	Persentase	70	63	75	75	77	77	80	80	83	82	Kesbangpol
5.10	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Ormas (LSM, OKP, organisasi mahasiswa, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi) dan Yayasan	Ormas/Yayasan	46	46	60	60	66	66	76	78	86	86	Kesbangpol
5.11	Jumlah Dokumen Data Konflik dan Kewaspadaan Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2		2	2	Kesbangpol
5.16	Tingkat pemahaman tentang peranan partai politik, Ormas, Demokrasi, wawasan kebangsaan dan koordinasi lembaga Pemerintahan	Persen	-	-	-	75	77	-	80	80	83	80	Kesbangpol
1	pelayanan informasi rawan bencana	%	-	98,1	-	97,40	100	100,00	100	99,5	100	83,19	BPBD
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	-	83,0	-	94,70	100	96,47	100	93,3	100	84,08	BPBD
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	-	98,5	-	91,55	100	100,00	100	77,6	100	54,87	BPBD
4	Indeks Resiko Bencana	Indeks	-	214,80*	-	214,80*	211,80	214,80*	208,80	n.a	205,80	205,8	BPBD
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>												
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	%	n.a	35	n.a	40	100	62	100	41,4	100	25,48	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	%	n.a	100	n.a	100	40	7,5	60	25	80	100	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Dalam Panti	%	n.a	-	n.a	-	80	31,51	85	8,7	90	25,34	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	%	n.a	50	n.a	45	60	5	70	37	80	100	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana	%	n.a	90	n.a	77,2	60	58,3	70	70	80	83,33	Dinas Sosial
6	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial	%	n.a	0,8	n.a	2,2	60	52,7	100	-	100	100	Dinas Sosial
													Dinas Sosial
<b>B.1. 2</b>	<b>NON PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>TENAGA KERJA</b>												
1	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun (Kasus)	Kasus	-	7	-	4	20,0	4,0	20,0	8,0	20,0	8,0	Dinas Tenaga Kerja
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	-	-	-	-	20,0	-	20,0	5,0	20,0	2	Dinas Tenaga Kerja
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	-	78	-	60	70,0	115,0	20,0	105	25,0	57	Dinas Tenaga Kerja
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	-	6.124	-	6.174	6.224,0	17.410,0	6.274,0	26.661	6.324,0	29.660	Dinas Tenaga Kerja
5	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Kompetensi	orang	-	320	-	160	48,0	400,0	48,0	144	48,0	80	Dinas Tenaga Kerja
6	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Berbasis Masyarakat	orang	-	160	-	-	-	-	10,0	64	10,0	0	Dinas Tenaga Kerja
<b>2</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>												
1.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kategori	-	-	Madya	Pratama	Madya	Pratama	Madya	n.a	Nindiya	n.a	OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	100%	70,01%	100%	70,01%	100%	70,01%	92%	n.a	93%	n.a	OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase	100%	93,24%	100%	93,24%	100%	93,24%	75%	n.a	83%	n.a	OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase	100%	68%	100%	88%	100%	96%	75%	20	83%	75	OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
													Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>3</b>	<b>PANGAN</b>												
1	Ketersediaan Pangan Utama	Ton (Beras)	179,9	63.250,50	184,7	62.567,56	62.167	63.672	62.240,00	107.192,95	62.309,50	102.417	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
2	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Energi (kal/kapita/hari)	8.134	6.449,00	8.977	6.454,20	6.460,73	6.942,94	6.470,25	6.441,25	6.475,56	2.445	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
		Protein (gram/kapita/hari)	230,56	145,2	253,38	151,22	153,74	165,21					OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
3	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skors (1-100)	83,7	83,3	86,9	83,58	85,3	85,2	86,7	86,3	87,5	86,90	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
4	Penguatan Cadangan Pangan	Ton (Beras)	2,7	2,7	4,7	4,7	4,7	7,724	25,00	12,999	75,00	17,176	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
5	Peningkatan Angka Ketersediaan Pangan	Jumlah Pangan Nabati (ton)	387.167,97	307.748,90	327.752,58	304.917,27	325.558,29	348.347,37	343.099,06	341.560,80	361.603,72	174.215,002	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
		Jumlah Pangan Hewani (ton)	26.772,18	21.280,45	27.458,64	27.389,99	28.141,36	29.031,84	29.576,88	28.146,51	30.255,41	27.171,89	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
6	Angka Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari) dalam (%)	378,32	299,95	417,53	300,19	300,5	322,93	6.470,25	6.441,25	6.475,56	2.455	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
		Ketersediaan Protein (%)	404,49	254,74	444,53	265,3	269,72	289,84	157,28	160,17	160,72	78,84	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
7		Angka Kecukupan energi (AKE) per kapita/hari berdasarkan Konsumsi (%)	100	97,6	103,7	101,90	103,50	100,1	104,70	114,2	105,30	104,01	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan
		Angka Konsumsi Energi Perkapita	2.150	2.099,30	2.150	2.190,20	2.150	2.152,70			105,30	101,59	OPD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
		Angka Konsumsi Protein Perkapita	57	42,93	57	48	57	48,2			160.72	104.13	
8	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	Unit	59	25	31	39	39	36	43	26	48	26	OPD yang membidangi urusanKetahanan Pangan
9	Jumlah Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah	Peningkat an Penyalur an Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (%)	7,8	6,2	8	7,98	8,38	6,05	5,85	6,01	4,74	9,5	OPD yang membidangi urusanKetahanan Pangan
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerint ah (ton)	2,7	2,7	4,7	4,7	4,7	7,724	25	12, 999	75		OPD yang membidangi urusanKetahanan Pangan
10	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	kali koordinasi	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	OPD yang membidangi urusanKetahanan Pangan
11	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	komoditi	16	16	16	14	16	16	26	16	26	16	
12	Skor pola pangan harapan	Skor (1- 100)	83,7	83,3	86,9	83,6	85,3	85,2	86,7	86,3	87,5		
<b>4</b>	<b>PERTANAHAN</b>												
1	Luas Lahan Bersertifikat	Ha	-	-	77.216	77.216	42.330	56.339	42.330		42.330	95.280,93	OPD yang membidangi urusanPertanahan
2	Jumlah Kasus Permasalahan Agraria	kasus	-	-	12	12	15	17	17		17	9 Kasus	OPD yang membidangi urusanPertanahan
<b>5</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>												
<b>1</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)</b>			<b>n.a</b>	<b>79,67</b>	<b>79,76</b>	<b>75,03</b>	<b>79,78</b>	74,16	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>75,20</b>	Dinas Lingkungan Hidup
1.1	Indeks Kualitas Air		60,5	63,2	64	64,8	63,30	64,8	54,14	65,5	65,50	58,08	Dinas Lingkungan Hidup
1.2	Indeks Kualitas Udara		94,95	95,2	95,2	95,2	95,27	95,25	97,17	95,3	95,30	95,61	Dinas Lingkungan Hidup
1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		83	81,80	81	79,67	80,60	79,82	66,00	79,87	79,67	66,88	Dinas Lingkungan Hidup
1.4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan		21,01	22	22,05	23	23						Dinas Lingkungan Hidup
1.5	Pengelolaan Bahan dan Limbah B3		3	3	4	5	5						
1.6	Peningkatan Edukasi Pengelolaan Lingkungan												Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
2	Indeks Daya Dukung Lingkungan		-										Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Daya Tampung Lingkungan		-										Dinas Lingkungan Hidup
4	Kelembagaan Pengelolaan Sampah (%)								34,72	42,39	40,96	n.a	Dinas Lingkungan Hidup
4.1	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Persampahan		29,03	32	33	35,5	37,00	43,83	50,00	50,89	50,89	38	
4.2	Fungsi Pengelolaan Sampah di TPA		31,50	35	35	35,0	37,5	33,33	33,33	40,00	40,00	30	
4.3	Pelayanan Pengangkutan Sampah		18,00	24,00	23,00	27,00	27,74	27	39,13	32	32	30	
6	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL</b>												
1.	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan pekerjaan	Persen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	99,87	95%	88,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	80%	90%	94,88	95%	92,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	80%	90%	99,68	95%	93,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Terciptanya Data Kependudukan yang Valid sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	80%	90%	88,65	95%	76,44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA</b>												
1.	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	%		63,07		64,25	66,8	70,29	89,25	28	70,55	70,55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2.	Persentase Kelompok Binaan PKK	%		45,29		46,34	47,29	47,29	50,35	2,6	54,15	54,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
3.	Jumlah LPM Berprestasi	Kelompok		2		2	4	4	6	10	8	8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
4.	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%		60%		60%	70%	70%	70%	n.a	75%	75%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
5.	Indeks Desa Membangun	Desa		3		3	3	3	4	6	5	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
8	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN</b>												

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
<b>KELUARGA BERENCANA</b>													
1.	Total Fertility Rate (TFR)	Org	3,4	3,80	3,2	3,80	2,95	3.124	2,9	2,9	2,85	2,66	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,9	0,85	0,85	1,70	0,85	0,60	0,83	1,42	0,82	1,0	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	-	-	50	50,00	55	48,8	60%	48,8%	65%	54,83	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
4.	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	%		-		80,00	80	80	85%	80%	90%	100%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
5.	Rata-rata Anak Per Keluarga	Org	3,3	2,48	3,2	3,78	3,0	3,9	2,95	3,04	2,9	1,38	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
6.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR	%	73	69,9	75	70,0	75	43,66	71	59,60%	72	63,78%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
7.	Rasio Akseptor KB	%	78	71,0	80	72,0	75	81,5	76,50%	59,13%	78%	63,78%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
8.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	25	20,2	25	25,0	25	64,9	25%	10,66%	25%	10,10%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
9.	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	12,3	14,10	12,2	12,00	12	37,8	11	18,44%	11	11,35%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22	18,50	20	19,00	19	14,56	20%	15,92%	20%	17,24%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
11.	Persentase Faskes Dan Jejaringsnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100	100,00	100	100,00	100	100	100%	100%	100%	100%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
12.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
13.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
14.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	80	54,7	74	70,0	70	70,36	75%	83,76%	75%	83,76%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
15.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	75	36,1	64	50,0	55	91,43	60%	27,10%	65%	27,10%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
16.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	75	47,2	64	50,0	55	64,5	60%	75,60%	65%	75,60%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB
17.	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan	%	75	46,0	64	43,4	55	86,6	60%	58,10%	65%	58,10%	Dinas Pengendalian Pendudukdan KB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
	Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB												
<b>9</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>												
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	Orang	1420	1431	1431	1.431,00	1.435	1.422	1.437	1.440	1.437	1.440	Dinas Perhubungan
2.	Rasio Izin trayek (%)	Persen	10%	9%	11%	11%	13%	9%	16%	12%	16%	12%	Dinas Perhubungan
3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kir	968	968	968	968	968	1.083	968	712	970	765	Dinas Perhubungan
4.	Jumlah Pelabuhan Laut, Udara/Terminal Bus	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	
5.	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	11%	88%	11%	88%	12%	88%	12%	11%	15%	11%	Dinas Perhubungan
6.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	Persen	36%	46%	36%	47%	55%	63%	60%	63%	60%	63%	Dinas Perhubungan
7.	Pemasangan Rambu-Rambu	Persen	21,91%	15%	21,91%	15,31	21,91%	22%	21,91%	22%	21,91%	22%	Dinas Perhubungan
8.	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun	Orang	162.000	162.000	162.000	162.000,0 0	162.000	162.000	162.000	162.536	162.000	163.245	Dinas Perhubungan
9.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	33,73	33,73	33,73	33,73	37,11	38%	40,82	41	44,90	44	Dinas Perhubungan
													Dinas Perhubungan
<b>10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>												
1	Jumlah Desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi	Jumlah Desa	-	80	-	73	63	49	51	49	37	37	Diskominfo
2	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan	Persen	-	13.04	-	13.04	25	13.04	40	-	50	51	Diskominfo
3	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Berita		6.760	-	6.103	8.800	8.088	8.900	8.756	9.000	6.000	Diskominfo
4	Rasio Sistem Pelayanan Berbasis Online	Aplikasi		5		9	11	1	13	10	15	11	Diskominfo
5	Data Statistik Sektor yang terintegrasi	Persen	-	-	-	-	40	-	50	35,57	60	51,61	Diskominfo
6	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengaman Informasi dan Persandian	Persen		-		-	40	-	50	-	60	Belum dilaksana kan	Diskominfo
<b>11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>												
1.	Persentase Koperasi Aktip	Unit	199	219	203	230	222	250	230	212	241	226	Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
2.	Persentase Koperasi Sehat	Unit	-	70	-	75	83	7	91	16	99	17	Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
3.	Persentase Pertumbuhan Volume Koperasi yang Melaksanakan RAT	Unit	-	-	-	60	70	30	80	42	90	80	Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
4.	Jumlah Koperasi yang terbentuk Pertahun	Unit	-	6	-	10	10	20	10	20	12	12	Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
5.	Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil (Unit)	Unit	6131	7015	6148	7.120	7.250	-	7.500	5.853	7.650	29.318	Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
6.	Jumlah Produk Unggulan UMKM Binaan	Unit	-	5	-	8	11	11	14	12	17	16	Dinas Koperasi dan UKM
7.	Jumlah Izin Halal	Unit	-	6	-	20	25	2	30	34	35	4	Dinas Koperasi dan UKM
<b>12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>												
12.1	Jumlah Investor PMDN (Proyek)	Proyek							53	223	53	101	DPM&P2TSP
12.2	Jumlah Investor PMA (Proyek)	Proyek							6,00	19	6,00	6	DPM&P2TSP
12.3	Jumlah Nilai Investasi PMDN (triliun)	Rupiah							0,29462	0,641	0,29610	56.929,62	DPM&P2TSP
12.4	Jumlah Nilai Investasi PMA (triliun)	Rupiah							3,264	1,460	3,281	43.407,87	DPM&P2TSP
12.5	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerjaberdasarkan LKPM	jumlah							100	n.a	100	21	DPM&P2TSP
12.6	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen							(0,01174)	0,5622	(0,01180)	0.011	DPM&P2TSP
12.7	Indeks kepuasan Masyarakat/ Nilai IKM	indeks							80(B)	80,026	80 (B)	80,10 (B)	DPM&P2TSP
<b>13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>												
13.1	Jumlah Pusat Olahraga yang Layak/Lapangan Olahraga	Jumlah							4	1	4	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.2	Jumlah Pemuda yang Kreatif dan inovatif	Jumlah							5	2	6	5	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.3	Jumlah Keikutsertaan kegiatan Kepramukaan	Kegiatan							3	2	3	2	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.4	Jumlah klub olahraga	Jumlah							90	62	100	62	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.5	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah							38	42	40	68	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>14</b>	<b>STATISTIK</b>												
1	Data Statistik Sektoral yang terintegrasi	Persen		-	-	40	0	50	35,57	60	51,61		
2	Indeks SPBE	Level/ind eks		-	2.64	2,90	2,59	3	2,58	3,1	2,89		
<b>15</b>	<b>PERSANDIAN</b>												
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian	Persen		-	-	40	0	50	-	60	Belum dilaksana kan		Diskominfo

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
2	Jumlah desa yang tidak terjangkau akses telekomunikasi	Jumlah		80		73	63	49	51	49	37	Belum dilaksanakan	Diskominfo
<b>17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>												
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	1.200	1.306	1.500	1.514	4.395	4.694	13.185	42.066	21.975	5.782	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Exp.	22.000	25.624	25.000	25.624	28.624	29.329	31.124	29.329	34.124	31.053	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Persen	0,1	0,0007	0,1	0,074	1,16	0,0008	1,24	0,055	1,32	0,0009	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	200	109	250	126	366	391	1.000	3.506	1.800	482	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Exp.	3.000	4.246	4.000	4.330	5.080	5.273	5.780	131.148	6.530	276	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6.	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	Orang				24	30		40	113	50	311	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.	Indeks Minat Membaca	Indeks	0,009	0,002	0,1	0,003	0,1	0,011	0,3	0,085	0,5	32,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>18</b>	<b>KEARSIPAN</b>												
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku								100	32	2	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan								31	5	1	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>B.2</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												
<b>1</b>	<b>PARIWISATA</b>												
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	55.637	139.697	61.200	58.329	60.331	65.471	63.328	66.566	66.476	66.868	Dinas Pariwisata
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	-	53	-	66	69	72	72	91	74	92	Dinas Pariwisata
3.	Lama Kunjungan Wisata	Hari	-	-	-	1,05	1,00	1,00	1,05	1	1,10	1	Dinas Pariwisata
4.	Jumlah lokasi yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi	Lokasi	-	-	-	3	3	1	2	2	2	0	Dinas Pariwisata
<b>2</b>	<b>PERTANIAN</b>												
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	42,97	43,55	43,55	43,57	40,82		40,93	*data belum rilis dari BPS	41,04	*data rilis dari BPS 2025	Dinas Pertanian
	Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan												Dinas Pertanian

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	<b>Jumlah Produksi Tanaman Pangan</b>												Dinas Pertanian
	- Padi (ton GKG)	ton GKG	256.701	466.944	269.508	293.487	277.140	244.902	277.260	332.109,05	277.380	331.424,93	Dinas Pertanian
	- Jagung (ton pipilan kering)	ton pipilan kering	1.017	24.086,00	1.053	1.782	1.781,67	11.426,98	1.790,58	12.161,61	1.799,53	11.824,8	Dinas Pertanian
2	<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura</b>												Dinas Pertanian
	- Bawang Merah (ton)	ton	35,14	341,80	38,20	39,00	41,91	324,08	45,27	514,8	48,89	1.067,90	Dinas Pertanian
	- Cabe (ton)	ton	489,45	5.348,35	496,40	498,00	504,51	2.161,49	511,63	2.507,7	518,84	4.110,02	Dinas Pertanian
	- Kentang (ton)	ton	-	553,40	-	63,00	64,04	249,13	64,68	289,86	65,33	220,09	Dinas Pertanian
	- Sayur-sayuran (ton)	ton	-	13.512,02	-	8.114,00	8.115,59	7.985,26	8.116,81	9.767,43	8.118,03	13.419,35	Dinas Pertanian
	- Buah-Buahan (ton)	ton	-	99.469,04	-	97.648,59	97.746,24	69.324,44	97.843,98	96.572,7	97.941,83	96.572,73	Dinas Pertanian
3	<b>Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (PR)</b>												Dinas Pertanian
	Komoditi Prioritas												Dinas Pertanian
	- Kelapa Sawit (ton)	ton	298.408,69	298.735,73	307.321,31	293.602,85	316.928,4	319.945,45	326.911,7	326.912,5	337.372,8	337.400	Dinas Pertanian
	- Karet (ton)	ton	50.716,98	50.847,79	52.231,70	52.826,23	53.892,0	52.404,00	55.562,70	55.563,1	57.396,30	58.400	Dinas Pertanian
	- Kopi Arabica (ton)	ton	2.727,13	2.390,03	2.901,20	2.565,16	2.698,4	3.049,00	2.878,3	2.879,2	3.076,9	3.100	Dinas Pertanian
	- Kopi Robusta (ton)	ton	-	393,42	-	400,32	405,5	436,00	412,3	412,7	418,9	420	Dinas Pertanian
	- Kelapa (ton)	ton	-	1.516,14	-	1.548,51	1.579,6	1.787,00	1.613,5	1.614,2	1.649,00	1.650	Dinas Pertanian
	- Kakao (ton)	ton	-	2.686,31	-	2.825,07	2.909,7	2.825,00	3.303,4	3.030,55	3.157,7	3.158	Dinas Pertanian
	Komoditi Potensial												Dinas Pertanian
	- Cengkeh (ton)	ton	-	25,07	-	12,26	12,30	15,30	12,41	12,6	12,53	12,5	Dinas Pertanian
	- Aren (ton)	ton	-	2.202,63	-	2.181,95	2.359,7	762,00	2.443,5	1.080,86	2.531,4	2.535	Dinas Pertanian
	- Nilam (ton)	ton	-	0,74	-	1,11	1,12	3,40	1,13	1,15	1,14	2,04	Dinas Pertanian
	- Tembakau (ton)	ton	-	0,08	-	0,07	0,075	1,00	0,08	0,1	0,085	1	Dinas Pertanian
4	<b>Komoditi Lainnya</b>												Dinas Pertanian
	Jumlah Produksi Peternakan												Dinas Pertanian
	Produksi Daging (ton)	ton	-	4.949,82	-	4.942,25	4.944,64	4.943,76	4.948,14	4.948,32	4.952,07	4.937,15	Dinas Pertanian
	- Sapi	ton	260,37	467,33	266,88	469,67	470,25	470,27	471,66	472,52	473,08	473,95	Dinas Pertanian
	- Kerbau	ton	90,31	146,94	92,57	147,53	147,71	147,14	148,15	148,42	148,6	149	Dinas Pertanian
	- Kambing	ton	-	109,89	-	111,21	111,88	111,90	112,55	112,68	113,22	113,25	Dinas Pertanian
	- Domba	ton	-	14,14	-	14,85	14,94	14,97	15,03	15,10	15,12	15,15	Dinas Pertanian
	- Babi	ton	-	17,81	-	4,45	4,49	4,46	5	3,36	5	2,59	Dinas Pertanian
	- Unggas	ton	-	4.193,70	-	4.194,54	4.195,38	4.195,02	4.196,22	4.196,24	4.197,05	4.183,21	Dinas Pertanian
	Produksi Telur (kg)	kg	-	6.468.916	-	6.523.512	6.552.477	6.552.534	6.581.572		6.610.797	6.588.284	Dinas Pertanian
	- Ayam Kampung	kg	-	2.845.116	-	2.870.722	2.885.076	2.885.132	2.899.501	2.889.557	2.913.998	2.902.513	Dinas Pertanian
	- Itik	kg	-	3.623.800	-	3.652.790	3.667.401	3.667.402	3.682.071	3.682.089	3.696.799	3.685.771	Dinas Pertanian
													Dinas Pertanian
													Dinas Pertanian
5	<b>PERDAGANGAN</b>												

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian			
5.1	Perdagangan, reoperasi mobil dan motor terhadap PDRB	Persen	-	14,47	-	14,15	15	13,84	15,10	13,84	15,20	9,72	Dinas Perdagangan
5.2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Milliar (Rp)	-	-	-	1.053,44	1.103.012,84	-619.590	1.022.533,34	16 403,53	1.088.659,04	2.190.000,75	Dinas Perdagangan
<b>6</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>												
6.1	Indutri pengolahan terhadap PDRB	Persen	-	11,43	-	11,47	11,47	11,44	11,50	11,44	11,55	10,94	Dinas Perdagangan
6.2	Jumlah Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	Industri	-	-	-	104	110	845	120	98	150	n.a	Dinas Perdagangan
<b>8</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>												
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	24.257,25	17.847,63	25.470,12	18.026,10	18.116,23	18.045	18.206,81	18.117,62	18.297,84	18.142,08	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	1.926,03	1.732,98	1.994,40	1.819,60	2.001,56	1.824,2	2.417,82	2.094,58	2.711,75	2.066,40	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	Kg	35,70	35,37	38,39	38,38	40,65	39,89	42,22	39,37	42,43	40,97	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Tahun	5,59	5,35	5,16	5,14	5,44	5,27	5,59	4,15	5,62	5,54	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>B.3</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSANPENUNJANG</b>												
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>												
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tdk Ada	n.a	Ada	n.a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	n.a	88,95	n.a	88,26	92	88,26	93	80,13	95	86,98	Bappeda
1.3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	n.a	87,57	n.a	92,27	90	92,27	92	98,37	93	98,91	Bappeda
<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>												
2.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	n.a	100	n.a	90	90	88	94	90	94	94	Keuangan
2.2	Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	%	n.a	100	n.a	94	100	90	100	100	100	100	Keuangan
2.3	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	n.a	4	n.a	4	4	4	4	4	4	4	Keuangan
2.4	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	n.a	4	n.a	4	4	4	4	4	4	4	Keuangan
2.5	Frekuensi terbitnya daftar gaji	bulan	n.a	14	n.a	12	12	14	12	14	12	12	Keuangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
2.6	frekuensi pembayaran gaji	bulan	n.a	14	n.a	12	12	14	12	14	12	12	Keuangan
2.7	Persentase peningkatan kualitas pegawai	%	n.a	n.a	n.a	n.a	100	90	100	50	100	95	Keuangan
2.8	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	Jenis	n.a	n.a	n.a	n.a	4	1	-	2	4	n.a	Keuangan
2.9	Frekuensi Diklat yang diikuti	bulan	n.a	n.a	n.a	12	12	n.a	12	0	12	-	Keuangan
2.10	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana kantor	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12		12	12	Keuangan
2.11	Frekuensi komponen instalasi bangunan kantor yang disediakan	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12		12	12	Keuangan
2.12	Frekuensi peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12		12	12	Keuangan
2.13	Frekuensi barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12	12	12	12	Keuangan
2.14	Frekuensi pelaksanaan rapat dan koordinasi ke luar daerah	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12	12	12	12	Keuangan
2.15	Jumlah BMD yang dibeli untuk penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	n.a	107	n.a	41	55	108	51	12	51	144	Keuangan
2.16	Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli	Unit	n.a	2	n.a	5	15	4	15	12	15	1	Keuangan
2.17	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	Unit	n.a	105	n.a	36	40	104	36	50	36	144	Keuangan
2.18	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	n.a	100	n.a	100	100	100	100	90	100	84	Keuangan
2.19	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diproses	Surat	n.a	6.620	n.a	2.000	2.000	4.889	2000	4416	2000	2795	Keuangan
2.20	Frekuensi jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12	12	12	12	Keuangan
2.21	Frekuensi jasa pelayanan umum yang tersedia	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12	12	12	12	Keuangan
2.22	Jumlah BMD yang dirawat	Unit	n.a	16	n.a	126	156	150	150	180	154	140	Keuangan
2.23	Jumlah Kendaraan dinas yang dirawat	Unit	n.a	8	n.a	6	38	37	38	38	38	12	Keuangan
2.24	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	Unit	n.a	8	n.a	34	20	12	17	45	17	10	Keuangan
2.25	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dirawat	Unit	n.a	63	n.a	85	90	60	90	90	95	80	Keuangan
2.26	Jumlah aset tetap lainnya yang dirawat	Paket	n.a	n.a	n.a	1	8	8	5	7	4	4	Keuangan
2.27	Ketetapan waktu penyusunan APBD	%	n.a	100	n.a	100	100	100	100	80	100	100	Keuangan
2.28	Persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai	%	n.a	100	n.a	100	100	100	100	100	100	95	Keuangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
	dengan peraturan perundang-undangan												
2.29	ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	%	n.a	100	n.a	100	100	100	100	100	100	90	Keuangan
2.30	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran	%	n.a	60,09	n.a	100	100	100	100	100	100	90	Keuangan
2.31	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen anggaran	Dokumen	n.a	14	n.a	13	13	13	13	4	13	-	Keuangan
2.32	Jumlah buku KUA PPAS yang disusun	Dokumen	n.a	2	n.a	2	2	2	2	2	2	2	Keuangan
2.33	Jumlah buku perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Buku	n.a	2	n.a	2	2	2	2	2	2	n.a	Keuangan
2.34	Jumlah RKA OPD yang diverifikasi	OPD	n.a	58	n.a	58	58	68	58	58	58	56	Keuangan
2.35	Jumlah Perubahan DPA RKA OPD yang diverifikasi	OPD	n.a	58	n.a	58	58	68	58	58	58	56	Keuangan
2.36	Jumlah DPA OPD yang diverifikasi	OPD	n.a	58	n.a	58	58	68	58	58	58	54	Keuangan
2.37	Jumlah Perubahan DPA OPD yang diverifikasi	OPD	n.a	58	n.a	58	58	68	58	58	58	54	Keuangan
2.38	Jumlah buku yang diterbitkan	OPD	n.a	4	n.a	4	4	4	4	4	4	2	Keuangan
2.39	Jumlah buku yang diterbitkan	OPD	n.a	4	n.a	4	4	4	4	4	4	2	Keuangan
2.40	Jumlah Dokumen SBU yang disusun	OPD	n.a	1	n.a	1	1	1	1	1	1	2	Keuangan
2.41	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi	OPD	n.a	58	n.a	58	58	68	58	-	58	n.a	Keuangan
2.42	Persentase penatausahaan anggaran daerah	%	n.a	100	n.a	100	100	97	100	85	100	n.a	Keuangan
2.43	Frekuensi koordinasi dan pengelolaan kas yang dilakukan	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12	12	12	12	Keuangan
2.44	Jumlah SPD yang diterbitkan	SPD	n.a	1.273	n.a	697	700	696	700	672	700	834	Keuangan
2.45	Frekuensi penyusunan laporan	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12	12	12	12	Keuangan
2.46	Jumlah SP2D yang diterbitkan	SP2D	n.a	5.347	n.a	7.306	6.000	7.323	6000	7093	6000	6230	Keuangan
2.47	Persentase penatausahaan keuangan daerah	%	n.a	100	n.a	100	100	90	100	80	100	90	Keuangan
2.48	Frekuensi koordinasi yang dilakukan	Bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12	12	12	12	Keuangan
2.49	Jumlah buku laporan yang disusun	Buku	n.a	3	n.a	3	3	2	3	3	3	2	Keuangan
2.50	Jumlah Ranperda yang disusun	Buku	n.a	4	n.a	4	4	3	4	3	4	1	Keuangan
2.51	Jumlah Laporan LHP yang disusun	Laporan	n.a	n.a	n.a	n.a	1	n.a	1	-	1	n.a	Keuangan
2.52	Jumlah kerugian daerah yang terpulihkan	tuntutan	n.a	n.a	n.a	n.a	12	n.a	12	-	12	n.a	Keuangan
2.53	Jumlah dokumen yang disusun	Buku	n.a	2	n.a	2	4	n.a	4	-	4	n.a	Keuangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
2.54	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	n.a	n.a	n.a	2	1	n.a	1	-	1	n.a	Keuangan
2.55	Frekuensi pengelolaan dana bantuan keuangan	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12	12	12	12	Keuangan
2.56	ADD dana Desa Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga	bulan	n.a	12	n.a	12	12	12	12	12	12	12	Keuangan
2.57	Ketepatan waktu penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	%	n.a	80	n.a	85	85	85	85	85	90	85	Keuangan
2.58	Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan pengelolaan Barang Milik Daerah	%	n.a	100	n.a	100	90	85	95	85	95	90	Keuangan
2.59	Ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah	%	n.a	100	n.a	100	95	85	95	85	100	95	Keuangan
2.60	Persentase capaian penatausahaan BMD	%	n.a	10	n.a	10	95	75	95	90	100	100	Keuangan
2.61	Jumlah dokumen penertiban BMD	Dokumen	n.a	10	n.a	10	427	n.a	528	90	528	n.a	Keuangan
2.62	Jumlah dokumen standar harga barang yang disusun	Dokumen	n.a	n.a	n.a	n.a	1	2	1	1	1	151	Keuangan
2.63	Jumlah dokumen standar kebutuhan BMD yang disusun	Dokumen	n.a	1	n.a	1	1	n.a	1	1	1	n.a	Keuangan
2.64	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	Dokumen	n.a	1	n.a	1	1	n.a	1	-	1	n.a	Keuangan
2.65	Jumlah kebijakan yang disusun	Dokumen	n.a	n.a	n.a	n.a	3	n.a	3	-	3	n.a	Keuangan
2.66	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun	Dokumen	n.a	6	n.a	6	5	2	5	5	5	n.a	Keuangan
2.67	Jumlah dokumen inventarisasi BMD yang disusun	Dokumen	n.a	6	n.a	6	n.a	n.a	1	-	1	n.a	Keuangan
2.68	Jumlah sertifikat tanah pemda yang disusun	Dokumen	n.a	99	n.a	44	400	36	500	214	500	154	Keuangan
2.69	Jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun	Dokumen	n.a	n.a	n.a	n.a	1	1	1	1	1	n.a	Keuangan
2.70	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	n.a	20	n.a	20	2	n.a	2	-	2	n.a	Keuangan
2.71	Jumlah dokumen penertiban yang disusun	Dokumen	n.a	10	n.a	10	10	n.a	10	-	10	n.a	Keuangan
2.72	Jumlah laporan BMD yang disusun	Dokumen	n.a	10	n.a	10	1	1	1	-	1	1	Keuangan
2.73	Frekuensi pembinaan pengelolaan BMD	Dokumen	n.a	0	n.a	0	1	n.a	1	-	1	n.a	Keuangan
2.74	Jumlah pendapatan asli daerah	Rupiah	n.a	91.664.12 3.964	n.a	100.203.0 36.445	120.243.6 43.734,00	93.950.78 0.407,16	122.648.5 16.609	1.257.762 .340.26 9,05	126.327.9 72.107	146.027.3 82.344,88	Keuangan
<b>3</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA</b>												

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
	<b>PENDIDIKANDAN PELATIHAN</b>												
	<b>KEPEGAWAIAN DAERAH</b>												
3.1	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Sumber Daya Manusia	orang	-	9	-	454	355	76	455	- Ujian Dinas 157 org PKA 5 org PKP 5 org - Latsar CPNS 62 org Total 229 org	340	Total 447 org	Badan Kepegawaian Daerah
3.2	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persenta se	-	98	-	82	85	80	85	88,28%	85	58,61	Badan Kepegawaian Daerah
3.3	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Persenta se	-	98	-	85	90	78,15	90	93,83%	90	82,22	Badan Kepegawaian Daerah
<b>4</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>												
1	Indeks daya saing daerah	Skor Indeks	2,1	2,1012	2,5	2,512	2,75	2,53	3,00	Sejak tahun 2022 proses penginput an variabel indikator sudah menjadi kewenan gan Kemenda gri	3,25	Sejak tahun 2022 proses penginput an variabel indikator sudah menjadi kewenan gan Kemenda gri	Badan Penelitian dan Pengembangan
2	Indeks Inovasi Daerah	Skor Indeks	2,1	2,1012	44,76	44,76	48	54,56	50	Hasil diperole h di tahun n + 1	53	52,65	Badan Penelitian dan Pengembangan
<b>5</b>	<b>PENGAWASAN</b>												
1	Opini BPK	Kategori	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	n.a	WTP	Belum rilis	Inspektorat
2	Nilai SAKIP	Kategori	BB	C	BB	CC	B	CC	B	CC	B	Bulan Septemb er baru dirilis	Inspektorat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
<b>6</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN</b>												
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekwan
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekwan
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekwan
<b>7</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>												
7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah	Indeks	n.a	n.a	B	B (77,69)	B	B (73,63)	B	B	B	B	Sekretariat Daerah
7.2	Perkembangan kemajuan laporan realisasi fisik pembangunan daerah setiap OPD secara tepat waktu (%)	Persen	100	85	85	85	100	90,5	100	91	100	88	Sekretariat Daerah
7.3	Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (%)	Persen	n.a	n.a	n.a	95	100	88,57	100	77,90	100	100	Sekretariat Daerah
7.4	Jumlah eksaminasi harmonisasi produk hukum daerah (dokumen)	Dokumen	900 Produk Hukum Daerah	899 Produk Hukum Daerah	900 Produk Hukum Daerah	1.043 Produk Hukum Daerah	930 Produk Hukum Daerah	1.513 Produk Hukum Daerah	950 Produk Hukum Daerah	1.581 Produk Hukum Daerah	975 Produk Hukum Daerah	1581 Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah
7.5	Tingkat kepuasan terhadap layanan administrasi dan konsultasi (%)	Persen	100	100	95	95	100	88	100	95	100	96	Sekretariat Daerah
7.6	Tingkat realisasi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan gedung dan mess pemerintah provinsi (Rp)	Persen	55.100.00 0,-	29.314.00 0,-	103.100.0 00,-	33.350.00 0,-	129.050.0 00,-	46.800.00 0,-	232.363.2 50	32.660.00 0	267.217.8 00	66.199.00 0	Sekretariat Daerah
7.7	Indkes Reformasi Birokrasi	Indeks	B	C	B	C	B	C	B	CC	BB	Masih Proses penilaian	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
7.8	Peringkat LPPD	Skor	Peringkat 25 Kab/Kota	n.a	Peringkat 23 Kab/Kota	n.a	Peringkat 21 Kab/Kota	n.a	2,96	n.a	3,01	Masih Proses penilaian	Sekretariat Daerah
7.9	Indeks kepuasan masyarakat	Kategori	n.a	n.a	B	B	B	B	B	B	B	B	Sekretariat Daerah
<b>C.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>												
<b>C.1</b>	<b>FOKUS KEMAMPUAN EKONOMIDAERAH</b>												
1	Pendapatan Perkapita	Rp. (Ribu)				20.594.39 8	31.104.17 3	31.022.08 0	31.644.83 7	33.584.95 0	32.185.50 1	36.867.69 0	OPD Penanggung jawab Pendapatan Daerah
<b>C.2</b>	<b>FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTU R</b>												
1	Indeks Infrastruktur	Persen				49,54	52,34	51.82	54,67	57.84	55,14	57.84	Dinas PU
2	Persentase akses air minum layak	persen				75,04	76,80	74	77,50	74.86	80,00	74.86	Dinas PU
3	Persentase akses sanitasi layak	Persen				39,44	48,99	36.74	58,53	37.92	68,10	37.92	Dinas PU
4	Panjang jalan dan jembatan kondisibaik	Persen				55,49	56,00	46.19	59,00	61.39	62,00	61.39	Dinas PU
5	Rasio jaringan irigasi kondisi baik	persen				41,74	45,50	33.95	49,50	52.64	54,50	53.04	Dinas PU
6	Persentase balai kecamatan, kelurahan dan desa dalam kondisi Baik	Persen				47,83	50,22	49.8	52,73		55,37		Dinas PU

## 2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

### 2.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penggambaran keuangan daerah dapat dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48  
Skala Interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Mandailing Natal sebesar 7,11% dan masuk kategori sangat kurang karena nilai DOF nya antara 0,00%-10,00%. Data DOF Kabupaten Mandailing Natal di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.49  
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Pendapatan	1,506,860,933,386	1,699,660,832,133	1,587,365,102,294	1,587,365,102,294	1,722,385,089,387	1,680,670,332,429
Pendapatan Asli Daerah	90,454,777,183	142,409,606,086	93,950,780,407	93,950,780,407	124,677,017,400	119,434,529,165
Persentase	6.00 %	8.38 %	5.92 %	7.24 %	7.72 %	7,11 %

Sumber: BPKAD & Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori baik, maka Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat maupun provinsi akan semakin berkurang. Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan DOFD dengan strategi diversifikasi sumber pendapatan seperti pengembangan sektor pariwisata berbasis pajak lokal atau penguatan retribusi layanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat menggali sumber pendapatan melalui pembentukan BUMD. Potensi Kabupaten Mandailing Natal yang besar sebagaimana diuraikan pada sub bab Potensi Sumber Daya Alam sebelumnya seperti perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, pertambangan, dll dapat dioptimalkan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Beberapa keuntungan lain yang diperoleh dengan pembentukan BUMD, diantaranya:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: BUMD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan investasi, dan mempromosikan produk lokal. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 tercatat 4.83%. Selama empat tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara terutama pada tiga tahun terakhir. Selain itu dalam lingkup regional wilayah barat Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal lebih lambat dibandingkan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Padang Lawas.
2. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 sebesar 7.22% lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pembentukan BUMD dapat memberikan peluang bagi masyarakat Mandailing Natal untuk berkarir dan mengembangkan potensi daerah. Selain itu, dengan penyerapan tenaga kerja, angka kemiskinan yang pada tahun 2024 sebesar 8,69% diharapkan dapat diturunkan.
3. Meningkatkan Kemandirian Daerah. BUMD dapat membantu meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkannya pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Mandailing Natal secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2025. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

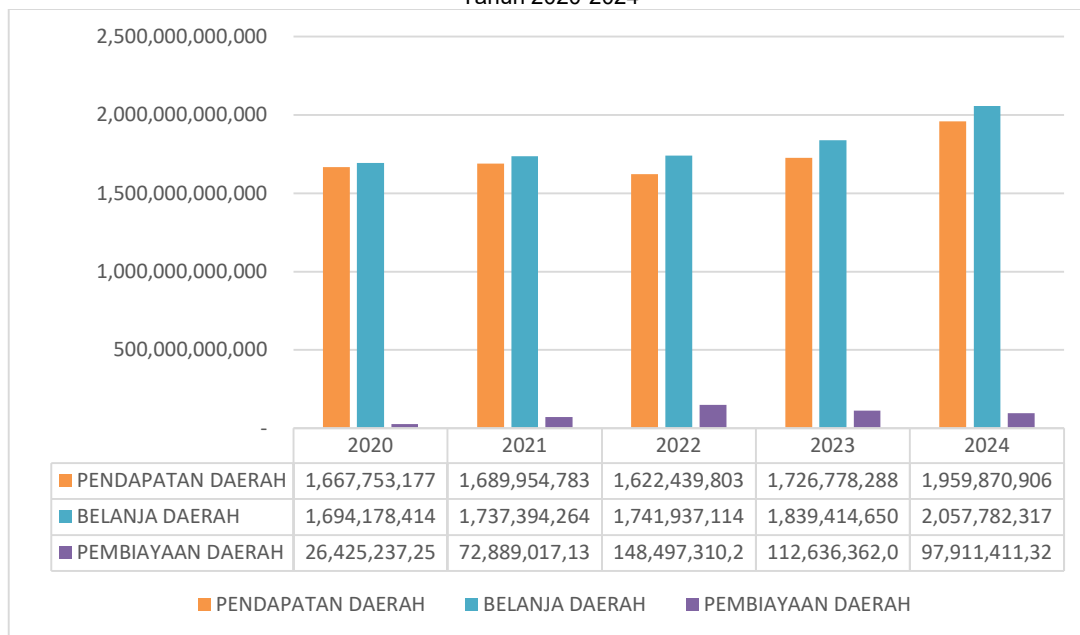
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

### 2.5.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Mandailing Natal dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada Gambar berikut.

Diagram 2. 40  
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

## A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Dengan mengacu pada peraturan yang sama, terdapat perubahan pada struktur Pendapatan Daerah yaitu pada rincian pendapatan transfer. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, rincian pendapatan transfer meliputi transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut dana perimbangan diatur sebagai bagian pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Selain dana perimbangan, komponen pendapatan lainnya yang juga dikelompokkan dalam jenis pendapatan transfer pemerintah pusat antara lain: dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara komponen pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dikelompokkan ke dalam pendapatan transfer antar-daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

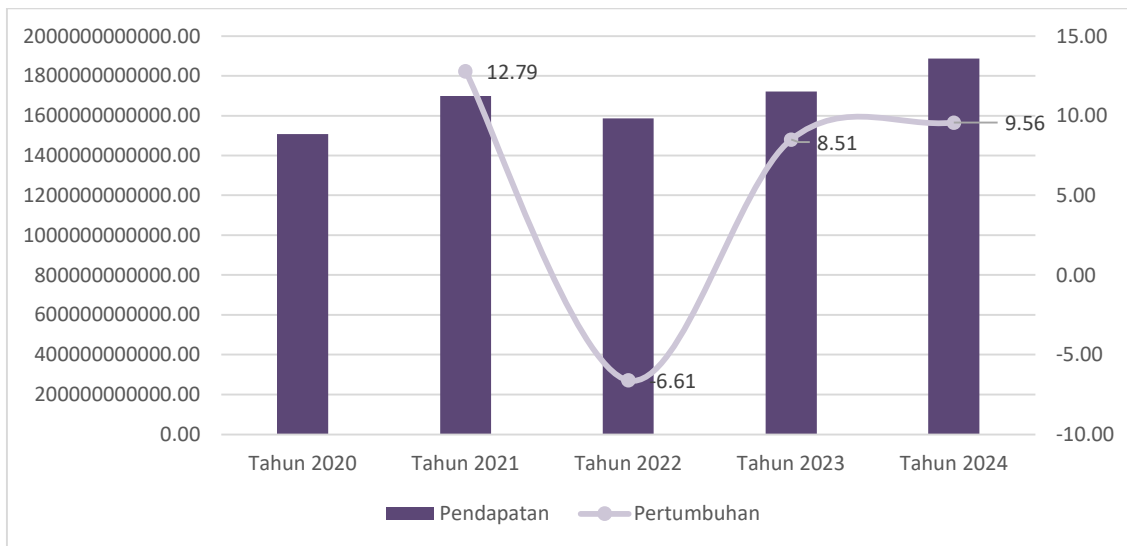
Tabel 2.50  
Realisasi APBD Tahun 2020-2024

No.	Uraian	REALISASI				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,506,860,933,386</b>	<b>1,699,660,832,133</b>	<b>1,587,365,102,294</b>	<b>1,722,385,089,387</b>	<b>1,887,079,704,943</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	90,454,777,183	142,409,606,086	93,950,780,407	124,677,017,400	145,680,464,747
2	Pendapatan Transfer	1,315,496,993,073	1,471,726,289,000	1,477,646,951,981	1,577,229,394,783	1,735,036,405,130
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100,909,163,130	85,524,937,047	15,767,369,906	20,478,677,204	6,362,835,066
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,559,758,322,076</b>	<b>1,614,881,787,325</b>	<b>1,604,651,809,027</b>	<b>1,718,760,178,302</b>	<b>1,919,437,539,521</b>
1	Belanja Operasional	1,032,862,119,726	1,020,902,139,553	1,030,199,828,401	1,133,825,712,440	1,306,319,323,850
2	Belanja Modal	138,152,200,872	217,236,641,546	191,100,101,983	195,918,115,974	211,131,358,148
3	Belanja Tidak Terduga	23,585,560,597	12,404,963,485	19,173,221,791	458,500,000	521,500,000.00
4	Belanja Transfer	365,158,440,881	364,338,042,741	364,178,656,852	388,557,849,888	401,465,357,523
	Surplus/Defisit	(52,897,388,690)	84,779,044,808	(17,286,706,733)	3,624,911,085	(32,357,834,578)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>116,116,603,126</b>	<b>75,943,982,262</b>	<b>139,787,141,163</b>	<b>113,506,979,630</b>	<b>117,131,976,932</b>
1	Penerimaan Pembiayaan	116,116,603,126	63,219,214,433	135,287,141,163	113,506,979,630	117,131,976,932
2	Pengeluaran Pembiayaan		12,724,767,829	4,500,000,000	-	
	Pembiayaan Netto	116,116,603,126	50,494,446,604	130,787,141,163	113,506,979,630	117,131,976,932
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	63,219,214,433		113,500,434,430	117,131,890,615	84,774,142,354.83
	Total Belanja Daerah	1,675,874,925,202	1,627,606,555,154	1,609,151,809,027	1,718,760,178,302	1,919,437,539,521

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, 2020-2024

Pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 meningkat sebesar 25,23%. Pada kurun waktu tersebut, pendapatan cenderung meningkat dari Rp 1,506,860,933,386 pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp1,887,079,704,943. Terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2022 terutama karena realiasi Pajak Daerah yang menurun Rp.69.548.946.404 dari tahun 2021 serta menurunnya besaran komponen lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan pendapatan di tampilan pada Diagram berikut:

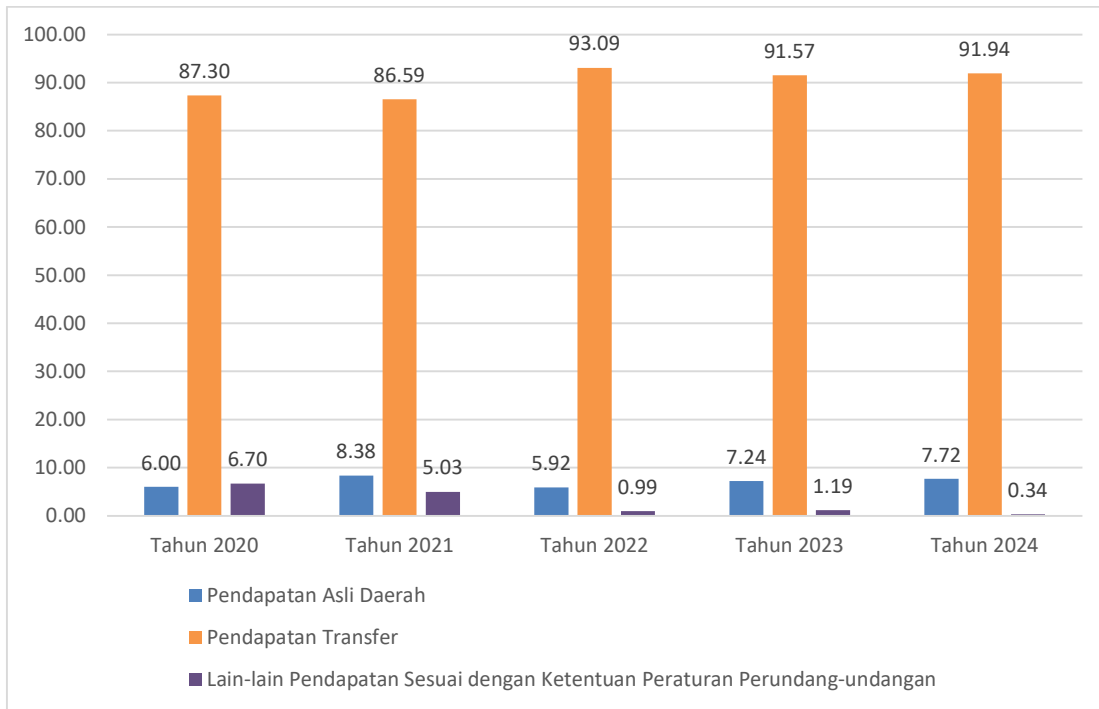
Diagram 2.41  
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD, data diolah

Dari Diagram di atas terlihat bahwa pada 2021, pendapatan daerah meningkat 12,79% dari pendapatan tahun 2020. Menurun di tahun 2022 dan terus meningkat sampai tahun 2024. Jika dilihat dari proporsi komponen Pendapatan Daerah, pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh pendapatan Transfer dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif, sebagaimana terlihat pada Diagram berikut:

Diagram 2.42  
 Proporsi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD, data diolah 2025

pada tahun 2020 Pendapatan Transfer memiliki kontribusi sebesar 87.30% kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 86,59%. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 93.09% yang kemudian menurun menjadi 91.94% hingga tahun 2024. Besarnya komposisi dana transfer serta rendahnya proporsi PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Mandailing Natal sangat rendah.

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13.49% per tahun dan Pendapatan Transfer meningkat dengan rata rata pertumbuhan sebesar 7,22% per tahun, sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 40.89% per tahun.

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

1. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
2. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi dan Badan Usaha Milik Daerah.

3. **Pembangunan Infrastruktur:** Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
4. **Pengelolaan Utang:** Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
5. **Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK):** Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
6. **Pengembangan Sektor Ekonomi:** Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
7. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
8. **Kebijakan pendapatan daerah** haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

## **B. Belanja Daerah**

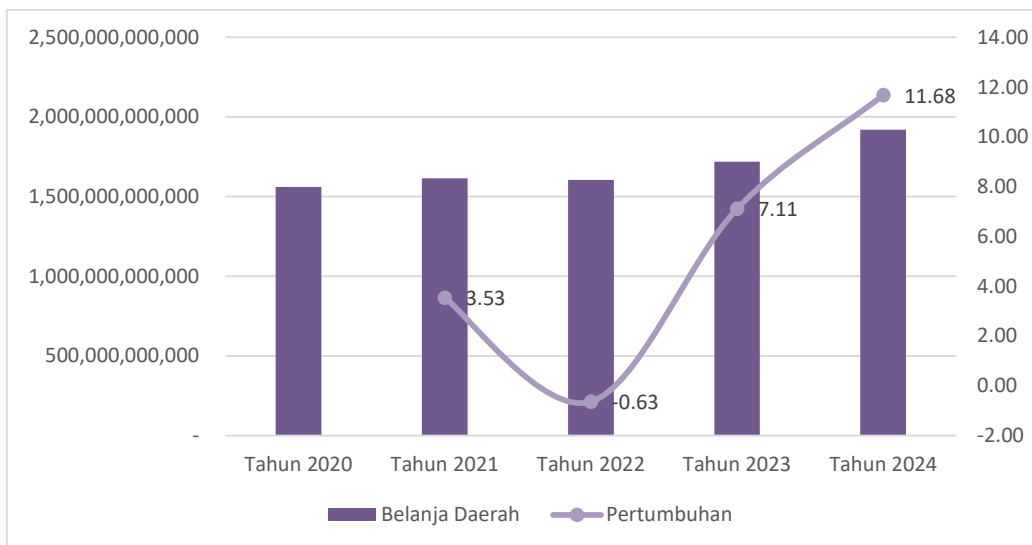
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1. **Belanja operasi**  
Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. **Belanja modal**  
Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. **Belanja tidak terduga** Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. **Belanja transfer**  
Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

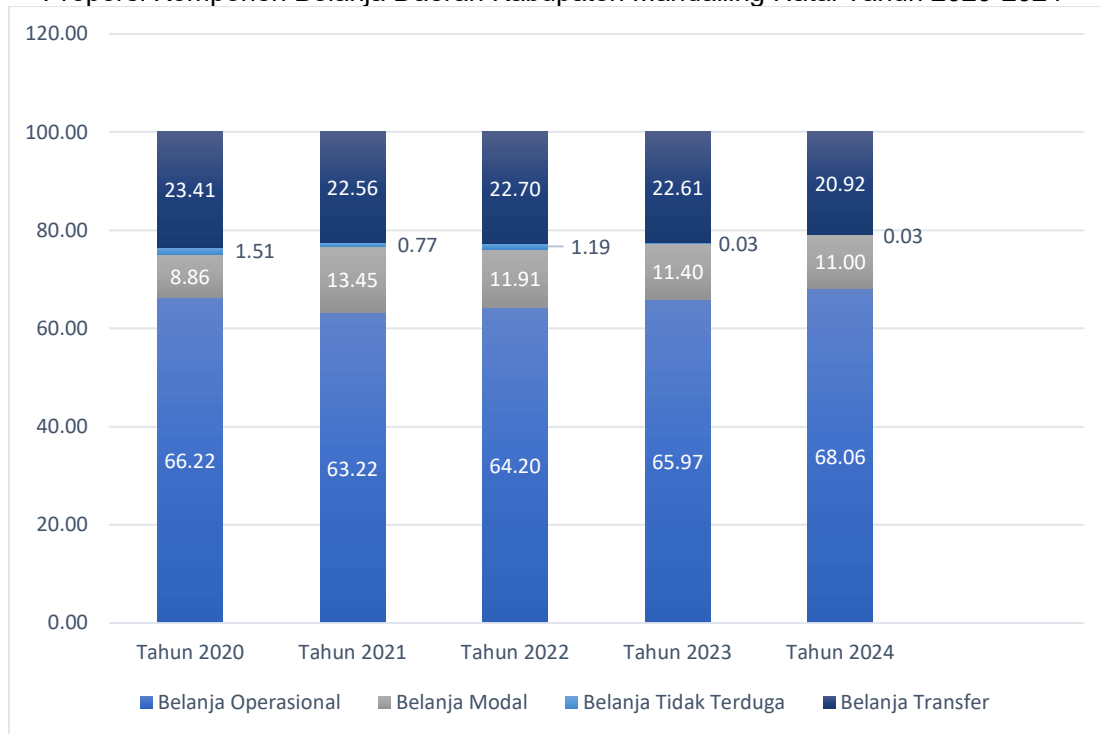
Diagram 2.43  
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD, data diolah 2025

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi namun trennya meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,63% per tahun. Fluktuasi Belanja Daerah terjadi di tahun 2022 di mana realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 1,614 triliun menurun 0.63% menjadi Rp 1,604 triliun pada tahun 2022 dan kemudian meningkat hingga mencapai Rp 1,919 triliun di tahun 2024. Penurunan belanja pada tahun 2022 lebih disebabkan kurang terserapnya anggaran belanja daerah.

Diagram 2.44  
Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD, data diolah 2025

Komposisi terbesar Belanja Daerah terdapat pada komponen belanja Operasional dengan proporsi sebesar 66,22% ditahun 2020 meningkat menjadi sebesar 68,06% ditahun 2024, diikuti belanja modal yang cenderung fluktuatif pada kisaran 8,86-13,45% selanjutnya pada belanja transfer cenderung pada kisaran 20,92-23,41%. Unsur belanja tak terduga proporsinya paling rendah bahkan di bawah 2%.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

1. Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

3. Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
4. Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
5. Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, pendirian badan usaha daerah atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek proyek investasi.
6. Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
7. Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

### **C. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Mandailing Natal berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Mandailing Natal berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi). Sementara itu, Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Perkembangan penerimaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan netto Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.51  
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020- 2024

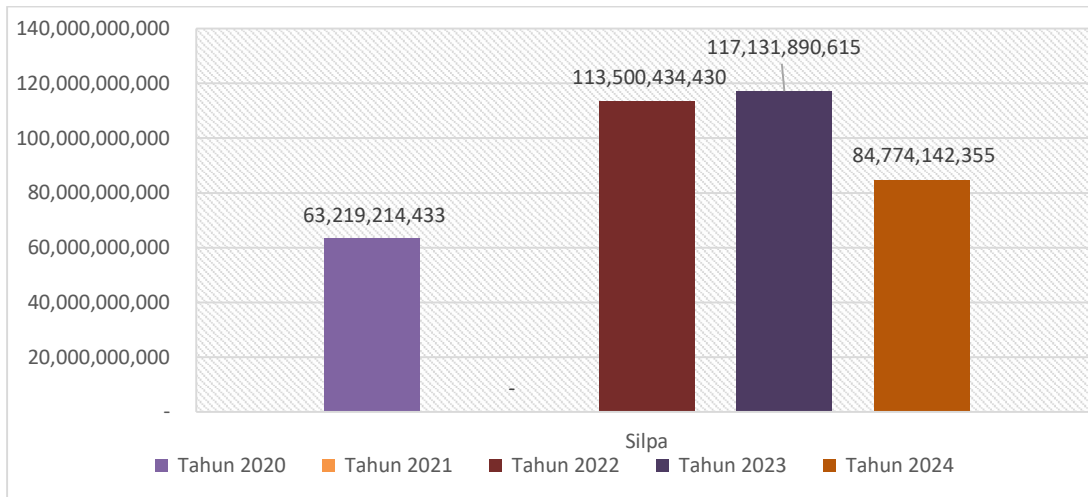
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pembiayaan	116,116,603,126	63,219,214,433	135,287,141,163	113,506,979,630	117,131,976,932.37
Pengeluaran Pembiayaan		12,724,767,829	4,500,000,000	-	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Dari data di atas terlihat bahwa perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Mandailing Natal berfluktuasi. Pada tahun 2020 penerimaan pembiayaan sebesar Rp116.116.603.126 meningkat menjadi Rp. 117.131.976.932,37 pada tahun 2024.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kabupaten Mandailing Natal dalam periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, terjadi lonjakan cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 113.500.434.430 dimana pada tahun 2020 SILPA berada pada angka Rp. 63.219.214.433, perkembangan SILPA kemudian menurun hingga pada tahun 2024 menjadi Rp. 84.774.142.355 Secara rinci perkembangan SILPA Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020-2024 dilihat pada gambar berikut :

Diagram 2.45  
Perkembangan SILPA Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

## **D. Neraca Daerah**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Badan Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

### **1. Aset**

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara keseluruhan nilai aset Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 3.50% pertahun. Tercatat aset Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 senilai Rp. 1.859.622.595.201,34 menjadi Rp. 2,124,994,531,024.08 pada tahun 2024. Adapun peningkatan aset tersebut dipengaruhi oleh semakin meningkatnya aset tetap dan investasi jangka panjang Kabupaten Mandailing Natal. Rata-rata aset tetap berkontribusi sebesar 87,39% terhadap nilai total aset. Sedangkan aset lainnya rata-rata berkontribusi sebesar 1,25% dari total nilai aset Kabupaten Mandailing Natal dan investasi jangka Panjang rata-rata berkontribusi sebesar 3,19%. Besaran nilai aset berasal dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi yang masih dalam pengerjaan.

### **2. Kewajiban**

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Mandailing Natal hanya berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cenderung meningkat dari Rp. 55,497,746.00 pada tahun 2020

menjadi Rp.2,037,348,519.00 pada tahun 2024. Jika dilihat dari strukturnya maka kewajiban jangka pendek pada tahun 2020-2024 berasal dari Jangka Pendek Lainnya, utang beban dan utang belanja.

### **3. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas dana Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tren yang semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.48%. Tercatat nilai ekuitas Kabupaten Mandailing Natal ditahun 2020 sebesar Rp. 1,859 Triliun dan menjadi Rp. 2.122 Triliun ditahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa selisih antara nilai aset yang ada terhadap kewajiban yang harus dibayarkan terus meningkat. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020-2024 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52  
Neraca Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>1,859,622,595,201.34</b>	<b>2,069,641,613,078.03</b>	<b>2,078,295,195,850.54</b>	<b>2,150,774,759,426.15</b>	<b>2,124,994,531,024.08</b>	<b>3.50</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>88,561,402,345.61</b>	<b>220,831,523,556.58</b>	<b>142,423,414,025.28</b>	<b>218,190,136,830.02</b>	<b>177,656,030,189.54</b>	<b>37.12</b>
1	Kas di kas daerah	57,366,452,199.68	132,849,003,366.41	103,124,216,983.73	107,433,689,043.78	74,811,197,827.76	20.75
2	Kas di bendahara penerimaan	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Kas di bendahara pengeluaran	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Kas di BLUD	4,840,133,938.00	1,265,333,488.84	9,412,145,082.64	7,012,465,763.65	8,320,254,165.85	140.79
5	Kas lainnya di bendahara pengeluaran dana BOS	1,012,628,296.00	1,043,912,105.00	823,446,854.00	816,415,340.00	817,602,198.00	-4.68
6	Kas Dana Kapitasi FKTP	0.00	115,242,453.09	125,689.10	1,869,320,467.96	98,010,428.22	495654.26
7	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	0.00	0.00	40,499,820.84	0.00		-100.00
8	Piutang pendapatan	22,213,244,448.00	51,015,260,507.00	10,380,054,326.00	80,657,989,337.00		156.76
9	Piutang lain-lain	167,944,800.00	600,487,026.00	1,123,448,580.00	4,873,091,341.00	700,487,026.00	148.19
10	Penyisihan piutang	-16,915,164,853.07	-13,298,282,684.76	-2,103,002,307.03	-3,403,465,724.37	(4,532,539,956.29)	-2.64
11	Persediaan	19,876,163,517.00	47,240,567,295.00	19,622,478,996.00	18,930,631,261.00	16,685,197,072.00	15.96
12	Beban dibayar dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Kas Dana BOSP					610,018.00	
	Kas Dana BOK Puskesmas					726,467,717.00	
	Piutang Pajak Daerah					10,378,910,715.00	
	Piutang Transfer antar Daerah					69,649,832,978.00	
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>52,986,507,466.73</b>	<b>65,740,694,072.45</b>	<b>70,178,243,423.11</b>	<b>70,160,291,968.11</b>	<b>70,158,037,300.53</b>	<b>7.70</b>
2.1	Investasi jangka panjang non permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

No.	URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Investasi non permanen-dana bergulir	2,618,836,787.00	2,618,836,787.00	2,589,891,137.00	2,583,273,937.00	2,589,819,137.00	-0.28
2	Penyisihan investasi non permanen-dana bergulir	-2,618,836,787.00	-2,618,836,787.00	-2,589,891,137.00	-2,583,273,937.00	(2,589,819,137.00)	-0.28
2.2	Investasi jangka panjang permanen	52,986,507,466.73	65,740,694,072.45	70,178,243,423.11	70,160,291,968.11	70,158,037,300.53	7.70
	Penyediaan modal pemerintah daerah	52,986,507,466.73	65,740,694,072.45	70,178,243,423.11	70,160,291,968.11	70,158,037,300.53	7.70
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>1,672,399,652,524.00</b>	<b>1,747,806,029,138.00</b>	<b>1,851,208,797,827.00</b>	<b>1,847,332,797,089.00</b>	<b>1,862,058,787,610.99</b>	<b>2.75</b>
1	Tanah	303,798,048,990.00	312,525,278,742.00	326,730,650,258.00	327,192,466,422.00	327,753,175,022.00	1.93
2	Peralatan dan mesin	426,943,924,955.00	467,848,228,288.00	511,133,781,106.00	542,795,668,640.00	583,888,875,924.99	8.15
3	Gedung dan bangunan	828,368,297,765.00	852,317,200,467.00	885,441,314,629.00	934,776,315,187.00	1,145,089,419,602.00	8.71
4	Jalan, irigasi dan jaringan	1,672,617,132,765.00	1,741,262,353,966.00	1,913,283,354,146.00	1,973,556,890,549.00	2,038,425,307,890.00	5.11
5	Aset tetap lainnya	123,246,743,746.00	132,052,000,146.00	139,235,449,323.00	147,697,338,600.00	158,558,896,150.00	6.50
6	Konstruksi dalam pengerjaan	24,840,358,988.00	86,627,940,042.00	78,480,766,124.00	81,833,324,155.00	13,339,632,306.00	39.98
7	Akumulasi penyusutan	-1,707,414,854,685.00	-1,844,826,972,513.00	-2,003,096,517,759.00	-2,160,519,206,464.00	(2,404,996,519,284.00)	8.95
<b>1.4</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>45,675,032,865.00</b>	<b>35,263,366,311.00</b>	<b>14,484,740,575.15</b>	<b>15,091,533,539.02</b>	<b>15,121,675,923.02</b>	<b>-19.33</b>
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	907,200,000.00	967,200,000.00	907,200,000.00	907,200,000.00	907,200,000.00	0.10
2	Aset tidak berwujud	226,685,000.00	226,685,000.00	226,685,000.00	1,129,490,000.00	1,129,490,000.00	99.57
3	Aset lain-lain	160,409,244,916.00	116,117,876,292.00	67,194,024,754.15	61,975,894,675.02	66,227,551,493.02	-17.66
4	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	-119,805,327,051.00	-85,985,624,981.00	-57,881,621,925.00	-52,959,503,882.00	(57,181,018,316.00)	-15.36
5	Tagihan angsuran sewa	3,937,230,000.00	3,937,230,000.00	4,038,452,746.00	4,038,452,746.00	4,038,452,746.00	0.64
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>55,497,746.00</b>	<b>55,497,746.00</b>	<b>55,497,746.00</b>	<b>2,977,759,298.05</b>	<b>2,037,348,519.00</b>	<b>1308.49</b>
<b>2.1</b>	<b>Kewajiban jangka pendek</b>	<b>55,497,746.00</b>	<b>55,497,746.00</b>	<b>55,497,746.00</b>	<b>2,977,759,298.05</b>	<b>2,037,348,519.00</b>	<b>1308.49</b>
1	Utang piutang pihak ketiga-BUD	0.00	0.00	0.00	0.00		

No.	URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Utang piutang pihak ketiga-bendahara pengeluaran	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Utang beban	0.00	0.00	0.00	2,922,261,552.05		-100.00
4	Utang pihak ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Utang jangka pendek lainnya	55,497,746.00	55,497,746.00	55,497,746.00	55,497,746.00	55,497,746.00	0.00
	Utang Belanja					1,981,850,773.00	
<b>2.2</b>	<b>Kewajiban jangka panjang</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	
	Utang dalam negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Utang jangka panjang lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>1,859,567,097,455.34</b>	<b>2,069,586,115,332.03</b>	<b>2,078,239,698,104.54</b>	<b>2,147,797,000,128.10</b>	<b>2,122,957,182,505.08</b>	<b>3.48</b>
	Ekuitas	1,859,567,097,455.34	2,069,586,115,332.03	2,078,239,698,104.54	2,147,797,000,128.10	2,122,957,182,505.08	3.48
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1,859,622,595,201.34</b>	<b>2,069,641,613,078.03</b>	<b>2,078,295,195,850.54</b>	<b>2,150,774,759,426.15</b>	<b>2,124,994,531,024.08</b>	<b>3.50</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, 2025

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2013-2017 digunakanlah beberapa analisis rasio, antara lain:

### 1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, rasio lancar Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berfluktuasi namun mempunyai tren yang menurun. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ditahun 2020 sebesar 159.576,58%. Artinya Kabupaten Mandailing Natal ditahun 2020 mempunyai kemampuan menutup utang jangka pendeknya sebesar 159.576,58% dari total kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan ditahun 2024 kemampuan Kabupaten Mandailing Natal dalam menutup kewajiban jangka pendek sebesar 8719% (87,19 kali) dari total kewajiban jangka pendek yang ada. Dengan melihat nilai rasio lancar ini yang relatif cukup besar, maka sebenarnya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal masih punya kemampuan untuk meningkatkan investasi sehingga dapat menambah penerimaan daerah setidaknya hingga nilai rasio lancar menjadi antara 100%-200% dari nilai kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 2.53  
Rasio Lancar Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
ASET LANCAR	88,561,402,345.61	220,831,523,556.58	142,423,414,025.28	218,190,136,830.02	177,656,030,189.54
KEWAJIBAN	55,497,746.00	55,497,746.00	55,497,746.00	2,977,759,298.05	2,037,348,519.00
Rasio (%)	159576.58	397910.80	256629.19	7327.33	8719.96

Sumber: BPKAD, 2025 (diolah)

## 2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset atau asset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisadimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

### a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Ekuitas)

Merupakan Perbandingan antara utang–utang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Jika dilihat dari data yang ada, rasio utang terhadap ekuitas Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2020-2024 tidak pernah lebih dari 1%. Artinya total jumlah kewajiban yang ada tidak pernah lebih dari 1% dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada. Adapun nilai rasio tertinggi terjadi ditahun 2023 yaitu sebesar 0,139%. Itu artinya nilai modal / kekayaan bersih daerah masih sangat cukup sekali untuk menjamin pembayaran utang yang ada.

Tabel 2.54  
Rasio Hutang terhadap Ekuitas Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
KEWAJIBAN	55,497,746.00	55,497,746.00	55,497,746.00	2,977,759,298.05	2,037,348,519.00
EKUITAS	1,859,567,097,455.34	2,069,586,115,332.03	2,078,239,698,104.54	2,147,797,000,128.10	2,122,957,182,505.08
<i>TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO</i>	0.003	0.003	0.003	0.139	0.096

Sumber: BPKAD, 2025 (diolah)

### b) *Rasio Utang terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Asset Ratio)*

Rasio ini merupakan perbandingan antara utang (baik utang lancar maupun utang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio utang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total utang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Karena nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 2020-2024 nilainya relatif kecil, maka hasilnya akan tidak jauh berbeda dengan nilai Rasio utang terhadap Ekuitas yang telah dibahas sebelumnya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio utang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah lebih dari 1%. Artinya total jumlah kewajiban yang ada tidak pernah lebih dari 1% dari total aset yang ada. Adapun nilai rasio tertinggi terjadi ditahun 2023 yaitu sebesar 0,138%. Itu artinya nilai total aset daerah nilainya masih sangat cukup sekali untuk menjamin pembayaran utang yang ada.

Tabel 2.55  
Rasio Utang terhadap Total Aktiva Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
KEWAJIBAN	55,497,746.00	55,497,746.00	55,497,746.00	2,977,759,298.05	2,037,348,519.00
AKTIVA	1,859,622,595,201.34	2,069,641,613,078.03	2,078,295,195,850.54	2,150,774,759,426.15	2,124,994,531,024.08
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0.003	0.003	0.003	0.138	0.096

Sumber: BPKAD, 2025 (diolah)

### 3. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

#### a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan aktiva tetapnya seperti gedung, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor, dan lain-lain. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan. Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 2020-2024 relatif fluktuatif dengan tren meningkat. Rasio ditahun 2020 mencapai 5,4% dan menjadi 7,8% ditahun 2024. Artinya tahun 2020 pendapatan/keuntungan yang diperoleh Kabupaten Mandailing Natal mencapai 5,4% dari total pendayagunaan sumberdaya aset tetap yang senilai Rp. 1,672 Triliun. Sedangkan ditahun 2024 keuntungan (PAD) yang didapat mencapai 7,8% dari pendayagunaan aset tetap daerah yang bernilai Rp. 1,862 triliun. Artinya ada peningkatan efektifitas penggunaan sumberdaya aset daerah untuk meningkatkan PAD yang ada.

Tabel 2.56  
Rasio Utang terhadap Total Aktiva Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
PAD	90,454,777,183	142,409,606,086	93,950,780,407	124,677,017,400	145,680,464,747
AKTIVA TETAP	1,672,399,652,524.00	1,747,806,029,138.00	1,851,208,797,827.00	1,847,332,797,089.00	1,862,058,787,610.99
Rasio (%)	5.4	8.1	5.1	6.7	7.8

Sumber: BPKAD, 2025 (diolah)

## b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 2020-2024 relatif berfluktuasi namun trennya meningkat. Rasio ditahun 2020 mencapai 4,9% dan menjadi 6,9% ditahun 2024. Itu artinya ditahun 2020 pendapatan/keuntungan yang diperoleh Kabupaten Mandailing Natal mencapai 7,11% dari total pendayagunaan seluruh sumberdaya aset yang senilai Rp. 1,8Triliun. Sedangkan ditahun 2024 keuntungan (PAD) yang didapat mencapai 6,9% dari total pendayagunaan seluruh aset yang bernilai Rp. 2,1 triliun. Artinya ada peningkatan efektifitas penggunaan sumberdaya aset daerah untuk meningkatkan PAD yang ada. Meskipun efektifitasnya semakin meningkat namun jika dilihat nominalnya masih relatif kecil. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah.

Tabel 2.57  
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
PAD	90,454,777,183	142,409,606,086	93,950,780,407	124,677,017,400	145,680,464,747
Total Aktiva	1,859,622,595,201.34	2,069,641,613,078.03	2,078,295,195,850.54	2,150,774,759,426.15	2,124,994,531,024.08
Rasio (%)	4.9	6.9	4.5	5.8	6.9

Sumber: BPKAD, 2025 (diolah)

### 2.5.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

## A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Mandailing Natal selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.58**  
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2024

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
<b>A</b>	<b>Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur</b>	<b>612,972,702,517.00</b>	<b>628,448,318,731.00</b>	<b>664,062,349,805.00</b>	<b>693,161,230,295.00</b>	<b>795,366,684,175.54</b>
<b>B</b>	<b>Total Pengeluaran</b>	<b>1,194,599,881,198.39</b>	<b>1,627,606,555,154.00</b>	<b>1,609,151,809,027.00</b>	<b>1,718,760,178,302.00</b>	<b>1,919,437,539,520.83</b>
1	Total Realisasi Belanja	1,194,599,881,198.39	1,614,881,787,325.00	1,604,651,809,027.00	1,718,760,178,302.00	1,919,437,539,520.83
2	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	-	12,724,767,829.00	4,500,000,000.00	-	-
	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran (%)	51.31	38.61	41.27	40.33	41.44

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Tabel di atas menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini. Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun berfluktuasi dan memperlihatkan tren menurun, meski secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut masih cenderung meningkat. Pada tahun 2020, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 51,31% dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 38,61% dan kemudian naik pada tahun selanjutnya menjadi sebesar 41,27% di tahun 2022 hingga tahun 2024 mencapai sebesar 41,44%. Proporsi di tahun 2021 merupakan angka terendah selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah. Kenaikan belanja seperti yang diperlihatkan pada tabel di atas linear dengan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1. **Evaluasi Kebutuhan Pegawai:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan belanja pegawai di setiap unit organisasi. Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
2. **Optimalisasi Produktivitas:** Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
3. **Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru:** Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
4. **Peningkatan Efisiensi Administrasi:** Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi, seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
5. **Pengendalian Tunjangan dan Insentif:** Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
6. **Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan:** Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

## **B. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020, 2022, dan 2024 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 52,89 miliar, Rp 17,28 miliar dan Rp 32,35 miliar, sementara pada tahun 2021 dan 2023 terjadi surplus anggaran masing-masing sebesar Rp 84,77 miliar and Rp 3,62 miliar.

Tabel 2.59  
Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	<b>Realisasi Pendapatan Daerah</b>	<b>1,506,860,933,386</b>	<b>1,699,660,832,133</b>	<b>1,587,365,102,294</b>	<b>1,722,385,089,387</b>	<b>1,887,079,704,943.29</b>
	Dikurangi realisasi:					
2	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1,194,599,881,198.39</b>	<b>1,614,881,787,325.00</b>	<b>1,604,651,809,027.00</b>	<b>1,718,760,178,302.00</b>	<b>1,919,437,539,520.83</b>
3	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	-	12,724,767,829.00	4,500,000,000.00	-	
A	<b>Surplus (Defisit) Riil</b>	<b>(52,897,388,690)</b>	<b>84,779,044,808</b>	<b>(17,286,706,733)</b>	<b>3,624,911,085</b>	<b>(32,357,834,577.54)</b>
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
	- SILPA	117,747,236,120	63,219,214,433	135,258,123,513	113,500,434,430	117,131,976,932.37
	- Pencairan Dana Cadangan					
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	- Penerimaan Pinjaman Daerah					
	- Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	29,017,650	6,545,200	
	- Koreksi SILPA	(1,645,048,994)	-	-	-	
	- Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	14,416,000	-	-	-	
B	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>116,116,603,126</b>	<b>63,219,214,433</b>	<b>135,287,141,163</b>	<b>113,506,979,630</b>	<b>117,131,976,932.37</b>
A+B	<b>SILPA</b>	<b>63,219,214,436</b>	<b>147,998,259,241</b>	<b>118,000,434,430</b>	<b>117,131,890,715</b>	<b>84,774,142,355</b>

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2020-2024 dapat ditutup semua oleh total Komposisi Penutup Defisit (SiLPA dan Penerimaan Pinjaman Daerah) pada tahun 2020-2024 yang secara berturut-turut sebesar Rp 116,116 miliar, Rp 63,219 miliar, Rp 135,287 miliar. Rp 113,506 miliar, dan Rp 117,131 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup.

#### 2.5.4. Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

##### A. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mandailing Natal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 hingga 2024 (APBD) yang disesuaikan dengan menstandarkan data-data outlier yang sifatnya dapat membiaskan proyeksi. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mandailing Natal ini tidak bias dan mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri. Adapun penerimaan yang bersumber dari luar baik itu dari dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung ditarget relatif tetap.

##### 1) Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah untuk tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,50 persen, untuk tahun 2025 sebesar Rp1,928,374,076,483,00 dan di akhir periode Tahun 2030 menjadi Rp2,586,131,794,705,00. Tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Transfer setiap tahunnya diproyeksikan naik dengan rata-rata sebesar 6,53 persen. DAU diproyeksikan naik dengan asumsi adanya kenaikan jumlah ASN dan PPPK melalui pengadaan CPNS dan PPPK dan asumsi kenaikan gaji ASN dan PPPK.

**Tabel 2.60**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 s.d 2030**

Uraian	Tahun Dasar APBD 2025 (Rp)	Proyeksi (Rp.)					Rata-rata kenaikan (%)
		2026	2027	2028	2029	2030	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,928,374,076,483</b>	<b>2,022,363,827,896</b>	<b>2,143,600,802,136</b>	<b>2,279,472,257,894</b>	<b>2,426,580,235,294</b>	<b>2,586,131,794,705</b>	6.05
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>192,066,728,685</b>	<b>193,277,057,601</b>	<b>197,213,407,000</b>	<b>199,267,407,000</b>	<b>200,125,407,000</b>	<b>202,997,407,000</b>	1.11
a. Pajak Daerah	70,361,795,000	70,872,000,000	71,946,000,000	73,000,000,000	73,858,000,000	74,730,000,000	1.21
b. Retribusi Daerah	15,343,207,000	15,343,207,000	15,343,207,000	15,343,207,000	15,343,207,000	15,343,207,000	0.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0.00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91,361,726,685	92,061,850,601	94,924,200,000	95,924,200,000	95,924,200,000	97,924,200,000	1.40
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,729,807,347,798</b>	<b>1,821,936,770,295</b>	<b>1,938,522,395,136</b>	<b>2,071,553,350,894</b>	<b>2,216,938,178,294</b>	<b>2,372,666,072,705</b>	6.53
<b>a. Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1,652,961,904,950</b>	<b>1,765,936,770,295</b>	<b>1,888,522,395,136</b>	<b>2,021,553,350,894</b>	<b>2,165,938,178,294</b>	<b>2,322,666,072,705</b>	7.04
1) Dana Perimbangan	1,347,526,813,950	1,459,789,801,495	1,581,592,360,756	1,713,761,944,376	1,857,199,262,424	2,012,884,896,548	8.36
<b>a) Dana Transfer Umum</b>	<b>980,703,008,000</b>	<b>1,056,283,614,950</b>	<b>1,137,735,555,556</b>	<b>1,225,519,458,656</b>	<b>1,320,132,528,133</b>	<b>1,422,111,488,827</b>	7.72
(1) DBH	81,115,254,000	89,226,779,400	98,149,457,340	107,964,403,074	118,760,843,381	130,636,927,720	10.00
(2) DAU	899,587,754,000	967,056,835,550	1,039,586,098,216	1,117,555,055,582	1,201,371,684,751	1,291,474,561,107	7.50
<b>b) Dana Transfer Khusus</b>	<b>366,823,805,950</b>	<b>403,506,186,545</b>	<b>443,856,805,200</b>	<b>488,242,485,719</b>	<b>537,066,734,291</b>	<b>590,773,407,721</b>	10.00
(1) DAK Fisik	26,117,018,950	28,728,720,845	31,601,592,930	34,761,752,222,45	38,237,927,445	42,061,720,189	10.00
(2) DAK Non Fisik	340,706,787,000	374,777,465,700	412,255,212,270	453,480,733,497	498,828,806,847	548,711,687,531	10.00
<b>2) Dana Insentif Daerah</b>	<b>7,118,778,000</b>	<b>7,830,655,800</b>	<b>8,613,721,380</b>	<b>9,475,093,518</b>	<b>10,422,602,870</b>	<b>11,464,863,157</b>	10.00
<b>3) Dana Otonomi Khusus</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>4) Dana Keistimewaan</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>5) Dana Desa</b>	<b>298,316,313,000</b>	<b>298,316,313,000</b>	<b>298,316,313,000</b>	<b>298,316,313,000</b>	<b>298,316,313,000</b>	<b>298,316,313,001</b>	0.00
<b>b. Transfer Antar Daerah</b>	<b>76,845,442,848</b>	<b>56,000,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>51,000,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>	-7.56
1) Pendapatan Bagi Hasil	76,845,442,848	56,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	51,000,000,000	50,000,000,000	-7.56
2) Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>6,500,000,000</b>	<b>7,150,000,000</b>	<b>7,865,000,000</b>	<b>8,651,500,000</b>	<b>9,516,650,000</b>	<b>10,468,315,000</b>	10.00
a. Hibah	-	-	-	-	-	-	-
b. Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,500,000,000	7,150,000,000	7,865,000,000	8,651,500,000	9,516,650,000	10,468,315,000	10.00

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

## 2) Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk lima tahun mendatang dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai belanja langsung atau belanja program RPJMD. Analisis proyeksi belanja juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan belanja tidak langsung daerah serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. Sedangkan, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan barang dan jasa. Analisis hasil proyeksi belanja selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran yang juga berkaitan dengan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk lima tahun mendatang. Adapun beberapa kebijakan terkait penentuan belanja daerah yang harus dianggarkan, antara lain:

1. Mengutamakan belanja daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah/Prioritas Bupati/Wakil Bupati.
2. Menganggarkan belanja program/kegiatan *dedicated* dan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
3. Mengutamakan dukungan Program Strategis Nasional, terutama yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.
4. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
5. Memenuhi alokasi persentase belanja daerah yang sudah ditentukan besaran dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mendorong peningkatan belanja modal tiap tahun.
7. Mengakomodir belanja operasional yang merupakan belanja wajib dan mengikat karena terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang merupakan belanja kebutuhan aparatur yang wajib dipenuhi. Besarannya tiap tahunnya memperhitungkan turun-naiknya jumlah pegawai dan pengaruh inflasi atas harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan operasional aparatur negara.
8. Menetapkan Belanja Tidak Terduga setiap tahunnya untuk membiayai kegiatan yang tidak terencana.
9. Pemenuhan kebutuhan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2030 yang dialokasikan langsung pada program, kegiatan dan sub kegiatan OPD tanpa melalui pembentukan Dana Cadangan.

Belanja Daerah untuk tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,97 persen, untuk tahun 2025 sebesar Rp2,065,995,752,949,00 dan di akhir periode Tahun 2030 menjadi Rp2,630,978,124,994,00. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,77 persen dengan perincian:
  - a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 3 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan PPPK dan kenaikan gaji ASN dan PPPK.
  - b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 2 persen per tahun.
  - c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan rata-rata sebesar 10 persen pertahun, kecuali pada tahun 2029 karena proses pemilihan kepala daerah belanja hibah diasumsikan meningkat menjadi Rp85,000,000,000,00.
  - d. Proyeksi belanja bantuan sosial diasumsikan rata-rata sebesar 10 persen pertahun.
- 2) Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10 persen.
- 3) Belanja Tak Terduga diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp10 Miliar/tahun.
- 4) Belanja Transfer diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10 persen dengan perincian:
  - a. Rata-rata pertumbuhan Belanja Bagi Hasil sebesar 10 persen per tahun.
  - b. Belanja Bantuan Keuangan diasumsikan naik rata-rata sebesar 10 persen per tahun

Tabel 2.61  
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 s.d 2030

No.	Uraian	Tahun Dasar APBD 2025 (Rp)	Proyeksi (Rp.)					Rata-rata kenaikan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,065,995,752,949</b>	<b>2,144,528,788,625</b>	<b>2,227,072,456,811</b>	<b>2,313,899,674,088</b>	<b>2,481,923,580,414</b>	<b>2,596,638,762,466</b>	4.69
<b>1</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>1,458,537,862,640</b>	<b>1,498,319,968,950</b>	<b>1,539,275,895,317</b>	<b>1,581,446,447,225</b>	<b>1,701,492,010,619</b>	<b>1,709,656,156,335</b>	3.25
	a. Belanja Pegawai	975,652,821,714	1,004,922,406,365.42	1,035,070,078,556.38	1,066,122,180,913.07	1,098,105,846,340.47	1,131,049,021,730.68	3.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	472,199,780,426	481,643,776,034.52	491,276,651,555.21	501,102,184,586.32	511,124,228,278.04	562,236,651,105.85	3.60
	c. Belanja Bunga							
	d. Belanja Subsidi							
	e. Belanja Hibah	5,725,260,500	6,297,786,550	6,927,565,205	7,620,321,726	85,000,000,000	8,382,353,898	191.06
	f. Belanja Bantuan Sosial	4,960,000,000	5,456,000,000	6,001,600,000	6,601,760,000	7,261,936,000	7,988,129,600	10.00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>189,023,197,009</b>	<b>207,352,391,710</b>	<b>227,497,312,131</b>	<b>249,639,015,032</b>	<b>273,976,647,373</b>	<b>330,882,191,466</b>	11.93
	a. Belanja Tanah	8,187,500,000	8,433,125,000	8,686,118,750	8,946,702,313	9,215,103,382	9,491,556,483	3.00
	b. Belanja Peralatan Mesin	59,312,374,097	65,243,611,506.70	71,767,972,657.37	78,944,769,923.11	86,839,246,915.42	99,865,133,952.73	11.00
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	48,423,416,033	53,265,757,636.30	58,592,333,399.93	64,451,566,739.92	70,896,723,413.92	88,620,904,267.39	13.00
	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	61,114,792,271	67,226,271,498.27	73,948,898,648	81,343,788,513	89,478,167,364	111,847,709,205.24	13.00
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	11,985,114,608	13,183,626,068.80	14,501,988,675.68	15,952,187,543.25	17,547,406,297.57	21,056,887,557.09	12.00
	f. Belanja Modal Sumber Dana BOS							
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>408,434,693,300</b>	<b>428,856,427,965</b>	<b>450,299,249,363</b>	<b>472,814,211,831</b>	<b>496,454,922,423</b>	<b>546,100,414,665</b>	6.00
	a. Belanja Bagi Hasil	8,510,500,200	8,936,025,210	9,382,826,471	9,851,967,794	10,344,566,184	11,379,022,802.10	6.00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	399,924,193,100	419,920,402,755	440,916,422,893	462,962,244,037	486,110,356,239	534,721,391,863.18	6.00
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(137,621,676,466)</b>	<b>(122,164,960,729)</b>	<b>(83,471,654,675)</b>	<b>(34,427,416,194)</b>	<b>(55,343,345,121)</b>	<b>(10,506,967,760)</b>	-24.38

Sumber : Proyeksi Bapperida, 2025

### 3) Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pembiayaan daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk lima tahun mendatang. Pengeluaran pembiayaan direncanakan akan digunakan untuk penyertaan modal. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Dana Cadangan tidak dianggarkan karena pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2030 langsung dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan di OPD terkait.
2. Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD untuk memenuhi kegiatan prioritas daerah, diantaranya melalui KPBU atau yang bersumber dari masyarakat untuk membiayai kegiatan prioritas yang bersifat strategis dan mendesak penyelesaiannya.
3. Penyediaan pembayaran kewajiban yang terkait dengan pembiayaan di luar APBD, terutama untuk pembayaran penyediaan layanan yang sudah ditentukan dalam skema KPBU.
4. Penganggaran penyertaan modal BUMD mendasarkan pada besaran anggaran yang telah tercantum dalam dokumen sesuai ketentuan perundangan-undangan yang ada.

Tabel 2.62  
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 s.d 2030

No.	Uraian	Tahun Dasar APBD 2025 (Rp)	Proyeksi (Rp.)					Rata-rata kenaikan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>137,621,676,466</b>	<b>152,164,960,729</b>	<b>113,471,654,675</b>	<b>64,427,416,194</b>	<b>85,343,345,121</b>	<b>40,506,967,760</b>	-19.95
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>137,621,676,466</b>	<b>137,164,960,729</b>	<b>98,471,654,675</b>	<b>49,427,416,194</b>	<b>70,343,345,121</b>	<b>25,506,967,760</b>	-19.95
	a. SILPA	137,621,676,466	137,164,960,729.38	98,471,654,675.17	49,427,416,194.06	70,343,345,120.71	25,506,967,760.29	
	b. Penerimaan Dana Cadangan							
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah							
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah							
	f. Koreksi SILPA							
	g. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>	0,00
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo							
	b. Penyertaan Modal Daerah		15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0,00
	c. Pembentukan Dana Cadangan							
	d. Pemberian Pinjaman Daerah							
	e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							

Sumber : Proyeksi Bapperida, 2025

### 2.5.5. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dihitung berdasarkan total penerimaan daerah dikurangi belanja wajib mengikat, antara lain belanja pegawai dan operasional Perangkat Daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.63  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Ribu Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	Pendapatan	1,928,374,076,483	2,022,363,827,896	2,143,600,802,136	2,279,472,257,894	2,426,580,235,294	2,586,131,794,705.34
2	Pencairan dana cadangan						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	137,621,676,466.15	137,164,960,729.38	98,471,654,675.17	49,427,416,194.06	70,343,345,120.71	25,506,967,760.29
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>2,065,995,752,949</b>	<b>2,159,528,788,625</b>	<b>2,242,072,456,811</b>	<b>2,328,899,674,088</b>	<b>2,496,923,580,414</b>	<b>2,611,638,762,466</b>
	Dikurangi:						
4	Belanja Wajib Mengikat	1,447,852,602,140	1,486,566,182,400	1,526,346,730,112	1,567,224,365,499	1,609,230,074,619	1,693,285,672,836.53
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>618,143,150,809</b>	<b>672,962,606,225</b>	<b>715,725,726,699</b>	<b>761,675,308,589</b>	<b>887,693,505,796</b>	<b>918,353,089,629</b>

Sumber: Proyeksi Bapperida, 2025

Berdasarkan Tabel di atas kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diproyeksikan terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak cukup tinggi.

Kemudian, hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program- program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program- program pelayanan dasar;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

## 2.6. Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sehingga kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

### 2.6.1. Permasalahan

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada sub bab gambaran umum daerah maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan utama pembangunan Kabupaten Mandailing Natal adalah **“Masih Belum Optimalnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berkualitas dan Berkeadilan”** dengan 6 (enam) permasalahan pokok yaitu:

1. Belum optimalnya perekonomian daerah
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan
3. Belum optimalnya pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan

5. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik
6. Meningkatnya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi

Keterkaitan antara permasalahan utama dan permasalahan pokok dapat dilihat sebagai berikut.

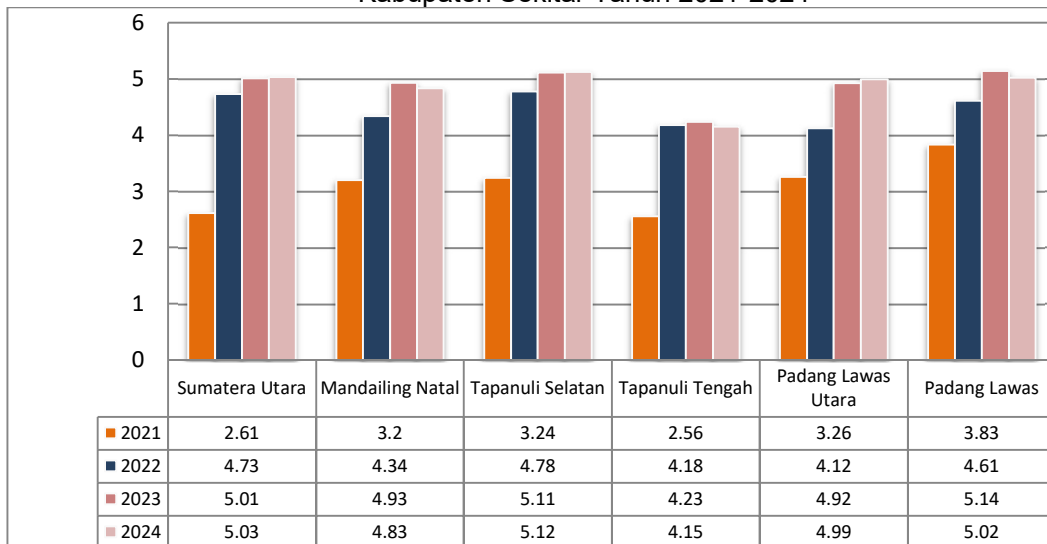
Gambar 2.12  
Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal



### 1. Belum optimalnya perekonomian daerah

Belum optimalnya perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal menjadi tantangan utama bagi pengembangan wilayah ini. Meskipun potensi alam yang melimpah seperti pertanian, perkebunan, kelautan, dan kehutanan, namun masih terdapat hambatan dalam infrastruktur dasar dan akses pasar yang memadai. Hal ini menghambat pertumbuhan sektor ekonomi lokal serta kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Ketidakefektifan perekonomian terlihat pada perbandingan pertumbuhan ekonomi di bawah ini:

Diagram 2.46  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal dengan  
Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

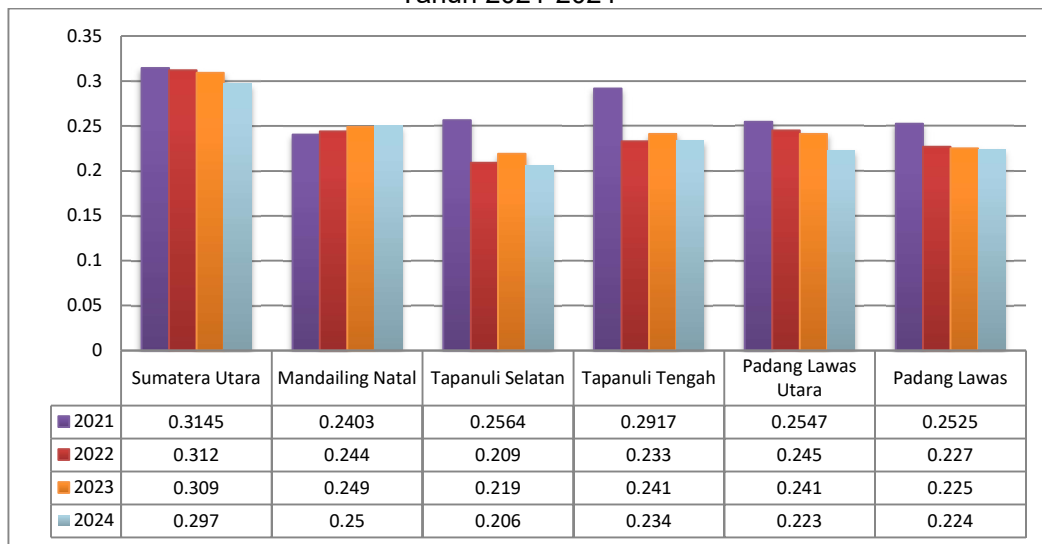
Berdasarkan Diagram yang disajikan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara terutama pada tiga tahun terakhir. Selain itu dalam lingkup regional wilayah barat Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal masih tertinggal dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan Padang Lawas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Faktor utama yang mempengaruhi meliputi infrastruktur yang belum memadai, terutama akses transportasi dan jaringan komunikasi yang terbatas, serta kurangnya investasi yang cukup dalam pengembangan sumber daya manusia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah daerah bersama dengan sektor swasta dan masyarakat lokal. Pertama, peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, dengan memperbaiki jaringan jalan dan sarana transportasi lainnya untuk memudahkan akses ke pasar dan distribusi hasil produksi. Kedua, perlunya dorongan investasi yang lebih besar dalam sektor-sektor ekonomi potensial seperti pariwisata yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Langkah ini akan membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal.

## 2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan

Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal telah menarik perhatian baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Meskipun telah dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya, tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi jelas tercermin dalam Rasio Gini yakni sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau distribusi kesenjangan pendapatan atau kekayaan di dalam suatu populasi. Semakin tinggi nilai Rasio Gini, semakin besar ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan suatu daerah. Kondisi ketimpangan di Kabupaten Mandailing Natal terlihat pada Diagram di bawah ini:

Diagram 2.47  
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

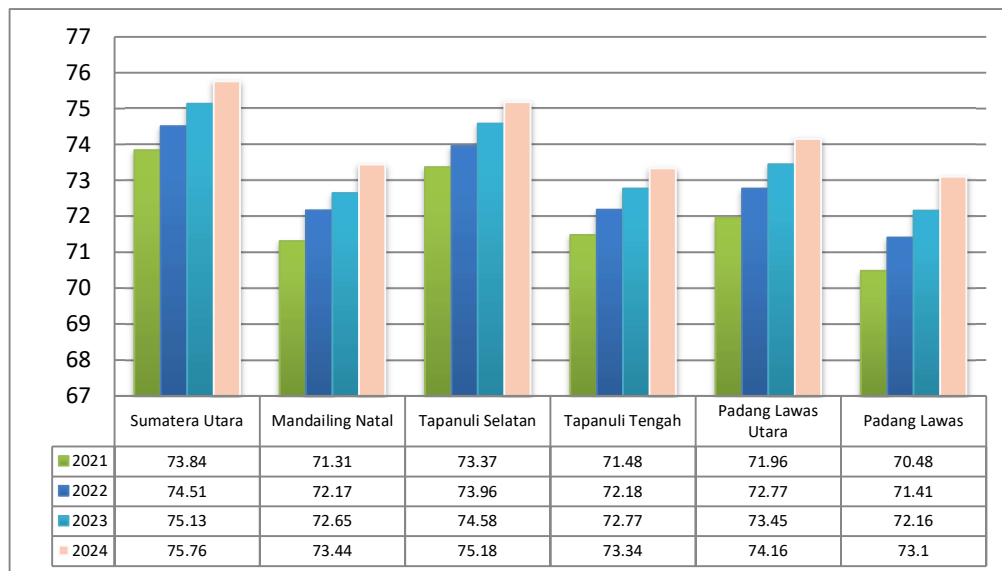
Berdasarkan Diagram di atas menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir, rata-rata Rasio Gini Kabupaten Mandailing Natal secara konsisten berada di atas Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di Kabupaten Mandailing Natal dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya dalam periode tersebut.

Ketika melihat kondisi infrastruktur, tingkat kemandapan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023 sebesar 61,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan jaringan transportasi yang memadai untuk mendukung konektivitas dan mobilitas di seluruh wilayah.

### 3. Belum optimalnya pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia

Belum optimalnya pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia mencerminkan sebuah tantangan yang signifikan di Kabupaten Mandailing Natal. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan akses layanan kesehatan, masih terdapat kesenjangan yang mencolok dalam kemampuan dan kesempatan yang diperoleh penduduk setempat. Belum optimalnya pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mandailing Natal dapat terlihat melalui berbagai indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergambarkan pada Diagram di bawah ini:

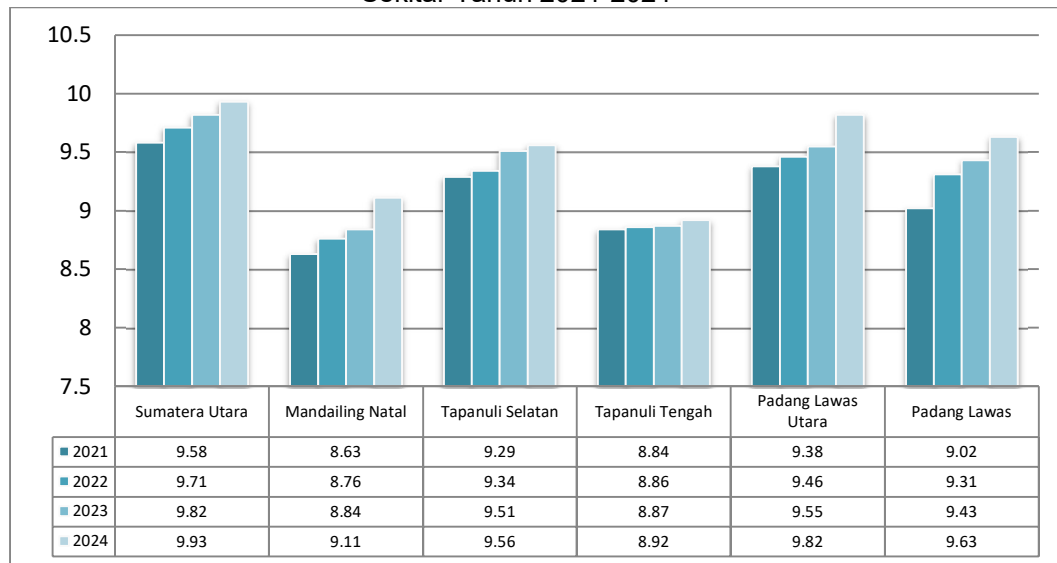
Diagram 2.48  
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan Diagram di atas, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandailing Natal dalam empat tahun terakhir di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara mengalami kemajuan. Meskipun demikian, Kabupaten Mandailing Natal harus terus meningkatkan IPM terutama dalam mengejar IPM Sumatera Utara, Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara. Untuk meningkatkan IPM, Kabupaten Mandailing Natal menghadapi beberapa tantangan diantaranya keterbatasan akses pendidikan, serta upaya kesempatan penduduk Kabupaten Mandailing Natal dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini tercermin melalui Diagram rata-rata lama sekolah di bawah ini:

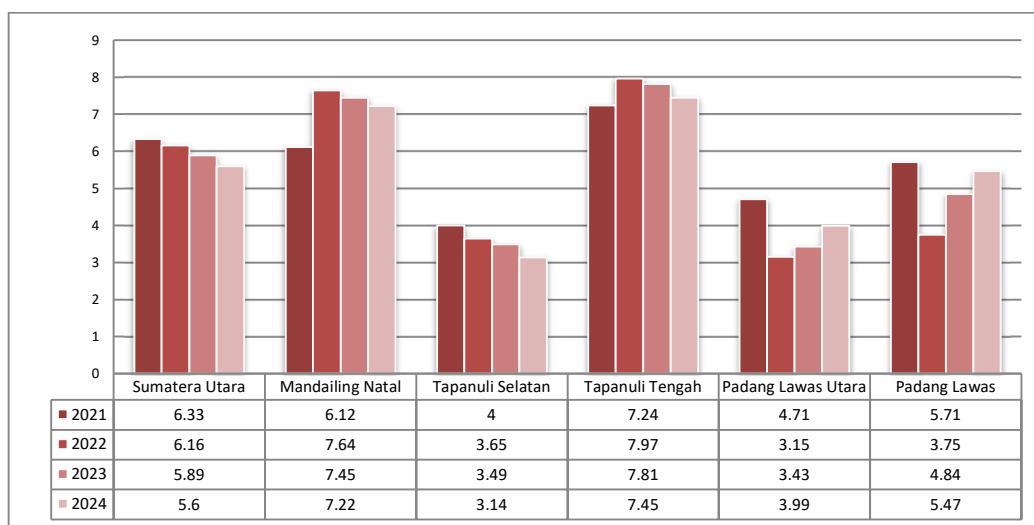
**Diagram 2.49**  
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan Diagram di atas, perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Mandailing Natal masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten sekitar terutama pada tahun 2021-2023, dan melampaui Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan tantangan terhadap akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi penduduk Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini harus menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi sosial-ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Mandailing Natal secara menyeluruh.

**Diagram 2.50**  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

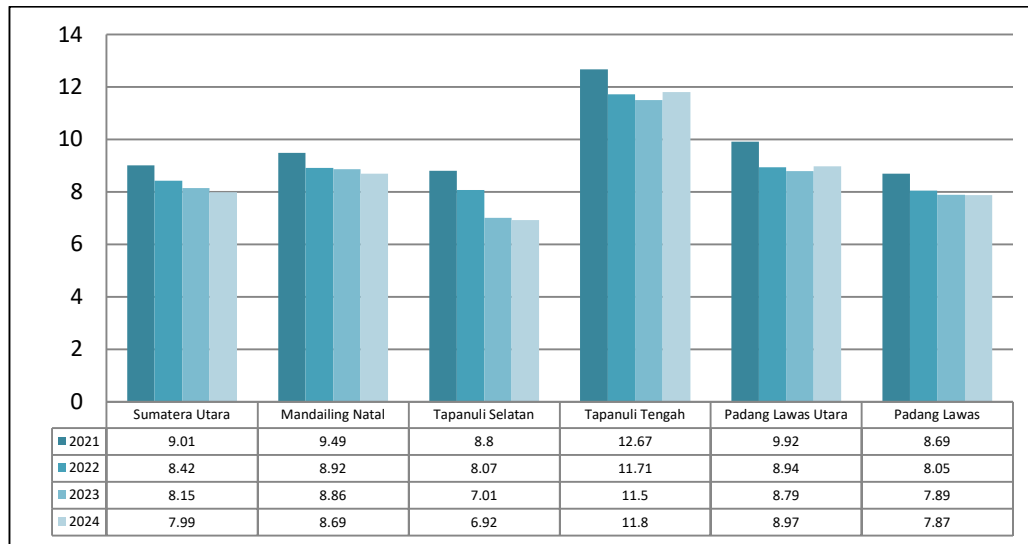
Tingkat pengangguran Kabupaten Mandailing Natal juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mencerminkan tantangan ekonomi yang signifikan di Kabupaten Mandailing Natal yang memerlukan strategi pembangunan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Masalah ketenagakerjaan lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan di sebagian besar tenaga kerja. Pada Tahun 2021, pekerja di Kabupaten Mandailing Natal pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebanyak 87.708 orang (42,25%), pekerja dengan pendidikan SMP sebanyak 40.695 orang (19,60%) , pekerja dengan pendidikan SMA sebanyak 41.288 orang (19,89%), pekerja dengan pendidikan SMK sebanyak 16.266 orang (7,84%), Diploma sebanyak 3.685 orang (1,77%) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana sebanyak 17.949 orang (8,65%).

Kondisi ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi persaingan di pasar kerja yang semakin kompleks. Dengan begitu, Kabupaten Mandailing Natal telah menghadapi permasalahan Belum optimalnya pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia.

#### 4. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan

Belum optimalnya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Mandailing Natal. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, tantangan seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, kurangnya kesempatan kerja yang layak, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata, masih menjadi hambatan utama. Hal ini tergambarkan pada Diagram tingkat kemiskinan di bawah ini:

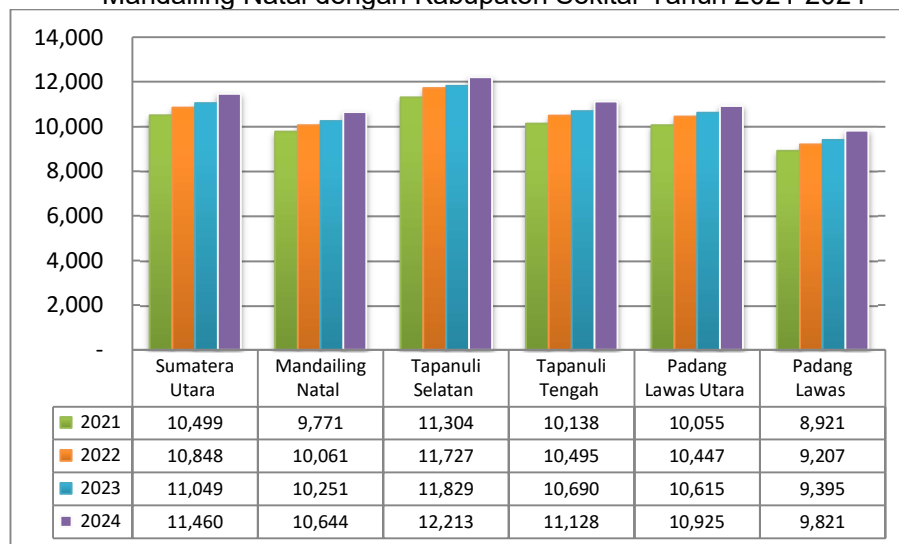
Diagram 2.51  
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Berdasarkan Diagram di atas, angka kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas pada tahun 2021-2023. Angka kemiskinan ini juga lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal juga menunjukkan pengeluaran per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Seperti yang tergambarakan pada Diagram di bawah ini:

Diagram 2.52  
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Dalam empat tahun terakhir, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Mandailing Natal lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah dan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mencerminkan

tantangan yang masih akan dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan terstruktur di Kabupaten Mandailing Natal. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan bantuan sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pengurangan tingkat kemiskinan.

#### **5. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik**

Tantangan utama yang dihadapi di Kabupaten Mandailing Natal adalah belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tercermin dari Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2023 adalah 50.78 dengan predikat "CC". Angka ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam birokrasi, masih terdapat ruang besar untuk perbaikan yang lebih lanjut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara unit-unit birokrasi di tingkat kabupaten. Sistem koordinasi yang belum terintegrasi dengan baik dapat menghambat proses implementasi kebijakan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Selain itu, rendahnya kapasitas dan keterampilan administratif di beberapa unit kerja pemerintahan juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, aspek budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi juga turut berperan. Adopsi nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan di seluruh tingkatan birokrasi. Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menjadi agenda formal, tetapi juga diimplementasikan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan perubahan yang nyata dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara efektif.

#### **6. Meningkatnya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi**

Di Kabupaten Mandailing Natal, meningkatnya aktivitas ekonomi berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah degradasi lingkungan akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, seperti deforestasi dan pertambangan ilegal. Praktik-praktik ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem lokal, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan habitat satwa liar yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu, pertumbuhan infrastruktur juga berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan secara negatif. Pembangunan jalan raya, pemukiman baru, dan fasilitas industri

dapat menyebabkan peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Hal ini bisa mengancam kesehatan masyarakat setempat serta memperburuk kondisi ekologis di sekitar area tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah perlu menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan pengelolaan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk pemangku kepentingan lokal dan komunitas adat, juga penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius dan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan penjabaran permasalahan atas, maka beberapa akar masalah sebagai pemicu permasalahan pokok dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.64  
Permasalahan Perurusan Kabupaten Mandailing Natal

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
<b>A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR</b>		
1	Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana fisik serta sistem pendukung
		Angka partisipasi sekolah semakin rendah di setiap kenaikan jenjang pendidikan
		Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan yang merata
		Rata-rata lama sekolah penduduk juga masih cukup rendah dan dibawah angka Provinsi Sumut
2	Kesehatan	Belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat
		Masih cukup tingginya prevalensi Stunting
		Belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan pada seluruh wilayah dan lapisan masyarakat
		Pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas belum optimal
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kapasitas maupun kualitas jalan
		Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
		Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, akses masyarakat terhadap air minum bersih, dan pengelolaan air limbah domestik
		Belum optimalnya implementasi rencana pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW
4	Perumahan dan Pemukiman	Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh
		Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	Belum optimalnya pencegahan pelanggaran PERDA oleh masyarakat
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum
		Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor
6	Sosial	Belum optimalnya pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Belum optimalnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
		Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi Registrasi Sosial Ekonomi dalam melaksanakan perlindungan sosial masyarakat
<b>B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR</b>		
7	Tenaga Kerja	Belum optimalnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dimana cukup banyaknya tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah (termasuk tidak pernah sekolah)
		Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha mandiri
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
		Belum optimalnya antisipasi dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Pangan	Masih adanya wilayah rawan pangan di beberapa wilayah

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
		Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman
10	Pertanahan	Belum optimalnya pelayanan administrasi pertanahan
11	Lingkungan Hidup	Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas ekonomi
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		Belum optimalnya upaya kemandirian desa melalui kegiatan ekonomi yang produktif
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Belum optimalnya pemahaman kesehatan reproduksi masyarakat
15	Perhubungan	Belum optimalnya konektivitas antar wilayah
		Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan perhubungan belum memadai
16	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik
		Aplikasi <i>e-government</i> belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran produk UMKM
		Belum optimalnya peningkatan kualitas UMKM mandiri
		Belum optimalnya produktivitas koperasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan (sebagian koperasi tidak aktif)
18	Penanaman Modal	Belum efektifnya promosi investasi pengembangan produk unggulan daerah
		Belum optimalnya iklim investasi yang kondusif
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi dan kegiatan kepemudaan

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
		Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
20	Statistik	Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia
		Sulitnya pemenuhan data sektoral oleh perangkat daerah yang valid dan <i>up to date</i>
21	Persandian	Belum optimalnya tingkat keamanan informasi pemerintah
22	Kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur
23	Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah
24	Kearsipan	Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah
		Belum optimalnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan serta pelestarian arsip
<b>C. URUSAN PILIHAN</b>		
25	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal
		Belum optimalnya produktivitas penangkapan ikan di laut
26	Pariwisata	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi destinasi kepariwisataan unggulan daerah
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pada potensi produk unggulan daerah
27	Pertanian	Belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian
		Belum optimalnya hilirisasi produk pertanian
28	Perdagangan	Belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah
		Belum optimalnya pengendalian harga kebutuhan pokok
		Belum optimalnya jangkauan jaringan perdagangan
29	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
		Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi
<b>D. URUSAN PENUNJANG</b>		
30	Penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah
31	Perencanaan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan
		Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang komprehensif dan relevan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan
32	Keuangan	Belum optimalnya pengelolaan aset, khususnya dalam identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah
		Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah dalam pelaksanaan pembangunan
		Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi secara efektif dan efisien
33	Kepegawaian	Belum optimalnya pemetaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai kompetensinya
		Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN berbasis kinerja
		Belum optimalnya pemberian <i>reward and punishment</i> kepada ASN di lingkup pemerintahan daerah
34	Pengawasan	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan
35	Sekretariat Dewan	Belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD dalam mengoptimalkan kinerja anggota DPRD
36	Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, khususnya bagi generasi muda
		Belum optimalnya fasilitas pendidikan politik yang baik

## 2.6.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihai yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

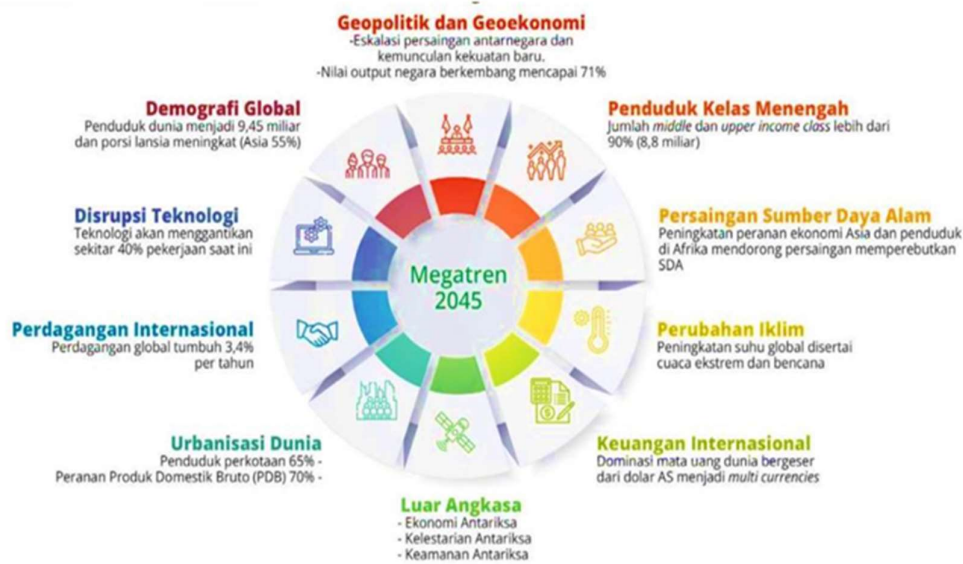
Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu strategis, kita dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun, sebaliknya, jika isu-isu strategis diabaikan, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan menjadi langkah awal dalam merumuskan isu strategis.

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, dapat dipahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

### A. Isu Strategis Global

Isu strategis global menjadi penting dalam pembangunan nasional pada jangka menengah yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Mandailing Natal. Isu strategis global akan dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.13  
Megatren Global



Sumber: Bappenas, 2022

#### - **Demografi Global**

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

#### - **Disrupsi Teknologi**

Pandemi COVID-19 secara tidak langsung meningkatkan penggunaan informasi teknologi untuk membantu kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling penting adalah

karena aturan untuk menjaga jarak fisik mengharuskan semua pertemuan dilakukan melalui konferensi video. Kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis juga sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih luas. Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan teknologi IT, khususnya di bidang telekomunikasi.

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi dengan sangat cepat dan menjadi lebih mudah bagi semua orang untuk menggunakannya. Perkembangan positif ini telah menyebabkan dunia industri teknologi informasi dan komunikasi mengalami agregat yang semakin besar. Ke depan, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemakai (*user*) tetapi juga menjadi pembuat (*produsen*), sehingga dapat bersaing secara global.

Namun Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, *3D*, dan *Future Technologies*.

Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Disrupsi Teknologi yang berkembang akan mempengaruhi berbagai sektor seperti sektor manufaktur, sektor pendidikan, dan sektor lainnya yang akan memberikan inovasi pada berbagai aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, adanya disrupsi teknologi akan berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah yang akan membuka peluang baru pada percepatan pembangunan ekonomi serta mendorong transformasi pada tata kelola kinerja pelayanan publik.

#### - **Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas

geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Terkait Geoekonomi, Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara- negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 % pada tahun 2015 menjadi 20% pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

#### - **Persaingan Sumber Daya Alam**

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

- **Perubahan Iklim (*Climate Change/Global Warming*)**

Saat ini, semua orang memperhatikan masalah pemanasan global. Kerusakan ekosistem alam sebagai akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan adalah inti dari masalah pemanasan global. Dengan dampak yang signifikan bagi manusia dan lingkungan, seperti kekeringan, pemanasan global memerlukan antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia.

Protokol Kyoto, yang merupakan perubahan terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan hidup akan tetap baik. Negara-negara yang meratifikasi protokol setuju untuk mengurangi emisi dan pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau untuk bekerja sama dalam perdagangan emisi. Jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
- 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
- 3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
- 4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
- 5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui "*Katowice Climate Package*" yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global

maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Mandailing Natal.

#### - **Urbanisasi Dunia**

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif.

#### - **Pemanfaatan Luar Angkasa**

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat *manusia (common heritage of humankind)*, yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

### **B. Isu Strategis Nasional**

Isu strategis nasional juga perlu mendapat perhatian khusus di dalam rencana pembangunan daerah. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya perlakuan khusus dalam mengantisipasinya. Isu strategis nasional yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal beberapa diantaranya bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode

2025-2029. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Gambar 2.14  
Visi Misi Presiden



Sumber: RPJMN 2025-2029

Asta Cita memuat program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 2.15  
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Sumber: RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, Untuk pencapaian sarasannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lmbaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebilakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 2.16  
Isu Jangka Menengah RPJMN Teknokratik 2025-2029



Sumber: Data Diolah, Bapperida Kabupaten Mandailing Natal, 2024

### 1. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia

Hilirisasi industri mengacu pada proses meningkatkan nilai tambah dalam suatu sektor industri melalui peningkatan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Ini melibatkan transformasi produk mentah atau setengah jadi menjadi produk jadi dengan menggunakan teknologi, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) mencatat bahwa realisasi investasi dalam bidang hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai Rp 375,4 triliun, yang merupakan 26,5% dari total investasi pada periode tersebut. Investasi terbesar terjadi pada sektor smelter mineral, terutama nikel, dengan realisasi mencapai Rp 216,8 triliun. Selain itu, sektor minyak dan gas, kehutanan, pertanian, dan ekosistem kendaraan listrik juga menerima investasi signifikan dalam proses hilirisasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa surplus perdagangan pada November 2023 mencapai USD2,41 miliar, dengan surplus akumulatif periode Januari-November 2023 mencapai USD33,63 miliar.

Hilirisasi menjadi kunci dalam mempercepat sektor industri dan ekspor khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal dapat fokus pada peningkatan nilai tambah pada komoditas sumber daya alam. Pemerintah telah menyediakan infrastruktur, insentif fiskal, dan lingkungan bisnis yang kondusif untuk mendukung perkembangan industri hilir.

## 2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Sinkronisasi antara kebijakan makro dan sektoral menjadi landasan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan stabil. Koordinasi yang efektif antara kebijakan makro dengan kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor spesifik akan memastikan konsistensi tujuan pembangunan nasional, mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan manfaat ekonomi. Dengan demikian, integrasi yang kokoh antara kedua jenis kebijakan ini tidak hanya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, tetapi juga mengoptimalkan potensi pertumbuhan dalam berbagai sektor, menyokong visi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, koordinasi kebijakan juga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi risiko ketidakseimbangan ekonomi. Misalnya, pengendalian inflasi yang dilakukan melalui kebijakan moneter harus didukung oleh kebijakan sektoral yang memastikan ketersediaan pasokan barang dan jasa yang memadai dengan harga stabil. Dengan demikian, melalui integrasi yang baik antara kebijakan makro dan sektoral, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Integrasi ini harus terjalin dari pusat sampai ke level daerah, yakni Kabupaten Mandailing Natal.

## 3. Penerapan Standar *Sustainability* yang Tinggi di Level Global

Dalam era di mana *sustainability* semakin diakui sebagai komponen penting dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pembangunan daerah, penting bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk melaporkan dampak keberlanjutan masyarakat dengan transparan dan akuntabel. Inilah sebabnya mengapa standar keberlanjutan tingkat global menjadi sangat penting. Dalam konteks global, adopsi standar *sustainability* yang tinggi membantu menciptakan lingkungan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan, di mana organisasi dapat dibandingkan dan dievaluasi. Hal ini memungkinkan *stakeholders* untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berkelanjutan.

## 4. Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan

Transisi energi menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur mapan yang bergantung pada keterbatasan sumber daya, ketidakpastian ekonomi, dan resistensi politik dari pihak yang terpengaruh secara ekonomi. Meskipun begitu, transisi energi juga membawa peluang besar untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru,

memajukan teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Dengan memperhatikan aspek ini secara serius, transisi energi bisa menjadi sarana untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, kolaborasi global dalam menghadapi tantangan transisi energi dapat memperkuat solidaritas internasional dan membangun kerangka kerja yang inklusif untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengadopsi teknologi dan praktik terbaru. Tantangan Transisi Energi menggarisbawahi perlunya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam mengelola perubahan energi. Hal ini, tidak hanya melibatkan kebijakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan bahwa manfaat dari transisi energi dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global.

### **5. Aging Population Negara Maju**

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengindikasikan bahwa sejumlah provinsi di Indonesia, akan segera mengalami fase penuaan populasi pada tahun 2024. *Aging population*, yang ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas melebihi 7% dari total populasi, menjadi perhatian serius. Tantangan penuaan penduduk yang dini di Indonesia menjadi fokus perencanaan strategis pemerintah, terutama dalam upaya mencapai target menjadi Indonesia Emas 2045. Untuk mengantisipasi dampak penuaan populasi, pemerintah telah menyusun upaya strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan. Strategi ini mencakup langkah-langkah untuk memperkuat program perlindungan sosial, pembangunan masyarakat, dan lingkungan yang ramah bagi penduduk lanjut usia. Melalui kesempatan ini, diharapkan kesadaran dan komitmen untuk mempersiapkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan inklusif semakin meningkat, terutama dalam rangka merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.

### **C. Isu Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029**

Isu-isu strategis Sumatera Utara yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan jangka menengah (2025–2029) diuraikan sebagai berikut:

#### **- Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan

pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta *responsiveness*/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

#### - **Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif,

seperti pemasaran berbasis *e-commerce* dan promosi melalui *platform* media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

#### - **Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan**

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

- **Pembangunan antar daerah serta desa-kota**

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan**

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan *green waste* dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

#### - **Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur**

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

- **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif**

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan *core value*.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

#### **D. Isu Strategis Kabupaten Mandailing Natal**

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Mandailing Natal yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

##### **a) Pembangunan Ekonomi**

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Mandailing Natal, fokus utama adalah pada optimalisasi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA), dengan menonjolkan potensi pertanian, perkebunan dan pariwisata alam. Dalam sektor pertanian, upaya akan difokuskan pada peningkatan produksi dan diversifikasi produk pertanian lokal, serta penguatan rantai pasokan dan nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan yang lebih baik. Sementara itu, pariwisata alam akan dikembangkan melalui promosi destinasi wisata yang mengutamakan keindahan alam dan budaya lokal, dengan membangun infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan pelayanan wisata yang berkualitas. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Mandailing Natal diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal potensi SDA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**b) Akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas**

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Mandailing Natal, fokus utama adalah pada akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan jaringan transportasi yang memadai, termasuk perbaikan dan pengembangan jalan raya utama serta jembatan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Langkah ini tidak hanya akan mempermudah aksesibilitas penduduk lokal dalam beraktivitas sehari-hari tetapi juga akan membuka akses ke pasar regional dan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Selain itu, perluasan jaringan transportasi akan mengurangi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memungkinkan distribusi barang yang lebih efisien dari dan ke daerah pedalaman. Selain infrastruktur transportasi, akselerasi ini juga mencakup peningkatan infrastruktur dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan dan perluasan sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan sarana pendukung lainnya akan memastikan bahwa penduduk di Kabupaten Mandailing Natal memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan manusia yang menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.

**c) Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul**

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Mandailing Natal, fokus utama adalah pada upaya mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul. Langkah pertama adalah memperkuat sistem pendidikan, mulai dari peningkatan akses pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan. Ini meliputi investasi dalam fasilitas pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penting untuk memperkuat pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, terutama dalam sektor-sektor yang mendukung perekonomian lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selanjutnya, upaya mewujudkan SDM yang sehat akan diperkuat dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ini termasuk pembangunan dan perluasan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya di seluruh kabupaten. Program-program kesehatan masyarakat yang efektif juga akan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Selain itu,

pendidikan tentang kesehatan mental juga akan diberikan perhatian untuk memastikan kesejahteraan psikologis masyarakat secara keseluruhan. Dengan mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul, Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas individu untuk bersaing di pasar kerja global tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi penduduk Mandailing Natal

**d) Akselerasi pengentasan kemiskinan**

Pada periode 2025-2029, Kabupaten Mandailing Natal memprioritaskan isu akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai bagian integral dari agenda pembangunan jangka menengah. Langkah utama dalam upaya ini adalah meningkatkan akses terhadap lapangan kerja produktif melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat terpinggirkan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selain itu, upaya akselerasi ini juga melibatkan penguatan sistem perlindungan sosial untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program bantuan sosial yang tepat sasaran akan diperkuat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam membangun kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga.

**e) Ancaman bencana alam, degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi**

Pada periode pembangunan 2025-2029, Kabupaten Mandailing Natal menghadapi tantangan serius terkait dengan ancaman bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi. Wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi kebencanaan yang tinggi, yaitu bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tsunami. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana seperti banjir, kebakaran dan abrasi dipengaruhi oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan. Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana menjadi upaya meminimisir potensi kerugian bencana. Tantangan adaptasi dan mitigasi kebencanaan di Kabupaten Mandailing Natal yaitu penurunan kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam manajemen kebencanaan, serta masih terbatasnya akses informasi rawan bencana bagi masyarakat.

Isu ini juga meliputi berbagai aspek, mulai dari deforestasi dan degradasi lahan hingga penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah strategis akan diterapkan dengan fokus pada pemulihan ekosistem yang terganggu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap habitat satwa liar serta ekosistem kritis. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk penggunaan teknologi hijau dan praktik konstruksi ramah lingkungan. Selain itu, upaya perlindungan dan restorasi hutan serta lahan basah akan ditingkatkan untuk mempertahankan fungsi ekologisnya yang vital dalam mengatur tata air dan menjaga keanekaragaman hayati. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam implementasi kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat juga akan ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal berkomitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan meningkatkan ketahanan ekologi sebagai bagian dari visi pembangunan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

**f) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif**

Isu strategis lainnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dimana kondisi Kabupaten Mandailing Natal saat ini dapat dikatakan belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, rendahnya kemandirian keuangan daerah, kurangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan budaya organisasi dan terlambatnya pencapaian sasaran kinerja. Oleh karena itu, isu kedepan adalah bagaimana meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, mandiri dan *agile* di dalam menyikapi perkembangan dan perubahan. Sehingga penting untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi guna mendukung kinerja pemerintah secara lebih baik.

**E. Integrasi Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029**

Sebagai upaya untuk memastikan keselarasan antara pembangunan berkelanjutan dan perencanaan jangka menengah daerah, dilakukan integrasi antara isu strategis yang diidentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025–2029. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur, tetapi

juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan wilayah. Berikut hasil integrasi isu strategis KLHS RPJMD dengan isu strategis RPJMD sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel 2.65  
Integrasi Isu KLHS RPJMD dan Isu Strategis RPJMD

KLHS	RPJMD
Kualitas kehidupan keluarga	Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul
	Akselerasi pengentasan kemiskinan
Jangkauan dan Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas
Kesiapsiagaan penanganan bencana alam	Ancaman bencana alam, degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi
Keterbatasan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	
Perekonomian Masyarakat	Pembangunan Ekonomi
Kapasitas pemerintah daerah dan kualitas layanan publik	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025

Integrasi Isu KLHS RPJMD dengan isu strategis dalam RPJMD antara lain:

**1. Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul serta Akselerasi pengentasan kemiskinan**

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta akselerasi pengentasan kemiskinan sangat terkait dengan isu dalam KLHS mengenai kualitas kehidupan keluarga. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial akan membantu menciptakan sumber daya manusia yang berdayasaing sehingga dapat mendukung kesadaran terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan sosial serta mengurangi angka kemiskinan.

**2. Akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas.**

Isu ini berkaitan dengan isu KLHS RPJMD Jangkauan dan Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana terutama karena berkaitan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi,

prasarana sumber daya air, pengelolaan limbah dan sampah, penyediaan/penggunaan listrik dan energi, akses hunian, jangkauan pelayanan kesehatan, jangkauan pelayanan pendidikan, ketersediaan sarana perhubungan, dan cakupan kapasitas telekomunikasi sebagaimana diuraikan pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029. Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas wilayah dapat membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar serta dapat meningkatkan daya saing daerah.

### **3. Ancaman bencana alam, degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi**

Isu tersebut seiring dengan isu RPJMD yaitu kesiapsiagaan penanganan bencana alam dan keterbatasan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penanganan isu ini memerlukan kebijakan yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dan mengurangi risiko yang dihadapi.

### **4. Pembangunan Ekonomi**

Dengan mengembangkan sektor industri sesuai dengan potensi daerah dan pariwisata secara berkelanjutan, akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan Ekonomi diharapkan dapat diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembangkan sektor ekonomi lokal dan pariwisata secara berkelanjutan, akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **5. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, dan inovatif**

Dalam konteks ini, pemerintah perlu memiliki sistem yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan efektivitas dalam merespons tantangan yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peningkatan kapasitas tata kelola, pemerintah dapat berdampak pada pengambilan Keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta pengimplementasian kebijakan yang relevan dan inovatif. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. ketahanan pangan yang berkelanjutan



*Rancangan Awal*  
**RPJMD**

**Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2029**

**BAB 3**  
**Visi, Misi dan Program Prioritas  
Pembangunan Daerah**



## **BAB III**

### **VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan atau prioritas dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dan dimiliki daerah dalam waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dalam pembangunan jangka panjang daerah. Dalam RPJPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045 telah disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Rumusan prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, namun semua harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan para pemangku kepentingan berkomitmen dan bercita-cita untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Hal ini digambarkan secara ringkas dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal untuk jangka panjang maupun menengah. Selanjutnya dengan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berupaya untuk meningkatkan berbagai aspek pembangunan secara seimbang dan berkelanjutan sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera. Visi RPJPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan adalah:

***“Mandailing Natal yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2025 hingga 2045 Kabupaten Mandailing Natal diharapkan menjadi kabupaten yang dihuni oleh masyarakat yang unggul dan berperadaban tinggi yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera, dan didukung oleh aktivitas ekonomi yang berdaya saing serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Percepatan pencapaian pembangunan yang mampu mewujudkan kesejahteraan memerlukan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagai pondasi dalam merumuskan kebijakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mandailing Natal, RPJMD Provinsi Sumatera Utara

dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun.

Rumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 juga memperhatikan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045, visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal selama lima tahun mendatang dan dijabarkan secara lebih fokus dan spesifik dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

### 3.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025-2029, yaitu:



Visi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029

**MELANJUTKAN PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN  
UNTUK MADINA MAJU DAN MADANI**



Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Madina** : Merupakan akronim dari Kabupaten Mandailing Natal diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu

kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

**Pembangunan yang Inklusif** : artinya proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk kelompok marginal, baik sebagai objek maupun subjek, dalam proses pembangunan, disertai adanya rasa memiliki dari setiap elemen masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut. Pembangunan yang inklusif juga dapat diartikan sebagai pembangunan yang berkualitas, yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan (*pro-growth*), penyerapan tenaga kerja (*pro-job*), mengurangi kemiskinan (*pro-poor*) dan memperhatikan lingkungan (*pro-environment*).

**Berkelanjutan** : Berkelanjutan artinya Kabupaten Mandailing Natal menjalani perjalanan pembangunan yang berfokus pada konsep berkelanjutan dengan wawasan lingkungan sebagai fokus utama. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan alam, pemerintah daerah menitikberatkan pada program pembangunan berbasis Berkelanjutan. Kabupaten Mandailing Natal yang berkelanjutan bermakna pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang selaras, serasi serta seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal juga merangkul konsep ekonomi hijau dan hilirisasi untuk memperkuat sektor ekonomi lokal. Pengembangan usaha-usaha yang ramah lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi pijakan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

**Maju** : artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas serta perekonomian yang maju melalui

peningkatan sektor ekonomi unggulan daerah, yang didukung pemantapan pembangunan infrastruktur.

Madani : artinya masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur dan terdapat kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses menentukan kehidupan bersama.

### 3.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif;  
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mewujudkan misi ini melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, peningkatan kualitas dan fasilitas kesehatan, serta perlindungan sosial terhadap masyarakat yang adaptif dan merata.
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;  
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku usaha dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Berkualitas;  
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui upaya peningkatan sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan serta pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.
4. Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal;  
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pelestarian budaya lokal, penguatan nilai moral dan keagamaan, peningkatan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender sehingga dapat tercipta ketahanan sosial budaya di Kabupaten Mandailing Natal.
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.  
Misi ini menggarisbawahi pentingnya infrastruktur yang tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, misi tersebut mencakup pembangunan dan perawatan sarana fisik seperti jaringan

transportasi, air bersih, sanitasi, irigasi serta pengelolaan limbah. Langkah-langkah strategis termasuk penggunaan teknologi hijau, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan efisiensi energi dalam pembangunan dan operasional infrastruktur.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.1  
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029

MISI RPJPD KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025-2045		MISI RPJMD KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025-2029	
Misi 1:	Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Misi 1:	Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
Misi 2:	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tumbuh dan Produktif	Misi 2:	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Misi 3:	Mewujudkan Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas dan prima serta adaptif	Misi 3:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima
Misi 4:	Mewujudkan Keamanan Daerah, Masyarakat yang Damai dan Stabilitas Ekonomi Makro	Misi 4:	Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal
Misi 5:	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan penciptaan ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter, dan ketangguhan lingkungan.	Misi 5:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
Misi 6:	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		
Misi 7:	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		
Misi 8:	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah yang sinergis dan terintegrasi		

### 3.1.3. Tujuan

Untuk mencapai kelima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dari RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu tujuan dari misi pertama, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Diharapkan, SDM Kabupaten Mandailing Natal yang berkualitas dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan merupakan tujuan dari misi kedua, yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat melalui peningkatan produk unggulan daerah. Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan dan perdagangan juga

dilakukan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing masyarakat.

3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Melayani, Terbuka dan Bertanggung Jawab  
Terwujudnya reformasi birokrasi yang melayani, terbuka, dan bertanggungjawab merupakan tujuan dari misi ketiga, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima. Reformasi birokrasi harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan prinsip birokrasi yang efisien, bersih, dan akuntabel. Selain itu, diperlukan juga pengelolaan keuangan daerah secara tepat, pencegahan korupsi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
4. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Pelestarian Budaya dan Kesetaraan Gender  
Meningkatnya kerukunan umat beragama bagi masyarakat merupakan tujuan dari misi keempat, yaitu Menjaga serta melestarikan nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Tujuan ini dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam kehidupan beragama dan demokrasi untuk semua golongan, termasuk menjaga lingkungan dari gangguan keamanan dan ketertiban serta melakukan pembangunan berbasis gender.
5. Terwujudnya Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan  
Terwujudnya pembangunan yang tangguh, dan berkelanjutan merupakan tujuan dari misi kelima. Dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang tangguh untuk seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta tangguh terhadap potensi bencana yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, konektivitas wilayah juga menjadi perhatian untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah serta kehidupan kota dan desa yang dinamis dan produktif.

Tabel 3.1  
Tujuan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif;	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi
		Indeks Gini
Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Berkualitas	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Melayani, Terbuka dan Bertanggung Jawab	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 4: Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Pelestarian Budaya dan Kesenjangan Gender	Indeks Kerukunan Umat Beragama
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Misi 5: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

#### 3.1.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia  
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan
  - b. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan  
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi
  - b. Meningkatnya Kesempatan Kerja
  - c. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Melayani, Terbuka dan Bertanggung Jawab  
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
4. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Pelestarian Budaya dan Kesetaraan Gender  
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama
  - b. Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal
  - c. Meningkatnya Akses dan Perlindungan serta Kesetaraan Gender
5. Terwujudnya Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan  
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur
  - b. Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana
  - c. Terwujudnya pertumbuhan perkotaan dan pedesaan berbasis karakteristik wilayah dan lingkungan
  - d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029**

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani						
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
					2023	2024
<b>Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter</b>						
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia			Poin	72.65	73.44
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.86	13.87
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.84	9.11
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	71.72	71.88
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	81,32	98,19
<b>Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>						
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	4.93	4.83
		Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	36.87	40.13
			Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	48.6	49.68
			Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	11.03	10.94
	Indeks Gini			Poin	0.249	0.250
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.45	7.22
		Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	Persen	8.86	8.69
	<b>Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima</b>					
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	50.78	n.a
		Meningkatnya Kapasitas dan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai/ Predikat	52,52	53,46

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani						
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
					2023	2024
Melayani, Terbuka dan Bertanggung Jawab		Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,49 (C-)	2,8 ©
			Indeks SPBE	Indeks	2,83/ Baik	2,89/ Baik
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45.8	52.65
<b>Misi 4: Menjaga serta melestarikan nilai agama, budaya dan kearifan lokal</b>						
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Pelestarian Budaya dan Kesetaraan Gender	Indeks Kerukunan Umat Beragama			Indeks		
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Persentase Konflik SARA	Persen	n.a	n.a
		Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda)	Persen	n.a	n.a
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	93.68	n.a
		Meningkatnya Akses dan Perlindungan serta Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.515	n.a
<b>Misi 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan</b>						
Terwujudnya Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah			Indeks	2,63	3,12
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Indeks	1,41	2.64
		Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	214.8	n.a
		Terwujudnya pertumbuhan pedesaan berbasis karakteristik wilayah dan lingkungan	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6026	0.6109

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani						
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
					2023	2024
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	74,16	75,20
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,14	58,08
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	97,17	95,61
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	66,00	66,88
			Pemurunan Emisi CO2e	Ton CO2	n.a	n.a

### 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah

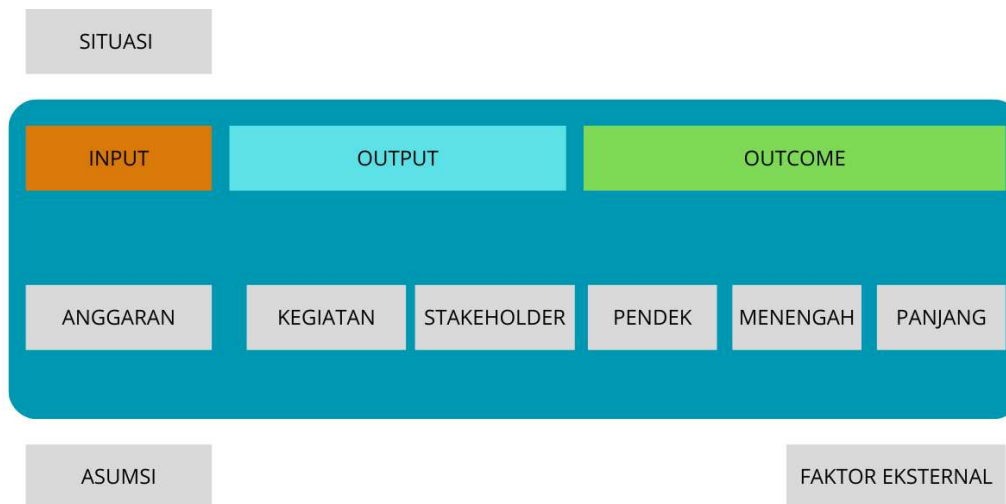
Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab II, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagai cara atau upaya yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### 3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik Tematik dan Integratif

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagai upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025-2029 yaitu analisis *logic model* atau model logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Metode ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku

kepentingan yang terlibat dan terdampak. Secara umum, teori *logic model* digunakan untuk menjelaskan ide, menyelesaikan permasalahan permasalahan atau menilai kemajuan dari suatu program. Dengan demikian dapat dijelaskan tentang hubungan yang kompleks antar unsur-unsur atau bagian, serta menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan dan batasan-batasan mengenai rancangan apa yang telah direncanakan dan hasil apa yang diharapkan. Konsep *logic model* menyediakan sebuah *road map* yang spesifik dan terukur mulai dari awal hingga akhir. Secara sederhana, melalui *logic model* digambarkan sebuah alur mulai dari aksi-aksi atau kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan hasil yang diharapkan dan membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi pada level Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada Gambar berikut.

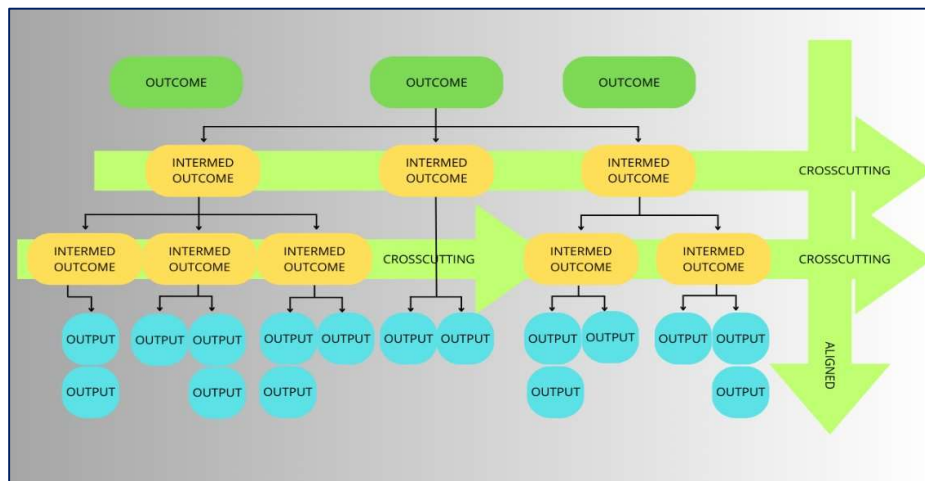
Gambar 3.2  
*Basic Logic Model*



Pada penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis. Sejalan dengan konsep *logic model* yang digunakan sebagai dasar analisis, maka desain program yang direncanakan diharapkan mampu menunjukkan hubungan kelogisannya mulai dari aktivitas apa yang dilakukan, output yang dihasilkan, serta outcome apa yang diharapkan pada perangkat daerah untuk mencapai tujuan akhir dalam hal ini adalah visi Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal yang harus dicapai dalam waktu lima tahun. Jabaran model kerangka logis mulai dari *input*, aktivitas, *output* serta *outcome* dalam rangka pencapaian dampak (*impact*) dituangkan dalam sebuah bagan

pohon kinerja atau disebut pula dengan *cascading* kinerja, sebagaimana gambaran pohon kinerja pada gambar berikut.

Gambar 3.3  
Pohon Kinerja



Pohon kinerja merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan menggunakan kerangka logis. Pohon kinerja digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus dilakukan di tingkat di bawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan, dengan prinsip umum penyusunan sebagai berikut:

1. Logis atau terdapat hubungan sebab akibat;
2. Empiris, berdasarkan kondisi yang ada;
3. Antisipatif atau berdasarkan hipotesa bukan untuk dipakai dalam jangka pendek;
4. Dinamis, atau mengikuti perubahan lingkungan;
5. *Wholistic* atau *crosscutting* dengan organisasi lain;
6. *Out of the box* yaitu untuk mencari yang terbaik bukan mempertahankan kondisi eksisting;
7. Materialisme yaitu memperhatikan tingkat kepentingan, bobot tinggi, dan strategis.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal dapat sekaligus menjawab isu strategis pembangunan. Lebih lanjut, melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan.

### 3.2.2. Strategi Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2029

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani		
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter</b>		
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan Sarana dan Kualitas Pendidikan Pengembangan Karakter dan Ideologi
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Sarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
<b>Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>		
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi	Peningkatan kinerja investasi
		Pemberdayaan Ekonomi Lokal
		Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif
		Penguatan ketahanan pangan
		Peningkatan daya saing pariwisata
	Peningkatan pemasaran produk daerah	
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	
Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan Penguatan perlindungan sosial	
<b>Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima</b>		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Melayani, Terbuka dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Reformasi birokrasi
		Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Peningkatan kualitas pelayanan publik
<b>Misi 4: Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal</b>		
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Pelestarian Budaya dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
	Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
	Meningkatnya Akses dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender	Pengarusutamaan gender
<b>Misi 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan</b>		

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani		
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Peningkatan kualitas tata ruang
	Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana	Peningkatan ketangguhan bencana
	Terwujudnya pertumbuhan pedesaan berbasis karakteristik wilayah dan lingkungan	Peningkatan Peran Desa dalam Kemajuan Daerah

Penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka menengah di atas adalah sebagai berikut:

#### I. **Strategi 1: Peningkatan Sarana dan Kualitas Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk membentuk karakter dan kepribadian manusia. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang baik merupakan hal yang wajib diberikan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas secara merata. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan kualitas pendidikan yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal; pengembangan kurikulum muatan lokal; dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

#### II. **Strategi 2: Pengembangan Karakter dan Ideologi**

Penguatan Ideologi Pancasila dilakukan melalui penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat melalui pendidikan multikulturalisme dan aplikasi teknologi informasi. Pendidikan Karakter dibentuk melalui sistem pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa yang religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif sejak dini, termasuk melalui kegiatan ekstrakurikuler dan keagamaan.

#### III. **Strategi 3: Peningkatan Sarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini,

karena kemampuan daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan kesehatan akan menentukan keberhasilan pembangunan secara mendasar.

#### **IV. Strategi 4: Peningkatan Jaminan Kesehatan**

Pembangunan Kesehatan juga harus mampu memastikan agar setiap warga Kabupaten Mandailing Natal memiliki akses pada fasilitas kesehatan yang memadai untuk menjamin kehidupannya. Hal ini dapat dilakukan melalui program *Universal Health Coverage*. Dengan adanya program ini akan berdampak langsung pada tingkat kemiskinan melalui pengurangan nilai pengeluaran penduduk. Selain itu, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

#### **V. Strategi 5: Peningkatan Kinerja Investasi**

Kinerja investasi yang baik merupakan tujuan dari berbagai kebijakan yang dilakukan seperti pemberian kemudahan berinvestasi dan perbaikan pelayanan investasi kepada investor dalam kerangka mempermudah peluang investasi di berbagai sektor. Cakupan peningkatan kinerja investasi dilakukan melalui upaya-upaya penetapan regulasi dan kebijakan yang ramah investasi.

#### **VI. Strategi 6: Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Ekonomi lokal yang berdaya saing adalah modal suatu daerah untuk dapat menciptakan iklim perekonomian daerah yang sehat. Dengan memberdayakan ekonomi lokal, diharapkan aktivitas usaha dapat berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi lokal diarahkan pada pengembangan sentra-sentra produk ekonomi lokal.

#### **VII. Strategi 7: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Industri Kreatif**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penyangga ketahanan perekonomian masyarakat karena berperan sebagai sumber pendapatan masyarakat tingkat menengah. Selain itu, industri kreatif merupakan sektor yang potensial untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di era yang dinamis seperti saat ini. Untuk mengakomodir hal-hal tersebut, kebijakan peningkatan produktivitas UMKM dan Industri Kreatif diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan industri kreatif.

#### **VIII. Strategi 8: Penguatan Ketahanan Pangan**

Penguatan ketahanan pangan merupakan unsur penting yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk itu, upaya yang dilakukan dalam penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

#### **IX. Strategi 9: Peningkatan Daya Saing Pariwisata**

Dengan tingginya potensi pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal berupa alam maupun budaya, beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan daya saing pariwisata dilakukan melalui pengembangan infrastruktur dan pengelolaan pariwisata.

#### **X. Strategi 10: Peningkatan Pemasaran Produk Daerah**

Peningkatan pemasaran produk daerah merupakan upaya menjamin aksesibilitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan barang/produk terutama kebutuhan pokok. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemasaran produk daerah yaitu melalui kebijakan peningkatan sarana distribusi produk daerah.

#### **XI. Strategi 11: Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja**

Kualitas tenaga kerja merupakan faktor penentu dalam persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. Dengan kualitas yang tinggi, daya saing tenaga kerja juga akan semakin tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dilaksanakan melalui peningkatan jaringan kemitraan tenaga kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

#### **XII. Strategi 12: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Kemiskinan**

Penanganan kemiskinan merupakan hal yang mutlak dilakukan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu dilakukan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan, sejahtera, dan bisa terus menjaga perekonomiannya menjadi stabil agar tidak kembali dalam lingkaran kemiskinan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat masuk ke dalam garis kemiskinan, antara lain tingkat pendidikan yang rendah, beban ekonomi keluarga yang terlalu berat, keterbatasan akses permodalan, serta kurangnya kesempatan kerja yang ada. Selain itu, tingginya pengeluaran warga miskin untuk biaya kesehatan juga semakin memperparah keadaan mereka. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya pemenuhan jaminan kesehatan.

#### **XIII. Strategi 13: Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu dasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mewujudkan reformasi birokrasi yaitu melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur; peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. yang rendah dan terbatasnya sarana prasarana dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena

itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasana pelayanan publik.

#### **XIV. Strategi 14: Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Di era digital dimana teknologi dan informasi berkembang sangat pesat, pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk dapat mengefisienkan kinerja perangkat daerah menjadi semakin terintegrasi. Upaya yang dilakukan untuk penguatan SPBE yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### **XV. Strategi 15: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku pelayanan dan kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan publik merupakan dua faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. SDM yang rendah dan terbatasnya sarana prasarana dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasana pelayanan publik.

#### **XVI. Strategi 16: Peningkatan Kerukunan Umat Beragama**

Kerukunan Umat Beragama merupakan tanggung jawab bersama warga dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, di mana warga ikut serta mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban antar sesama umat. Peran serta masyarakat sangat berarti dalam mewujudkan kondisi wilayah yang tentram, tertib dan nyaman dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam peningkatan kerukunan umat beragama masyarakat yaitu melalui penerapan nilai-nilai agama, peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **XVII. Strategi 17: Penerapan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal**

Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi budaya lokal yang sangat beragam seperti kesenian tradisional, tradisi dan cagar budaya yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Nilai-nilai budaya lokal yang perlu diterapkan dan dikembangkan dengan optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Kedepan, penguatan nilai budaya lokal diarahkan pada pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.

## **XVIII. Strategi 18: Pengarusutamaan Gender**

Perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Di sisi lain, kelompok tersebut juga merupakan masyarakat yang produktif dan potensial untuk mendukung kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis dan ramah gender demi kemajuan daerah. Upaya yang dilakukan dalam pengarusutamaan gender yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat berbasis gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

## **XIX. Strategi 19: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya-upaya untuk mencapainya dilakukan melalui kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pembangunan ramah lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

## **XX. Strategi 20: Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman**

Tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, aman, dan sehat merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

## **XXI. Strategi 21: Peningkatan Ketangguhan Bencana**

Salah satu indikator daerah yang tangguh yaitu dengan memiliki ketangguhan bencana yang baik. Kejadian bencana pada dasarnya tidak dapat diperkirakan, namun upaya kesiapsiagaan masyarakat baik fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana harus tetap dilakukan untuk dapat meminimalisasi dampak/resiko yang ditimbulkan. Upaya peningkatan ketangguhan bencana dilakukan melalui kebijakan peningkatan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana.

## **XXII. Strategi 22: Peningkatan Peran Desa Dalam Kemajuan Daerah**

Jumlah desa di Kabupaten Mandailing Natal yang begitu banyak memiliki sumber daya alam dan ekonomi yang beraneka ragam. Pertumbuhan yang dimulai dari desa diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Peningkatan peran desa dalam kemajuan daerah dilakukan melalui pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal, mengenali dan memaksimalkan produk unggulan desa, pembentukan *role model* pengembangan desa, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antara kota dan desa, serta pengembangan program desa mandiri dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu, kualitas dan transparansi hasil pembangunan. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang terlibat di dalamnya.

Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.4  
Tahapan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2026-2030



Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025–2029 didasarkan dengan memedomani arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2045, khususnya pada bagian pembangunan tahap pertama.

Pemerintah mempersiapkan periode perencanaan tahun 2025 sampai dengan 2029 serta pedoman pembangunan pada masa transisi pemerintahan tahun 2030.

### **Fokus Pembangunan Tahun 2025**

Fokus penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 adalah tahapan konsolidasi dan persiapan awal pembangunan daerah. Perencanaan pada tahun 2025 disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah pada tahun berjalan, sesuai dengan periodisasi kepemimpinan RPJMD yang baru dimulai pada tahun 2025. Pemerintah fokus dalam penyesuaian program prioritas sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah yang menjadi visi-misi Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah melakukan konsolidasi untuk penguatan kelembagaan serta regulasi-regulasi pendukung yang mempersiapkan arah kebijakan transformasional ke depannya. Pemerintah juga sudah mulai merintis penyelenggaraan program-program unggulan daerah yang dapat memberikan hasil cepat (*quick win*) penyelenggaraan pemerintahan.

### **Tahun 2026: Fondasi Transformasi**

Tahun 2026 menjadi tahun yang difokuskan untuk memperkuat fondasi dasar kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Mandailing Natal memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sebagai titik utama pembangunan di daerah. Pemerintah memperkuat modal dasar pembangunan untuk persiapan penyelenggaraan kebijakan transformasional baik dari ekonomi, sosial maupun tata kelola menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Pemerintah mengutamakan pemerataan layanan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif.

### **Tahun 2027: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Ekonomi**

Dengan terwujudnya penguatan fondasi kebijakan transformasi yang kokoh pada tahun 2026, pemerintah berupaya membangun arah kebijakan transformasional. Pemerintah berupaya mengoptimalkan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga layanan pemerintahan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berkeadilan. Pemerintah mengedepankan transformasi sosial untuk memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang non-produktif secara ekonomi dan terkendala keterampilan. Pemerintah juga menyelenggarakan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal, membangun kemandirian daerah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

### **Tahun 2028: Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas**

Demi mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Mandailing Natal memerlukan optimalisasi infrastruktur dan aksesibilitas dari berbagai aspek pembangunan. Pemerintah fokus untuk meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah berupaya memberikan infrastruktur layanan

dasar yang berkualitas kepada seluruh masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang murah dan terjangkau. Arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan menerapkan transisi hijau untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

### Tahun 2029: Nilai Budaya, Pendidikan Karakter

Visi dan misi-misi Kabupaten Mandailing Natal tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan transformasi dari nilai-nilai budaya dan karakter. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan pembangunan nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menyinergikan pembangunan kebudayaan dalam kepariwisataan. Penyelenggaraan pemerintahan berupaya untuk mencapai masyarakat berkeadilan yang tetap menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan yang lestari serta memberikan kesejahteraan yang berkeadilan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

### Tahun 2030: Capaian Pembangunan

Tahun 2030 menjadi tahun transisi kepemimpinan daerah sehingga fokus penyelenggaraan pemerintahan dibagi ke dua fokus utama, yaitu (1) memperkuat capaian pembangunan daerah yang memberikan wujud nyata dari visi-misi Kabupaten Mandailing Natal 2025-2029. Selain itu pemerintah juga mempertahankan capaian pembangunan sembari mempersiapkan transisi kepemimpinan daerah menuju periode pelaksanaan RPJPD Tahap 2.

Penjelasan tahapan pembangunan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025–2029 yang tertuang dalam tema prioritas pembangunan tahun 2026 sampai dengan 2030 dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Tahapan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tahapan Pembangunan	Penguatan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif	Penguatan landasan transformasi tata Kelola dengan reformasi birokrasi dan <i>smart government</i> serta transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas yang tangguh dan berkelanjutan dalam pembangunan	Pembangunan nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Perwujudan pembangunan Mandailing Natal yang Inklusif dan Berkeadilan untuk Madina Maju dan Madani serta transisi kepemimpinan
Penjelasan	Pemerintah fokus untuk memperkuat	Pemerintah melaksanakan pembangunan	Pemerintah fokus untuk mengembangkan	Pemerintah berupaya untuk	Pemerintah Kabupaten Mandailing

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	modal dasar pembangunan terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar yang mencapai seluruh daerah termasuk daerah terpencil	dengan memperbaiki tata Kelola pemerintahan serta memperkuat sektor perekonomian dengan memanfaatkan keunggulan lokal dengan pendekatan keberlanjutan. Penguatan UMKM dan iklim investasi pada tahapan ini juga menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	infrastruktur transportasi, digitalisasi serta energi yang mendukung konektivitas antar daerah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan juga menjadi kunci dalam transisi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan	memperkuat identitas budaya serta nilai-nilai lokal dalam pembangunan. Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pendidikan karakter, pelestarian budaya serta kepariwisataan berbasis budaya sebagai dasar perwujudan pembangunan masyarakat yang berkeadaban	Natal mengoptimalkan sinergi pembangunan berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadi daerah yang berkeadilan dan berdaya saing. Sinergi ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah mewujudkan capaian berkeadaban dengan menjaga nilai-nilai luhur

Dengan berdasar pada strategi, tahapan pembangunan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya maka dirumuskan arah kebijakan yang dipersiapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Penetapan arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut menjadi acuan penetapan program dan kegiatan sebagai bentuk perwujudan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagai bentuk perwujudan strategi utama pembangunan ditetapkan program prioritas Kabupaten Mandailing Natal setiap tahun yang disesuaikan dengan tema dan arah pembangunan.

Tabel 3.5  
Arah Kebijakan Kabupaten Mandailing Natal

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani				
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
<b>Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter</b>				
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan Sarana dan Kualitas Pendidikan	Mewujudkan wajib belajar 13 tahun	
			Meningkatkan pemberian Beasiswa Pendidikan	
			Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal	
			Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi	
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing	
			Pengembangan kurikulum pendidikan untuk peningkatan literasi dan numerasi siswa	
			Pengembangan kurikulum muatan lokal	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Sarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pengembangan Karakter dan Ideologi	Peningkatan pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan
			Peningkatan Sarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tenaga kesehatan
				Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat
Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Universal (UHC)				
			Penurunan Gizi Buruk dan Prevalensi Stunting	
			Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak	
			Pengendalian Penyakit dan Menular dan Tidak Menular	
<b>Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>				
		Peningkatan kinerja investasi	Penetapan regulasi dan kebijakan yang ramah investasi	

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani			
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi		Penguatan iklim investasi yang berkualitas
		Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Pengembangan sentra sentra produk ekonomi lokal
			Pembentukan Perusahaan Daerah/BUMD
		Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif	Pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan industri kreatif
		Penguatan ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan dan akses pangan, serta peningkatan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
		Peningkatan daya saing pariwisata	Pengembangan pengelolaan pariwisata
			Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sesuai karakteristik dan kearifan lokal
	Peningkatan pemasaran produk daerah	Peningkatan kualitas struktur pasar produk unggulan daerah	
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)
			Peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
			Peningkatan jaringan kemitraan tenaga kerja
	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
Penguatan perlindungan sosial			Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS
<b>Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima</b>			
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Melayani, Terbuka dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Reformasi birokrasi	Melanjutkan Reformasi Birokrasi
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur
			Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani			
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana pelayanan publik
Misi 4: Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal			
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Pelestarian Budaya dan Kesenjangan Gender	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penerapan nilai-nilai agama
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban
			Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan
	Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Peningkatan upaya pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal
	Meningkatnya Akses dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Kesenjangan Gender	Pengarutamaan gender	Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan bagi Perempuan
			Penguatan pembangunan inklusif
			Perlindungan Perempuan Diri dan kekerasan dan Diskriminasi
Misi 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan			
Terwujudnya Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
			Pembangunan ramah lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
			Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani			
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas tata ruang	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
	Meningkatnya Ketanggungan terhadap Bencana	Peningkatan ketanggungan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana
	Terwujudnya pertumbuhan pedesaan berbasis karakteristik wilayah dan lingkungan	Peningkatan Peran Desa dalam Kemajuan Daerah	Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal
			Mengenali dan memaksimalkan Produk Unggulan Desa
			Pembentukan <i>Role Model</i> Pengembangan Desa
			Peningkatan Konektivitas dan Akseibilitas antara Kota dan Desa
			Pengembangan Program Desa Mandiri dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

### 3.2.4. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dan Kawasan Strategis

Pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, maka wilayah Kabupaten Mandailing Natal akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu. Kawasan strategis Kabupaten Mandailing Natal mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Nasional, serta mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Kabupaten Mandailing Natal yang dijabarkan sebagai berikut.

#### **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengeksploitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Mandailing Natal adalah seluas kurang lebih 152.514 Ha (seratus lima puluh dua ribu lima ratus empat belas hektar).

Adapun Hutan Produksi Terbatas ini meliputi: di Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Tambangan.

#### **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Mandailing Natal adalah seluas kurang lebih 16.310 Ha (enam belas ribu tiga ratus sepuluh hektar) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014. Kawasan ini meliputi Kecamatan Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, dan Muara Batang Gadis.

### **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi**

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang dicadangkan bagi pengembangan pemanfaatan lain seperti transportasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Di Kabupaten Mandailing Natal hutan produksi yang dapat dikonversi ini adalah seluas kurang lebih 19.897 Ha (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh hektar). Kawasan ini terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Natal dan Kecamatan Lingga Bayu.

### **Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah**

Tipologi untuk kawasan pertanian lahan basah adalah berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemanfaatan ruang pertanian lahan basah bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal di kawasan sekitarnya dan pengembangan perekonomian Wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah berdasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting dan potensi wilayahnya dengan merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang lahan basah yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tersebut adalah mengelompok dan merupakan pemisah antara kawasan budidaya permukiman dan kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl.
2. Kawasan dengan kelerengan < 40%.
3. Kawasan dengan Kedalaman efektif tanah > 30 cm.
4. Mendapat pengairan teknis.
5. Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan pertanian lahan basah serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal.
6. Pola tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir.
7. Tindakan konservasi berkaitan dengan:
  - Vegetatif: pola tanam sepanjang tahun, penanaman tanaman panen atas air tersedia dengan jumlah dan mutu yang memadai yaitu 5 - 20 L/detik/ha untuk mina padi, mutu air bebas polusi, suhu 23 - 30°C, oksigen larut 3 - 7 ppm, amoniak 0.1 ppm dan pH 5 - 7;
  - Mekanik: pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase.

Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Mandailing Natal secara keseluruhan adalah kurang lebih 20.491 Ha (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu hektar) yang tersebar di wilayah Kabupaten dan perlu mendapat perhatian dibeberapa kecamatan, meliputi:

- a. Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Siabu dan Kecamatan Panyabungan Utara;
- b. Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Natal, merupakan daerah potensi untuk pertanian lahan basah; dan
- c. Kecamatan Siabu, dan Kecamatan Huta Bargout, merupakan arahan pengembangan untuk pertanian tanaman padi.

Kawasan pertanian lahan basah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal perlu ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan khususnya bagi wilayah kabupaten.

### **Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering**

Pemanfaatan ruang pertanian lahan kering bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal di kawasan sekitarnya. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering berdasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting (berupa kebun campuran, tegalan, padang rumput, ilalang dan semak belukar) dan potensi wilayahnya dengan merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang lahan kering yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tersebut adalah mengelompok dan merupakan pemisah antara kawasan budidaya permukiman dan kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan di wilayah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kemiringan 0 - 6%: tindakan konservasi secara vegetatif ringan, tanpa tindakan konservasi secara mekanik;
2. Kemiringan 8 - 15%:
  - Tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan organik, tanaman penguat keras;
  - Tindakan konservasi secara mekanik (ringan), teras gulud disertai tanaman penguat keras;
  - Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras gulud dengan interval tinggi 0,75 – 1,5 m dilengkapi tanaman penguat, dan saluran pembuang air ditanami rumput.
3. Kemiringan 15 - 40%:
  - Tindakan konservasi secara vegetatif (berat), pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pemberian mulsa sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, sisipan tanaman tahunan atau batu penguat teras dan rokrak;
  - Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras bangku yang dilengkapi tanaman atau batu penguat teras dan rokrak, saluran pembuangan air ditanami rumput.

Berdasarkan pertimbangan kriteria diatas, maka luas kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Mandailing Natal adalah kurang lebih 61.469 Ha (enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering diarahkan pada semua kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal.

Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian lahan kering harus diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumberdaya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Perkebunan merupakan sektor unggulan yang dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian wilayah. Pada wilayah Kabupaten Mandailing Natal, terdapat 4 komoditi unggulan yang dihasilkan dari sektor perkebunan, yaitu Karet, Kakao, Kopi, Kelapa Sawit, Kulit Manis yang secara keseluruhan adalah kurang lebih 165.824 Ha (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat hektar) meliputi berbagai komoditas perkebunan yang terdiri atas:

- a. Karet, tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Mandailing Natal;
- b. Kakao, tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Mandailing Natal
- c. Kopi, meliputi: di Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Muarasipongi, dan Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Selatan dan Kecamatan Panyabungan Timur;
- d. Kelapa sawit, meliputi: di Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Batahan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Natal, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Muara Batang Gadis;
- e. Kulit manis, meliputi: di Kecamatan Kotanopan, Batang Natal, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Ulu Pungkut; dan .
- f. aren, meliputi: Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Panyabungan Timur.

### **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki garis pantai 170 Km, merupakan potensi perikanan yang cukup handal yang hingga saat ini belum tergarap secara optimal. Selain perikanan yang berasal dari laut, terdapat juga potensi perikanan dengan budidaya air tawar (kolam) dan ikan darat (sungai/rawa) yang tersebar hampir di setiap kecamatan

di Kabupaten Mandailing Natal.

Wilayah pesisir Kabupaten Mandailing Natal yang begitu luas sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan, diantaranya budidaya tambak, usaha *sivofishery*, budidaya kayu bakau, lokasi galangan kapal, industri perikanan, industri penunjang perikanan, pelabuhan perikanan, dan lokasi tempat pelelangan ikan. Kawasan yang terdapat di bagian barat wilayah Kabupaten Mandailing Natal ini berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batahan (3 desa pesisir), Natal (11 desa pesisir), dan Muara Batang Gadis (5 desa pantai).

Wilayah perairan laut yang cukup luas ini menyimpan potensi perikanan laut yang cukup besar, juga menuntut adanya pemberdayaan potensi tersebut yang berorientasi kepada konsep lestari. Artinya bagaimana agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, sebagai pelaku utama perikanan tangkap. Namun tanpa melupakan adanya upaya untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan tersebut salah satunya dengan menertibkan peraturan terhadap jalur-jalur penangkapan ikan melalui upaya pengawasan.

Pemanfaatan potensi laut pada sektor perikanan Kabupaten Mandailing Natal didominasi usaha penangkapan ikan. Usaha perikanan di Kecamatan Batahan dan Natal (usaha penangkapan ikan laut) sedangkan di Kecamatan Muara Batang Gadis terdapat usaha perikanan ikan laut dan perikanan umum (sungai).

Selain usaha penangkapan ikan, di ketiga kecamatan yang berada di wilayah pesisir tersebut juga terdapat usaha pengeringan ikan dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari. Usaha ini baik untuk mengawetkan ikan sehingga dapat disimpan dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama, terutama untuk konsumsi ekspor. Pulau-pulau kecil sebanyak 15 (lima belas) buah yang terletak di depan daratan Pulau Sumatera membuat perairan di sekitarnya tenang. Kondisi ini semakin mendukung pemanfaatan potensi laut untuk melakukan kegiatan usaha budidaya laut seperti kerapu, kakap, dan rumput laut.

Dalam rangka pengembangan di bidang perikanan, maka ditetapkan kawasan perikanan di Kabupaten Mandailing Natal yakni berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta upaya pengolahan ikan laut dan ikan air tawar yang berlokasi sebagai berikut:

- a. perikanan tangkap, meliputi: Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Siabu dan Kecamatan Bukit Malintang;
- b. perikanan budidaya, meliputi: Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Muarasipongi, dan Kecamatan Batang Natal;
- c. pengolahan ikan laut, meliputi: Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Panyabungan, dan

Kecamatan Batang Natal; dan

- d. pengolahan ikan air tawar, meliputi: Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Panyabungan Utara.

### **Peruntukan Perikanan Tangkap**

Pengembangan perikanan laut melalui pola perikanan tangkap di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung perikanan laut antara lain pasar pelelangan ikan, pabrik es batu, dll. Untuk perikanan laut maka arahan pengembangannya dilakukan pada seluruh kecamatan yang berada di daerah pesisir barat, yaitu Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, dan Kecamatan Muara Batang Gadis.

### **Peruntukan Budidaya Perikanan**

Pengembangan perikanan darat dilakukan dengan memanfaatkan aliran-aliran sungai yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Adanya budaya lubuk larangan sebagai modal dasar pengembangan perikanan darat harus dapat ditindaklanjuti dengan skala pengelolaan dan produksi yang lebih besar. Adapun arahan ruang yang tepat untuk pengembangan kegiatan perikanan darat diarahkan di Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Muarasipongi, dan Kecamatan Batang Natal.

Selain perikanan darat dan perikanan laut, sebenarnya terdapat pola penggabungan dari keduanya yang biasa disebut dengan perikanan air payau/tambak. Jenis kegiatan ini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, terutama pada daerah-daerah yang merupakan daerah pertemuan antara sungai dan laut (muara sungai).

### **Pengolahan Ikan**

Pemanfaatan potensi laut maupun air tawar pada sektor perikanan di Kabupaten Mandailing Natal didominasi usaha penangkapan ikan. Usaha penangkapan ikan tersebut tentunya berkaitan erat dengan usaha pengolahannya yang pada umumnya berupa usaha pengeringan ikan dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari. Usaha ini baik untuk mengawetkan ikan sehingga dapat disimpan dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama, terutama untuk konsumsi ekspor. Usaha pengolahan ikan di Kabupaten Mandailing Natal berupa pengolahan ikan laut yang meliputi: Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Panyabungan, dan Kecamatan Batang Natal. Disamping itu juga terdapat pengolahan ikan air tawar yang meliputi: Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Panyabungan Utara.

## **Kawasan Peruntukan Industri**

Pengembangan sektor industri di Kabupaten Mandailing Natal terutama adalah industri-industri yang dapat mendukung pengolahan hasil-hasil pertanian sehingga nilai tambah dari produksi pertanian di Kabupaten Mandailing Natal dapat memberikan hasil yang maksimal. Adapun kegiatan industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Mandailing Natal adalah berupa industri besar, industri menengah dan kecil serta industri perkebunan.

## **Industri Besar**

Kawasan yang termasuk dalam kriteria industri besar di Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. Pabrik *Crump Rubber*, yang berfungsi untuk mengolah karet mentah yang dihasilkan oleh rakyat. Dengan adanya industri ini, maka karet yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama dari pembusukan, sehingga para petani karet dapat memiliki daya tawar yang lebih tinggi bagi pembeli karet. Arahkan ruang dari industri ini sebaiknya dikembangkan pada daerah yang dilalui oleh jalur lintas regional, sehingga pergerakannya untuk masuk dari perkebunan dan keluar menuju pasar dapat terakomodasi dengan baik.
- b. Pabrik Pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*), yang berfungsi untuk mengolah tandan buah segar (TBS) hasil dari perkebunan sawit menjadi minyak kelapa sawit yang manfaatnya sangat banyak. Sama halnya seperti karet, dengan adanya pengolahan ini maka TBS yang dihasilkan dapat cepat terolah sehingga dapat dihindari adanya pembusukan, dan bagi petani juga dapat memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Arahkan pengembangan industri pengolahan kelapa sawit diutamakan pada daerah pesisir karena selain berdekatan dengan areal perkebunannya, pada daerah pesisir ini aksesnya akan dilayani oleh jalan lintas barat Sumatera dan pelabuhan.
- c. Pabrik Pengolahan Rotan, Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang masih memiliki rotan, dimana produksi rotan ini dipasarkan keluar daerah dalam bentuk bahan mentah.
- d. Industri pengolahan ikan, merupakan industri perikanan sebagai industri penunjang perikanan dan pelabuhan perikanan, di Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal, dan Kecamatan Muara Batang Gadis.

Kawasan industri besar bagi kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas diarahkan berlokasi di Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Hutabargot, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis.

## Industri Menengah dan Kecil

Industri menengah dan kecil di Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari: industri makanan minuman, anyaman, bengkel, vulkanisir, furniture, kilang padi, agro industri, farmasi, jasa, pengolahan logam, air mineral, dan konveksi, di daerah-daerah di jalur lintas tengah Sumatera.

## Industri Perkebunan

Di Kabupaten Mandailing Natal, terdapat Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) sebagaimana Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/684/K/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) Kabupaten Mandailing Natal. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) adalah suatu sistem pengembangan dan pembinaan serta pengembalian pembangunan perkebunan yang dilaksanakan secara terpadu dan terprogram dalam suatu kawasan. Kimbun dibentuk karena perlunya pengembangan dan pembinaan secara terpadu dan terprogram usaha perkebunan sebagai salah satu upaya dan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat.

Industri perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal meliputi industri kopi (Kecamatan Pakantan, Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Batang Natal); industri kakao (Kecamatan Siabu, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Panyabungan Utara dan Kecamatan Panyabungan Barat); industri karet (Kecamatan Panyabungan Utara dan Panyabungan Barat); industri sawit (Kecamatan Siabu, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis); industri aren (Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Panyabungan Timur).

Kimbun Kabupaten Mandailing Natal dibagi berdasarkan perkebunan dominan di kabupaten ini seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6  
Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) Kabupaten Mandailing Natal

NO.	KIMBUN	SENTRA	WILAYAH PENGEMBANGAN
1.	Kopi	Kecamatan Ulu Pungkut	Kecamatan Pakantan Kecamatan Muara Sipongi Kecamatan Panyabungan Selatan Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kecamatan Kotanopan Kecamatan Tambangan Kecamatan Batang Natal

NO.	KIMBUN	SENTRA	WILAYAH PENGEMBANGAN
2.	Kakao	Kecamatan Lingga Bayu	Kecamatan Panyabungan Utara Kecamatan Panyabungan Timur Kecamatan Panyabungan Barat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kecamatan Siabu Kecamatan Bukit Malintang
3.	Karet	Kecamatan Panyabungan Utara	Kecamatan Siabu Kecamatan Bukit Malintang Kecamatan Panyabungan Barat Kecamatan Panyabungan Timur Kecamatan Panyabungan Selatan Kecamatan Tambangan Kecamatan Kotanopan Kecamatan Lingga Bayu Kecamatan Muara Batang Gadis
4.	Sawit	Kecamatan Batahan	Kecamatan Natal Kecamatan Lingga Bayu Kecamatan Muara Batang Gadis

Sumber: RTRW Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016-2036

### Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada wilayah-wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana pariwisata. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam, wisata sejarah dan konservasi budaya serta wisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam;
- b. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang juga dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Jenis kegiatan wisata yang tepat adalah wisata alam (*ecotourism*) sebagai bagian dari strategi untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah Mandailing Natal tanpa merusak lingkungan. Jenis pariwisata alam ini dapat memanfaatkan sumber air panas, daerah pegunungan, danau alam, pantai, dan taman nasional sebagai obyek wisatanya. Sebagai catatan utama dalam pengembangan sektor pariwisata ini adalah adanya pembatasan ketat pola pariwisata yang mendirikan kawasan terbangun (*estate*) di kawasan wisata alam tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar kawasan-kawasan lindung yang digunakan sebagai obyek wisata dapat tetap terjaga keberlangsungannya.

Mekanisme dan konsep pengelolaan ekowisata di Mandailing Natal rencananya akan dijalankan bersama masyarakat dan mitra. Pengembangan ekowisata akan memanfaatkan zona penyangga dari Taman Nasional Batang Gadis. Upaya ini diharapkan akan membuka kegiatan ikutan (peluang usaha) bagi masyarakat lokal/sekitar kawasan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Kawasan pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki potensi untuk dikembangkan terdiri atas:

- a. Wisata alam Pulau Unggeh, yang terletak di Pantai Barat Mandailing Natal;
- b. Wisata alam Pantai Barat mulai dari Natal sampai ke Muara Batang Gadis mempunyai pantai yang sangat panjang dan sangat landai serta berpasir putih. Pengolahan objek wisata dapat disinergiskan dengan budidaya perikanan yang ada di wilayah pesisir;
- c. Wisata alam panorama Sopotinjak, yang merupakan wisata gunung di Kecamatan Batang Natal; dan wisata alam air terjun seperti Desa Botung Kecamatan Kotanopan;
- d. Wisata Alam Pagaran Sigala-Gala di Kecamatan Panyabungan Selatan
- e. Wisata Alam Aek Batu Bontar di Kecamatan Panyabungan Timur
- f. Wisata alam air panas Sibanggor, terletak di Desa Sibanggor Jae, Desa Sibanggor Tonga, Desa Sibanggor Julu, di lereng Gunung Sorik Marapi, dan air panas Siabu;
- g. Wisata alam Danau Siombun di Kecamatan Panyabungan dan Danau Marambe di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat;
- h. Wisata sejarah di Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Panyabungan Barat;
- i. Wisata buatan meliputi Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Batang Natal dan disepanjang aliran-aliran sungai yang potensial pariwisata seperti sungai Batang Gadis, sungai Batang Natal dan Aek Pohon, Agro wisata di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Siabu dan Kecamatan Panyabungan Timur.

### 3.2.5. Kawasan Strategis

Salah satu terminologi baru yang dimuat dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah kawasan strategis. Secara umum, kawasan ini merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut, kawasan strategis dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan ruang lingkup dan kewenangannya yaitu kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 1 ayat 30 mendefinisikan kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Berdasarkan definisi di atas, ada kata kunci dalam kawasan strategis pada tiap lingkungannya adalah kawasan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Dengan demikian, peranan kawasan strategis diharapkan dapat secara signifikan untuk memberi pengaruh positif bagi wilayah pengaruhnya. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal meliputi:

- a. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Pantai Barat dan sekitarnya di Kawasan Mandailing Natal – Tapanuli Selatan;
- b. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis.

### **Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan strategis ekonomi adalah kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yang merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

- a. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. Potensi ekspor;
- d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal meliputi:

- a. Kawasan Strategis Panyabungan berada di Kecamatan Panyabungan. Kawasan yang diperuntukkan sebagai sentra pertanian tanaman pangan hortikultura, perdagangan/jasa dan pusat pemerintahan;
- b. Kawasan Strategis Natal berada di Kecamatan Natal. Kawasan yang diperuntukkan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan;

- c. Kawasan Strategis Agropolitan Dataran Tinggi berada di Kecamatan Ulu Pungkut, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Panyabungan Timur. Kawasan ini diperuntukkan sebagai pusat agrobisnis dan agro industri pertanian;
- d. Kawasan Pelabuhan berada di Kecamatan Natal dan Kecamatan Batahan. Kawasan ini diperuntukkan sebagai potensi wilayah pesisir, perikanan dan kelautan;
- e. Kawasan Bandar Udara berada di Kecamatan Bukit Malintang. Kawasan ini diperuntukkan sebagai sentra transportasi angkutan udara.

### **Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis lingkungan adalah kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang merupakan:

- a. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. Kawasan rawan bencana alam; atau
- g. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Mandailing Natal meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana longsor, yang berada di Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Ulu Pungkut dan Kecamatan Batang Natal.
- b. Kawasan jalur patahan aktif, yang berada di sebagian Kecamatan Siabu, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Ulu Pungkut dan Kecamatan Muarasipongi.

- c. Kawasan rawasan bencana letusan gunung berapi Sorik Marapi, yang berada di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Panyabungan Selatan dan Kecamatan Batang Natal.
- d. Kawasan pesisir pantai Barat, yang berada di Kecamatan Muara Batang Gadis, Natal, dan Batahan.

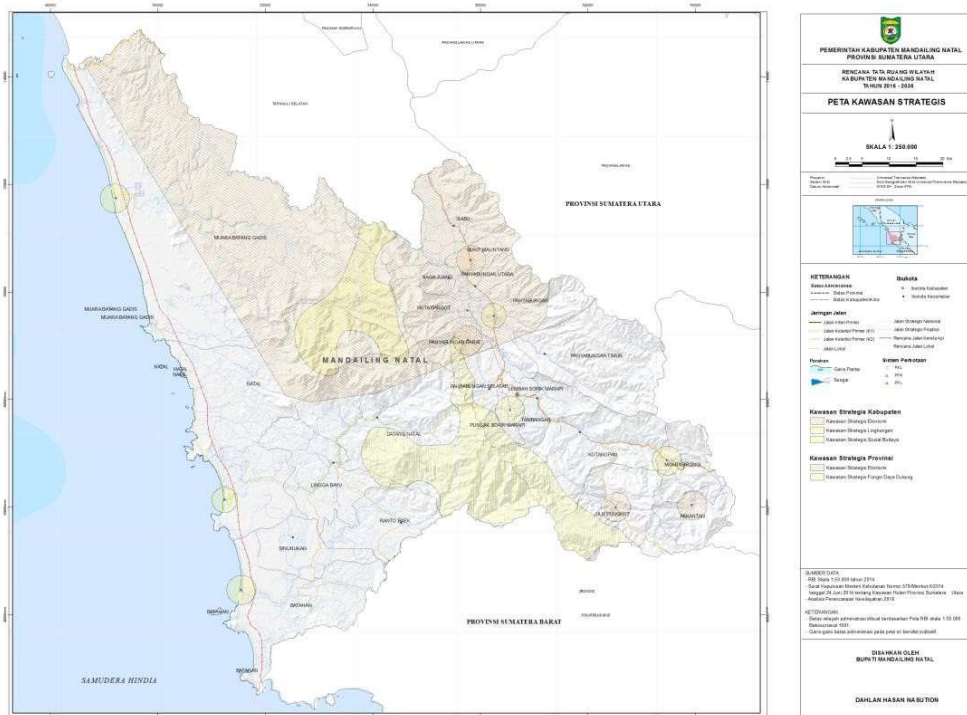
### Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan strategis sosial dan budaya adalah kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang merupakan:

- a. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- c. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. Tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya di Kabupaten Mandailing Natal, meliputi kawasan pemerintahan dan pendidikan di Kecamatan Panyabungan.

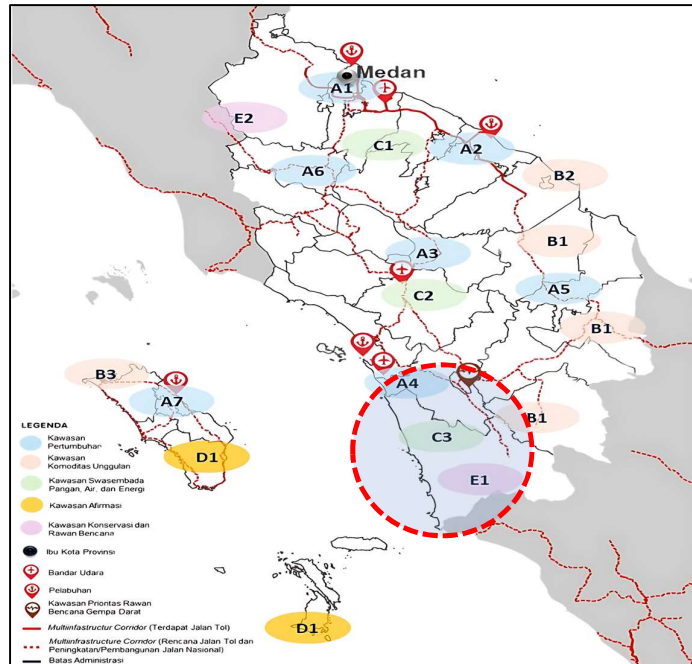
Gambar 3.5  
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Mandailing Natal



### 3.2.6. Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJM Nasional 2025 - 2029

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencan Pembangunan Jangka Mengengah Nasional Tahun 2025-2029, Kabupaten Mandailing Natal masuk dalam lokasi strategis di Provinsi Sumatera Utara sebagai Kawasan Kawasan Swasembada Pangan dan Air, Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana, serta Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.6  
Arah Pengembangan Kawasan Prioritas pada RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam kawasan ini terdapat beberapa Indikasi Intervensi yaitu:

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
C3	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola, Batang Gadis . Kab Tapanuli Selatan . Kab. Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Batang Batahan dan D. I. Batang Angkola</li> <li>• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah</li> <li>• Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)</li> <li>• Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)</li> </ul>

No	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura</li> <li>• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura</li> <li>• Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; opdmalisasi daJ! revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik</li> <li>• Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen</li> <li>• Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korpulasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.</li> </ul>

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.</li> <li>• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada <i>catchment area</i> WS Batang Angkola-Batang Gadis, terutama pada DAS Batang Gadis</li> <li>• Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Batang Gadis dan Danau Siais</li> </ul>
E1 E2	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Batang Gadis (E1) dan TN Gunung Luser (E2). <ul style="list-style-type: none"> <li>• TN Batang Gadis: Kab. Mandailing Natal</li> <li>• TN Gunung Luser: Kab. Langkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi</li> <li>• Pengurangan status keterancamannya spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan</li> <li>• Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi</li> <li>• Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik</li> <li>• Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri</li> <li>• Penguatan pengelolaan hutan Lestari</li> <li>• Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan</li> <li>• Perlindungan dan pengamanan hutan</li> <li>• Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana</li> <li>• Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Labuhanbatu Selatan</li> <li>• <b>Kab. Mandailing Natal</b></li> <li>• Kab. Padanglawas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)</li> </ul>

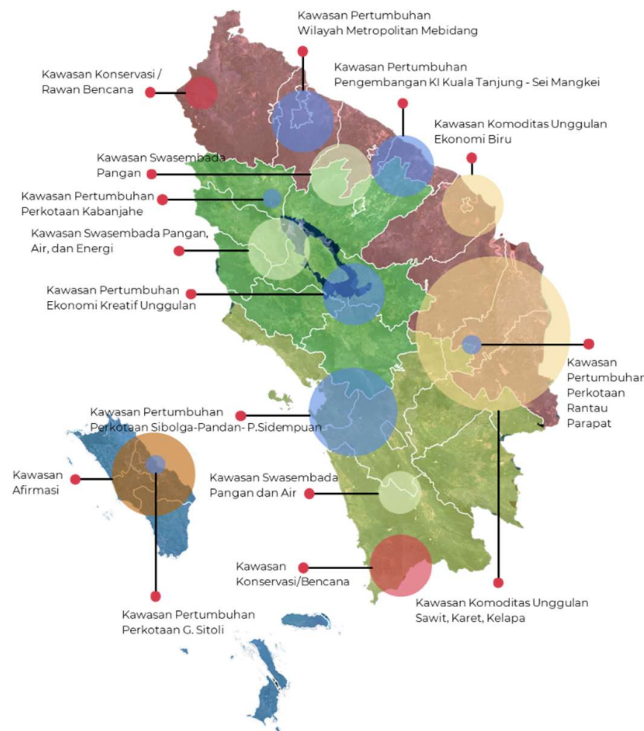
No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. PadangLawas Utara</li> <li>Kab. Labuhanbatu Utara</li> <li>Kab, Nias Selatan</li> <li>Kab, Pakpak Bharat</li> <li>Kab. Nias Utara</li> <li>Kab. Nias Barat</li> <li>Kab, Langkat</li> <li>Kab, Nias</li> <li>Kota Gunungsitoli</li> </ul>	

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

### 3.2.7. Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Pembangunan wilayah di Sumatera Utara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi masing-masing daerah. Provinsi ini dibagi dalam enam Wilayah Pengembangan dengan fungsi yang saling terintegrasi diantaranya Wilayah Pengembangan Selatan dengan arah kebijakan memaksimalkan potensi perkebunan, pertambangan, dan kawasan konservasi di Batang Toru serta Taman Nasional Batang Gadis. Wilayah Pengembangan Selatan meliputi Kota Padangsidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara. Di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padanglawas, dan Kabupaten Padanglawas Utara, tersebar PKL di Sipirok, Batang Toru, Gunung Tua, Sibuhuan, Natal, Siabu, Panyabungan, dan Kotanopan, kabupaten-kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal dan pariwisata.

**Gambar 3.7**  
**Strategi Pengembangan Wilayah Pertumbuhan Dan Pemerataan Provinsi Sumatera Utara**  
**– RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029**



Sumber: Materi Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara pada Acara FKP RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029

Pada gambar tersebut terlihat bahwa Strategi Pengembangan Wilayah Pertumbuhan Kabupaten Mandailing Natal yang direncanakan oleh Provinsi Sumatera Utara selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Kawasan Swasembada Pangan dan Air serta Kawasan Konservasi/Bencana.

### 3.2.8. Program Prioritas Daerah

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab visi misi kepala daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut.

Tabel 3.7  
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>SPM PENDIDIKAN</b>				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 Angka partisipasi kasar PAUD	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Nonformal	1 Angka partisipasi kasar kesetaraan	
3	Pendidikan Dasar	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	1 Angka putus sekolah SD	
		Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	1 Angka putus sekolah SMP	
		Program Bantuan Pendidikan	1 Angka putus sekolah SD	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2 Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan	
			3 Angka putus sekolah SMP	
			4 Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan	
			5 Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan	
<b>SPM KESEHATAN</b>				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Tingkat kesehatan masyarakat	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2 Persentase penanganan masalah gizi buruk	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3 Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia	
4	Pelayanan Kesehatan Balita			
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak	1 Tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN	
8	Pelayanan kesehatan Penderita <i>hipertensi</i>	menular	2	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>				
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan <i>Tuberkulosis</i>	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular	1	Tingkat pencegahan dan pengendalian Penyakit	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )		2	Persentase penanganan penderita penyakit menular	
			3	<i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	
			4	Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	
<b>SPM PEKERJAAN UMUM</b>					
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Program Penataan Kawasan Permukiman	1	Cakupan layanan air bersih	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Penataan Kawasan Permukiman	1	Persentase pengolahan air limbah rumah tangga	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN	
<b>SPM PERUMAHAN RAKYAT</b>					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	1	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			2	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang Layak Huni dan Korban Bencana	
			3	Persentase Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Penataan Kawasan Permukiman	1	Persentase Luasan Kawasan pemukiman kumuh	
<b>SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum	1	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	PD Penanggung Jawab Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
		Program Penegakan Produk Hukum	1	Cakupan penyelesaian	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN	
		Daerah	1	penegakan perda	
			2	Persentase penegakan perda	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	1	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	
4	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3	Rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	1	Tingkat waktu maksimum tanggap ( <i>response time rate</i> ) 15 menit	
<b>SPM SOSIAL</b>					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	1	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar diluar	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	1	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
	Panti		kebutuhan dasarnya	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	1	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Geladangan dan Pengemis diluar Panti	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/kota	Program Perlindungan Sosial Bencana	1	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program prioritas kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal diantaranya:

Tabel 3.8  
Program Prioritas Daerah

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani			
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
<b>Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter</b>			
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan Sarana dan Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		Pengembangan Karakter dan Ideologi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Sarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
<b>Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi	Peningkatan kinerja investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
		Pemberdayaan Ekonomi Lokal	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
		Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		Penguatan ketahanan pangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		Peningkatan daya saing pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		Peningkatan pemasaran produk daerah	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani				
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas	
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan	Penguatan perlindungan sosial	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Prima				
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Melayani, Terbuka dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Reformasi birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
		Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani			
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Misi 4: Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal			
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Pelestarian Budaya dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama,	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	Meningkatnya Akses dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender	Pengarusutamaan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Misi 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan			
Terwujudnya Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Visi: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani				
Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
		Peningkatan kualitas tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana	Peningkatan ketangguhan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		Terwujudnya pertumbuhan pedesaan berbasis karakteristik wilayah dan lingkungan	Peningkatan Peran Desa dalam Kemajuan Daerah	PROGRAM PENATAAN DESA
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				



*Rancangan Awal*  
**RPJMD**

**Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2029**

**BAB 4**

**Program Perangkat Daerah dan  
Kinerja Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah**

## **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

### **4.1. Program Perangkat Daerah**

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan SDGs.
4. Penerapan sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk periode Tahun 2025-2029 berjumlah 155 Program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan pengawasan, urusan kewilayahan dan urusan pemerintahan umum sesuai kewenangan Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada bab IV RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1  
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
BAHASA DAN SASTRA														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Dinas Kesehatan
PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN														Dinas Kesehatan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN</b>														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	86%	86%	15.362.933.004	86%	16.131.079.654	86%	16.937.633.637	86%	17.784.515.319	86%	18.673.741.085	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.Persentase Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi	N/A	25 %	4.350.000.000	28 %	4.567.500.000	30%	4.795.875.000	32%	5.035.668.750	35 %	5.287.452.188	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	2. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	53,04 %	55 %	12.741.087.130	57 %	13.378.141.487	59 %	14.047.048.561	61 %	14.749.400.989	63 %	15.486.871.038		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kapasitas Air Minum yang Terlayani	74,33 %	80 %	13.625.834.530	85 %	14.307.126.257	90 %	15.022.482.569	95 %	15.773.606.698	100 %	16.562.287.033	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak)	37,17 %	40 %	11.880.375.772	42 %	12.474.394.561	45 %	13.098.114.289	47.5 %	13.753.020.003	50 %	14.440.671.003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	25 %	8.970.492.130	28 %	9.419.016.737	30 %	9.889.967.573	32 %	10.384.465.952	35 %	10.903.689.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	60 %	52.706.503.056	65 %	55.341.828.209	70 %	58.108.919.619	75 %	61.014.365.600	80 %	64.065.083.880	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030		
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Tingkat Kemantapan Jalan	61.39 %	62 %	84.987.063.234	63 %	89.236.416.396	65 %	93.698.237.215	68 %	98.383.149.076	70 %	103.302.306.530	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Kompetensi	N/A	30 %	1.231.657.170	35 %	1.293.240.029	40 %	1.357.902.030	45 %	1.425.797.131	50 %	1.497.086.988	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang	N/A	33 %	1.590.227.547	40 %	1.669.738.924	45 %	1.753.225.870	50 %	1.840.887.164	55 %	1.932.931.522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Urusan Pemerintah Daerah	88%	100%	4.187.179.132	100%	4.270.922.715	100%	4.356.341.169	100%	4.443.467.992	100%	4.532.337.352	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang Tertangani	90 %	100%	38.433.950	100%	39.202.629	100%	39.986.682	100%	40.786.415	100%	41.602.144	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030		
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan	45%	100%	2.430.620.600	100%	2.479.233.012	100%	2.528.817.672	100%	2.579.394.026	100%	2.630.981.906	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	35%	100%	499.999.550	100%	509.999.541	100%	520.199.532	100%	530.603.522	100%	541.215.593	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang tertangani	35 %	100%	8.926.129.000	100%	9.104.651.580	100%	9.286.744.612	100%	9.472.479.504	100%	9.661.929.094	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah			12.491.829.191		13.393.684.251		13.617.259.251		13.766.684.251		13.876.684.251	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	Persentase Pengaduan Masyarakat yang		100%	1.106.690.000	100%	1.145.000.000	100%	1.305.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.455.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
DAN KETERTIBAN UMUM	ditindaklanjuti dan terselesaikan													
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Peningkatan dan Pencegahan Pemadaman Kebakaran/ non Kebakaran		100%	3.225.741.871	100%	7.458.902.609	100%	3.705.771.220	100%	4.889.470.254	100%	4.889.470.254	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur			6.510.733.450		7.196.833.450		6.728.433.450		6.751.633.450		6.629.633.450	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat			2.420.000.000		2.655.000.000		2.770.000.000		2.875.000.000		2.990.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PMKS Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial			1.140.000.000		1.180.000.000		1.235.000.000		1.290.000.000		1.335.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan			5.130.000.000		5.455.000.000		5.725.000.000		5.959.062.847		6.175.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terlaksananya Penanganan Bencana			585.000.000		617.000.000		625.000.000		700.000.000		745.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terlaksananya kegiatan pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan			52.000.000		50.000.000		52.000.000		55.000.000		56.000.000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														Dinas Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>														
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Kesetaraan Gender			90.000.000		94.000.000		96.000.000		98.000.000		100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan perempuan dari tindak kekerasan			95.000.000		99.000.000		101.000.000		107.000.000		109.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ketahanan Keluarga			67.000.000		67.000.000		68.000.000		69.000.000		69.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak			85.000.000		86.500.000		88.000.000		89.500.000		91.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kapasitas Jaringan tumbuh kembang anak dan forum anak, meningkatnya dan terpenuhinya hak hak anak			75.000.000		75.500.000		76.000.000		77.000.000		78.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kualitas perlindungan terhadap anak yang berkebutuhan khusus (ABK), meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak, meningkatkan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan													Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian urusan pemerintah daerah Kabupaten	93,00%	94,00%	4.310.504.373	95,00%	4.510.600.200	96,00%	4.820.000.600	97,00%	5.240.450.680	98,00%	5.780.900.500	Dinas Ketahanan Pangan	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	18,91%	38,90%	240.000.000	58,90%	230.000.000	68,90%	245.000.000	88,90%	260.000.000	98,90%	280.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	86,90%	88,50%	1.032.150.000	89,00%	1.179.000.000	89,40%	1.307.000.000	89,80%	1.344.000.000	90,50%	1.438.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030		
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	80,00%	85,00%	284.000.000	88,00%	309.000.000	91,00%	320.000.000	94,00%	331.000.000	96,00%	340.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	85,00%	88,00%	205.000.000	90,00%	225.000.000	92,00%	245.000.000	94,00%	265.000.000	95,00%	185.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>													
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah yang tetangani	1 Berita Acara	1 Berita Acara	93.283.300	1 Berita Acara	95.148.966	1 Berita Acara	97.051.945	1 Berita Acara	98.992.984	1 Berita Acara	100.972.844	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN TANAH ABSENTEE	Cakupan Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Program Tanah Absentee yang tetangani	1 Dokumen	1 Dokumen	29.999.100	1 Dokumen	30.599.082	1 Dokumen	31.211.064	1 Dokumen	31.835.285	1 Dokumen	32.471.991	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan Penatagunaan Tanah yang tetangani	1 Dokumen	1 Dokumen	81.741.800	1 Dokumen	83.376.636	1 Dokumen	85.044.169	1 Dokumen	86.745.052	1 Dokumen	88.479.953	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														Dinas Lingkungan Hidup
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100		100		100		100		100		100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi	100%	70	10.205.963.848	71	10.461.112.944	72	10.722.640.767	75	10.990.706.786	75	11.265.474.456	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030		
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Tribina dan UPPKS yang berKB	100%	61,25	588.965.000	63,75	603.689.125	67,5	618.781.353	70	634.250.887	70	650.107.159	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah		100%	6.825.045.500	100%	7.160.317.000	100%	7.783.817.000	100%	7.785.317.000	100%	9.261.817.000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dikelola		100%	14.975.000.000	100%	17.595.000.000	100%	17.385.000.000	100%	19.125.000.000	100%	18.355.000.000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penyelenggaraan Pelayaran yang dikelola			0	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara yang dikelola			0	100%	200.000.000		0	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Perhubungan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Persentase capaian penunjang	100%	100%	4.589.461.308	100%	5.314.009.373	100%	4.843.634.842	100%	5.151.741.584	100%	5.468.753.663	Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
DAERAH KABUPATEN/KOTA	urusan pemerintah daerah													
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	72%	78%	1.700.000.000	78%	1.880.000.000	79%	1.905.000.000	79%	2.005.000.000	80%	1.965.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60%	0,75	5.900.000.000	77%	6.175.000.000	78%	6.555.000.000	79%	7.275.000.000	80%	7.805.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100	100	3.600.000.000	100	3.700.000.000	100	3.800.000.000	100	3.900.000.000	100	4.000.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	
	2. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100	100		100		100		100		100			
	3. Jumlah dokumen pelaporan keuangan OPD	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUB JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan volume usaha koperasi	36%	30	183.000.000	30	183.000.000	30	185.000.000	30	190.000.000	30	190.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	24,9	25	161.000.000	25	163.000.000	25	164.000.000	25	166.000.000	25	168.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1. Persentase koperasi aktif KSP/USP	100	100	210.000.000	100	215.000.000	100	220.000.000	100	225.000.000	100	230.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	
	2. Persentase total koperasi aktif	42,2												
	3. Persentase koperasi sehat	16	25		25		25		25		25			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	26,7	27	310.000.000	27	320.000.000	27	340.000.000	27	360.000.000	27	380.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	10,7	10	52.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	65.000.000	10	70.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal.	60	60		60		60		60		60		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	2. Pertumbuhan wirausaha	30	30		30		30		30		30			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM yang menjalin kemitraan dan ekspor		2		3		4		5		6			Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	10,7	10	300.000.000	10	320.000.000	10	340.000.000	10	360.000.000	10	380.000.000		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN														Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030		
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	56,10%	2.000 Data	950.000.000	2.200 Data	1.050.000.000	2.400 Data	1.155.000.000	2.600 Data	1.270.000.000	2.800 Data	1.400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	40%	40%	160.000.000	50%	160.000.000	60%	160.000.000	70%	160.000.000	70%	160.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>													
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA														
PROGRAM PENGLOLAAN PERMUSEUMAN														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		100%	4.995.500.000	100%	5.632.000.000	100%	5.632.000.000	100%	6.235.500.000	100%	6.960.500.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Mandailing Natal		56,23	1.591.000.000	60	1.817.000.000	65	1.938.000.000	80	2.105.000.000	85	2.278.000.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki Kabupaten Mandailing Natal		0,001%	100.000.000	0,002%	100.000.000	0,003%	100.000.000	0,004%	175.000.000	0,005%	100.000.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>														
PROGRAM PENGLOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang melaksanakan Pengelolaan Arsip Secara Baku		75%	300.000.000	80%	360.000.000	100%	395.000.000	100%	455000000	100%	465000000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														Dinas Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														Dinas Perikanan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030		
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentasi tingkat kepuasan terhadap layanan administrasi umum	100%	2920778061	100%	2993797513	100%	3068642450	100%	3145358511	100%	3223992474		Dinas Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah lokasi wisata yang difasilitasi pengembangannya	1 Lokasi	2400000000	1 Lokasi	3510000000	1 Lokasi	4470000000	1 Lokasi	4420000000	1 Lokasi	4820000000		Dinas Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata	7 Kegiatan	1330000000	10 Kegiatan	1505000000	12 Kegiatan	1730000000	14 Kegiatan	2000000000	16 Kegiatan	2630000000		Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan penetapan Hak Kekayaan Intelektual	2 Ekraf	50000000	2 Ekraf	50000000	3 Ekraf	70000000	3 Ekraf	75000000	5 Ekraf	85000000		Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang dikembangkan kualitasnya	154 Orang	328000000	154 Orang	330000000	159 Orang	335000000	159 Orang	380000000	164 Orang	440000000		Dinas Pariwisata
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Capaian Akuntabilitas	Nilai sakip (72,10)	Nilai sakip (75-76)	24.491.671.139	Nilai sakip (77-78)	25.250.904.696	Nilai sakip (79-80)	26.048.099.931	Nilai sakip (81-83)	26.885.154.927	Nilai sakip (84-86)	27.764.062.674	Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Perangkat Daerah													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan 4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	1. Produksi Tanaman Pangan = 352.773,53 ton 2. Produksi Hortikultura = 119.606,81 ton 3. Produksi Komoditas Peternakan = 404.688,76 ton 4. Produksi Komoditas Perkebunan = 11.581,67 ton	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan = 501,4 ton 2. Peningkatan Produksi Hortikultura = 402,68 ton 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan = 64,83 ton 4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan = 7.309,25 ton	2.847.729.103	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan = 507,66 ton 2. Peningkatan Produksi Hortikultura = 404,37 ton 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan = 64,83 ton 4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan = 7.451,58 ton	2.990.115.558	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan = 514,06 ton 2. Peningkatan Produksi Hortikultura = 406,07 ton 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan = 66,17 ton 4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan = 7.596,67 ton	3.139.621.336	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan = 520,6 ton 2. Peningkatan Produksi Hortikultura = 407,78 ton 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan = 66,20 ton 4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan = 7.744,64 ton	3.296.602.403	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan = 527,28 ton 2. Peningkatan Produksi Hortikultura = 409,49 ton 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan = 66,20 ton 4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan = 7.895,56 ton	3.461.432.523	Dinas Pertanian	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	100%	100%	3.987.562.883	100%	4.186.941.027	100%	4.396.288.078	100%	4.616.102.482	100%	4.846.907.606	Dinas Pertanian	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100%	100%	157.500.000	100%	165.375.000	100%	173.643.750	100%	182.325.938	100%	191.442.234	Dinas Pertanian	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030		
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100%	100%	154.350.000	100%	162.067.500	100%	170.170.875	100%	178.679.419	100%	187.613.390	Dinas Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	100%	100%	36.828.750	100%	38.670.188	100%	40.603.697	100%	42.633.882	100%	44.765.576	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	100%	100%	489.195.000	100%	513.654.750	100%	539.337.488	100%	566.304.362	100%	594.619.580	Dinas Pertanian
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan layanan Administrasi yang tertangani	100%	100%	7.802.426.874	100%	8.008.337.545	100%	8.201.145.983	100%	8.395.899.632	100%	8.617.647.122	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi Pengelolaannya	100%	100%	4.250.000.000	100%	3.830.000.000	100%	4.150.000.000	100%	4.350.000.000	100%	4.500.000.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Laporan Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	305.000.000	100%	340.000.000	100%	375.000.000	100%	395.000.000	100%	420.000.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor	100%	100%	570.000.000	100%	5.625.000.000	100%	655.000.000	100%	685.000.000	100%	715.000.000	Dinas Perdagangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030		
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100%	100%	245.000.000	100%	310.000.000	100%	375.000.000	100%	435.000.000	100%	490.000.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	Dinas Perdagangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100%	100%	970.000.000	100%	960.000.000	100%	1.260.000.000	100%	1.190.000.000	100%	1.810.000.000	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perizinan Industri yang sudah masuk SIINAS	100%	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	210.000.000	100%	240.000.000	100%	250.000.000	Dinas Perdagangan
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN													Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
KESEJAHTERAAN RAKYAT														
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
PERENCANAAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,34%	98,00%	6.684.343.000	98,00%	6.851.451.575	98,00%	7.022.737.864	99,00%	7.198.306.311	99,00%	7.378.263.969		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	96,37%	100,00%	770.971.000	100,00%	790.245.275	100,00%	810.001.407	100,00%	830.251.442	100,00%	851.007.728		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030		
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	100%	100%	554.576.000	100%	568.440.400	100%	582.651.410	100%	597.217.695	100%	612.148.138	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
<b>KEUANGAN</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>KEPEGAWAIAN</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH													BKPSDM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>														
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														BKPSDM
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>														
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang Berkualitas	100%	100%	210.000.000	100%	215.250.000	100%	220.631.250	100%	226.147.031	100%	231.800.707		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														Inspektorat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
<b>KECAMATAN</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA														Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														Kecamatan
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan	94,2%	95%	5.200.000.000	95%	5.400.000.000	95%	5.600.000.000	95%	5.800.000.000	95%	6.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat keberhasilan Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	75%	77%	1.000.000.000	80%	1.200.000.000	83%	1.300.000.000	86%	1.400.000.000	90%	1.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat keberhasilan Program Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	75%	77%	2.760.000.000	80%	4.320.000.000	83%	43.030.000.000	86%	62.970.000.000	90%	4.220.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tingkat keberhasilan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85%	87%	560.000.000	89%	570.000.000	90%	710.000.000	92%	870.000.000	92%	1.070.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Tingkat keberhasilan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	85%	87%	500.000.000	89%	600.000.000	90%	700.000.000	92%	800.000.000	92%	900.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PD PENANGGUNG JAWAB	
		BASELINE	2026		2027		2028		2029		2030			
		TAHUN 2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Ekonomi, Sosial Dan Budaya													
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat keberhasilan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	77%	78%	1.995.000.000	80%	2.255.000.000	83%	2.295.000.000	86%	2.380.000.000	90%	2.440.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2025-2029. IKU Kabupaten Mandailing Natal disajikan pada tabel 4.2. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 4.2  
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Poin	73,44	74,08	74,72	75,35	75,99	76,63	77,27	
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,87	14,01	14,15	14,28	14,42	14,56	14,70	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,11	9,23	9,36	9,48	9,60	9,72	9,85	
3	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,88	72,11	72,35	72,58	72,81	73,04	73,28	
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
II.a	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>	Persen	4,83	4,95	5,07	5,19	5,31	5,43	5,55	
1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	20,28	21,89	23,50	25,11	26,72	28,32	29,93	
2	Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	49,68	51,21	52,75	54,28	55,81	57,34	58,88	
3	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	10,94	10,82	10,70	10,57	10,45	10,33	10,21	
II.b	<b>Rasio Gini /Indeks Gini</b>	Poin	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,22	6,95	6,69	6,42	6,15	5,89	5,62	
2	Tingkat Kemiskinan/Angka Kemiskinan	Persen	8,69		8,45	8,32	8,20	8,08	7,96	
III.	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Indeks/Poin								
1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai/ Predikat	53,46 (CC)							
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,8 (C)	2,89	2,97	3,06	3,15	3,23	3,32	
4	Indeks SPBE	Indeks	2,89/Baik	2,94	3,00	3,05	3,10	3,16	3,21	
5	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52.65	57,16	61,68	66,19	70,70	75,21	79,73	
IV,a	<b>Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Tertangani</b>	Persen								
1	Angka Kriminalitas	Kejadian	3203							

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda)	Persen	n.a							
IV.b	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	Indeks	93,88	94,04	94,20	94,36	94,52	94,68	94,84	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,518	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	
V.a	<b>Indeks Daya Saing Daerah</b>	Indeks	3,12	3,41	3,71	4,00	4,30	4,59	4,89	
1	Indeks Infrastruktur	Indeks	2,64	2,84	3,04	3,24	3,44	3,64	3,84	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	214,8	227,38	239,96	252,53	265,11	277,69	290,27	
3	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6109	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	
V.b	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Indeks	75,2	75,25	75,29	75,34	75,39	75,43	75,48	
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,08	58,17	58,27	58,36	58,45	58,55	58,64	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,61	95,70	95,80	95,89	95,98	96,08	96,17	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	66,88	66,97	67,07	134,04	201,11	335,15	536,25	
4	Pemurunan Emisi CO2e/Penurunan Emisi GRK	Ton CO2	4199	4.604	5.009	9.612	14.621	24.233	38.854	

Sementara itu, Indikator Kinerja Daerah (IKD) ditetapkan sebagai target penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya untuk indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) memuat IKU daerah maupun IKU perangkat daerah disajikan pada tabel 4.3. IKD. IKK tingkat dampak (impact) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD dan merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah, disajikan pada tabel. indikator makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 4.3  
Indikator Kinerja Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>									
1	Indeks Ketahanan Pangan		70,54	71,08	71,63	72,17	72,71	73,25	73,80	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	n.a							
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	27,54	28,81	30,07	31,34	32,60	33,87	35,13	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	74,33	75,93	77,52	79,12	80,71	82,31	83,90	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	75,2	75,25	75,29	75,34	75,39	75,43	75,48	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman /Layak	% RT	37,17	39,03	40,89	42,74	44,60	46,46	48,32	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	0							
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	19,6	20	20,4	20,8	21,2	21,6	22	
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	n.a							
10	Indeks Risiko Bencana	poin	214,8	227,38	239,96	252,53	265,11	277,69	290,27	
11	Indeks Ketahanan Daerah	poin	n.a							
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,69	1,90	2,11	2,31	2,52	2,73	2,94	
13	Rasio Penduduk	%	3,24	3,25	3,26	3,27	3,28	3,29	3,3	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m <sup>2</sup>	76	77,25	78,5	79,75	81	82,25	83,5	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,83	6,27	7,72	9,16	10,60	12,04	13,49	
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,69	8,57	8,45	8,32	8,20	8,08	7,96	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	20,28	21,89	23,50	25,11	26,72	28,32	29,93	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,22	7,40	7,58	7,76	7,94	8,12	8,30	
5	Indeks Gini	angka	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,44	74,08	74,72	75,35	75,99	76,63	77,27	
7	Usia Harapan Hidup	tahun	71,88	72,11	72,35	72,58	72,81	73,04	73,28	
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	n.a							
8	Prevalensi Stunting	%								
9	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,11	9,23	9,36	9,48	9,60	9,72	9,85	
10	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,87	14,01	14,15	14,28	14,42	14,56	14,70	
12	Angka Literasi SD	%	68,07							
	Angka Numerasi SD	%	66,52							
	Angka Literasi SMP	%	49,67							
	Angka Numerasi SMP	%	52,52							
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	n.a							
14	Indeks Literasi Digital	angka	n.a							
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	14,01	15,40	16,78	18,17	19,55	20,94	22,32	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	n.a							
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	n.a							
18	Indeks Perlindungan Anak	angka	n.a							
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	54,43	54,85	55,27	55,68	56,10	56,52	56,94	
20	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,518	0,508	0,504	0,500	0,496	0,493	0,489	
21	Indeks Pembangunan Pemuda		n.a							
22	Indeks Pembangunan Gender	poin	93,88	94,04	94,2	94,36	94,52	94,68	94,84	
23	Indeks Pemberdayaan Gender	poin	66,37	65,46	64,55	63,64	62,73	61,82	60,91	
<b>III ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Angka Ketergantungan	%	55,03	55,07	55,10	55,14	55,17	55,21	55,24	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,94	10,82	10,70	10,57	10,45	10,33	10,21	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,64	0,63	0,62	0,61	0,6	0,59	0,58	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	n.a							
5	Rasio Kewirausahaan	%	n.a							
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,42	64,04	63,66	63,28	62,9	62,52	62,14	
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	52,65	57,16	61,68	66,19	70,70	75,21	79,73	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/Jiwa	n.a							
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	n.a							
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	n.a							
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	n.a							
12	Indeks Masyarakat Digital		38,3	39,11	39,91	40,72	41,52	42,33	43,13	
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	20,53	20,13	19,72	19,32	18,91	18,51	18,10	
14	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	2,14	2,86	3,59	4,31	5,04	5,76	6,49	
15	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		2,64	2,8	3,04	3,24	3,44	3,64	3,84	
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	n.a							
17	Persentase Desa Mandiri	%	0,02	0,023	0,027	0,030	0,033	0,037	0,040	
18	Indeks Desa Membangun		0,6109	0,6213	0,6317	0,6421	0,6525	0,6629	0,6733	
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,192	0,221	0,250	0,278	0,307	0,336	0,365	
20	Tingkat Inflasi	%	2,46	2,26	2,06	1,85	1,65	1,45	1,25	
<b>IV</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1	Indeks Reformasi Hukum		C							
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	2,89	2,94	3,00	3,05	3,10	3,16	3,21	
3	Indeks Pelayanan Publik	poin	2,8	2,89	2,97	3,06	3,15	3,23	3,32	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Indeks Integritas Nasional	poin	57,15	59,21	61,27	63,33	65,39	67,45	69,51	
5	Persentase Penegakan Perda	%	60							
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	n.a							
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	n.a							
8	Indeks Rasa Aman	angka	n.a							
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	n.a							
10	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,12	3,41	3,71	4,00	4,30	4,59	4,89	



*Rancangan Awal*  
**RPJMD**

**Kabupaten Mandailing Natal  
Tahun 2025-2029**

**BAB 5  
Penutup**

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Mandailing Natal untuk turut andil dalam pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

#### **5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan**

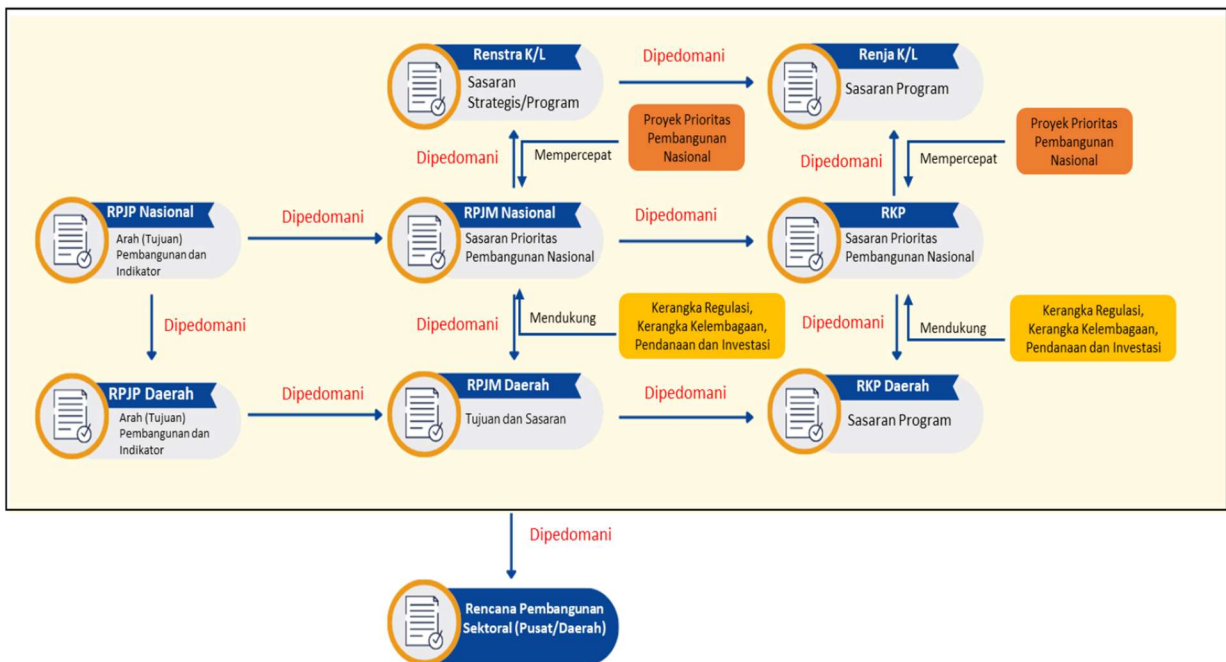
Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, pelaku non-pemerintah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

## A. Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Mandailing Natal

RPJMD menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di tingkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah (APBD). Penekanan substansi RPJMD adalah visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator capaian pembangunan daerah dipedomani oleh RKPD untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tersebut dipedomani RKP Daerah untuk menyusun sasaran dan program pembangunan tahunan. Semua rencana pembangunan daerah tersebut mempedomani rencana pembangunan di tingkat nasional atau pemerintah pusat yang mana RPJMD mempedomani RPJPN, RPJM Daerah mempedomani RPJMN, dan RKP Daerah mempedomani RKP. Semua rencana sektoral mempedomani rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 5. 1  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dalam rangka mempedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat, beberapa hal yang diperhatikan pada RPJMD, antara lain:

- 1) RPJMD bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD menjadi rencana strategis 5 tahunan daerah.
- 2) Penyusunan RPJMD seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJM Nasional.
- 3) Tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah Kabupaten berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJM di tingkat Nasional dan RPJMD di tingkat Provinsi. Selain itu RPJM Daerah menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis perangkat daerah (PD).
- 4) Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) PD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) PD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.
- 5) Sasaran program RKP Daerah kabupaten berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP dan RKP Daerah Provinsi. RKP Daerah kabupaten juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja PD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja PD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

### **5.1.2. Skema Pendanaan dan Penganggaran**

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat

sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

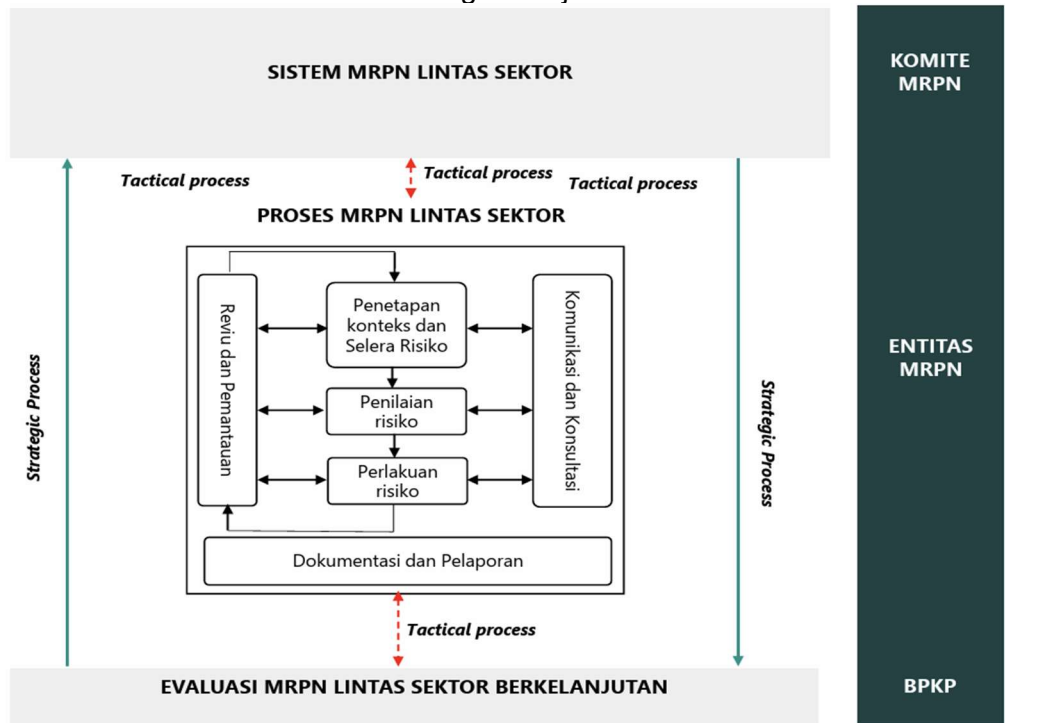
### **5.1.3. Kerangka Pengendalian**

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Terkait dengan manajemen risiko, manajemen risiko merujuk kepada manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN). MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Adapun Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada gambar di bawah.

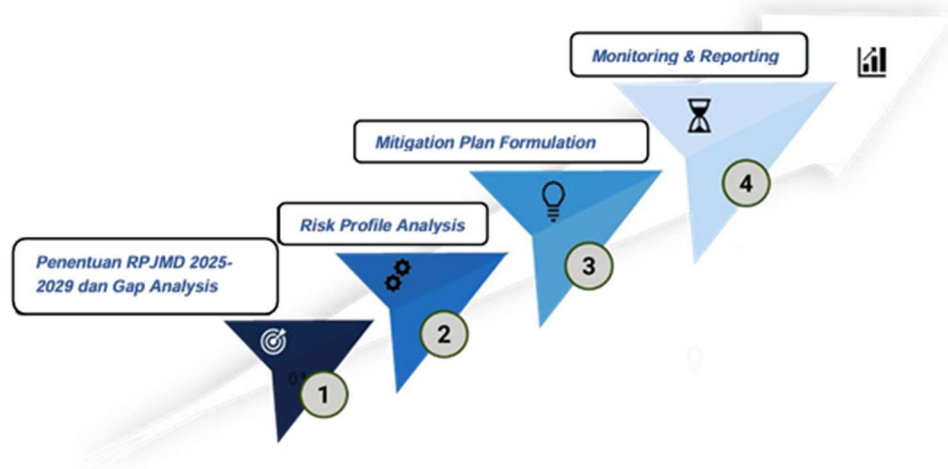
Gambar 5.2  
Kerangka Kerja MRPN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024  
Sebagai salah satu entitas MRPN, pemerintah daerah perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses *assessment* risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode serta menjaga sinkronisasi periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJMD dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 5. 3  
Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

- 1) Penentuan RPJMD periode 2025-2029 dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2029. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, serta sasaran pembangunan jangka menengah yang diharapkan dapat membawa Kabupaten Mandailing Natal mencapai visi Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Madani. Hal tersebut perlu dilakukan melalui *gap analysis* terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. *Gap analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pencapaian yang diharapkan dengan kinerja yang telah tercapai, sehingga langkah-langkah strategis dapat ditentukan untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJMD.
- 2) *Risk Profile Analysis* dilakukan dengan proses identifikasi dan *assessment* risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Selanjutnya, dilakukan *assessment* risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan dampak serius (*severity*) dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJMD.

- 3) Penyusunan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/ Lembaga/ Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.
- 4) Melakukan *monitoring & reporting* untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Mandailing Natal periode 2025-2029 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJMD.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi atau tujuan pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh jenis pekerjaan, serta percepatan wajib belajar 13 tahun khususnya perluasan kesempatan belajar untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Selain itu, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola yang efisien menjadi hal yang sangat penting. Langkah-langkah ini juga melibatkan integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.. Selaras dengan itu, pengendalian penyakit dan promosi budaya hidup sehat menjadi aspek yang tak terpisahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
- 2) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, beberapa aspek menjadi fokus utama. Pertama, mendukung percepatan transisi energi dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Kedua, mengembangkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan serta berorientasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

industri daerah. Selanjutnya, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi melalui peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, pengembangan pangan lokal melalui peningkatan produksi pangan lokal juga menjadi penting dalam memenuhi kecukupan konsumsi pangan. Selain itu, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Terakhir, pentingnya peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek untuk mendukung perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi termasuk dalam sektor pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan memainkan peran penting dengan memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini melibatkan penerapan praktik-praktik wisata yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, intermediasi dan layanan iptek yang ditingkatkan dapat memfasilitasi adopsi teknologi dan inovasi dalam pariwisata berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

- 3) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Sinergis dan Kolaboratif serta Pelayanan Publik yang Berkualitas, beberapa aspek menjadi fokus utama. Pertama, adalah terwujudnya tata kelola regulasi yang profesional dan berkualitas, yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam proses regulasi. Kedua, terwujudnya ekosistem digital pelayanan publik yang terpadu dan inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah maupun masyarakat harus diimplementasikan secara efektif, dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban serta meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi. Terakhir, terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif menjadi kunci untuk memastikan penggunaan anggaran secara optimal dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- 4) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada Misi 5: Menjaga serta Melestarikan Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal; beberapa aspek utama dipertimbangkan. Pertama, adalah terwujudnya pelestarian budaya lokal, penguatan nilai moral dan keagamaan, peningkatan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender sehingga dapat tercipta ketahanan sosial budaya di Kabupaten Mandailing Natal.

5) Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada Misi 5: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, beberapa aspek kunci perlu dipertimbangkan. Pertama, percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat. Selanjutnya, penerapan ekonomi sirkular dari sumber domestik secara partisipatif perlu diperhatikan, dengan reformasi tata kelola sampah yang efektif dan efisien untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Selain itu, pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) terintegrasi dari hulu ke hilir perlu diperhatikan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang memadai bagi masyarakat. Peningkatan kemandirian desa untuk memperkuat perekonomian lokal serta peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana serta peningkatan kinerja program perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan mengidentifikasi dan merancang strategi manajemen risiko yang tepat di setiap misi tersebut, rencana pembangunan dalam jangka menengah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan. Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

#### **a. Pengendalian perencanaan.**

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain sasaran program pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

#### **b. Pengendalian pelaksanaan.**

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan PD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian

yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal Pemerintah Daerah dan PD.

#### **5.1.4. Sistem Insentif**

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan PD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

#### **5.1.5. Mekanisme Perubahan**

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, target RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKP Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

### 5.1.6. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJMD Tahun 2025-2029 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada Perangkat Daerah (PD) dilakukan melalui Forum PD agar PD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi pada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi.

Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

### 5.1.7. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Mandailing Natal 2025-2029 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pembentukan kelompok kerja (POKJA) kelembagaan daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, penguatan *branding* dengan *digital marketing* dalam mempromosikan pariwisata, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, investasi infrastruktur pariwisata dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah, salah satunya meningkatkan UMKM Lokal dalam peningkatan ekonomi kreatif dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka menengah (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan

prioritas investasi publik skala daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

## **5.2. Kesimpulan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja selama kurun waktu 5 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. RPJMD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi PD dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal dengan periodisasi 5 tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal dengan periodisasi tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini membutuhkan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif, serta komitmen, berbagai pihak di Kabupaten Mandailing Natal seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025-2029.

BUPATI MANDAILING NATAL,

H. SAIPULLAH NASUTION, SH, MM